



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 - 2026

TANJUNGPANDAN, 2023



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perangkat....

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan....

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

23. Peraturan....

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan....

pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antar kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan.

16. Sasaran....

16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur untuk pencapaian kinerja suatu sasaran dalam bentuk dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah merupakan pedoman Pejabat (Pj.) Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2024-2026.
- b. Dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Gambaran Umum.
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis.
 - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran.
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas.
 - g. BAB....

- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pejabat (Pj.) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

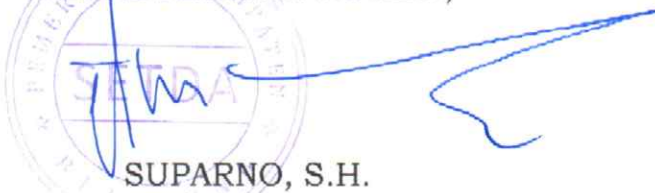
Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 19800315 200903 1 003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	5
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	10
2.1.1 <i>Karakteristik Lokasi dan Wilayah</i>	10
2.1.2 <i>Wilayah Rawan Bencana</i>	24
2.1.3 <i>Aspek Demografi</i>	33
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	40
2.2.1 <i>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>	40
2.2.2 <i>Fokus Kesejahteraan Sosial</i>	67
2.2.3 <i>Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga</i>	81
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	89
2.3.1 <i>Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib</i>	89
2.3.2 <i>Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan</i>	160
2.3.3 <i>Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	178
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	188
2.4.1 <i>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</i>	189
2.4.2 <i>Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur</i>	192
2.4.3 <i>Fokus Iklim Berinvestasi</i>	200
2.4.4 <i>Fokus Sumber Daya Manusia</i>	209
2.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	213
2.5.1 <i>Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan</i>	216
2.5.2 <i>Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan</i>	218
2.5.3 <i>Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum</i>	221
2.5.4 <i>Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat</i>	222



2.5.5 Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	224
2.5.6 Standar Pelayanan Minimal Sosial	226
2.6 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	227
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	242
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU	243
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	243
3.1.2 Neraca Daerah.....	267
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	274
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	274
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	278
3.3 KERANGKA PENDANAAN	282
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	282
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	286
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	289
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	289
4.1.1 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	290
4.1.2 Permasalahan Sumber Daya Manusia Belum Berkualitas dan Berdaya Saing.....	292
4.1.3 Permasalahan Infrastruktur.....	294
4.1.4 Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan.....	295
4.1.5 Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup	296
4.1.6 Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan.....	298
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	298
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	300
C. Urusan Pilihan.....	306
D. Urusan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.....	308
4.2 ISU STRATEGIS.....	310
4.2.1 Isu Strategis Internasional.....	311
4.2.2 Isu Strategis Nasional.....	318
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	329
4.2.4 Telaah terhadap RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025.....	332
4.2.5 Kebijakan pembangunan daerah Lainnya.....	337
4.2.6 Isu Strategis Daerah Kabupaten Belitung	339



BAB V TUJUAN DAN SASARAN.....	345
5.1 VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN BELITUNG 2005-2025.....	345
5.2 SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD TAHAP KEEMPAT	346
5.3 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026.....	347
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	353
6.1 STRATEGI.....	353
6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	367
6.3 PROGRAM PRIORITAS	381
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	390
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	413
8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	413
8.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	414
8.2.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target.....	414
8.2.2 Indikator Kinerja Sasaran dan Target.....	416
BAB IX PENUTUP	440



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 PENYEBARAN PULAU MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG	10
TABEL 2.2 RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN BELITUNG	23
TABEL 2.3 PERSENTASE LUAS WILAYAH PRODUKTIF KABUPATEN BELITUNG	23
TABEL 2.4 POTENSI BAHAYA DI KABUPATEN BELITUNG	25
TABEL 2.5 POTENSI BAHAYA BANJIR PER KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG.....	25
TABEL 2.6 POTENSI BAHAYA BANJIR BANDANG PER KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG	26
TABEL 2.7 POTENSI BAHAYA GEMPA BUMI PER KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG	27
TABEL 2.8 POTENSI BAHAYA TANAH LONSOR PER KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG	28
TABEL 2.9 POTENSI BAHAYA KEKERINGAN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG	29
TABEL 2.10 POTENSI BAHAYA CUACA EKSTRIM PER KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG	30
TABEL 2.11 POTENSI BAHAYA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI PER KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG	31
TABEL 2.12 POTENSI BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG	32
TABEL 2.13 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	34
TABEL 2.14 JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG	35
TABEL 2.15 JUMLAH PENDUDUK USIA DISTRIBUSI PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG	36
TABEL 2.16 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN KELOMPOK UMUR.....	37
TABEL 2.17 DATA PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2018 – 2022	39
TABEL 2.18 PDRB ADHB DAN ADHK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 - 2022 (DALAM JUTA) 41	
TABEL 2.19 NILAI DAN KONTRIBUSI KATEGORI DALAM PDRB KABUPATEN BELITUNG MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) TAHUN 2018 – 2022 (DALAM JUTA RP).....	44
TABEL 2.20 NILAI DAN KONTRIBUSI KATEGORI DALAM PDRB KABUPATEN BELITUNG MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) TAHUN 2018-2022 SERI TAHUN DASAR 2010 (DALAM JUTA RP)	46
TABEL 2.21 LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BELITUNG MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2018- 2022	49
TABEL 2.22 PDRB PER KAPITA MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 – TAHUN 2021 (DALAM RIBU RUPIAH).....	51
TABEL 2.23 INDEKS SPESIALISASI (SPECIALIZATION INDEX) KABUPATEN BELITUNG.....	53
TABEL 2.24 ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) KABUPATEN BELITUNG.....	55
TABEL 2.25 INTERPRETASI HASIL ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ).....	56
TABEL 2.26 ANDIL/SUMBANGAN KELOMPOK PENGELUARAN TERHADAP INFLASI KOTA TANJUNGPANDAN, KABUPATEN BELITUNG SELAMA TAHUN 2015-2019.....	58



TABEL 2.27 ANDIL/SUMBANGAN KELOMPOK PENGELUARAN TERHADAP INFLASI KOTA TANJUNGPANDAN, KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2022.....	59
TABEL 2.28 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	68
TABEL 2.29 ANGKA MELEK HURUF TAHUN 2017-2021	70
TABEL 2.30 ANGKA PUTUS SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	70
TABEL 2.31 ANGKA KEMATIAN BAYI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	71
TABEL 2.32 ANGKA KEMATIAN IBU KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	72
TABEL 2.33 ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	73
TABEL 2.34 STATUS GIZI BALITA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	74
TABEL 2.35 DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2021	75
TABEL 2.36 PERSENTASE (%) PENANGANAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL TAHUN 2019-2022	77
TABEL 2.37 JUMLAH SARANA SOSIAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019-2022.....	77
TABEL 2.38 POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	80
TABEL 2.39 JUMLAH SANGGAR SENI.....	82
TABEL 2.40 JUMLAH SANGGAR SENI PER-KECAMATAN TAHUN 2022	83
TABEL 2.41 JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM.....	83
TABEL 2.42 PRESTASI PEMUDA TAHUN 2022	84
TABEL 2.43 JUMLAH PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	86
TABEL 2.44 CAPAIAN PEROLEHAN MEDALI TINGKAT PROVINSI, REGIONAL, NASIONAL DAN INTENASIONAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	87
TABEL 2.45 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	88
TABEL 2.46 ANGKA KELULUSAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	92
TABEL 2.47 ANGKA MELANJUTKAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	92
TABEL 2.48 SEKOLAH TERAKREDITASI A DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019-2022	95
TABEL 2.49 LEMBAGA PAUD YANG TERAKREDITASI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019-2022	96
TABEL 2.50 LEMBAGA PKBM TERAKREDITASI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019-2022.....	96
TABEL 2.51 DATA AKREDITASI PUSKESMAS DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022	97
TABEL 2.52 DATA SARANA DAN PRASARANA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022.....	98
TABEL 2.53 JUMLAH PENDERITA PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	100
TABEL 2.54 HASIL KINERJA URUSAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	100
TABEL 2.55 HASIL KINERJA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	104
TABEL 2.56 HASIL KINERJA URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	110



TABEL 2.57 HASIL KINERJA URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	113
TABEL 2.58 JUMLAH PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	113
TABEL 2.59 HASIL KINERJA URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	114
TABEL 2.60 HASIL KINERJA URUSAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	115
TABEL 2.61 KONDISI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	116
TABEL 2.62 HASIL KINERJA URUSAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	118
TABEL 2.63 HASIL KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 – 2021.....	121
TABEL 2.64 HASIL KINERJA URUSAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018– 2022	122
TABEL 2.65 HASIL KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	124
TABEL 2.66 HASIL KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	125
TABEL 2.67 HASIL KINERJA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	127
TABEL 2.68 RATA-RATA KELOMPOK BINAAN PKK DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022..	133
TABEL 2.69 PERSENTASE PKK AKTIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	133
TABEL 2.70 TINGKAT PARTISIPASI PESERTA KB MKJP DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019-2022	137
TABEL 2.71 CAKUPAN PUS YANG INGIN BER-KB TIDAK TEPENUHI (UNMET NEED) DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	138
TABEL 2.72 HASIL KINERJA URUSAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	139
TABEL 2.73 HASIL KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018– 2022	140
TABEL 2.74 REALISASI TERINTEGRASINYA SSISTEM INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021-2022	141
TABEL 2.75 DAFTAR MEDIA WEBSITE YANG DIKELOLA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022.....	142
TABEL 2.76 DAFTAR MEDIA SOSIAL YANG DIKELOLA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022	142
TABEL 2.77 HASIL KINERJA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	142
TABEL 2.78 DATA PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI TAHUN 2018-2022	143



TABEL 2.79 HASIL KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	145
TABEL 2.80 HASIL KINERJA URUSAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	148
TABEL 2.81 HASIL KINERJA URUSAN STATISTIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	151
TABEL 2. 82 HASIL KINERJA URUSAN PERSANDIAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	152
TABEL 2.83 PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA DAN SARANA PENYELENGGARAAN SENI DAN BUDAYA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	155
TABEL 2.84 DATA MENGENAI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	155
TABEL 2.85 HASIL KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	157
TABEL 2.86 HASIL KINERJA URUSAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	160
TABEL 2.87 HASIL KINERJA URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	161
TABEL 2.88 HASIL KINERJA URUSAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	167
TABEL 2.89 HASIL KINERJA URUSAN PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	171
TABEL 2.90 PERKEMBANGAN AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2018-2022	174
TABEL 2.91 CAPAIAN KINERJA URUSAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	174
TABEL 2.92 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017-2021	176
TABEL 2.93 HASIL KINERJA URUSAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	177
TABEL 2.94 PERKEMBANGAN JUMLAH INDUSTRI KECIL TAHUN 2018-2022 (UNIT).....	178
TABEL 2.95 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERENCANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	179
TABEL 2.96 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	182
TABEL 2.97 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	183
TABEL 2.98 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	184
TABEL 2.99 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	186



TABEL 2.100 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	187
TABEL 2.101 RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN (DALAM RUPIAH) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2021 .	190
TABEL 2.102 RATA-RATA PENGELUARAN (RUPIAH) KONSUMSI MAKANAN DAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2017-2021	191
TABEL 2.103 PERSENTASE (%) JALAN BERKONDISI BAIK TAHUN 2018–2022.....	193
TABEL 2.104 PROFIL KONDISI JALAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018–2022.....	193
TABEL 2.105 JUMLAH DAN PANJANG JEMBATAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018–2022	194
TABEL 2.106 ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA BANDARA UDARA H.AS HANANDJOEDIN TAHUN 2018–2022	195
TABEL 2.107 ARUS LALU LINTAS PELABUHAN PENUMPANG LASKAR PELANGI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018–2022.....	196
TABEL 2.108 ARUS LALU LINTAS PENUMPANG DAN BUS YANG MASUK TERMINAL TANJUNGPANDAN TAHUN 2018 – 2022.....	197
TABEL 2.109 PERKEMBANGAN JUMLAH HOTEL DAN PENGINAPAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	197
TABEL 2.110 PERKEMBANGAN JUMLAH RESTORAN DAN RUMAH MAKAN TAHUN 2018 – 2022.....	198
TABEL 2.111 PERKEMBANGAN BANYAKNYA PELANGGAN, PEMAKAI DAN PENJUALAN AIR MINUM PDAM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	199
TABEL 2.112 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DAN INSTALASI KOTA KECAMATAN (IKK) DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022	199
TABEL 2.113 PERKEMBANGAN JUMLAH PELANGGAN DAN DAYA TERSAMBUNG LISTRIK DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	200
TABEL 2.114 JUMLAH TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	201
TABEL 2.115 DEMONSTRASI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019-2022.....	202
TABEL 2.116 PERKEMBANGAN JUMLAH IZIN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	204
TABEL 2.117 PERKEMBANGAN JUMLAH DAN MACAM PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	205
TABEL 2.118 PERKEMBANGAN JUMLAH PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI YANG MENDUKUNG IKLIM USAHA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	207
TABEL 2.119 DATA PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2018-2022	209
TABEL 2.120 RASIO LULUSAN D-IV/S1, S2 DAN S3 DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	210
TABEL 2.121 RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022 .	212
TABEL 2.122 CAPAIAN SPM PENDIDIKAN TAHUN 2020-2021.....	216
TABEL 2.123 CAPAIAN SPM KESEHATAN TAHUN 2020-2022	218
TABEL 2.124 CAPAIAN SPM PEKERJAAN UMUM TAHUN 2020-2021	222
TABEL 2.125 CAPAIAN SPM PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2021	223



TABEL 2.126 CAPAIAN SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2020-2021	225
TABEL 2.127 TARGET CAPAIAN DAN REALISASI SPM URUSAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG....	226
TABEL 2.128 PEMETAAN CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2020.....	228
TABEL 3.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	245
TABEL 3.2 RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018- 2022	249
TABEL 3.3 RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TAHUN 2018-2022	250
TABEL 3.4 ANGKA PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022....	252
TABEL 3.5 PERSENTASE REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	255
TABEL 3.6 TARGET DAN REALISASI APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 – 2022	257
TABEL 3.7 RATA - RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	260
TABEL 3.8 RATA-RATA PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018- 2022	265
TABEL 3.9 RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017-2021	268
TABEL 3.10 ANALISIS RASIO LIKUIDITAS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017-2021.....	273
TABEL 3.11 ANALISIS RASIO SOLVABILITAS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017-2021	274
TABEL 3.12 PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH 2018-2022	275
TABEL 3. 13 PROPORSI BELANJA APARATUR/PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	276
TABEL 3.14 REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	277
TABEL 3.15 PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	279
TABEL 3.16 KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	280
TABEL 3.17 REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	281
TABEL 3.18 SISA LEBIH (RIIL) PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.....	281
TABEL 3.19 PROYEKSI KEUANGAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023-2026.....	283
TABEL 3.20 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH.....	287



TABEL 4.1 HASIL TELAAHAN SASARAN POKOK, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA RPJPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005-2025 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022.....	333
TABEL 5.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026	348
TABEL 5.2 TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BELITUNG 2024-2026	349
TABEL 5.3 TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BELITUNG 2024-2026	350
TABEL 5.4 PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO	352
TABEL 6.1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026	355
TABEL 6.2 VISI, MISI, TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI	367
TABEL 6.3 KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ANTARA RPD PROVINSI KEPUALUAN BANGKA BELITUNG 2023-2026 DAN RPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026	369
TABEL 6.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BELITUNG	370
TABEL 6.5 PENTAHAPAN PELAKSANAAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 – 2026	376
Tabel 6.7 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Belitung...	383
Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Belitung	391
TABEL 8.1 TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 – 2026	415
TABEL 8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.....	418



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	2
GAMBAR 1.2 HUBUNGAN RPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA	7
GAMBAR 2.1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG 2014 – 2034	11
GAMBAR 2.2 PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL TANJUNG KELAYANG DAN SEKITARNYA.....	20
GAMBAR 2.3 LUASAN WILAYAH PRODUKTIF KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN RTRW TAHUN 2014-2034	22
GAMBAR 2.4 PETA BAHAYA BANJIR	26
GAMBAR 2.5 PETA BAHAYA BANJIR BANDANG	27
GAMBAR 2.6 PETA BAHAYA GEMPA BUMI.....	28
GAMBAR 2.7 PETA BAHAYA TANAH LONGSOR	29
GAMBAR 2.8 PETA BAHAYA KEKERINGAN.....	30
GAMBAR 2.9 PETA BAHAYA CUACA EKSTRIM	31
GAMBAR 2.10 PETA BAHAYA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	32
GAMBAR 2.11 PETA BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	33
GAMBAR 2.12 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG	36
GAMBAR 2.13 PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022	38
GAMBAR 2.14 PDRB ADHB DAN ADHK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 - 2022 (DALAM JUTA)	41
GAMBAR 2.15 KONTRIBUSI SEKTOR PEMBENTUK PDRB ADHB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023	43
GAMBAR 2.16 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2018-TAHUN 2022 (DALAM PERSEN)	50
GAMBAR 2.17 PDRB PER KAPITA MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BELITUNG,PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2017-2021 (DALAM RIBU RUPIAH)....	52
GAMBAR 2.18 INFLASI TANJUNGPANDAN, GABUNGAN DUA KOTA (PANGKALPINANG DAN TANJUNGPANDAN) DAN NASIONAL TAHUN 2018-2022.....	57
GAMBAR 2.19 LIMA KOMODITAS TERBESAR PENYUMBANG INFLASI DAN DEFLASI DI TANJUNGPANDAN, KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 (PERSEN).....	60
GAMBAR 2.20 PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022 TERHADAP PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN INDONESIA.....	62
GAMBAR 2.21 GARIS KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022 TERHADAP GARIS KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN GARIS KEMISKINAN INDONESIA (RP/ PER KAPITA/ PER BULAN).....	63
GAMBAR 2.22 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2018-2022.....	64



GAMBAR 2.23 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2018-2022.....	64
GAMBAR 2.24 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022 TERHADAP TPT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN TPT INDONESIA	66
GAMBAR 2.25 INDEKS GINI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022 TERHADAP INDEKS GINI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDEKS GINI INDONESIA	67
GAMBAR 2.26 RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	69
GAMBAR 2.27 PERSENTASE (%) PENANGANAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL TAHUN 2019-2022	76
GAMBAR 2.28 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022.	90
GAMBAR 2.29 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	91
GAMBAR 2.30 PERSENTASE GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/DIV DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	93
GAMBAR 2.31 PERSENTASE JUMLAH GURU YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019-2022	94
GAMBAR 2.32 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG 2022.....	99
GAMBAR 2.33 TPT KABUPATEN BELITUNG TERHADAP TPT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2018-2022	116
GAMBAR 2.34 TPAK KABUPATEN BELITUNG TERHADAP TPAK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2018-2022.....	117
GAMBAR 2.35 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017-2021	119
GAMBAR 2.36 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017-2021	120
GAMBAR 2.37 JUMLAH DESA DENGAN IDM DESA “MAJU” KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	130
GAMBAR 2.38 PERSENTASE BUM DESA AKTIF SETIAP DESA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	131
GAMBAR 2.39 PERSENTASE POSYANDU AKTIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	132
GAMBAR 2.40 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022....	134
GAMBAR 2.41 CAKUPAN SASARAN PUS MENJADI PESERTA KB AKTIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	135
GAMBAR 2.42 TOTAL FERTILY RATE (TFR) DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	136
GAMBAR 2.43 PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI KB PRIA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	137
GAMBAR 2.44 OMSET USAHA MIKRO DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022 (DALAM RIBU RUPIAH)	144
GAMBAR 2.45 JUMLAH INVESTOR DALAM NEGERI BESERTA REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	147



GAMBAR 2.46 JUMLAH INVESTOR ASING BESERTA REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	147
GAMBAR 2.47 PERSENTASE PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019-2022	154
GAMBAR 2.48 PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN BELITUNG KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	162
GAMBAR 2.49 JUMLAH EKSPOR HASIL PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022 ...	162
GAMBAR 2.50 PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	163
GAMBAR 2.51 JUMLAH PRODUKSI PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2018-2022.....	163
GAMBAR 2.52 KONSUMSI IKAN (KG/KAPITA/TAHUN) DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	164
GAMBAR 2.53 JUMLAH BENIH YANG DIHASILKAN (EKOR) DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	165
GAMBAR 2.54 JUMLAH KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	165
GAMBAR 2.55 JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	166
GAMBAR 2.56 KUNJUNGAN WISATAWAN KE KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	168
GAMBAR 2.57 PAD SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022.....	170
GAMBAR 2.58 JUMLAH PELAKU EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	170
GAMBAR 2.59 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017-2021	175
GAMBAR 2.60 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017-2021 (PERSEN).....	177
GAMBAR 2.61 RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN (DALAM RUPIAH) PENDUDUK DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2017-2021	189
GAMBAR 2.62 ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA BANDARA UDARA H.AS HANANDJOEDIN TAHUN 2018-2022	195
GAMBAR 2.63 JUMLAH LULUSAN D-IV/S1, S2 DAN S3 DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 - 2022	211
GAMBAR 2.64 RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN BELITUNG 2017-2021	213
GAMBAR 3.1 REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 2018-2022	246
GAMBAR 3.2 RATA-RATA PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018-2022.....	247
GAMBAR 3.3 KONTRIBUSI KOMPONEN PENDAPATAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	247
GAMBAR 3.4 RATA-RATA PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	250
GAMBAR 3.5 KONTRIBUSI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	251
GAMBAR 3.6 RATA-RATA PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN TRANSFER KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	253



GAMBAR 3.7 KONTRIBUSI KOMPONEN PENDAPATAN TRANSFER KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	254
GAMBAR 3.8 RATA-RATA PROPORSI KOMPONEN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	254
GAMBAR 3.9 REALISASI BELANJA APBD PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2022	258
GAMBAR 3.10 PERSENTASE REALISASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018– 2022	261
GAMBAR 3.11 KOMPOSISI BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	262
GAMBAR 3.12 PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN SEBELUMNYA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	266
GAMBAR 3.13 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2022	267
GAMBAR 4.1 VISI DAN MISI PRESIDEN RI TAHUN 2020–2024.....	319
GAMBAR 4.2 ARAH KEBIJAKAN PRESIDEN RI	320
GAMBAR 4.3 DAFTAR PROYEK PRIORITAS STRATEGIS RPJMN 2020–2024.....	321
GAMBAR 4.4 PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA	323
GAMBAR 4.5 PERSEBARAN DESTINASI PARIWISATA SUMATERA – JAWA – BALI	324
GAMBAR 4. 6 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS.....	324
GAMBAR 4.7 KORIDOR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	325
GAMBAR 4.8 PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS PRIORITAS DI WILAYAH SUMATERA	326
GAMBAR 4.9 PETA SEBARAN KEK, KI DAN KPBPB DI PULAU SUMATERA	327
GAMBAR 4.10 LOKASI 62 KPPN SUMATERA – JAWA – BALI	327
GAMBAR 4.11 KOMODITAS UNGGULAN DI WILAYAH SUMATERA	329
Gambar 6.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal berdasarkan Analisis SWOT.....	354
GAMBAR 6.2 ARSITEKTUR PERENCANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH.....	382



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup berbagai perubahan dari struktur sosial dengan tetap mengejar pertumbuhan ekonomi dalam penanganan ketimpangan pendapatan, serta dalam penanganan kemiskinan pembangunan harus selaras dengan tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaannya diawali dengan penyusunan perencanaan melalui siklus perencanaan pembangunan. Pada perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung pada tahun 2023, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 2024. Sehingga Pada masa transisi ini, jika dipandang dari sisi perencanaan, maka Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam Perencanaan Tahunan Atau RKPD Tahun 2023 Terjadi “Kekosongan”.

Untuk menjembatani hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 05 Desember 2022 telah menerbitkan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang mengamanatkan

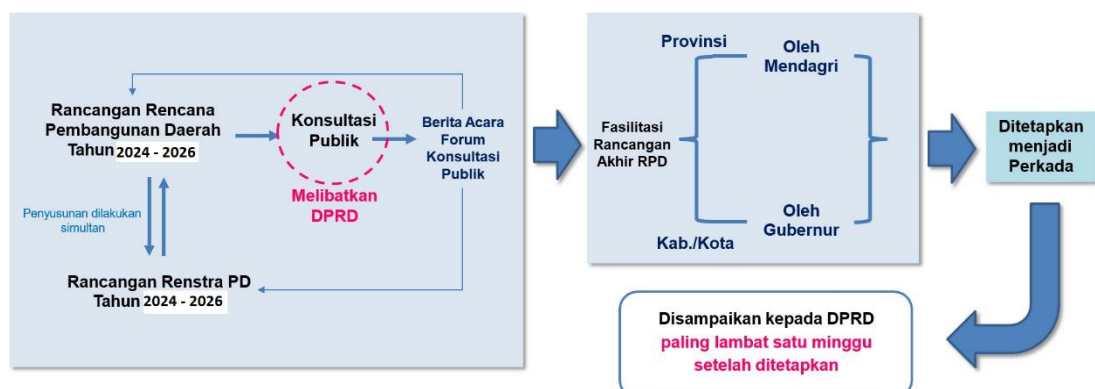


bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan dan hakekat dari pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat terwujud, diperlukan suatu perencanaan yang terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah ini merupakan tahapan ke-4 dari 4 (empat) tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005-2025. Tahap ke-4 ini masih melanjutkan pencapaian tahap ke-3, dimana fokus pada bidang ekonomi, Sumber Daya Manusia dan penguatan birokrasi diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung 2005-2025 yaitu: **“ Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”**.

Adapun tahapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (SK Nomor 010750 A);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

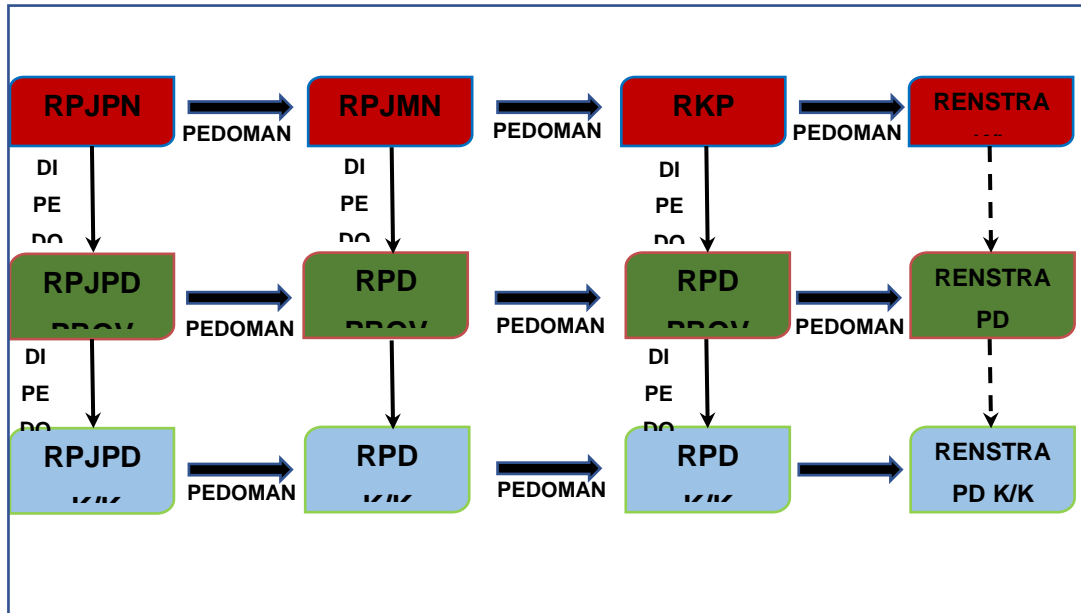


Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD 2005-2025 dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan/atau isu strategis aktual. Keterkaitan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 khususnya pada tahap pembangunan lima tahun keempat yang merupakan tahap penguatan sektor industri dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan, kontinuitas pengembangan potensi kepariwisataan, optimalisasi pengelolaan pelabuhan laut Tanjung Batu, dan pengembangan sumber daya manusia berbasis potensi daerah.



Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 1.2 Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 harus memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Belitung sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dengan maksud menyiapkan dokumen pembangunan untuk tahun 2024-2026 mendatang dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman



penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Belitung.

Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Pejabat (Pj.) Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026;
2. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2024-2026 mendatang;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Menjadi Pedoman dalam pengukuran Kinerja dan atau penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Menyediakan instrument sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai evaluasi;
7. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan serta menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta



aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan tahun 2024-2026 mendatang.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan target.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan serta program-program prioritas daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung selama 3 (tiga) tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan disertai indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan, serta kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran wajib dan mengikat.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menyampaikan harapan pencapaian dari Dokumen RPD yang telah ditetapkan, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPD sesuai peraturan perundangan berlaku.

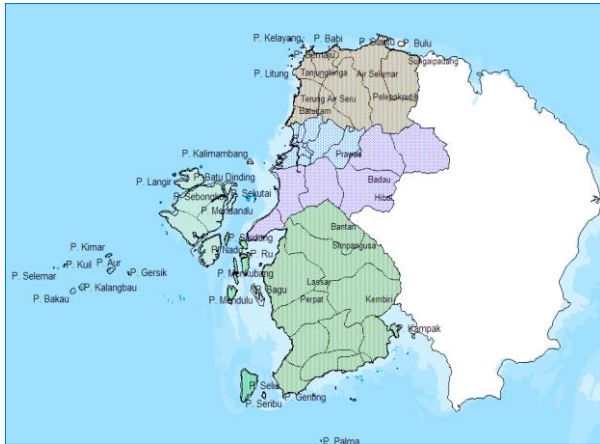


BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah



Kabupaten Belitung dengan luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², terdiri dari daratan dengan luas 2.293,69 km² dan luas wilayah lautan yaitu 6.363 km². Luas wilayah daratan berdasarkan letak wilayah di tiap kecamatan, yaitu a) Kecamatan Membalong dengan luas wilayah

909,55 km²; b) Kecamatan Tanjungpandan dengan luas wilayah 378,45 km²; c) Kecamatan Badau dengan luas wilayah 458,20 km²; d) Kecamatan Sijuk dengan luas wilayah 413,99 km²; dan e) Kecamatan Selat Nasik dengan luas wilayah 133,50 km². Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08'-107°58' BT dan 02°30'-03°15' LS, dengan batas wilayah meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 163 buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, di samping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu. Penyebaran pulau di setiap kecamatan digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2.1 Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Jumlah Pulau (Buah)
(1)	(2)	(3)
1.	Membalong	35
2.	Tanjungpandan	17
3.	Sijuk	55
4.	Badau	18
5.	Selat Nasik	38
	Jumlah	163

Sumber data : *Belitung Dalam Angka, 2023*

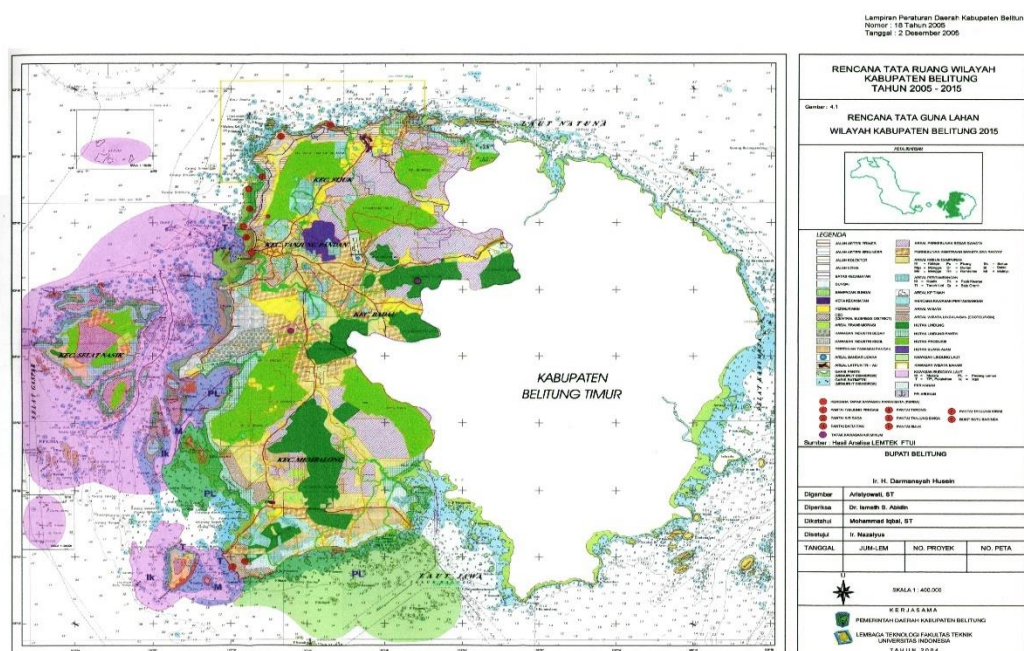


Berdasarkan kondisi topografi, daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Daerah pedalaman Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit yang kemudian membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, di mana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai, sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungai yang berbentuk seperti pohon. Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kuarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas mencapai 266.865,0 ha atau 56,98 % dari luas Kabupaten Belitung.

Batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 km² atau 5,82 % dari luas Kabupaten Belitung. Daerah aliran sungai yang dimiliki Kabupaten Belitung meliputi :

- Sebelah Utara oleh Daerah Aliran Sungai Buding;
- Sebelah Selatan oleh Daerah Aliran Sungai Pala dan Kembiri;
- Sebelah Barat oleh Daerah Aliran Sungai Brang dan Cerucuk.

Kabupaten Belitung memiliki iklim tropis dan basah dengan variasi hujan bulanan antara 0,00 mm sampai 347,4 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai dengan 25 hari setiap bulannya.



Gambar 2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung 2014 – 2034



Mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034, maka rencana pola ruang Kabupaten Belitung meliputi:

a. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung terdiri dari :

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kawasan ini terdiri atas kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 39.306 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam) hektar dan terletak di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan setempat terdiri dari :

- a. Sempadan pantai, sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai tersebar di wilayah Kabupaten.
- b. Sempadan sungai.
- c. Sempadan sekitar kolong dan/atau waduk yang diperuntukkan sebagai sumber air baku dan/atau kawasan mata air.
- d. Ruang terbuka hijau pantai terdapat di Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk.

3. Kawasan Hutan Konservasi

Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan ini terdiri atas kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya Gunung Lalang seluas kurang lebih 2.590 (dua ribu lima ratus sembilan puluh) hektar.

4. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kawasan ini terdiri dari : Bangunan Gedung Eks. Kantor Pusat PT. Timah (Jam Gede); Wisma Bougenville (Bekas Rumah *Hoofadministratur*); Eks *Chineesche Hospital*; RSUD Kab. Belitung (Eks *Europeesch Kliniek*); Rumah Tipe Kolonial I; Rumah Tipe Kolonial II; Museum Pemerintah Kabupaten Belitung; Wisma Pantai; Bekas Kapel Regina



Pacis; Eks *Societeit*; Rumah Kapiten Pang Tjong-Toen; Kelenteng Hok Tek Che; Kian Sien; SMPN 1 Tanjungpandan (Eks *Holland Indisch School*); Kantor Dinas P dan K Kabupaten Belitung; Gedung PWRI (Eks *Tuindienst*); Eks. Kantor Asisten Residen (Dinas P dan K); Kantor Kodim 0414 Garuda Dempo; Galangan Kapal (*Dockyard*); Wisma Dian (Benteng Kuehn); Gedung Nasional; Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung); *Kherkhof* (Pemakaman Belanda); Situs Makam KA. Rahat; Situs Bukit Luday; Mercusuar Pulau Sumedang; Situs Lempak Tuk Layang; Museum Badau; Makam Datuk Mayang Geresik; Situs Kota Tanah Cerucuk (Cakraningrat X); Makam Tuk Kundo; Struktur Gerbang Bentek Kenupuk; Situs Gunung Tajam (Makam Syech Abubakar Abdullah); Situs Mentikus; Masjid Al Ikhlas; Kelenteng Hok Tek Che; Mercusuar Pulau Lengkuas; Situs Padang Kelarin; Situs Padang Pendam; Kelenteng Piet Tie Miauw; dan Mercusuar Tanjung Lancur.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, meliputi :

- a. Banjir, terdapat di Kelurahan Parit, Kelurahan Kampung Damai, Desa Air Raya, Desa Badau, Desa Membalong, dan Desa Sijuk.
- b. Angin puting beliung, terdapat di Desa Padang Kandis, Desa Pelepak Putih, Desa Kacang Butor, Desa Perawas, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Juru Seberang, dan Desa Pegantungan.
- c. Banjir rob, tersebar di sekitar muara sungai Desa Cerucuk, sepanjang pantai Air Saga, Desa Juru Seberang, Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan, Desa Padang Kandis, Desa Mentigi, Desa Tanjung Rusa, Desa Selat Nasik, Desa Suak Gual, Pulau Gersik, Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Sumedang
- d. Abrasi/erosi, tersebar di sepanjang pantai Air Saga, Juru Seberang, Sungai Samak, Pegantungan, Dudat, Padang Kandis, Mentigi, Tanjung Rusa, Keciput, Tanjungtinggi, Pulau Gersik, Pulau Sumedang, Pulau Buntar, Suak Gual dan Pulau Kuil.
- e. Badai laut tropis, tersebar di perairan utara pulau Belitung, pemukiman pulau-pulau dan kawasan pesisir pantai yang *mangrove* dan karang rusak.
- f. Petir, terdapat di Desa Tanjung Rusa, laut sekitar Desa Pegantungan, Batu Itam, Tanjung Binga, Keciput dan Sijuk.
- g. Kebakaran, tersebar di Kecamatan Tanjungpandan dan Desa Suak Gual (daerah gambut).



6. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang memiliki keunikan alam batuan, fosil, bentang alam, dan proses geologi yang perlu dilindungi.

7. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Lindung Lainnya adalah kawasan perlindungan plasma nutfah, yang meliputi :

- a. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Pohon Krui di Air Batu Buding, pohon Blangeran (*Shorea belangeran*) di hutan produksi Batu Itam Air Gelarak, dan pohon Bulin di Petaling; dan
- b. Kawasan Habitat Satwa Tupai Selat Nasik di Selat Nasik, Pelile'an (*Tarsius Bancanus Saltator*) di Kecamatan Badau.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, termasuk di dalamnya diperuntukan sebagai hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan adalah seluas kurang lebih 41.530 (empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar.
2. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdiri atas :
 - a) Pertanian lahan basah terdiri atas :
 - i. Budidaya tanaman pangan kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar dengan luas lahan sawah 2.000 (dua ribu) hektar dan luas lahan palawija 1.000 (seribu) hektar yang tersebar di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Membalong dengan irigasi sepanjang 40 km (40.000 m);
 - ii. Budidaya hortikultura dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Selat Nasik, dan Kecamatan Membalong, dengan rincian luas lahan pekarangan 1.000 (seribu) hektar dan luas lahan non pekarangan 1.000 (seribu) hektar.
 - b) Pertanian lahan kering, terdiri atas :
 - i. Kawasan budidaya tanaman pangan hortikultura dan palawija seluas



- 3000 (tiga ribu) hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Selat Nasik, dan Kecamatan Membalong. dengan rincian luas lahan pekarangan 1.000 (seribu) hektar dan luas lahan non pekarangan 1.000 (seribu) hektar.
- ii. Perkebunan besar swasta dengan luas kurang lebih 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar yang terdiri dari perkebunan besar swasta komoditas kelapa sawit 30.000 (tiga puluh ribu) hektar dan perkebunan besar swasta komoditas non sawit 5000 (lima ribu) hektar terletak di Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Sijuk.
 - iii. Kawasan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 31.090 (tiga puluh satu ribu sembilan puluh) hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Selat Nasik.
3. Pengembangan kegiatan peternakan, terdiri atas :
- a) Budidaya peternakan skala sedang dan besar menurut jenis ternak tersebar di Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Selat Nasik.
 - b) Rumah Pemotongan Hewan Terpadu seluas lebih kurang 5 (lima) hektar terletak di Desa Juru Seberang.
4. Kawasan Peruntukan Perikanan.
- a) Kawasan perikanan tangkap, terletak di perairan umum daratan tersebar di seluruh kecamatan.
 - b) Kawasan budidaya perikanan, terdiri atas :
 - i. Kawasan budidaya perikanan air payau dengan luas lebih kurang 249,78 (dua ratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) hektar dengan pengembangan potensi tersebar di seluruh kecamatan.
 - ii. Kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luas kurang lebih 179,7 (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh) Hektar dengan pengembangan potensi tersebar di seluruh kecamatan.
 - c) Kawasan pengolahan hasil perikanan, terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik.
5. Kawasan Minapolitan, terdiri dari :
- a) Zona inti terletak di Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - b) Zona pengembangan terletak di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Badau.



6. Kawasan Peruntukan Pertambangan :

- a) Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi mineral logam, non logam, dan batuan, luas kurang lebih 40.464 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat) hektar meliputi wilayah darat terdapat di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik.
- b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang meliputi mineral logam, non logam, dan batuan, luas kurang lebih 40.464 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari yang berada di luar kawasan hutan seluas kurang lebih 29.900 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar dan potensi yang berada dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 10.564 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh empat) hektar.

7. Kawasan Peruntukan Industri terdiri dari :

- a) Kawasan industri, dengan luas kurang lebih 1.414 (seribu empat ratus empat belas) hektar terletak di Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan Kecamatan Badau, dan Desa Bantan Kecamatan Membalong.
- b) Area industri berbasis produksi, terletak di seluruh kecamatan.
- c) Pengembangan industri kecil dan menengah, tersebar diseluruh kecamatan.
- d) Pengembangan industri rumah tangga, tersebar di seluruh kecamatan.

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan Peruntukan Pariwisata memiliki luas kurang lebih 11. 602 (sebelas ribu enam ratus dua) hektar, meliputi:

- a) Kawasan Pariwisata Alam, terdiri atas :
 - i. Pariwisata alam pantai, meliputi : Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Binga, Pantai Secupak, Pantai Mabai, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Pendaunan Indah, Pantai Penyaeran, Pantai Batu Rakit, Pantai Marina, Pantai Bebilai, Pantai Siantu, Pantai Batu Bukit, Pantai Sengkelik, Pantai Batu Bedil, Pantai Tanjung Genting, Pantai Tanjung Rusa, Pantai Mentigi, Pantai Tanjungpendam, Pantai Cawat, Pantai Cepun, Pantai Tanjung Kiras, Pantai Teluk Gembira, Pantai Penyabong, Pantai Batu Lubang, Pantai Awan Mendung, Pantai Pulau Bayan, Pantai Pegantungan, Pantai Pasir Panjang, Pantai Tanah Tinggi, dan Pantai Gilang.
 - ii. Pariwisata alam pulau, meliputi : Pulau Kera, Pulau Burung, Pulau Pasir, Pulau Kelayang, Pulau Lengkuas, Pulau Aji, Pulau Siantu, Pulau



Buluh/ Mempalik, Pulau Kemulutan Besar, Pulau Kemulutan Kecil, Pulau Kambing, Pulau Rengit, Pulau Naduk, Pulau Batu Dinding, Pulau Kalamoa, Pulau Lima, Gugusan Pulau di Desa Juru Seberang, Pulau Mentikus, Pulau Seliu, Pulau Gersik, Pulau Kalimambang, Pulau Sekupuk, Pulau Sekudang, Pulau Kampak, Pulau Katan, Pulau Kepayang, Pulau Batu Layar, Pulau Gusong Are, Pulau Bayan, Pulau Emperut, Pulau Genting, Pulau Pelema Besar, Pulau Pelema Kecil, Pulau Tupai, Pulau Seribu, Pulau Kapak, pulau Betangan, pulau Liak Besar, Pulau Liak Kecil, Pulau Belatuk, Pulau Sebongkok, Pulau Sepindang, Pulau Sekutai, Pulau Piling, Pulau Punai dan pulau-pulau lainnya.

- iii. Pariwisata alam sungai, meliputi: Sungai Petaling, Sungai Cerucuk, Sungai Padang, dan Sungai Brang.
 - iv. Pariwisata alam lainnya, meliputi : Bukit Batu Baginde, Bukit Batu Telaga Bulan, Goa Nek Santen, Bukit Paramont, Air Terjun Gurok Beraye, Hutan Kemasyarakatan Desa Juru Seberang, Hutan Kemasyarakatan Munsang, Hutan Produksi Konversi Tanjung Siantu, Goa di Juru Seberang, Pemandian Alam Jerry, Pemandian Tirta Marundang Indah, Pemandian Suci Indah, Batu Siang, Air Terjun Gunung Kubing, Air Lembung Dalam dan Air Terjun, Batu Mentas *Sanctuary*, Danau Kaolin Kolong Murai, Taman Hiburan Kolong Keramik, Desa Wisata Tanjung Tinggi, Kampong Oranye, Rindu Kampung, Mercusuar Tanjung Lancur.
- b) Kawasan Pariwisata Budaya, terdiri atas :
- i. Kawasan pariwisata budaya di Kecamatan Membalong meliputi: Situs Ai' Labu (makam KA Rahat/Depati Tjakraningrat VIII), Situs Luday dan Membalong (makam Raja Belantu dan keturunan), Situs Lempak Tuk Layang, Mercusuar Pulau Sumedang.
 - ii. Kawasan pariwisata budaya di Kecamatan Badau meliputi : Situs Kota Tanah Cerucuk (makam KA Hatam/Depati Tjakraningrat VII dan makam KA Muhammad Saleh/Depati Tjakraningrat IX), Kawasan Situs Gunung Lilangan (makam Raja Badau/Datuk Mayang Geresik) dan Museum Badau, Situs Gunung Tajam (makam Syech Abu Bakar Abdullah) dan Situs Parit Gunong (makam Tuk Kundo).
 - iii. Pariwisata budaya di Kecamatan Sijuk meliputi : Desa Balitung, Situs Mentikus Air Selumar, Mesjid Tua Sijuk (Al Ikhlas), Kelenteng Sijuk, Mercusuar Pulau Lengkuas, Situs Padang Kelaring Sungai Padang.



- iv. Pariwisata budaya di Kecamatan Selat Nasik meliputi Mercusuar Pulau Mendanau (Tanjung Lancur).
 - v. Pariwisata budaya di Kecamatan Tanjungpandan meliputi Museum Pemkab Belitung, Rumah Adat Belitung, Kawasan Kota Tua Tanjungpandan meliputi Eks. *NV GMB* Jam Gede, Rumah tipe kolonial I dan tipe kolonial II, Benteng Penutuk Perawas, Rumah Kapiten Phang Tjong-toen, *Kian Sien*, Kelenteng Hok Tek Che, Eks. *Societeit* Toapekong Ho A Joen, Rumah Tuan Kuase, Hotel Pantai (Mess KJUB Pertim), Eks. *Europeesche Kliniek*, Museum Tanjungpandan, eks Gereja Regina Pacis, Gedung Nasional, Eks *Tuindienst*, Eks *Landraad*, Eks *Holland Indisch-School* (SMPN 1 Tanjungpandan), Eks. Kantor Asisten Residen (Kantor KODIM), Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung), Situs Benteng Kuehn, Situs Dockyard, Kerkhof Tanjungpandan (pekuburan Belanda), Masjid Al Mabruur, Eks Kantor Asisten Residence, Gedung Nasional Padang Miring.
 - c) Kawasan Pariwisata Buatan, tersebar di seluruh kecamatan.
 - d) Kawasan Agrowisata, meliputi kebun durian Dusun Aik Gede, Kebun Buah Badau, Taman Kehati Aik Selumar, Taman Kehati Desa Lassar.
9. Kawasan Peruntukan Permukiman, terdiri atas :
- a) kawasan permukiman perkotaan, dengan luas kurang lebih 9.170 (sembilan ribu seratus tujuh puluh) hektar, terletak di kawasan perkotaan Tanjungpandan yang merupakan *Central Bussines District*.
 - b) kawasan permukiman perdesaan, dengan luas kurang lebih 20.020 (dua puluh ribu dua puluh) hektar terletak di Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik.
10. Kawasan Peruntukan Lainnya, adalah kawasan latihan tempur *Air Weapon Range (AWR)* TNI Angkatan Udara Republik Indonesia mendukung pertahanan dan keamanan seluas lebih kurang 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) Hektar di Desa Buding Kecamatan Badau dan Kawasan Radar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia di Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk.

c. Kawasan Strategis

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas:

1. Kawasan strategis provinsi sebagaimana pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034,



terdiri atas:

- a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Selat Nasik,
 - b. Kawasan pengembangan ekonomi secara khusus Suge, meliputi pelabuhan Laut Regional Tanjung Batu dan Kawasan Industri Terpadu Suge sebagai simpul transportasi barang dan orang skala nasional serta kegiatan industri yang berpotensi sebagai pemicu ekonomi wilayah provinsi.
 - c. Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk.
 - d. Kawasan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan.
 - e. Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk.
 - f. Kawasan Museum Nasional Maritim di Kecamatan Sijuk.
 - g. Cagar alam Gunung Lalang di Kecamatan Tanjungpandan.
 - h. Taman Kehati di Kecamatan Sijuk.
2. Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas :
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai telah dijelaskan di atas, meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Tanjungpandan sebagai *Central Bussines District (CBD)*;
- b. Kawasan Wisata Kecamatan Sijuk dan Membalong;
- c. Kawasan Industri Suge dan Kawasan Pelabuhan Regional Tanjung Batu sebagai kawasan pengembangan ekonomi secara khusus;
- d. Kawasan agropolitan Kecamatan Membalong;
- e. Kawasan minapolitan yang terdiri dari zona inti terletak di Kecamatan Tanjungpandan dan zona pengembangan terletak di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Badau;
- f. Kawasan strategis cepat tumbuh Kecamatan Sijuk, Badau dan Membalong;
- g. Kawasan pengembangan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin;
- h. Kawasan pariwisata.

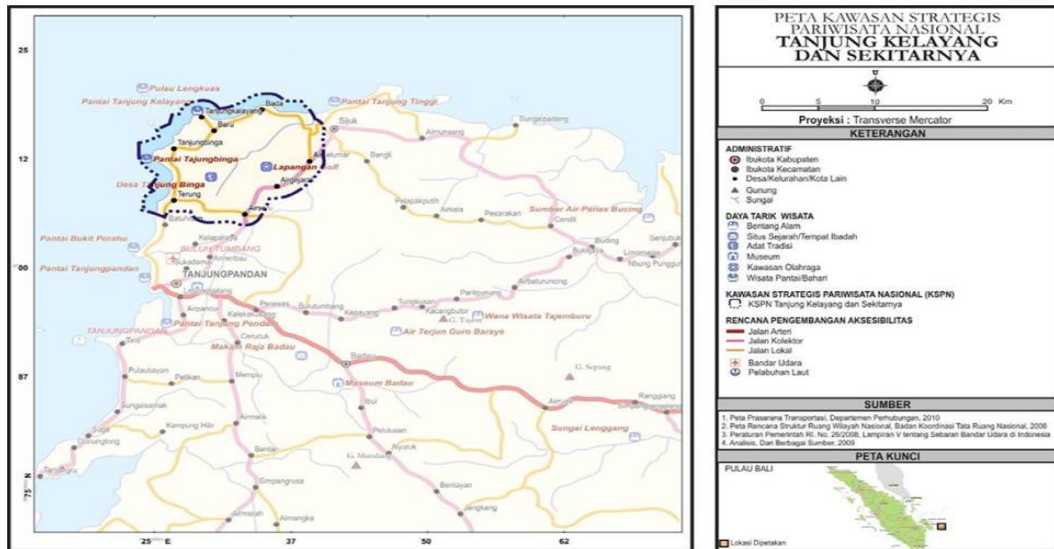
Sebagai pengejawantahan dari penentuan sebagai kawasan wisata sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pemerintah pusat menetapkan kawasan strategis nasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kecamatan Sijuk;
- b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kecamatan Sijuk;



- c. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik;
- d. Geopark Nasional.

Substansi pengembangan Geopark adalah suatu kawasan yang dapat memberikan perlindungan geologi dan geomorfologi secara berkelanjutan. Hal tersebut merupakan faktor utama dalam pengembangan kepariwisataan daerah.



Gambar 2.2 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Kelayang dan Sekitarnya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. Kawasan makam bersejarah yaitu Situs Kota Tanah Cerucuk (makam Depati Tjakraningrat VII dan IX), Situs Ai' Labu (makam KA Rahat), Situs Luday (makam Datuk Ahmad Mempawah), Situs Membalong (makam KA Deraip), Situs Gunung Lilangan (makam Raja Badau/Datuk Mayang Geresik), Situs Gunung Tajam (makam Syech Abu Bakar Abdullah), Situs Parit Gunung (makam Tuk Kundo), Kerkhof Tanjungpandan (pekuburan Belanda)
- b. Kawasan Kota Tua Tanjungpandan meliputi Eks. NV GMB Jam Gede, Rumah Tipe Kolonial I dan Rumah Tipe Kolonial II, Rumah Kapiten Phang Tjong-toen, Kian Sien, Kelenteng Hok Tek Che, Eks. Societeit Toapekong Ho A Jun, Rumah Tuan Kuase (Wisma Bougenville), Hotel Pantai (Mess KJUB Pertim), Eks. Europeesche Kliniek (RSUD Kab. Belitung), Museum Tanjungpandan, Gereja Regina Pacis, Gedung Nasional, Eks. Tuindienst (Sekretariat PWRI), Eks Landraad (UPTD TK/SD Tanjungpandan), Eks. Holland Indisch-School (SMPN 1 Tanjungpandan), Eks. Kantor Asisten Residen(Kantor KODIM), Eks. Districthoofd (Rumah Dinas Kapolres Belitung), Situs Benteng Kuehn;



- c. Kawasan bersejarah lainnya yaitu Museum Badau, Mesjid Tua Sijuk (Al Ikhlas), Kelenteng Sijuk, Situs Mentikus Air Selumar, Mercusuar Pulau Lengkuas, Mercusuar Pulau Mendanau (Tanjung Lacur), Mercusuar Pulau Sumedang
- d. Kawasan Museum Nasional Maritim di Kecamatan Sijuk; dan
- e. Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Sijuk

Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi :

- a. Kawasan hutan konservasi Gunung Lalang;
- b. Kawasan konservasi perairan di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Membalong;
- c. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Sijuk;
- d. Kawasan keanekaragaman hayati di Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Membalong;
- e. Kawasan rawan bencana alam
- f. Kawasan perlindungan sumber air baku

Adapun Struktur Ruang Kabupaten Belitung meliputi:

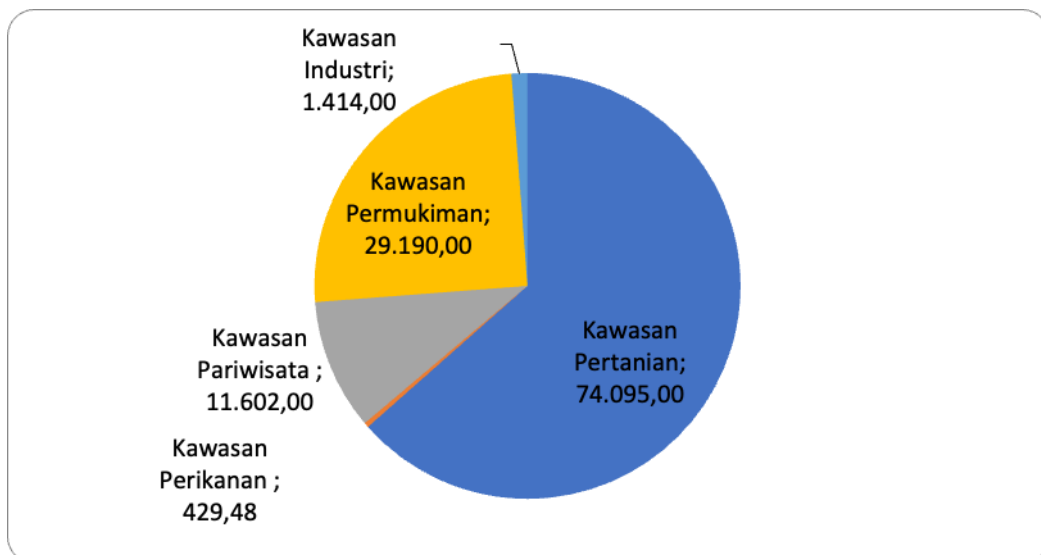
- a. Arah pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKW, sistem prasarana wilayah di Tanjungpandan; PKL di Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik; dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di pusat-pusat desa/kelurahan sebagai pusat pelayanan bagi desa/kelurahan itu sendiri atau beberapa desa/kelurahan di sekitarnya. Adapun Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat nasik mempunyai pusat pelayanan lingkungan yang berada di Desa nya masing-masing yaitu Kecamatan Sijuk yang dilayani oleh Desa Sijuk, Kecamatan Badau oleh Desa Badau, Kecamatan Membalong oleh Desa Membalong dan Kecamatan Selat Nasik oleh Desa Selat Nasik. Jadi keempat kecamatan tersebut selain Pusat Kegiatan Lokal, Kecamatan tersebut di atas juga menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan yang melayani beberapa desa di sekitarnya.
- b. Rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang meliputi:
 - 1. Sistem jaringan prasarana transportasi, terdiri atas sistem jaringan jalan, jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).



2. Sistem jaringan prasarana energi, terdiri atas jaringan batubara, minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan prasarana kelistrikan.
3. Jaringan telekomunikasi terdiri atas penyelenggaraan jaringan tetap, penyelenggaraan jaringan bergerak.
4. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air terdiri atas sistem wilayah sungai, sistem daerah irigasi dan sistem jaringan air baku.

Sistem prasarana lainnya, terdiri atas sistem pengelolaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan limbah, pengembangan prasarana perikanan, dan pengembangan prasarana pemakaman umum.

Sementara untuk kawasan produktif yang ada di Kabupaten Kabupaten Belitung meliputi kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan industri. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2034, luas kawasan produktif di Kabupaten Belitung seluas 158.558,48 Ha yang terdiri dari kawasan pertanian seluas 74.095,00 Ha, luas kawasan perikanan sebesar 429,48 Ha, luas kawasan pariwisata sebesar 11.620 Ha, luas kawasan pemukiman sebesar 29.190 Ha dan luas kawasan industri sebesar 1.414 Ha. Maka luasan seluruh wilayah produktif sebesar 117.028,48 atau sebesar 73,81% dari luas kawasan budidaya yang diusahakan menjadi lahan produktif.



Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (diolah)

Gambar 2.3 Luasan Wilayah Produktif Kabupaten Belitung berdasarkan RTRW Tahun 2014-2034

Tabel di bawah ini menggambarkan klasifikasi peruntukan wilayah budidaya sesuai dengan luasannya berdasarkan RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034.



Tabel 2.2 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Belitung

No.	Uraian	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	41.530,00
2	Kawasan Peruntukan Pertanian A. Pertanian Lahan Basah - Budidaya Tanaman Pangan - Budidaya Hortikultura B. Pertanian Lahan Kering - Kawasan Budidaya Tanaman Pangan Holtikultura dan Palawija - Perkebunan Besar Swasta - Kawasan Perkebunan Rakyat C. Pengembangan Kegiatan Peternakan	3.000,00 2.000,00 3.000,00 35.000,00 31.090,00 5,00
3	Kawasan Peruntukan Perikanan - Kawasan Budidaya Perikanan Air Payau - Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	249,78 179,70
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan	40.464,00
5	Kawasan Peruntukan Industri	1.414,00
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	11.602,00
7	Kawasan Peruntukan Permukiman - Kawasan Permukiman Perkotaan - Kawasan Permukiman Perdesaan	9.170,00 20.020,00
8	Kawasan Peruntukan Lainnya	298,00

Sumber : RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (diolah)

Tabel 2.3 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Belitung

No	Uraian	Luasan (Ha)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kawasan Budidaya	199.022,48	
2	Kawasan Pertanian	74.095,00	37,23
3	Kawasan Perikanan	429,48	0,22
4	Kawasan Pariwisata	11.602,00	5,83
5	Kawasan Permukiman	29.190,00	14,67
6	Kawasan Industri	1.414,00	0,71

Sumber : RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, luasan wilayah produktif pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata alam dan kawasan pariwisata budaya, Kawasan pariwisata buatan dan Kawasan pariwisata Agrowisata. Wilayah produktif permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan yang terletak di kawasan perkotaan Tanjungpandan yang merupakan *Central Bussines District* dan kawasan permukiman perdesaan yang terletak di Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik. Sedangkan wilayah produktif industri terdiri dari kawasan industri, area industri berbasis produksi, pengembangan industri kecil dan menengah, serta pengembangan industri rumah tangga.



2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi wilayah Kabupaten Belitung secara umum dapat ditinjau dari beberapa aspek. Peninjauan tersebut lebih diarahkan pada keterkaitan langsung dengan aspek pengkajian bencana. Aspek yang utama terkait dengan kondisi geografis, administratif, iklim, cuaca dan topografi wilayah yang berpengaruh terhadap potensi bahaya di Kabupaten Belitung. Selain itu juga pengaruh demografi wilayah terhadap perkiraan penduduk terpapar dan kerugian serta kerusakan yang timbul bila terjadinya bencana. Kondisi geografis dan administratif Kabupaten Belitung jika dihubungkan dengan bencana yang berpotensi terjadi maka akan berdampak pada faktor pemicu luas paparan bencana. Luas paparan bencana tersebut akan berbeda di tiap kecamatannya. Semakin luas wilayah suatu daerah maka semakin luas daerah terdampak bencana di Kabupaten Belitung. Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Belitung mempunyai karakteristik yang sangat bervariasi sehingga menyebabkan Kabupaten Belitung rawan bencana. Potensi bahaya di dataran rendah yang berkemungkinan terjadi adalah banjir dan cuaca ekstrim, di dataran tinggi adalah tanah longsor, sedangkan di pesisir pantai berkemungkinan terjadi bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Selain itu dengan aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon. Dimana sungai yang ada, berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai. Kondisi ini bisa berpotensi terjadi bencana banjir bandang yang dipicu oleh longsor di wilayah hulu sungai. Sedangkan dari kondisi iklim di Kabupaten Belitung tergolong tropis basah dengan variasi curah hujan. Dilihat dari kondisi iklim tersebut, dapat menjadi salah satu penyebab dan pemicu terjadinya bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Potensi bencana yang mengancam dan pernah terjadi yaitu bencana banjir dan cuaca ekstrim atau angin puting beliung, hal ini dilihat dari curah hujan dan tekanan udara. Wilayah Kabupaten Belitung hampir setiap tahun mengalami bencana banjir. Untuk wilayah pesisir pantai, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan terjadinya gelombang ekstrim dan abrasi. Selain itu juga kekeringan juga berpotensi tinggi terjadi akibat perubahan iklim tersebut. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Belitung Tahun 2021-2025, berikut dibawah ini Luas Wilayah terdampak bahaya di kabupaten Belitung :



Tabel 2.4 Potensi Bahaya di Kabupaten Belitung

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Banjir	22.936,70	Tinggi
2	Banjir Bandang	2.380,14	Tinggi
3	Gempa Bumi	219.944,00	Rendah
4	Tanah Longsor	12.584,97	Rendah
5	Kekeringan	219.944,00	Sedang
6	Cuaca Ekstrim	180.881,60	Sedang
7	Glombang ekstrim dan abrasi	9,949,50	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	182.626,58	Tinggi

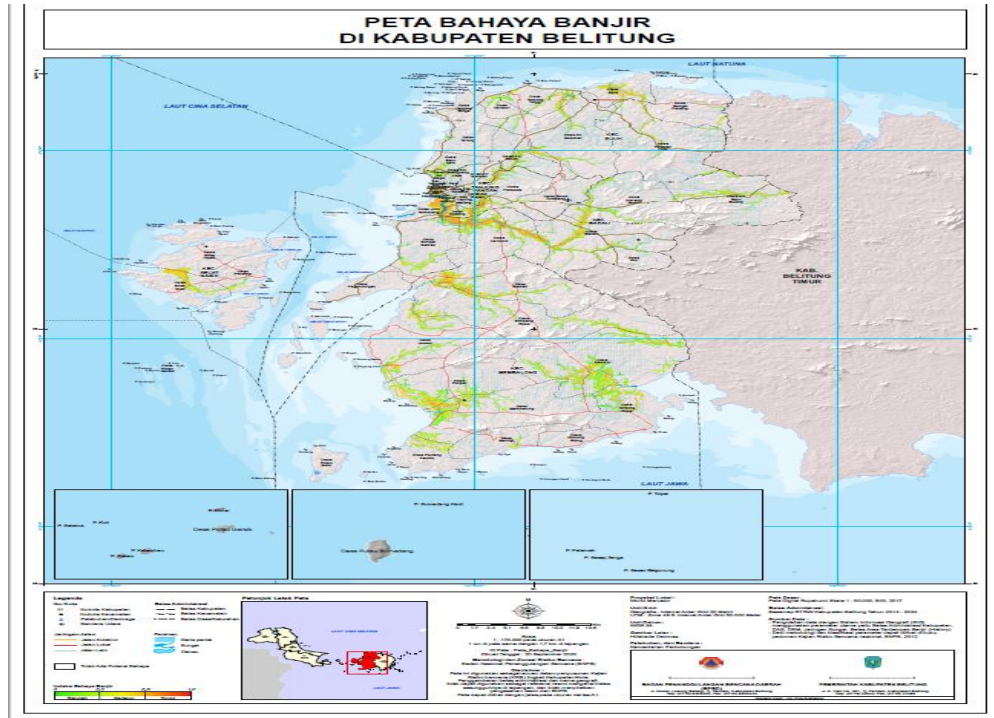
Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelas bahaya seluruh potensi bencana di Kabupaten Belitung bervariasi yaitu ada yang berada pada kelas tinggi, sedang dan rendah. Kelas tinggi ditunjukkan oleh jenis bencana banjir dan kelas rendah ditunjukkan oleh jenis bencana gempa bumi.

Tabel 2.5 Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Badau	5.281,74	Tinggi
2	Membalong	11.236,23	Sedang
3	Selat Nasik	813,87	Sedang
4	Sijuk	2.912,60	Sedang
5	Tanjungpandan	2.692,26	Tinggi
	Kabupaten Belitung	22.936,70	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

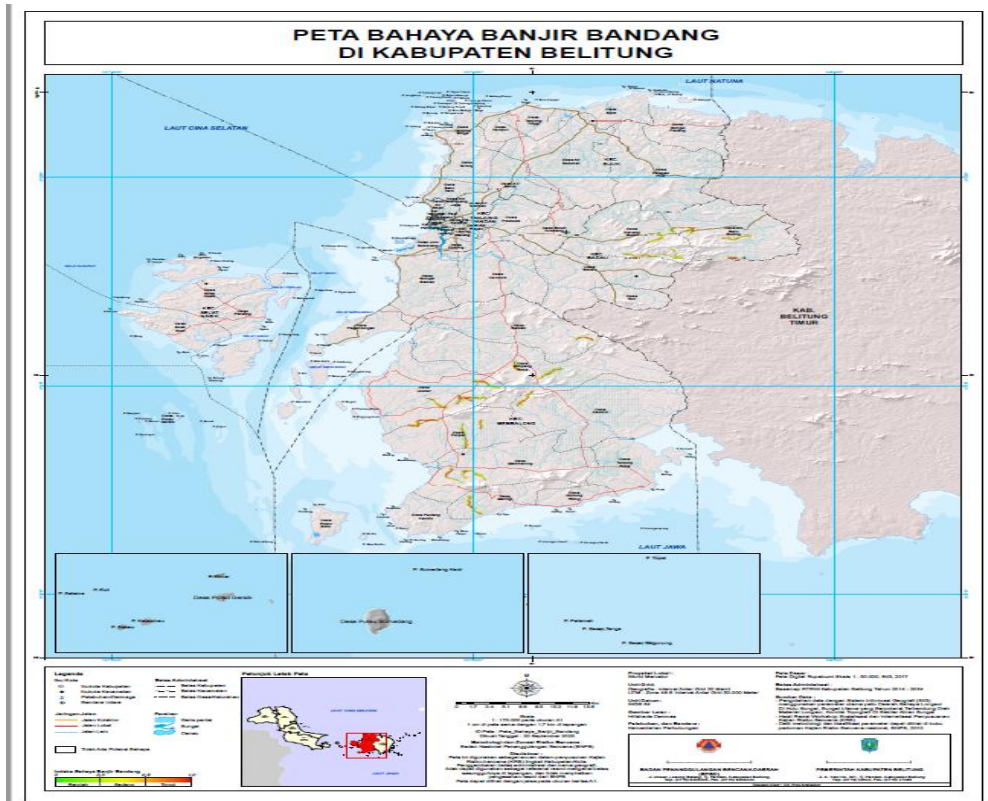
Gambar 2.4 Peta Bahaya Banjir

Tabel 2.5 di atas menunjukkan bahwa hasil kajian bahaya di Kabupaten Belitung untuk bencana banjir berada di kelas Tinggi, sedangkan total luas wilayah terdampak yaitu 22.936,70 Ha. Total potensi bahaya banjir di Kabupaten Belitung diperoleh berdasarkan rekapan total luas bahaya di seluruh kecamatan berpotensi banjir. Sementara itu kelas bahaya banjir di Kabupaten Belitung dilihat berdasarkan kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan.

Tabel 2.6 Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Badau	652,23	Tinggi
2	Membalong	1.727,91	Tinggi
	Kabupaten Belitung	2.380,14	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

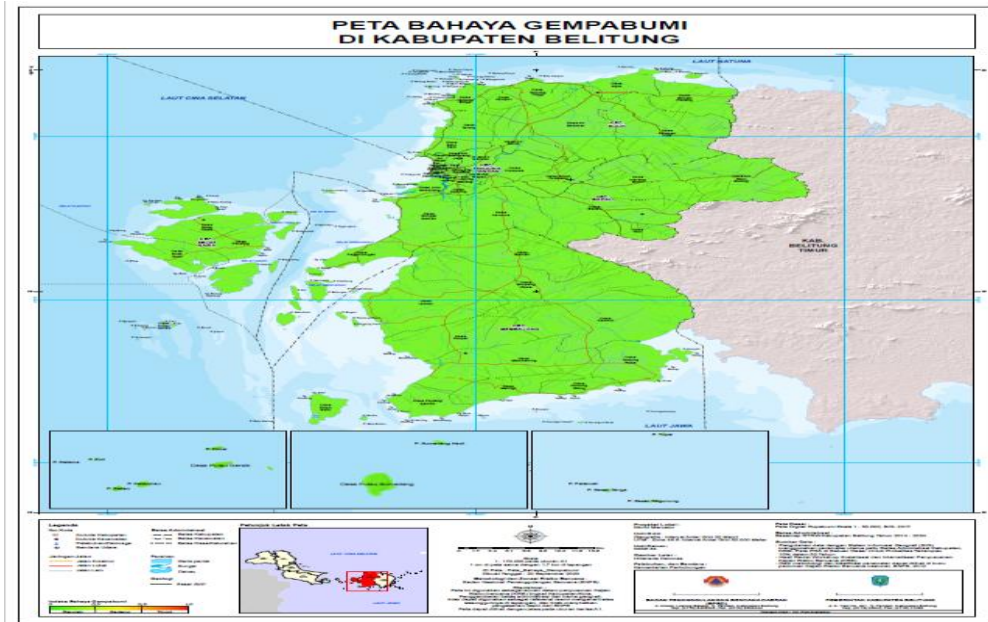
Gambar 2.5 Peta Bahaya Banjir Bandang

Tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa bahaya di Kabupaten Belitung untuk bencana banjir bandang berada di kelas Tinggi, sedangkan total luas wilayah terdampak yaitu 2.380,14 Ha. Total potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Belitung berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya dari seluruh kecamatan berpotensi banjir bandang di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.7 Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Badau	49.051	Rendah
2	Membalong	91.037	Rendah
3	Selat Nasik	13.350	Rendah
4	Sijuk	45.200	Rendah
5	Tanjungpandan	21.306	Rendah
	Kabupaten Belitung	219.944,00	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

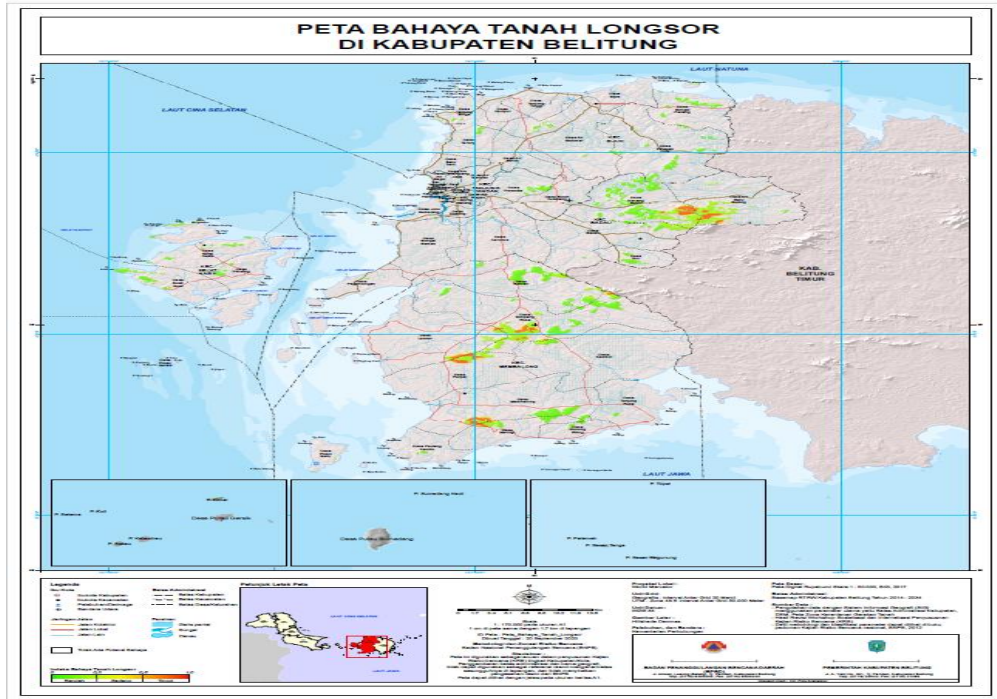
Gambar 2.6 Peta Bahaya Gempa Bumi

Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa kajian bahaya di Kabupaten Belitung untuk bencana gempa bumi berada di kelas Rendah dengan total luas wilayah terdampak yaitu 219.944,00 Ha. Total potensi luas bahaya gempa bumi Kabupaten Belitung diperoleh berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya dari seluruh kecamatan berpotensi gempa bumi di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.8 Potensi Bahaya Tanah Lonsor Per Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Badau	4.226,22	Rendah
2	Membalong	6.129,54	Rendah
3	Selat Nasik	84,92	Rendah
4	Sijuk	1.160,91	Rendah
5	Tanjungpandan	223,38	Rendah
	Kabupaten Belitung	12.584,97	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

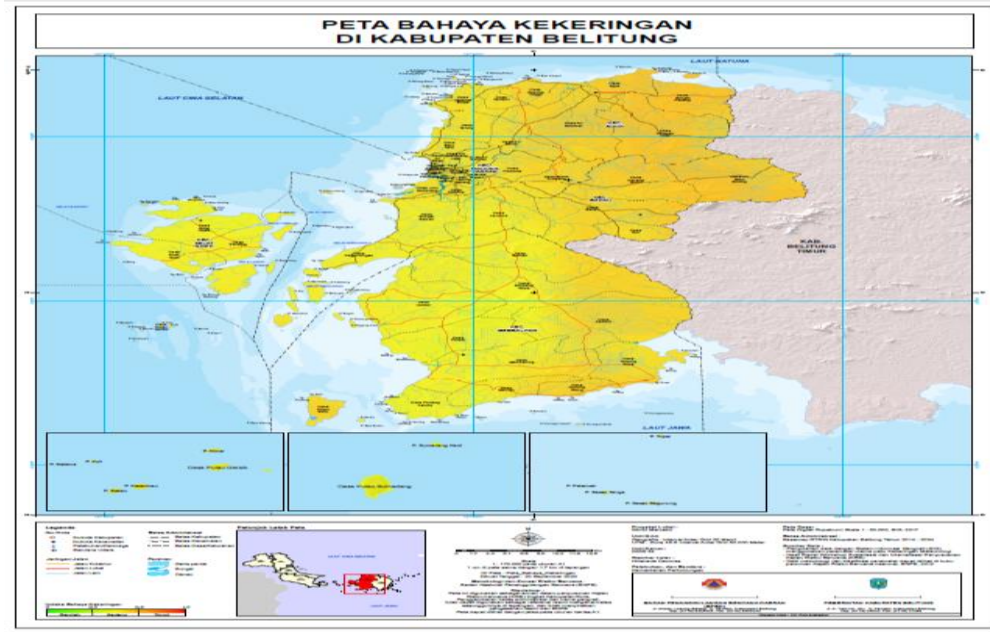
Gambar 2.7 Peta Bahaya Tanah Longsor

Tabel 2.8 di atas menunjukkan bahwa hasil kajian bahaya di Kabupaten Belitung untuk bencana tanah longsor berada di kelas Rendah dengan total luas wilayah terdampak yaitu 12.584,97 Ha. Total potensi luas bahaya tanah longsor Kabupaten Belitung diperoleh berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya dari seluruh kecamatan berpotensi longsor di Kabupaten Belitung, sedangkan kelas bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan.

Tabel 2.9 Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Badau	49.051,00	Sedang
2	Membalong	91.037,00	Sedang
3	Selat Nasik	13.350,00	Sedang
4	Sijuk	45.200,00	Sedang
5	Tanjungpandan	21.306,00	Sedang
	Kabupaten Belitung	12.584,97	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

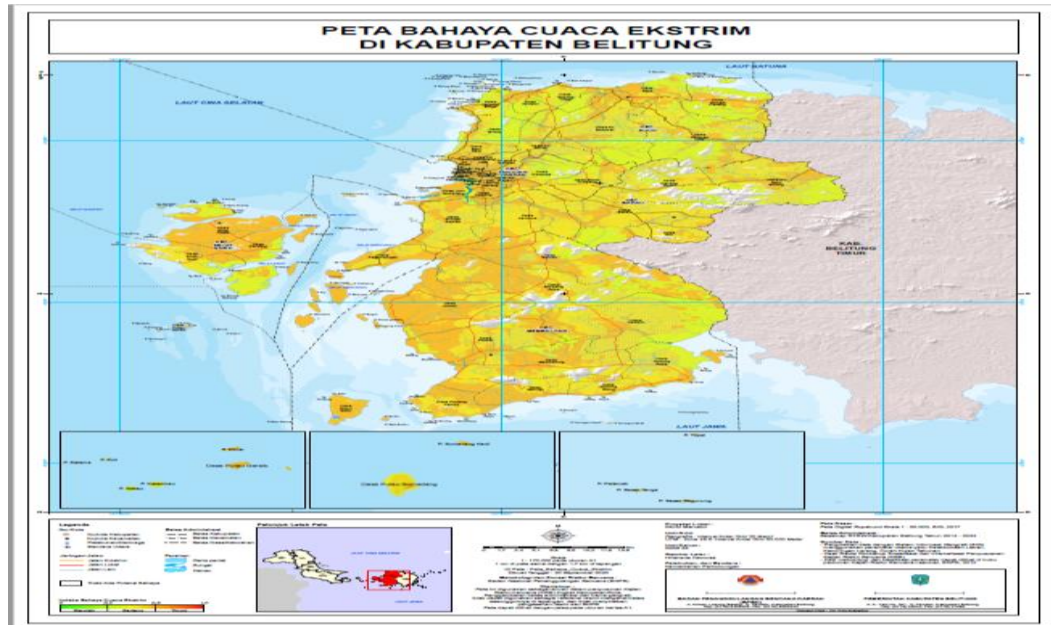
Gambar 2.8 Peta Bahaya Kekeringan

Tabel 2.9 di atas menunjukkan hasil kajian bahaya di Kabupaten Belitung untuk bencana kekeringan berada di kelas sedang dengan total luas wilayah terdampak yaitu 219.944,00 Ha. Total potensi luas bahaya kekeringan Kabupaten Belitung diperoleh berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya dari seluruh kecamatan berpotensi kekeringan di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.10 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Badau	40.649	Sedang
2	Membalong	83.001	Sedang
3	Selat Nasik	11.075	Sedang
4	Sijuk	34.876	Sedang
5	Tanjungpandan	11.281	Sedang
	Kabupaten Belitung	180.881,60	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

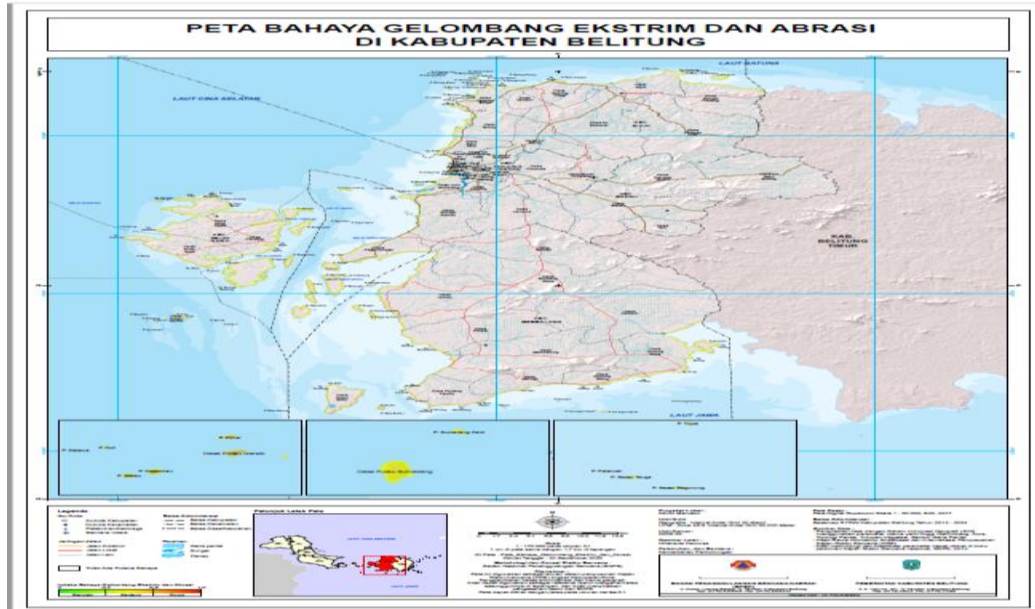
Gambar 2.9 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim

Tabel 2.10 di atas menunjukkan hasil kajian bahaya di Kabupaten Belitung untuk bencana cuaca ekstrim berada di kelas sedang dengan total luas wilayah terdampak yaitu 180.881,60 Ha. Total potensi luas bahaya cuaca ekstrim Kabupaten Belitung diperoleh berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya dari seluruh kecamatan berpotensi cuaca ekstrim di kabupaten Belitung, sedangkan kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan berdasarkan kelas bahaya maksimal dari seluruh kecamatan terdampak bencana cuaca ekstrim.

Tabel 2.11 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Badau	1.098,72	Sedang
2	Membalong	3.420,45	Sedang
3	Selat Nasik	3.551,94	Sedang
4	Sijuk	1.433,34	Sedang
5	Tanjungpandan	445,05	Sedang
	Kabupaten Belitung	9.948,50	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

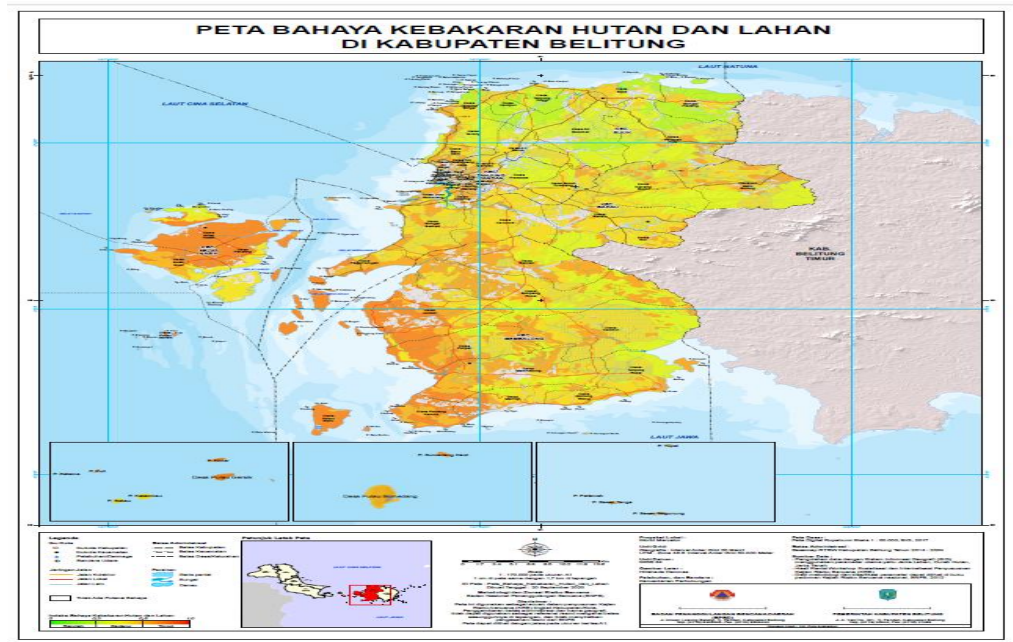
Gambar 2.10 Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Tabel 2.11 di atas menunjukkan hasil kajian bahaya di Kabupaten Belitung untuk bencana gelombang ekstrem dan abrasi berada dikelas sedang dengan total luas wilayah terdampak yaitu 9.949,50 Ha. Total potensi luas bahaya gelombang ekstrem dan abrasi Kabupaten Belitung diperoleh berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya dari seluruh kecamatan berpotensi gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.12 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Badau	43.620,85	Tinggi
2	Membalong	84.454,58	Tinggi
3	Selat Nasik	11.730,82	Tinggi
4	Sijuk	33.633,88	Sedang
5	Tanjungpandan	9.186,45	Tinggi
	Kabupaten Belitung	182.626,58	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

Gambar 2.11 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Tabel 2.12 di atas menunjukkan hasil kajian bahaya di Kabupaten Belitung untuk bencana kebakaran hutan dan lahan berada dikelas Tinggi dengan total luas wilayah terdampak yaitu 182.626,58 Ha. Total potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Belitung diperoleh berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya dari seluruh kecamatan berpotensi kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Belitung. Sementaraitukelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Belitung dikatakan sedang disebabkan karena dasar penentuan dengan melihat kelas bahaya maksimal seluruh kecamatan terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

2.1.3 Aspek Demografi

Salah satu komponen penyusun perencanaan pembangunan daerah adalah analisis kependudukan. Adapun proses perencanaan pembangunan itu sendiri mutlak memerlukan variabel demografi dan variabel pembangunan. Perubahan yang terjadi dalam jumlah, komposisi dan pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada berbagai aspek pembangunan yang selanjutnya akan mempengaruhi dinamika kependudukan. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menerbitkan data kependudukan nasional per semester.

Selanjutnya berdasarkan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tahun 2022, Kabupaten Belitung memiliki jumlah penduduk sebesar



185.591 jiwa. Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belitung masih mendominasi dan lebih tinggi daripada perempuan. Namun demikian perbedaannya tidak terlalu besar, hanya selisih 1,47 persen dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 94.225 jiwa (50,77%) dan penduduk perempuan sebesar 91.366 jiwa (49,23%). Selain itu nilai *sex ratio* total penduduk Kabupaten Belitung adalah sebesar 103,16. Berikut data penduduk Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No (1)	Uraian (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)
1	Jumlah Penduduk	169,053	173,717	177.472	181.735	185.591
2	Komposisi menurut Jenis Kelamin:					
a.	Laki-laki	85,855	88,177	90,176	92.259	94.225
b.	Perempuan	83,198	85,540	87,296	89.476	91.366
3	Sex ratio	103.19	103.08	103.30	103,11	103,13
4	Pertumbuhan (%)	4.54	2.76	2.16	2,40	2,12
5	Tingkat kepadatan (km2)	73.70	75.74	77.37	79,23	80,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 dan selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2021, yaitu 2,40% dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 2,12%. Selain itu jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belitung lebih banyak daripada penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin/ *sex ratio* lebih dari 100 persen. Artinya terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Selain itu kepadatan penduduk di Kabupaten Belitung selalu mengalami peningkatan dalam rentang lima tahun terakhir dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,44 persen tiap tahunnya.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kabupaten Belitung dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor tingginya angka kelahiran yang disebabkan karena tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas/ kelahiran maupun mortalitas/ kematian penduduk Kabupaten Belitung dan faktor demografis yang menyebabkan tingginya arus migrasi yang masuk ke Kabupaten Belitung. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menimbulkan



risiko bagi munculnya berbagai persoalan sosial ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan tindak kriminal. Hal ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan hidup dari berbagai aspek.

Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2022 rata-rata mencapai 80,91 jiwa/ km² dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Tanjungpandan (279,30 jiwa/km²) dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Membalong (29,11 jiwa/km²). Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka Kecamatan Tanjungpandan termasuk dalam kategori “cukup padat” karena berada di kisaran 251 – 400 km². Sementara itu Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau dan Kecamatan Selat Nasik masuk dalam kategori “tidak padat” karena kurang dari 50 jiwa per km². Hanya Kecamatan Sijuk yang berada dalam kategori “ kurang padat” dengan kepadatan 77,50 jiwa per km².

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung

No	KECAMATAN	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Daerah (km ²)	Penduduk (jiwa)				Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
				Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio	
1	Tanjungpandan	16	378,45	53.290	52.409	105.699	101,68	279,30
2	Membalong	12	909,55	13.568	12.913	26.481	105,07	29,11
3	Selat Nasik	4	133,50	3.077	2.909	5.986	105,78	44,84
4	Sijuk	10	413,99	16.390	15.696	32.086	104,42	77,50
5	Badau	7	458,20	7.900	7.439	15.339	106,20	33,48
	Jumlah	49	2.293,69	94.225	91.366	185.591	103,13	80,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2022 (diolah)

Penduduk Kabupaten Belitung tersebar di 49 Desa/Kelurahan, kondisi persebaran penduduk di Kabupaten Belitung masih belum merata, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk disetiap kecamatan sangat bervariasi, hal ini disebabkan oleh penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah kecamatan yang berbeda-beda, namun permukiman penduduk terpadat terkonsentrasi di Tanjungpandan, Hal ini terjadi karena Tanjungpandan merupakan ibu kota Kabupaten dan merupakan pusat perdagangan, perhotelan, rumah makan/restoran dan juga pusat pendidikan.

Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Belitung adalah kecamatan Tanjungpandan sebesar 56,95%, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Belitung secara keseluruhan, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Selat Nasik sebesar 3,23%. Pada tabel 2.12 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk



perempuan di setiap kecamatan dengan rasio jenis kelamin antara 101,68 sampai 106,20. Adapun Kecamatan Selat Nasik berada di pulau tersendiri yang terpisah dari Pulau Belitung dan dengan luas wilayah yang juga tidak terlalu besar.

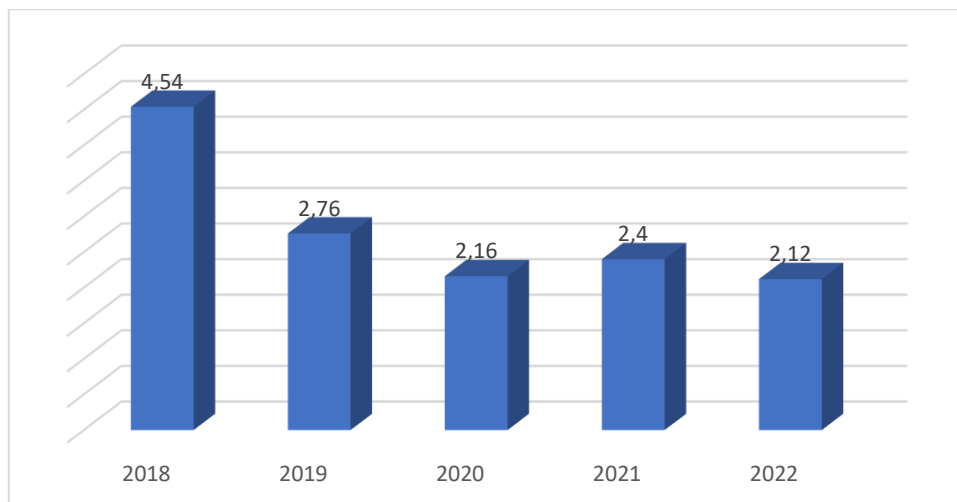
Distribusi pertumbuhan Penduduk kabupaten Belitung per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.15 Jumlah penduduk usia Distribusi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tanjungpandan	94,441	98,233	101,016	103.520	105.699
2.	Membalung	25,039	25,226	25,389	26.014	26.481
3.	Selat Nasik	6,004	5,911	5,973	5.974	5.986
4.	Sijuk	29,477	30,091	30,577	31.282	32.086
5.	Badau	14,092	14,256	14,517	14.945	15.339
	Jumlah	169,053	173,717	177.472	181.735	185.591

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2023

Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan tingkat penambahan penduduk di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kelahiran, tingkat kematian serta migrasi atau mobilitas.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2022 (diolah)

Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung

Grafik di atas menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung cenderung mengalami penurunan menjadi 2,76 dari tahun 2018 kecuali pada tahun 2021 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,4% dan kembali menurun di tahun 2022 sebesar 2,12%. Di tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung sempat mencapai 4,54%. Dengan angka



pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 2% selama periode 2018-2022, maka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung dapat dikategorikan “tinggi”.

Adapun komposisi penduduk Kabupaten Belitung sebagian besar didominasi oleh kelompok muda, tingkat kelahiran bayi yang tinggi, kelompok balita dan remaja masih sangat besar serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Gambaran dari karakteristik penduduk ini menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0-4	12.944	12.863	13.132	13.471	11.033
2	5-9	14.486	15.569	15.873	15.625	15.075
3	10-14	13.530	14.379	15.323	15.825	16.422
4	15-19	13.618	12.167	12.826	13.431	13.535
5	20-24	13.940	14.187	14.788	15.056	15.444
6	24-29	13.472	14.029	14.136	14.306	14.914
7	30-34	13.580	13.850	13.892	14.079	14.131
8	35-39	15.496	15.679	15.217	15.032	14.127
9	40-44	13.166	13.899	14.520	14.862	16.012
10	45-49	11.932	12.145	12.252	13.040	13.360
11	50-54	9.437	9.894	10.174	10.484	11.884
12	55-59	7.991	8.374	8.480	8.854	9.138
13	60-64	6.108	6.355	6.760	6.839	7.587
14	65-69	4.302	4.732	4.607	4.983	5.570
15	70-74	2.517	2.806	2.835	2.953	3.642
16	>75	2.534	2.789	2.657	2.895	3.717
	JUMLAH	169.053	173.717	177.472	181.735	185.591

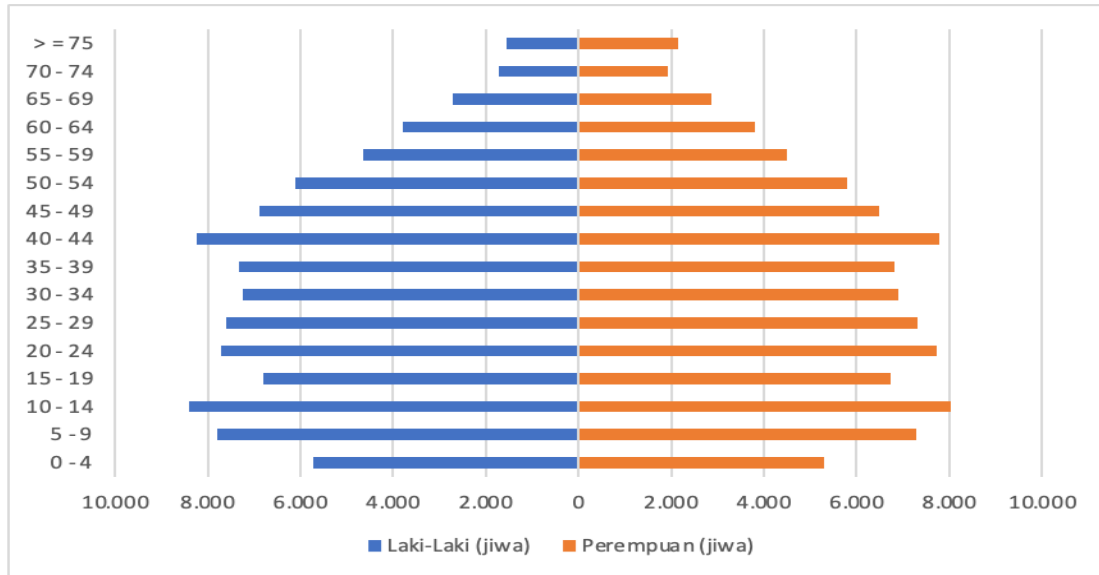
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas. Kabupaten Belitung memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja segala sektor. Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan usianya pada tahun 2022 proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,11%. usia muda (0-14 tahun) ada 22,92%. dan usia lanjut (65 tahun keatas) sebesar 6,97%.



Apabila ditinjau dari piramida penduduk. Kabupaten Belitung memiliki bentuk yang cenderung rata mulai dari kelompok usia 44 tahun ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya peralihan struktur penduduk kabupaten Belitung di mana tingkat kelahiran mulai menurun walau cenderung melambat.

Gambar 2.13 Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2022 (diolah)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa penduduk berusia 10-14 tahun baik laki-laki maupun perempuan memiliki jumlah terbesar dari total penduduk atau 8,84%. Selain itu proporsi usia penduduk produktif mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia muda.

Meskipun sudah mengarah ke bentuk yang lebih stasioner, piramida penduduk Kabupaten Belitung tahun 2022 masih cenderung berbentuk lebar dibawah (ekspansif). sehingga dapat digolongkan sebagai piramida penduduk muda yang dapat diartikan bahwa penduduk usia produktif/ usia kerja dan usia muda masih mendominasi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung. Dominasi jenis kelamin laki-laki tampak pada hampir semua golongan umur kecuali pada kelompok usia tua atau >65 tahun yang menandakan bahwa perempuan cenderung hidup lebih panjang dibandingkan laki-laki di Kabupaten Belitung. Adapun cekungan pada kelompok usia 15-19 tahun mengindikasikan bahwa terdapat migrasi keluar daerah untuk menempuh pendidikan atau mencari pekerjaan. Dalam menyikapi hal tersebut hendaknya fokus dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong terbukanya lapangan kerja dalam pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Belitung.



Struktur penduduk juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Selama periode 2018-2022 terdapat peningkatan jumlah penduduk yang lulus sarjana. Selain itu terdapat penurunan penduduk yang memiliki ijazah Diploma I/II karena cenderung melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Belitung dengan ijazah tertinggi berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung kecuali untuk penduduk yang pendidikannya tidak/belum tamat SD dan Tamat SD/MI/Sederajat. sedangkan penduduk yang berijazah SLTP/MTs/Sederajat. SMU/MA/Sederajat dan perguruan tinggi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 sebagian besar masyarakat dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat yaitu sebesar 24,29%. SLTP/ sederajat sebesar 14,15% dan SLTA/ sederajat 20,36%. Jika dilihat dari tingkat pendidikan SLTA/ sederajat mengalami peningkatan hal ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Belitung semakin tinggi dan kesadaran penduduk untuk mengakses layanan pendidikan sudah baik.

Perbandingan persentase tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Belitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Data Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2018 – 2022

No	Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tidak/Belum Sekolah	29,685	31,174	33,110	33.995	34.832
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	26,942	28,913	29,875	30.470	30.301
3.	Tamat SD/Sederajat	44,089	44,225	43,986	44.637	45.088
4.	SLTP/Sederajat	24,809	25,250	25,379	25.863	26.264
5.	SLTA/Sederajat	33,485	34,543	35,175	36.323	37.787
6.	Diploma I/II	1,439	1,087	1,062	1.041	1.026
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	3,424	2,908	2,996	3.105	3.194
8.	Diploma IV/Strata I	5,009	5,433	5,692	6.094	6.567
9.	Strata II	169	181	194	204	229
10.	Strata III	2	3	3	3	3
	Jumlah	169,053	173,717	177,472	181.735	185.591

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Jumlah dan laju penduduk yang besar merupakan aset bagi pembangunan apabila jika diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Penduduk yang besar dengan tingkat SDM yang rendah hanya akan menjadi beban



bagi pembangunan disuatu wilayah. Oleh sebab itu, penanganan masalah penduduk sebaiknya tidak hanya diarahkan pada upaya penekanan laju pertumbuhannya akan tetapi lebih dititik beratkan pada peningkatan sumber daya manusianya. Usaha peningkatan sumber daya manusia secara sistemik dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir yang ingin dicapai daerah dari pelaksanaan keseluruhan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, pembahasan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat terbagi kedalam 3 fokus pembahasan, yaitu 1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; 2) kesejahteraan sosial; dan 3) seni budaya dan olah raga. Gambaran tingkat keberhasilan berikut capaian indikator dari masing-masing fokus kesejahteraan tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dapat diukur dan digambarkan melalui capaian beberapa indikator ekonomi makro daerah seperti perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Mengacu kepada capaian indikator ekonomi makro yang dicapai daerah tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat berada dalam kategori baik.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berguna untuk melihat struktur perekonomian, sehingga akan tergambar sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian wilayah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan aktivitas ekonomi dan produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000, melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar ini mengadopsi rekomendasi



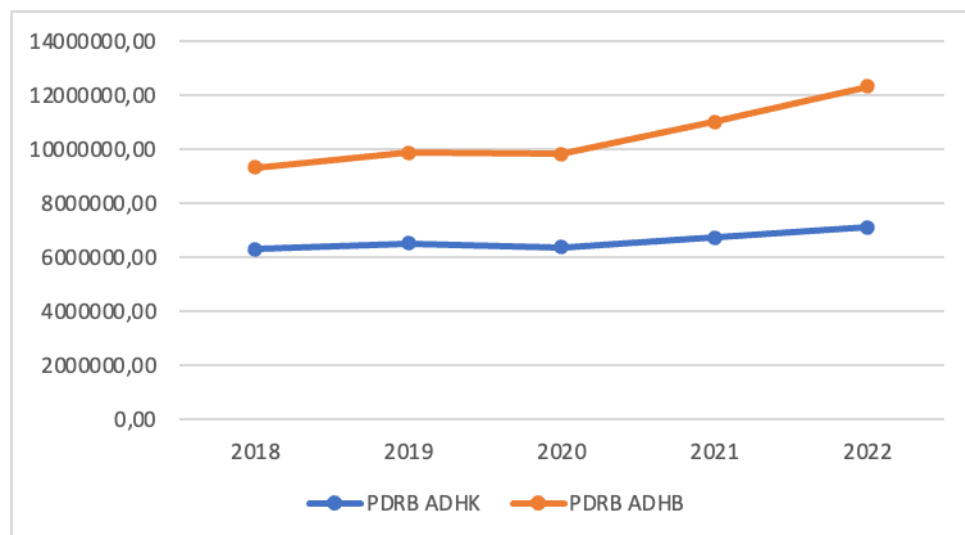
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Implikasi perubahan ini, salah satunya adalah berubahnya struktur ekonomi yang semula hanya 9 (sembilan) sektor ekonomi menjadi 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 besaran PDRB ADHB bersifat fluktuatif, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Demikian halnya dengan PDRB ADHK, juga mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Berikut adalah tabel dan diagram besaran PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.18 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2022
(dalam juta)

Tahun	PDRB ADHB	Pertumbuhan (%)	PDRB ADHK	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	9.318.341,50	6,64	6.290.362,90	5,38
2019	9.856.802,00	5,78	6.502.017,00	3,33
2020	9.826.821,00	-0,30	6.352.859,00	-2,27
2021	11.011.042,00	12,05	6.710.007,00	5,62
2022	12.322.373,00	11,91	7.093.355,00	5,71

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023

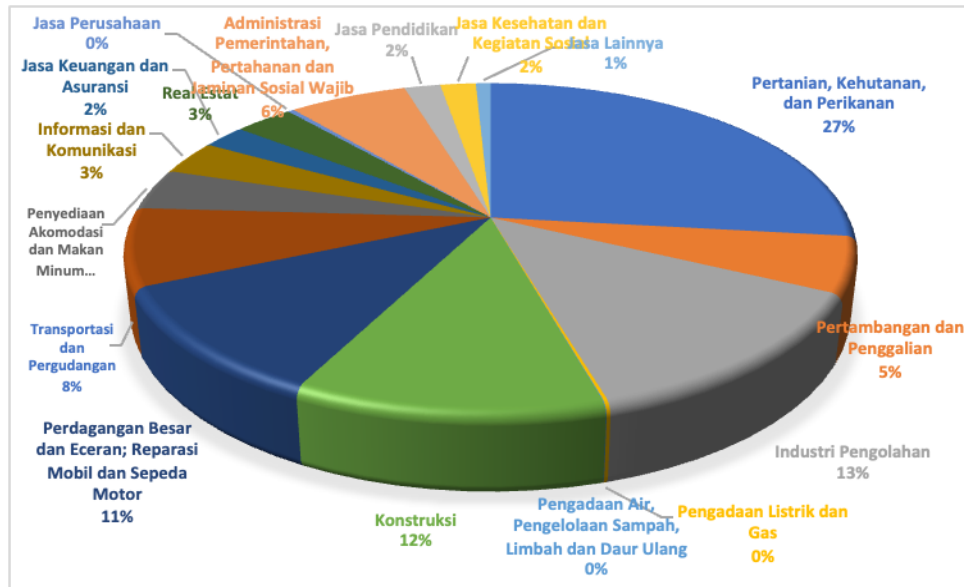
Gambar 2.14 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2022
(dalam juta)



Berdasarkan tabel dan diagram di atas terlihat nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku trend lima tahun terakhir cenderung naik, pada tahun 2018 sebesar Rp. 9,3 triliun kemudian pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 9,8 triliun, pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19 pertumbuhan PDRB ADHB mengalami kontraksi sedalam -0,30 dan beranjak pulih kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 11 triliun dan meningkat kembali di tahun terakhir 2022 menjadi Rp 12,3 triliun.

Besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan mempunyai trend yang sama dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 6,29 triliun meningkat menjadi Rp. 6,50 triliun pada tahun 2019, kemudian turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 6,35 triliun terjadi kontraksi sedalam -2,27. Perlambatan tersebut secara umum juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nasional bahkan global. Adanya pandemi Covid-19 memberi dampak pada buruknya pertumbuhan ekonomi global, karena terhentinya banyak aktivitas ekonomi di seluruh dunia akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ekonomi Kabupaten Belitung mulai pulih kembali pada tahun 2021 ditunjukkan dengan melonjaknya pertumbuhan ekonomi pada tersebut yaitu Rp. 6,71 triliun kemudian meningkat sebanyak 5,71% pada tahun 2022 menjadi Rp. 7,09 triliun. Akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga (*booster*), serta konsisten dalam penerapan protokol kesehatan juga terus ditingkatkan. Hal ini menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi selanjutnya yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan mereka.

Berdasarkan strukturnya, kategori yang menjadi *leading sector* dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 26,82%. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung tahun 2018-2022 adalah kategori Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata sebesar 13,27%. Kontribusi terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Belitung adalah kategori Konstruksi dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,77%. Tingginya kontribusi kategori industri pengolahan didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan setengah jadi Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut tetap dominan dan memberikan kontribusi tertinggi. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung yang salah satu prioritasnya adalah pada sektor perikanan. Berikut adalah diagram *pie* kontribusi sektor pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Belitung Tahun Tahun 2022.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023

Gambar 2.15 Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Belitung Tahun 2023

Nilai dan kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – 2022 (dalam juta Rupiah) dijabarkan secara lebih detail dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.19 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018 – 2022 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.357.881,8	25,31	2.464.903,6	25,01	2.726.088,1	27,74	3.107.489,20	28,22	3.305.338,8	26,82
B	Pertambangan dan Penggalian	677.476,3	7,27	650.443,0	6,60	588.015,6	5,98	684.175,60	6,21	674.096,0	5,47
C	Industri Pengolahan	1.156.306,7	12,41	1.124.620,8	11,41	1.173.040,8	11,94	1.357.644,00	12,33	1.634.751,8	13,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.328,2	0,19	17.538,0	0,18	17.511,9	0,18	18.943,30	0,17	18.446,4	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.701,4	0,03	2.826,7	0,03	3.101,6	0,03	3.303,50	0,03	3.476,3	0,03
F	Konstruksi	1.163.773,4	12,49	1.315.344,4	13,34	1.271.878,6	12,94	1.386.187,20	12,59	1.443.940,3	11,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.068.459,3	11,47	1.107.314,7	11,23	1.017.022,8	10,35	1.125.732,90	10,22	1.339.962,0	10,87
H	Transportasi dan Pergudangan	638.907,2	6,86	689.589,3	7,00	521.903,5	5,31	591.341,60	5,37	938.900,2	7,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	324.286,9	3,48	377.583,8	3,83	368.570,4	3,75	418.455,80	3,80	496.121,3	4,03
J	Informasi dan Komunikasi	247.501,7	2,66	289.154,1	2,93	333.918,1	3,40	364.657,60	3,31	411.566,3	3,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	215.035,5	2,31	232.851,1	2,36	214.243,2	2,18	246.130,70	2,24	284.787,6	2,31
L	Real Estat	297.883,3	3,20	317.403,3	3,22	336.798,3	3,43	357.403,80	3,25	385.185,9	3,13
M, N	Jasa Perusahaan	32.370,5	0,35	35.848,7	0,36	30.501,5	0,31	33.340,80	0,30	40.877,4	0,33



Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	678.565,6	7,28	745.726,4	7,57	738.552,0	7,52	783.765,60	7,12	777.997,5	6,31
P	Jasa Pendidikan	192.862,8	2,07	210.576,5	2,14	213.470,3	2,17	225.511,40	2,05	236.523,6	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164.412,2	1,77	185.855,0	1,89	190.750,1	1,94	220.943,10	2,01	232.994,1	1,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya	78.872,2	0,85	89.223,0	0,91	81.454,0	0,83	86.016,00	0,78	97.410,1	0,79
		9.314.625,04	100	9.856.802,4	100	9.826.820,80	100	11.011.041,90	100	12.322.374,6	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023



Tabel 2.20 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2022 seri Tahun Dasar 2010 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.613.150,6	25,64	1.657.637,3	25,50	1.781.709,2	28,05	1.855.831,1	27,66	1.859.482,1	26,21
B	Pertambangan dan Penggalian	545.532,1	8,67	546.868,1	8,41	484.231,1	7,62	508.719,3	7,58	504.005,4	7,11
C	Industri Pengolahan	783.618,4	12,46	733.657,0	11,29	734.688,3	11,56	770.095,5	11,48	839.826,8	11,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.920,9	0,16	9.817,1	0,15	9.724,6	0,15	10.549,0	0,16	10.124,2	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.817,10	0,03	1.890,4	0,03	2.053,5	0,03	2.163,5	0,03	2.266,0	0,03
F	Konstruksi	768.351,2	12,21	832.641,8	12,81	798.606,4	12,57	839.436,6	12,51	832.058,8	11,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	709.691,3	11,28	726.347,9	11,17	661.396,8	10,41	700.944,3	10,45	798.570,1	11,26
H	Transportasi dan Pergudangan	394.613,2	6,27	399.198,9	6,14	316.707,3	4,99	343.384,5	5,12	467.912,2	6,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	212.127,8	3,37	231.508,7	3,56	206.872,0	3,26	229.162,1	3,42	261.608,9	3,69
J	Informasi dan Komunikasi	211.486,0	3,36	244.714,1	3,76	285.403,8	4,49	308.692,7	4,60	341.061,4	4,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	144.585,1	2,30	154.133,7	2,37	142.334,2	2,24	155.015,8	2,31	164.358,3	2,32
L	Real Estat	202.642,3	3,22	208.538,5	3,21	211.003,3	3,32	221.950,9	3,31	234.106,4	3,30
M, N	Jasa Perusahaan	21.363,7	0,34	21.955,1	0,34	17.505,1	0,28	18.468,5	0,28	22.588,7	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	383.667,8	6,10	418.570,0	6,44	398.269,0	6,27	420.650,5	6,27	416.640,9	5,87



Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
P	Jasa Pendidikan	119.591,1	1,90	129.019,4	1,98	124.854,1	1,97	127.957,4	1,91	131.686,3	1,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118.908,9	1,89	130.008,4	2,00	131.366,6	2,07	148.830,7	2,22	153.016,2	2,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	49.295,8	0,78	53.910,8	0,83	46.133,3	0,73	48.156,3	0,72	54.043,0	0,76
	TOTAL	6.290.363,3	100	6.500.417,2	100	6.352.858,6	100	6.710.006,7	100	7.093.355,3	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023



Berdasarkan tabel nilai dan kontribusi PDRB ADHK di atas, terlihat bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang kontribusinya berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata kontribusi sebesar 26,61%. Kontribusi terbesar kedua berasal dari kategori Konstruksi dan kontribusi terbesar ketiga berasal dari kategori Industri Pengolahan. Jika melihat perkembangan PDRB ADHK sebagaimana dijabarkan pada tabel di atas terlihat terjadinya perlambatan di beberapa sektor. Perlambatan perkembangan tersebut diakibatkan pasca penyebaran pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas perekonomian secara global, karena adanya kebijakan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tapi beberapa sektor tersebut mulai pulih kembali pada tahun 2021 dan mulai meningkat di tahun 2022.

Beberapa kategori yang mengalami perlambatan, antara lain kategori pertambangan dan penggalian dari 8,67% pada tahun 2018 menjadi 7,11% tahun 2022. Kategori industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 12,46% pada tahun 2018 menjadi 11,84% pada tahun 2022. Demikian juga kategori konstruksi yang berkontribusi sebesar 12,21% pada tahun 2018 menjadi 11,26% pada tahun 2022. Sedangkan beberapa kategori lainnya berkontribusi di bawah 5%. Adanya perlambatan kontribusi PDRB ADHK pada beberapa kategori tersebut di atas menandakan bahwa terjadi perlambatan aktivitas ekonomi pada kategori tersebut, yang juga berarti lambatnya jumlah produksi pada kategori tersebut.

Di sisi lain, meski aktivitas ekonomi di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami perlambatan, tapi kontribusi terbesar dari sektor ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas ekonomi lapangan usaha lainnya. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa aktivitas Sektor pertambangan dan penggalian juga masih berkontribusi cukup besar, walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2018 sebesar 8,67% menjadi 7,11% pada tahun 2022. Mengingat sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak *sustainable*, maka perlu dipikirkan strategi-strategi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya sebagai sektor utama untuk meningkatkan kontribusi PDRB ADHK.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja perekonomian daerah tersebut. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terlihat pertumbuhan kategori pembentuk PDRB tumbuh secara bervariasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.21 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018- 2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,08	2,73	7,48	4,16	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian	0,91	0,24	-11,45	5,06	-0,93
C	Industri Pengolahan	6,11	-6,38	0,14	4,82	9,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,61	4,03	-0,94	8,47	-4,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,50	8,37	8,65	5,31	4,76
F	Konstruksi	12,50	8,37	-4,09	5,11	-0,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,50	2,35	-8,94	5,98	13,93
H	Transportasi dan Pergudangan	8,10	1,16	-20,66	8,42	36,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,46	9,14	-10,64	10,77	14,16
J	Informasi dan Komunikasi	13,45	15,71	16,63	8,16	10,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,74	6,60	-7,66	8,91	6,03
L	Real Estat	4,47	2,91	1,18	5,19	5,48
M, N	Jasa Perusahaan	3,24	2,77	-20,27	5,51	22,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	5,04	9,10	-4,85	5,62	-0,95
P	Jasa Pendidikan	4,96	7,88	-3,23	2,49	2,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,06	9,33	1,05	13,29	2,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,10	9,36	-14,43	4,39	12,22
	Laju Pertumbuhan	5,38	3,33	-2,27	5,62	5,71

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023

Berdasarkan penjabaran pada tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mulai bangkit dan pulih namun pada beberapa sektor yang mengalami perlambatan yaitu pada kategori Industri Pengolahan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini disebabkan mulai pulihnya sektor-sektor perekonomian yang sempat berkontraksi pada saat terjadinya pandemi Covid-19 yang sempat



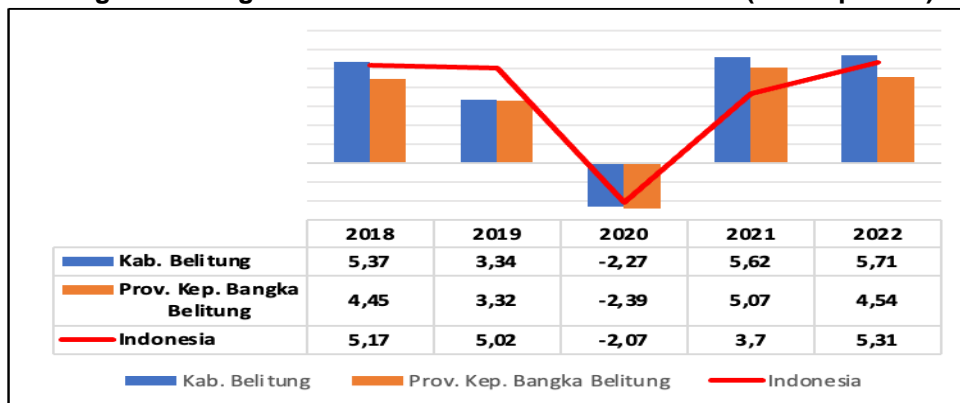
melumpuhkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Belitung karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga banyak aktivitas perekonomian yang dilakukan secara *daring*.

Di sisi lain, beberapa kategori yang sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan di era pandemi, yaitu kategori Informasi dan Komunikasi yang sempat tumbuh menjadi 16,64% pada tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi 10,49% pada tahun 2022, hal ini seiring dengan mulai normalnya aktivitas perekonomian secara *luring*. Secara umum pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung mulai bangkit dan pulih kembali, terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan hingga mencapai 5,71%. Akselerasi pemulihan ekonomi tersebut merupakan dampak dari akselerasi pelaksanaan vaksinasi *booster* dan disiplin pengendalian pandemi, serta adanya respon kebijakan ekonomi yang tepat, akomodatif dan terukur. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk kembali meningkatkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat dengan terus menggiatkan kembali promosi pada sektor-sektor pembangunan, khususnya sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan daya ungkit bagi sektor lapangan usaha lainnya.

Berikut adalah grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional.

Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-Tahun 2022 (dalam persen)



Sumber : BPS, 2023



Dari grafik di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Belitung pada tahun 2022 konsisten mengalami pulih pasca Covid sejak tahun 2021 sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional masih fluktuatif dan mengalami penurunan di tahun 2022. Di Kabupaten Belitung pada sektor produksi utama meliputi tujuh belas sektor dengan empat sektor penyumbang perekonomian terbesar, yakni sektor Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

b. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai alat ukur. Secara umum, kinerja tersebut diukur dengan besaran PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Kenaikan PDRB per kapita mengindikasikan bahwa perekonomian berkembang ke arah yang baik dan terjadi peningkatan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Namun, peningkatan PDRB per kapita tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung, menunjukkan adanya peningkatan PDRB per kapita setiap tahunnya. Berikut adalah tabel dan grafik yang menggambarkan tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten Belitung tahun 2017 hingga tahun 2021.

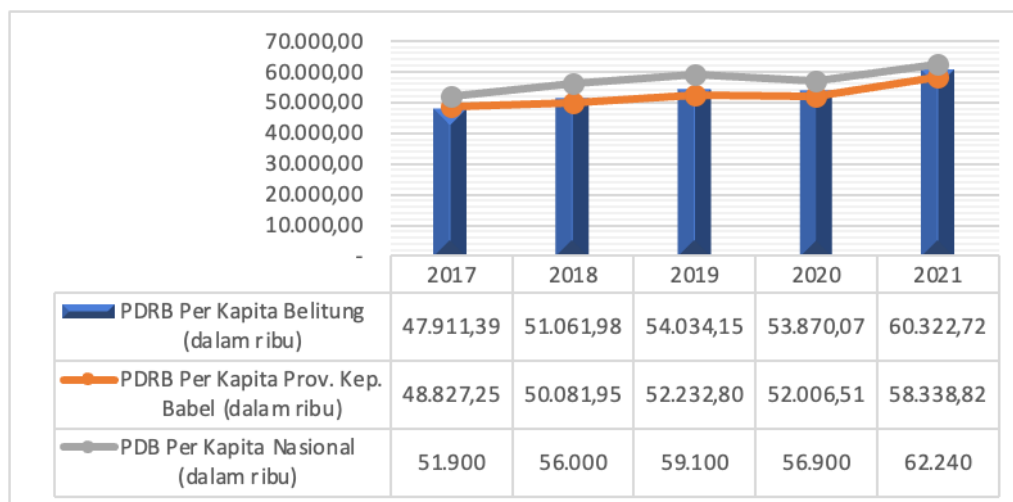
Tabel 2.22 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Tahun 2017 – Tahun 2021 (dalam ribu rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.556	12.926	13.512	14.968	16.996
B	Pertambangan dan Penggalian	3.826	3.714	3.566	3.202	3.751
C	Industri Pengolahan	5.869	6.339	6.165	6.428	7.443
D	Pengadaan Listrik dan Gas	87	95	96	96	105
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15	15	16	17	18
F	Konstruksi	5.350	6.380	7.211	6.972	7.607
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.491	5.857	6.070	5.576	6.171



Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	3.218	3.502	3.780	2.861	3.234
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.620	1.778	2.070	2.021	2.294
J	Informasi dan Komunikasi	1.219	1.357	1.585	1.831	1.999
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.088	1.179	1.277	1.175	1.349
L	Real Estat	1.547	1.633	1.740	1.846	1.959
M, N	Jasa Perusahaan	161	178	197	167	183
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	3.605	3.720	4.088	4.049	4.297
3.929	Jasa Pendidikan	1.008	1.057	1.154	1.170	1.236
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	853	901	1.019	1.046	1.211
R,S,T,U	Jasa Lainnya	400	432	489	447	471
	PDRB Per Kapita	47.911	51.062	54.034	53.870	60.323

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022 (diolah)

Gambar 2.17 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021 (dalam ribu rupiah)

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa PDRB per kapita penduduk Kabupaten Belitung terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 44.911.390,- hingga tahun 2021 sebesar Rp. 60.322.720,- meski mengalami kontraksi pada tahun 2020 menjadi Rp. 53.870.070,- pada tahun 2020 dengan pertumbuhan minus 0,30%. Rata-rata peningkatan PDRB per kapita di Kabupaten Belitung adalah



9,61% per tahun. Penurunan PDRB per kapita tersebut akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, pada tahun 2021 PDRB per kapita menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan bangkitnya perekonomian baik di Kabupaten Belitung, Provinsi maupun tingkat nasional.

c. Indeks Spesialisasi

Dalam pengembangan ekonomi wilayah atau pembangunan daerah, ada berbagai indikator dan beragam analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Pembangunan ekonomi seyogyanya dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada dalam daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai beragam sektor unggulan yang ada pada suatu daerah, untuk menyusun rencana pembangunan daerah kedepannya.

Analisis Indeks Spesialisasi (SI) merupakan salah satu cara untuk mengukur perilaku dinamika kegiatan ekonomi secara keseluruhan untuk menganalisis tingkat konsentrasi sektor kegiatan secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (provinsi). Berikut adalah tabel Indeks Spesialisasi Kabupaten Belitung.

Tabel 2.23 Indeks Spesialisasi (Specialization Index) Kabupaten Belitung

Kategori	Uraian	SI 2018	SI 2019	SI 2020	SI 2021	SI 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,036	0,036	0,039	0,041	0,037
B	Pertambangan dan Penggalian	0,020	0,019	0,019	0,020	0,020
C	Industri Pengolahan	0,051	0,054	0,049	0,050	0,049
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
F	Konstruksi	0,018	0,020	0,018	0,018	0,017
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,015	0,015	0,017	0,017	0,017
H	Transportasi dan Pergudangan	0,012	0,012	0,009	0,009	0,013
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,005	0,006	0,004	0,004	0,005
J	Informasi dan Komunikasi	0,006	0,007	0,009	0,009	0,009
0.003K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,002	0,003	0,002	0,003	0,003
L0.000	Real Estat	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001



Kategori	Uraian	SI 2018	SI 2019	SI 2020	SI 2021	SI 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
M, N	Jasa Perusahaan	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002
P	Jasa Pendidikan	0,003	0,004	0,003	0,003	0,003
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Nilai SI	0,176	0,182	0,177	0,182	0,181

Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Skala interval nilai Indeks Spesialisasi antara 0 -100, atau pada skala maksimal 1, maka nilai spesialisasi antara 0 sampai dengan 1. Oleh karena itu, apabila nilai SI = 0 atau mendekati 0, maka tidak terjadi konsentrasi sektor i di suatu kabupaten, jika dibandingkan dengan tingkat provinsinya. Begitupun sebaliknya apabila nilai SI = 1 atau mendekati 1, maka disimpulkan terjadi konsentrasi pada sektor tersebut.

Berdasarkan data hasil analisis di atas, nilai SI disetiap sektor cenderung mendekati 0 bahkan beberapa sektor = 0 dan total nilai SI hanya sebesar 0,181 pada tahun 2022, yang berarti juga mendekati 0. Ada 2 (dua) sektor yang mempunyai nilai SI relatif lebih besar dibanding sektor lainnya, yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan nilai SI 0,049 dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai SI 0,037.

Dari hasil analisis di atas bisa diinterpretasi atau disimpulkan bahwa masih belum terjadi fokus pembangunan yang terkonsentrasi pada sektor tertentu di Kabupaten Belitung. Walaupun analisis SI ini masih bersifat sangat makro, namun bisa menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan kedepan supaya dapat lebih fokus berdasarkan potensi daerah yang dimiliki.

d. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ merupakan suatu metode analisis yang sederhana, namun cukup bermanfaat untuk mengidentifikasi sektor basis dari suatu daerah. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang merupakan sektor basis suatu daerah yang mampu mengekspor (ke luar daerah maupun ke luar negeri) sehingga dapat meningkatkan perekonomian wilayah. Dengan mengetahui sektor basis tersebut, maka pemerintah daerah bisa menjadikan



informasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah ke depannya. Berikut adalah tabel Location Quotient Kabupaten Belitung.

Tabel 2.24 Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Belitung

Kategori	Uraian	LQ 2018	LQ 2019	LQ 2020	LQ 2021	LQ 2022	Rata-rata LQ	Ket.
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)		(8)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,40	1,39	1,39	1,42	1,39	1,40	Sektor basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,68	0,68	0,67	0,65	0,63	0,66	Sektor non basis
C	Industri Pengolahan	0,55	0,51	0,54	0,54	0,55	0,54	Sektor non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,67	1,55	1,46	1,43	1,40	1,50	Sektor basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,72	1,70	1,75	1,75	1,74	1,73	Sektor basis
F	Konstruksi	1,42	1,44	1,41	1,41	1,40	1,42	Sektor basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,79	0,80	0,76	0,76	0,77	0,77	Sektor non basis
H	Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,60	1,52	1,51	1,68	1,59	Sektor basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,47	1,46	1,34	1,34	1,37	1,39	Sektor basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,57	1,61	1,64	1,62	1,61	1,61	Sektor basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,28	1,29	1,28	1,31	1,30	1,29	Sektor basis
L	Real Estat	0,99	1,00	0,97	0,95	0,94	0,97	Sektor non basis
M, N	Jasa Perusahaan	1,30	1,32	1,22	1,21	1,32	1,28	Sektor basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	1,12	1,13	1,11	1,11	1,09	1,11	Sektor basis
P	Jasa Pendidikan	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,76	Sektor non basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,57	1,55	1,55	1,53	1,52	1,54	Sektor basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,07	1,06	0,98	0,98	1,00	1,02	Sektor basis

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Interpretasi nilai LQ terhadap suatu sektor dilihat dari seberapa besar nilai hasil analisis LQ. Semakin tinggi nilai LQ, maka semakin tinggi *comparative*



advantage suatu daerah dalam mengembangkan sektor tersebut. Dilihat dari hasil analisis pada tabel di atas, terlihat bahwa ada 12 (dua belas) sektor di Kabupaten Belitung yang menjadi sektor basis untuk dapat dikembangkan. Konsentrasi pengembangan pada sektor basis diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, karena sektor-sektor basis tersebut mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah Kabupaten Belitung. Berikut akan ditampilkan tabel mengenai standar interpretasi Analisis LQ.

Tabel 2.25 Interpretasi Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Nilai LQ	Sektor Basis/Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
LQ>1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ<1	Sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terpesialisasi	Non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar negeri
LQ=1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama dengan wilayah acuan	Non eksport, hanya mampu melayani pasar dalam wilayah

Sumber : Muta'ali, 2015

e. Laju Inflasi

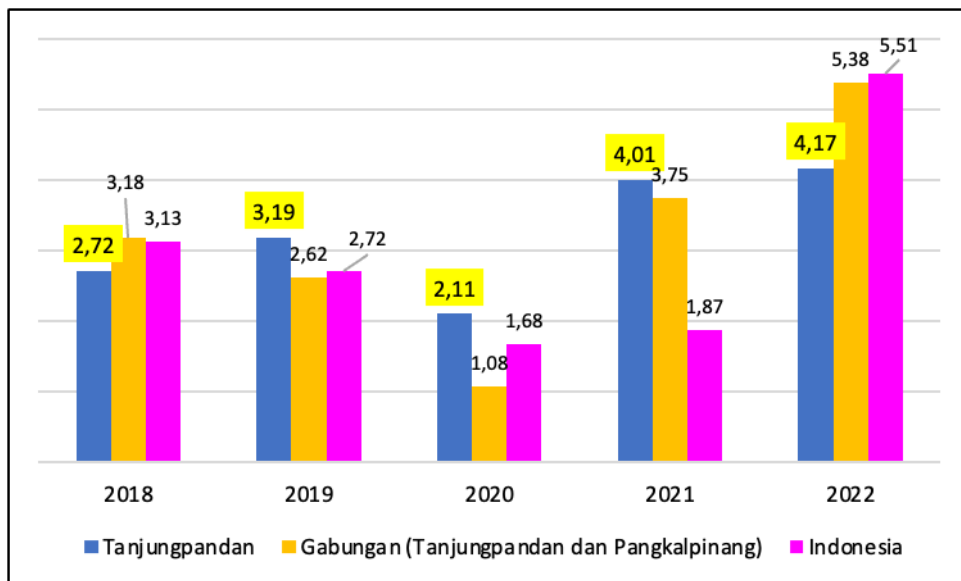
Sebagaimana dilansir dari laman BPS bahwa inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Adapun deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dampak perekonomian secara luas akan dirasakan bila penyumbang inflasi adalah kebutuhan yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Pengukuran Inflasi menggunakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*) dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu yang dihitung setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik terhadap 82 kota di Indonesia. Laju inflasi dan perubahan IHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi dua kota, yaitu Tanjungpandan dan Pangkalpinang.

Sejak Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018 = 100 dan terdapat beberapa perubahan mendasar, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Perubahan pengelompokan komoditas



didasarkan pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) 2018, dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012 = 100) yang semula 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018 = 100).

Selama periode 2018-2022, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi yang berfluktuasi tiap tahunnya meski masih di atas 2%. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021 dimana laju inflasi dari semula 2,72% menjadi 4,01% yang merupakan inflasi tertinggi se-Sumatera. Selanjutnya pada tahun 2022 laju inflasi melonjak hingga menjadi sebesar 4,17 persen. Angka ini masih jauh dibawah 10%, sehingga dikategorikan inflasi 'ringan' yang berarti inflasi tersebut masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi daerah. Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir memang telah memberi dampak pada seluruh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah melalui mekanisme kombinasi guncangan penawaran dan permintaan yang menyebabkan penurunan kegiatan produktif, dan pengurangan pendapatan. Secara bertahap keluarga kehilangan penghasilan dan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi rumah tangga. (Bappenas, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.18 Inflasi Tanjungpandan, Gabungan Dua Kota (Pangkalpinang dan Tanjungpandan) dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan data dan informasi yang disajikan pada Gambar 2.23 terlihat bahwa pada tahun 2018 dan 2022 laju inflasi Kota Tanjungpandan berada di bawah laju inflasi nasional dan laju inflasi gabungan dua kota



(Pangkalpinang dan Tanjungpandan). Selain itu rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Tanjungpandan masih cukup stabil, yaitu 3,24%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Tabel 2.26 Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Selama Tahun 2015-2019

No.	Kelompok Pengeluaran (COICOP 1999)	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bahan Makanan	-1,36	2,26	0,37	-0,39	1,60
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,88	2,01	1,36	0,73	0,44
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,66	0,17	1,42	0,81	0,40
4	Sandang	0,08	0,15	0,16	0,30	0,17
5	Kesehatan	0,16	0,10	0,27	0,20	0,09
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,41	0,18	0,19	0,31	0,43
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,05	0,05	0,20	0,76	0,06
	Umum	0,88	4,92	3,97	2,72	3,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung, Tahun 2022



Tabel 2.27 Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2020-2022

No	Kelompok Pengeluaran (COICOP 2018)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Umum	2,110	4,010	4,170
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,611	2,718	-0,335
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,036	0,003	0,056
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,116	0,307	0,578
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,073	0,058	0,058
5	Kesehatan	0,017	0,037	-0,004
6	Transportasi	-0,268	0,276	2,612
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,014	-0,028	-0,053
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,009	0,005	0,094
9	Pendidikan	0,014	0,029	0,063
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,304	0,425	0,875
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,211	0,182	0,208

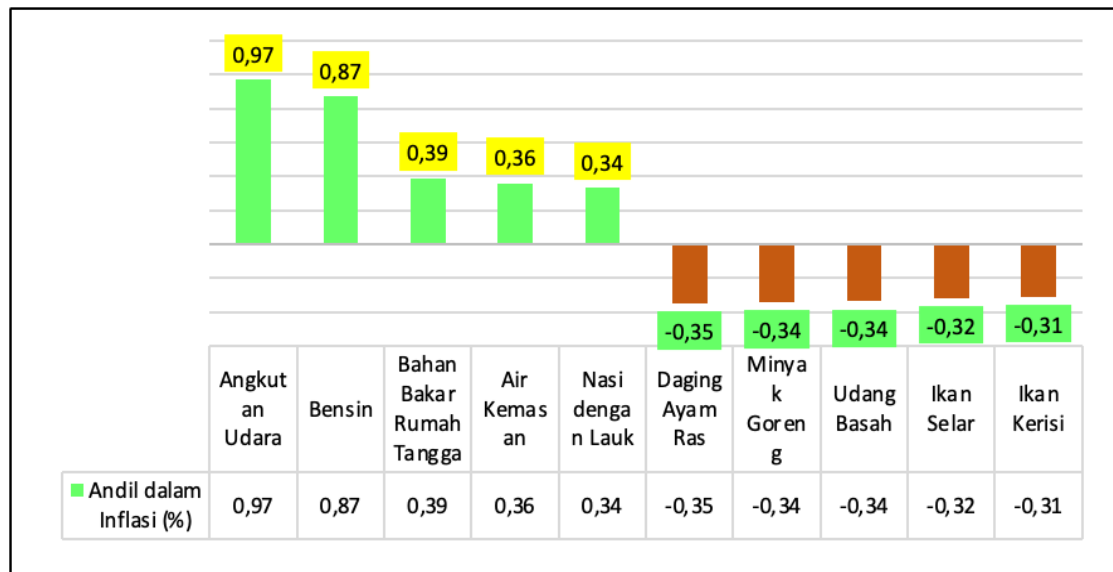
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Kelompok Transportasi merupakan penyumbang andil terbesar terhadap inflasi (*year-on-year/y-o-y*) di Tanjungpandan pada tahun 2022. Kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami kenaikan adalah Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Adapun pada kelompok Bahan Makanan atau *volatile food* justru mengalami deflasi. Demikian juga dengan kelompok Kesehatan dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Beberapa komoditas yang sangat dominan menyumbang inflasi selama tahun 2022 diantaranya adalah angkutan udara, bensin dan bahan bakar rumah tangga.

Selama tahun 2022, inflasi *y-on-y* tertinggi pada Juli 2022 yang mencapai 7,57 persen, sementara terendah pada Februari 2022 sebesar 1,07 persen. Inflasi yang tinggi ini disebabkan oleh pergerakan harga yang cukup tinggi di bulan Juli 2022 karena bertepatan dengan liburan sekolah dan tahun ajaran baru, serta mulai berjalannya kegiatan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Selain itu inflasi menjelang akhir tahun juga dipengaruhi oleh



dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022 lalu.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung, Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.19 Lima Komoditas Terbesar Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2022 (Persen)

Pasca Pandemi COVID-19 pola belanja masyarakat mulai berangsur normal. Perubahan konsumsi masyarakat terjadi pada kebutuhan sekunder dan tersier. Namun, konsumsi kebutuhan primer masih relatif terjaga Tahun 2022 juga lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi disertai akselerasi vaksinasi COVID-19 melalui pemberian dosis ketiga (*booster*) dan *booster* kedua untuk masyarakat. Keberhasilan pengendalian pandemi pasca penyebaran varian Delta pada pertengahan tahun 2021 oleh pemerintah bersama seluruh *stakeholders*, telah mampu mendorong keyakinan masyarakat untuk beraktivitas dan dunia usaha untuk berekspansi, khususnya di Kabupaten Belitung. dan menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi karena ekspektasi mereka terhadap situasi ekonomi yang lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebenarnya besaran inflasi akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat bergantung pada komponen penyebab inflasi itu sendiri. Jika komponen penyumbang inflasi tidak banyak terkait dengan hajat hidup sebagian besar penduduk, maka tidak perlu dikhawatirkan. Demikian juga

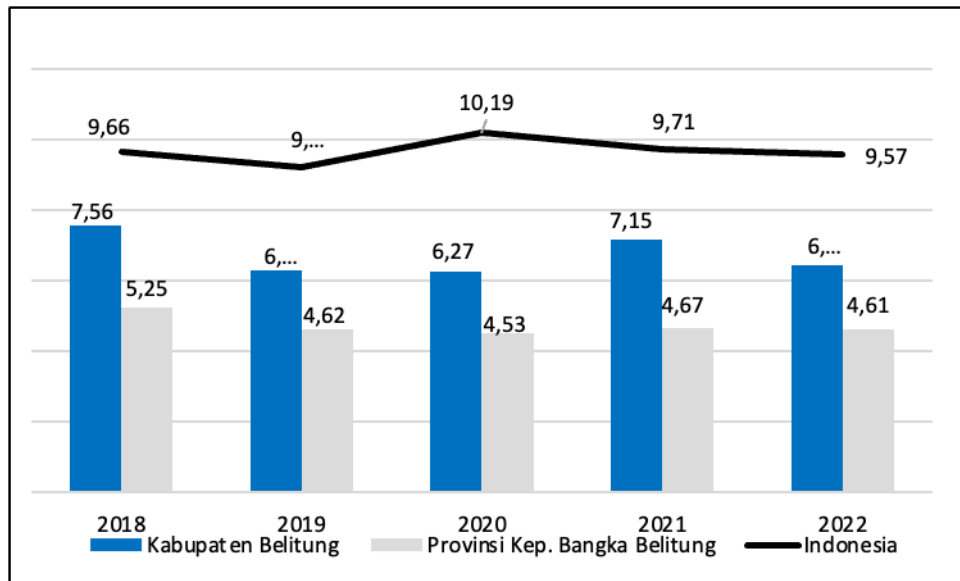


sebaliknya, jika faktor penyebab inflasi terkait dengan masyarakat banyak maka perlu dilakukan pengendalian terhadap inflasi tersebut.

f. Tingkat Kemiskinan

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menjadi permasalahan tidak hanya di daerah namun juga di tingkat nasional dan dunia. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development* (SDGs) telah disepakati bahwa mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, menjadi tujuan pertama dan utama dalam 17 (tujuh belas) tujuan SDG's. Ini akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi, dan seterusnya, sehingga penting untuk melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan tersebut dari berbagai sisi yang kemudian diimplementasikan dalam program penanggulangan kemiskinan. Adapun definisi kemiskinan menurut BPS adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Jadi, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berikut perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional periode 2018-2022.



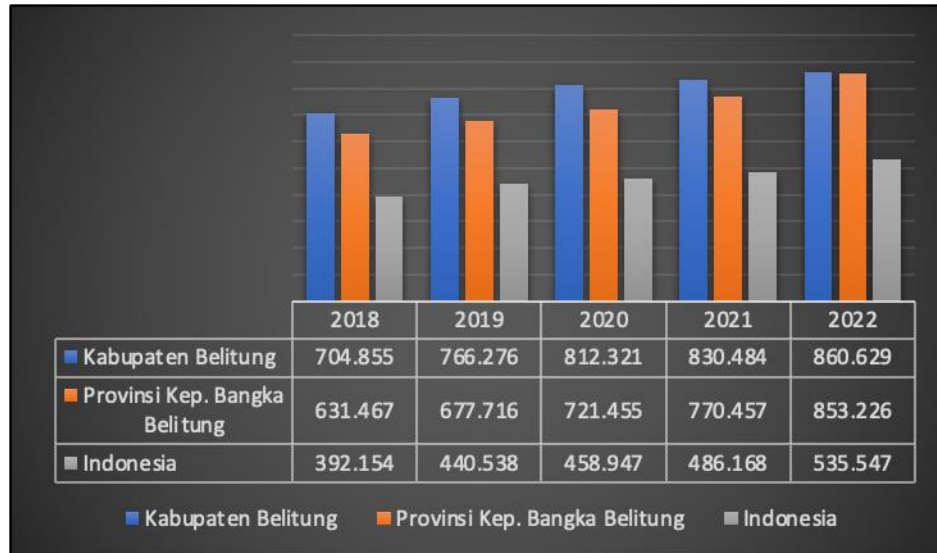
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Gambar 2.20 Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022 terhadap Persentase Angka Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Persentase Angka Kemiskinan Indonesia

Angka kemiskinan Kabupaten Belitung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata penurunan sebesar 3,11 poin. Pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Belitung mengalami penurunan bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun masih berada dibawah capaian angka kemiskinan tahun 2018 atau terpaut 1,11 poin. Selain itu penduduk miskin di Kabupaten Belitung juga berkurang 1.190 jiwa menjadi 12.340 jiwa atau 6,45 persen dari total jumlah penduduk.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan (GK) sebagai representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan non makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, serta kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berikut adalah perbandingan angka kemiskinan dan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung terhadap angka kemiskinan dan garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Gambar 2.21 Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022 terhadap Garis Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Garis Kemiskinan Indonesia (Rp/ per kapita/ per bulan)

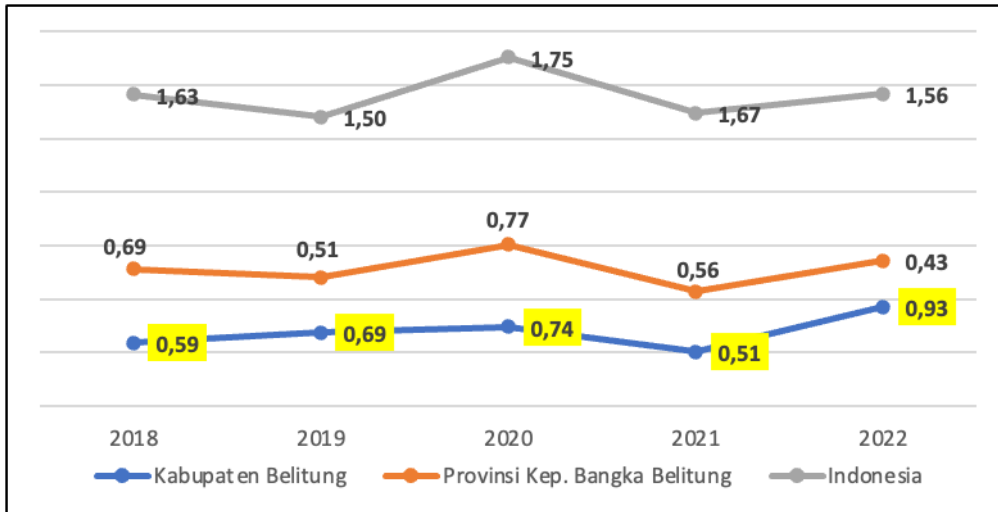
Berdasarkan Gambar 2.21 di atas, terlihat bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Belitung merupakan yang tertinggi jika dibandingkan garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia, yaitu sebesar Rp 860.629,00 per kapita per bulan atau lebih tinggi 60,70 persen dari garis kemiskinan Indonesia.

Tingginya garis kemiskinan di suatu daerah juga mengisyaratkan bahwa harga kebutuhan pokok di daerah tersebut lebih mahal dibandingkan daerah lain yang garis kemiskinannya lebih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung merupakan yang tertinggi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya garis kemiskinan di Provinsi Kep. Bangka Belitung umumnya dan Kabupaten Belitung khususnya, antara lain disebabkan harga kebutuhan pokok yang relatif mahal karena sebagian besar dipasok dari luar daerah

Selanjutnya kualitas kemiskinan diukur dengan pendekatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rata-rata



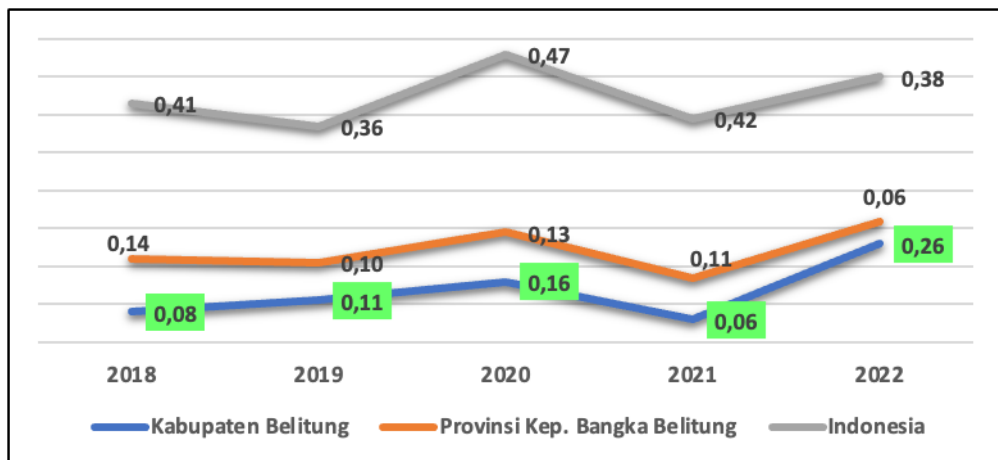
pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Gambar 2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung pada tahun 2022 adalah sebesar 0,93 atau naik sebesar 0,42 dari capaian tahun sebelumnya. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih jauh dari garis kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan ada penambahan penduduk miskin yang masih sulit dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun P1 Kabupaten Belitung lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional, meskipun sudah di atas P1 Provinsi Kep Bangka Belitung.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Gambar 2.23 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022

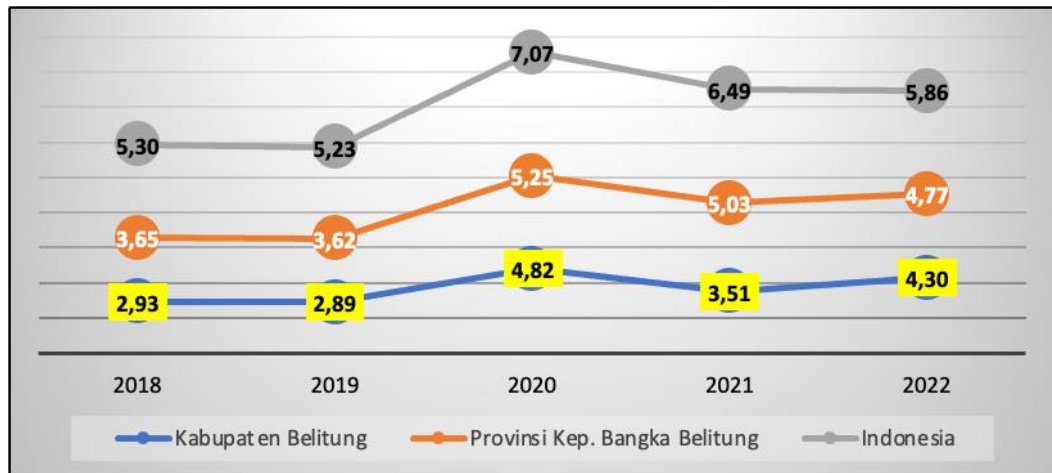


Indeks Keparahan Kemiskinan, menurut BPS merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2022 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 0,26 dari sebelumnya 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih tinggi. Nilai P2 Kabupaten Belitung masih jauh berada di bawah provinsi yang sebesar 0,06 pada tahun 2022, namun berada di bawah nilai P2 nasional yang sebesar 0,42. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut agar dapat keluar dari kemiskinan.

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi makro ketenagakerjaan daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam kurun 2018-2022. Lonjakan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,82 persen. Namun kemudian terjadi penurunan TPT Kabupaten Belitung di tahun 2021 sebesar 3,51 persen. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak bekerja menjadi sebanyak 4.160 orang atau 4,30 persen dari total jumlah penduduk. Angka ini masih di bawah provinsi dan nasional yang ternyata mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

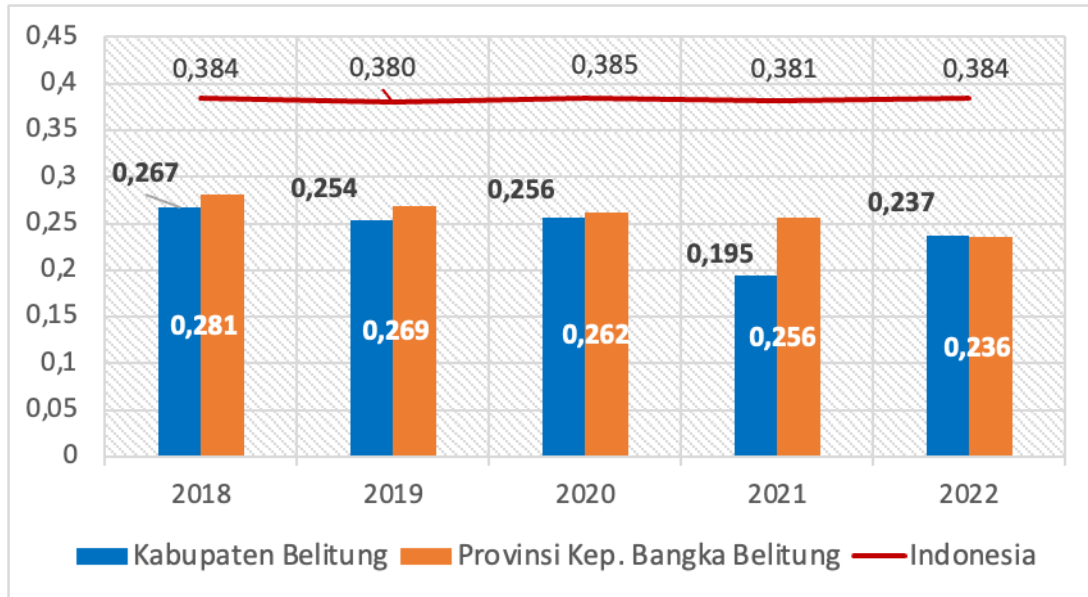
Gambar 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022 terhadap TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan TPT Indonesia

h. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada Indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Angka pada perhitungan rasio gini memiliki arti sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah bila gini ratio $< 0,3$
- Ketimpangan sedang bila gini ratio antara $0,3 \leq G \leq 0,5$
- Ketimpangan tinggi bila gini ratio $> 0,5$

Berikut perkembangan gini ratio di Kabupaten Belitung berdasarkan hasil perhitungan pengeluaran penduduk dalam lima tahun terakhir.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.25 Indeks Gini Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022 terhadap Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indeks Gini Indonesia

Gambar 2.25 memperlihatkan perbandingan angka gini rasio Kabupaten Belitung dengan gini rasio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia. Trend gini rasio Kabupaten Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir berada pada jenis ketimpangan sedang dengan koefisien gini rata-rata 0,2418 per tahun. Berdasarkan rata-rata tersebut, Indeks Gini Kabupaten Belitung masih dibawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indeks Gini Nasional. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir sudah cukup merata.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga dilihat dari kesehatan dan pendidikan. pada sub bab ini akan dilihat analisis kinerja kesejahteraan sosial yang dilakukan pada indikator-indikator yang relevan.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*), pengetahuan



(*knowledge*), dan *standard hidup layak (decent standard of living)*. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusia yang semakin baik. Berikut adalah tabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,64	70,94	71,05	71,10	71,31
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,83	11,84	11,85	11,86	11,89
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,15	8,41	8,46	8,47	8,74
Pengeluaran riil per Kapita	Ribu Rp	13.300	13.600	13.554	13.563	14.045
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,70	72,46	72,51	72,57	73,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2023

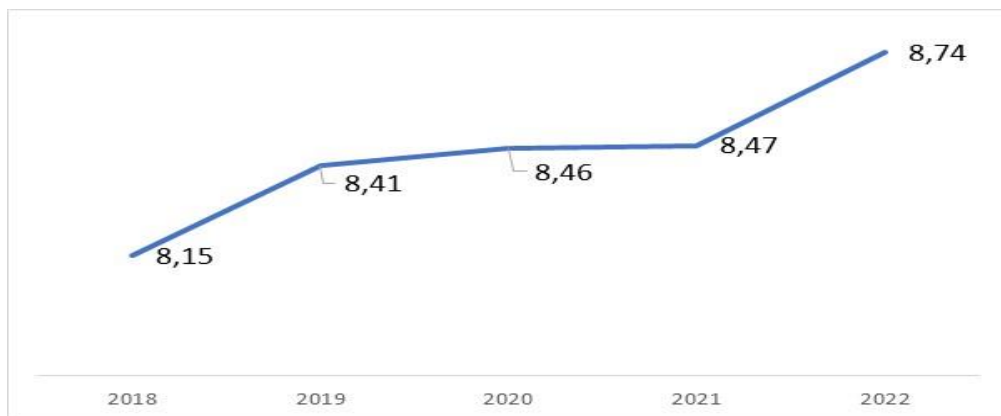
Selama lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Belitung yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2018 sebesar 71,70 kemudian terus meningkat pada tahun 2019-2022 yaitu masing-masing sebesar 72,46 (2019); 72,51 (2020); 72,57 (2021); 73,38 (2022). Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil.



b. Aspek pendidikan

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik. Adapun perkembangan Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Belitung dari Tahun 2018-2022 disajikan sebagaimana Grafik 2.18 berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Gambar 2.26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung pada tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 adalah sebesar 8,15 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 8,74 tahun pada tahun 2022. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi lama sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMP/MTs.

2. Angka Melek Huruf

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya, semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Angka



melek huruf selama tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang memuaskan seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29 Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021

Angka Melek Huruf (%)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	98,29	98,89	98,85	99,06	98,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Peningkatan capaian Angka Melek Huruf tahun 2017-2021 di atas menunjukkan semakin baiknya kualitas kinerja pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait didalam peningkatan kualitas pendidikan daerah, Angka melek huruf di Kabupaten Belitung tahun 2022 sebesar 98,47 % yang artinya masyarakat di Kabupaten Belitung hampir semua dapat membaca dan menulis. Angka ini mengindikasikan bahwa masih ada 1,53% penduduk Kabupaten Belitung yang masih belum melek huruf. Tingginya angka melek huruf ini mengindikasikan kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Belitung semakin meningkat.

3. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Berikut adalah tabel angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Belitung tahun 2018-2022.

Tabel 2.30 Angka Putus Sekolah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD/MI	0,14	0,13	0,15	0,19	0,09
2.	SMP/MTs	0,17	0,11	0,30	0,33	0,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Berdasarkan data di atas, persentase angka putus sekolah (DO) pada semua jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/Mts merupakan salah satu prioritas dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak. Angka DO untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif, angka DO untuk tingkat SD menurun sangat signifikan menjadi 0,09 pada tahun 2022



dari sebelumnya 0,19 tahun 2021. Namun untuk angka DO tingkat SMT/MTs dalam 2 (dua) tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini terjadi disebabkan beberapa alasan, yaitu faktor lingkungan, keluarga, dan motivasi.

Hal ini masih menjadi perhatian pemerintah agar angka putus sekolah (DO) segera tuntas sehingga anak usia sekolah benar-benar bersekolah sesuai jenjang pendidikannya. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menjamin anak-anak usia wajib belajar untuk bersekolah melalui pendidikan gratis, namun kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi perkembangan sosial dan motivasi belajar siswa sehingga dengan alasan ikut meringankan beban keluarga mereka harus bekerja.

c. Aspek kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Berikut adalah tabel AKB di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.

Tabel 2.31 Angka Kematian Bayi Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kasus Kematian Bayi	AKB Kab Belitung per 1.000 KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2018	3.048	37	12,1
2.	2019	2.951	52	14
3.	2020	3.197	46	15
4.	2021	3.106	44	15,78
5.	2022	2.776	39	14,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif namun dalam dua tahun terakhir cenderung menurun, baik dari jumlah kasus kematian bayi maupun AKB secara umum.

2. Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi



status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Angka Kematian Ibu di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.

Tabel 2.32 Angka Kematian Ibu Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kasus Kematian Ibu	AKI Kab. Belitung per 100.000 KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2018	3.048	6	196
2.	2019	2.951	4	138
3.	2020	3.197	3	94
4.	2021	3.106	4	128
5	2022	2.776	6	216,14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Angka kematian ibu pada kurun waktu 2018-2022 cenderung fluktuatif. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 216,14 AKI per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab tertinggi angka kematian ibu pada tahun 2022 adalah disebabkan oleh hipertensi dan pendarahan. Hal ini seiring dengan meningkatnya prevalensi tekanan darah tinggi setiap tahunnya. Tahun 2022 prevalensi tekanan darah tinggi di Kabupaten Belitung sebesar 66,81 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun lima tahun terakhir yang mana sebelumnya hanya 34,91 tahun 2018.

3. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Usia Harapan Hidup)

Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berikut merupakan data usia angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Belitung.



Tabel 2.33 Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
(1)	(2)	(3)
1.	2018	70,64
2.	2019	70,94
3.	2020	71,05
4.	2021	71,10
5.	2022	71,31

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, angka harapan hidup saat lahir terus meningkat. Pada tahun 2018 angka harapan hidup saat lahir menunjukkan angka 70,64 tahun dan terus meningkat menjadi 71,31 tahun pada tahun 2022. Peningkatan angka harapan hidup saat lahir kabupaten tentunya tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap urusan kesehatan dengan berbagai program dan pelayanan serta penyuluhan kepada masyarakat, kondisi tersebut didukung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan kesehatan yang baik.

4. Status Gizi Balita

Status gizi balita diukur berdasarkan indikator umur, berat badan (BB), dan tinggi badan/panjang badan (TB/PB). Variabel BB dan TB/PB balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB.

Kekurangan gizi merupakan masalah utama kesehatan pada anak balita karena dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangannya serta berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas anak. Untuk menentukan masalah gizi di suatu wilayah digunakan istilah *underweight* (gabungan gizi buruk dan gizi kurang), *stunting* (gabungan sangat pendek dan pendek), dan *wasting* (gabungan sangat kurus dan kurus). Keadan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal, Rendahnya status gizi berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Data status gizi balita di Kabupaten Belitung berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.34 Status Gizi Balita di Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Masalah Gizi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<i>Underweight</i>	9,38	9,38	5,56	6,90	6,38
2	<i>Stunting</i>	10,76	10,39	6,98	9,40	6,60
3	<i>Wasting</i>	5,65	5,62	2,21	2,60	1,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2023

Sesuai dengan standar WHO, suatu wilayah dikatakan kategori baik bila prevalensi balita stunting kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus kurang dari 5%. Berdasarkan tabel di atas, persentase balita yang mengalami *underweight* pada tahun 2022 sebesar 6,38% menurun dari tahun sebelumnya yaitu 6,90% pada tahun 2021. Demikian pula dengan balita *stunting* yang sudah di angka kurang dari 20% yaitu 6,60% pada tahun 2022 dan balita *wasting* sudah di bawah kurang dari 5% yaitu 1,86% pada tahun 2022.

d. Kesejahteraan Sosial

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah indikator yang menunjukkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Belitung pada tahun tersebut. Persentase penanganan PMKS di Kabupaten Belitung selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belitung untuk tahun 2019-2022 ada pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.35 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2018-2021

No	Jenis PMKS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)
1	Anak Balita Terlarang	1	1	100,00	0	0	0,00	71	71	100,00	71	71	100,00
2	Anak Terlarang	244	129	52,87	244	144	59,02	219	219	100,00	86	86	100,00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	20	20	100,00	6	6	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00
4	Anak Jalanan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	43	10	23,26	43	10	23,26	37	12	32,43	37	37	100,00
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	21	21	100,00	9	9	100,00	10	10	100,00	8	8	100,00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	1	100,00	6	6	100,00	15	15	100,00	50	50	100,00
8	Lanjut Usia Terlarang	1163	1084	93,21	1163	993	85,38	1163	1163	100,00	1154	1154	100,00
9	Penyandang Disabilitas (PACA)	705	134	19,01	612	125	20,42	612	295	48,20	612	435	71,08
10	Tuna Susila	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
12	Pengemis	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	48	48	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100,00	4	4	100,00	6	6	100,00	4	4	100,00
18	Korban Trafficking	2	2	100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	44	44	100,00	28	28	100,00	40	40	100,00	32	32	100,00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	18	18	100,00	18	18	100,00	12	12	100,00	13	13	100,00
21	Korban Bencana Alam	384	384	100,00	11	11	100,00	32	32	100,00	16	16	100,00
22	Korban Bencana Sosial	38	38	100,00	8	8	100,00	17	17	100,00	2	2	100,00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a	0,00	1096	1096	100,00	1096	1096	100,00
24	Fakin Miskin	11601	10090	86,98	11463	11463	100,00	11463	11463	100,00	11463	11463	100,00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0,00	0	0	0,00	5	5	100,00	21	21	100,00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jumlah		14337	12028	83,89	13631	12841	94,20	14829	14487	97,69	14686	14509	98,79

Sumber data : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung Tahun 2023



Dari tabel di atas pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 143 orang dari 14.829 di tahun 2021 menjadi 14.686 tahun 2022. Dari 26 (dua puluh enam) jenis jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diatas, yang terlihat terjadi penurunan yang signifikan adalah jumlah anak terlantar di tahun 2021 ada 219 orang menjadi 86 di tahun 2022 artinya ada penurunan 133 orang hal ini disebabkan karena adanya peningkatan peran dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), sedangkan untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus terjadi peningkatan sebanyak 35 orang ditahun 2021 berjumlah 15 orang dan di tahun 2022 menjadi 50 orang (jumlah kasus anak bertambah baik saksi pelaku ataupun korban).



Sumber data : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung Tahun 2023

Gambar 2.27 Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial Tahun 2019-2022

Persentase PMKS yang tertangani, tahun 2022 sebesar 98,79% lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Persentase ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan persentase 97,23% atau naik sebesar 1,56%. Faktor pendukung yaitu adanya Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat. Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.



Tabel 2.36 Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penyandang Masalah Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Sosial yang Tertangani	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	14.337	12.028	83,89
2020	13.631	12.841	94,20
2021	14.829	14.487	97,69
2022	14.686	14.509	98,79

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung

2. Jumlah Sarana Sosial

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin satu diantaranya adalah tersedianya panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar. Sarana sosial di Kabupaten Belitung terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Panti Asuhan dan Panti Lansia dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.37 Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022

No	Sarana Sosial	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Panti Asuhan (Unit)	3	3	3	3
2.	Panti Lansia (Unit)	1	1	1	1
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)	2	1	2	2
	Jumlah	5	5	5	5

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, Tahun 2023

3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Adapun Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlibat dalam penanganan PMKS di Kabupaten Belitung sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial,



dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.



10. Penyuluh Sosial :

- Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.



Tabel 2.38 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Sumber : Dinas SPPPA, 2023

NO	JENIS PSKS	KEC.TG.PANDAN				KEC.MEMBALONG				KEC.SIJUK				KEC.BADAU				KEC.SELAT NASIK			
		Tahun				Tahun				Tahun				Tahun				Tahun			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Pekerja Sosial Profesional	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekerja Sosial Masyarakat	16	16	16	16	12	12	12	12	10	10	10	10	7	7	7	7	4	4	4	4
3	Taruna Siaga Bencana	39	38	37	37	0	0	0	0	4	3	3	3	2	1	1	1	4	4	4	4
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Karang Taruna	18	18	18	18	13	13	13	13	11	11	11	11	8	8	8	8	5	5	5	5
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kelurga Pioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wahana Kesejahteraan Kelurga Berbasis Masyarakat (WKSMB)	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Kelurga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Penyuluh Sosial	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Dunia Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Data tabel di atas menunjukkan bahwa ditahun 2022 jumlah sarana panti sosial masih sama seperti ditahun-tahun sebelumnya, artinya belum ada penambahan dan pengurangan jumlah sarana dan prasarana panti. Semua sarana dan prasarana panti di Kabupaten Belitung telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak terlantar dan lanjut usia terlantar sehingga dapat ditangani dan dibina sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan salah satu kebutuhan dasar yang layak.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Belitung dari 12 (dua belas) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ada beberapa yang belum terpenuhi yaitu keluarga pioner, wanita pemimpin kesejahteraan keluarga, dunia usaha.

2.2.3 Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan seni budaya terkait erat dengan kualitas hidup masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Belitung yang bermoral, berakhlak mulia, beretika, berbudaya dan beradab yang berperan penting dalam pembangunan. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian pembangunan sehingga keberadaan dan peranan olahraga penting untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam upaya menjaga kualitas manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan.

Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Subsistem keolahragaan diantaranya yaitu pelaku olahraga, organisasai olahraga, dana olahraga, prasara dan sarana olahraga. Pembangunan keolahragaan dipayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat.

a. Seni Budaya

Kabupaten Belitung mempunyai potensi yang cukup besar dibidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang berkembang di Kabupaten Belitung seperti upacara adat, benda cagar budaya dan kesenian tradisional. Keragaman



seni dan budaya tersebut merupakan kekayaan daerah yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan dimasa yang akan datang. Selain sebagai upaya pelestarian agar bisa menjadi daya tarik wisata baik bagi wisatawan asing maupun domestik.

Jenis Kesenian dan Group Kesenian di Kabupaten Belitung dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu Tradisi, Kreasi dan Campuran (Tradisi dan Kreasi). Kesenian Tradisi adalah kesenian yang tidak merubah ciri khas kesenian tersebut dari zaman dahulu sampai saat ini masih orisinil, sedangkan kesenian kreasi adalah kesenian yang memodifikasi kesenian yang sudah ada yang bersifat kontemporer, adapun kesenian campuran merupakan pembauran atau gabungan dua jenis kesenian tersebut.

Jumlah sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Belitung berjumlah 59 buah, Gedung kesenian sebanyak 1 (satu) buah dan museum Kabupaten Belitung ada 2 (dua) buah.

Tabel 2.39 Jumlah Sanggar Seni

NO	SANGGAR SENI	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terdata	53	56	59	59	59
2	Terdaftar	-	1	1	1	2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Sanggar seni terdaftar adalah sanggar seni yang sudah mendapatkan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dari data di atas menunjukkan ada 2 (dua) sanggar seni yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

1. Sanggar Seni "PELITA BUDAYA" (kategori sanggar tari) beralamat di Jl.Tanjung Kelayang Ds.Batu Itam Kec. Sijuk dengan surat registrasi SKT No. 430/796/Kebud/dindikbud/2019.
2. Sanggar Seni "SEDULANG BUDAYE" (Dul Mulok, Tari & Musik Tradisi/kreasi) beralamat di SMAN 1 Desa Membalong dengan surat registrasi Nomor : 188.46/40/KEP/V/DISDIKBUD/2022.



Tabel 2.40 Jumlah Sanggar Seni Per-Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH SANGGAR SENI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tanjungpandan	36	
2	Membalung	10	
3	Sijuk	7	
4	Badau	4	
5	Selat nasik	2	
	JUMLAH	59	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Sedangkan jumlah Cagar Budaya dan museum yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Jumlah Cagar Budaya dan Museum

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Benda Cagar Budaya	0	0	0	0	0
2.	Bangunan Cagar Budaya	27	27	27	27	27
3.	Struktur Cagar Budaya	1	1	1	1	1
4.	Situs Cagar Budaya	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belum ada perubahan data dari tahun 2018 sampai tahun 2022, data Benda Cagar Budaya juga belum ada dikarenakan belum ada tim yang meneliti keberadaan benda cagar budaya di Kabupaten Belitung.

b. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan terutama yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk maksud tersebut, pemuda harus dipersiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan masa sekarang dan masa yang akan datang.



Di samping itu pembangunan Keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat secara jasmani dan rohani.

Salah satu indikator yang dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan bagi penyelenggaraan urusan kepemudaan adalah jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi kepemudaan yang diimplementasikan dengan program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dan peningkatan kompetensi kepemudaan, di antaranya:

Tabel 2.42 Prestasi Pemuda Tahun 2022

No	Kegiatan	Peringkat	Keterangan
1	Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2022		6 (enam) Prestasi
2	Pepelingsih tingkat kepulauan bangka Belitung (Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih)	Juara 2	1 (satu) Prestasi
3	Bintang Radio LPP RRI Sungailiat Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kategori Penyanyi Puteri	Juara 1 Puteri	1 (satu) Prestasi
4	Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	juara II	1 (satu) Prestasi
5	Miss Asian International	Harapan I dan Juara II best talent	1 (satu) Prestasi

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas pada bulan Juni tahun 2022 Kabupaten Belitung mengirimkan 6 (enam) orang peserta Paskibraka Tingkat Provinsi, Ke-enam peserta tersebut lolos seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi untuk mewakili Kabupaten Belitung. Pada bulan Juni Tahun 2022, Kabupaten Belitung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung memberikan dukungan untuk mengikuti kegiatan Training of Trainers Pepelingsih (Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih) mewakili Kabupaten Belitung dan dilaksanakan di Pangkalpinang. Kegiatan Pepelingsih merupakan wadah yang dibentuk oleh KEMENPORA RI dalam rangka mendukung pemuda untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Pada Bulan November 2022, salah satu anggota Gradasi yaitu pentas musik binaan Dinas Pemuda dan Olahraga berhasil menjadi juara dalam ajang Bintang Radio RRI Sungailiat kategori Penyanyi Puteri Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di



Sungailiat. Pada Bulan November 2022, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung memberikan dukungan kepada wirausaha muda Belitung dalam mengikuti ajang Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2022. Perwakilan Kabupaten Belitung berhasil meraih juara II sebagai Wirausaha Muda Berprestasi. Pada Bulan Desember Tahun 2022, salah satu pemuda Kabupaten Belitung berhasil meraih peringkat Harapan I dan Juara II best talent dalam ajang Miss Asian International.



Tabel 2.43 Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK YANG BER UMUR (16 S.D 30 TAHUN)	NAMA ORGANISASI								JUMLAH
			Karang Taruna/ Pok Darwis.	Osis	AMB	D.Ganesa.	Okp/Knpi/Komunitas/Ikatan Pelajar dll.	PPI	D.3 Keperawatan	Pramuka	
1.	TANJUNGPANDAN	24.442	3.421	7.563	155	45	8.165	454	45	6.165	20.771
2.	MEMBALONG	6.215	1.431	585			1.427	55		445	3.743
3.	SELAT NASIK	1.370	2.90	165			349	35		176	975
4.	SIJUK	7.606	1.355	575			2.915	45		734	5.251
5.	BADAU	3.663	1.097	305			1.055	55		583	2.905
	JUMLAH	43.296	7.594	9.193	155	45	13.911	644	45	8.103	33.645

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Tahun 2023



Untuk meningkatkan motivasi masyarakat akan gemar berolahraga maka dilaksanakan beberapa program yang nantinya diterjemahkan ke dalam beragam kegiatan berupa penyelenggaraan kejuaraan serta pembinaan terhadap cabang olahraga termasuk olahraga tradisional.

Berikut capaian perolehan medali kejuaraan olahraga di tingkat provinsi, regional, Nasional dan Internasional Tahun 2018 – 2022:

Tabel 2.44 Capaian Perolehan Medali Tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Perolehan Medali			Sertifikat	Ket
		Emas	Perak	Perunggu		
1	2018	39	39	64		Pekan Olahraga Provinsi IV (Bangka Tengah)
2	2019	3	1	3		Pada Even Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan pada tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional
3	2020	2	4	8		
4	2021	6	11	21	38	- Pekan Olahraga Nasional XX Papua, - Kayak Stand Up Paddle Race Nomor 1 km Hard Board Race (Elite) Putra, - Triathlon All Category, - Potradnas VIII, - Taekwondo Kyorugi Junior Under 44 Putri - Taekwondo Poomsae Individu Junior Putra - Paskibraka
5	2022	95	123	129		- Tenis lapangan - Gulat - Catur - Renang - Triathlon - Atletik - Bulu tangkis - Taekwondo

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 Kabupaten Belitung memperoleh prestasi sebanyak 347 Medali dengan rincian sebagai berikut:

- Capaian prestasi tingkat Provinsi mendapatkan **631 Medali Emas** (cabang olahraga Tenis Lapangan, Gulat, Renang, Triathlon, Atletik, Bulu Tangkis) **18 Medali Perak** (cabang olahraga Tenis Lapangan, Gulat, Catur, Renang, Triathlon, Atletik) dan **35 Medali**



Perunggu (cabang olahraga Tenis Lapangan, Gulat, Renang, Triatlon, Atletik, Bulu Tangkis).

- Capaian prestasi tingkat Nasional mendapatkan 63 **Medali Emas** (cabang olahraga Atletik dan Taekwondo), **105 Medali Perak** (cabang olahraga Taekwondo) dan **94 Medali Perunggu** (cabang olahraga Taekwondo).
- Capaian prestasi tingkat Internasional mendapatkan 1 **Medali Emas** (cabang olahraga Atletik).

Peningkatan prestasi olahraga diupayakan oleh daerah melalui perangkat daerah terkait dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga serta melakukan pembinaan terpadu terhadap para atlet dan pelatih pada cabang-cabang olahraga.

Untuk gedung olahraga Kabupaten Belitung memiliki 1 (satu) buah yaitu Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan sedangkan sarana prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45 Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana dan Prasarana Olah Raga per Tahun (Unit)							
		2018	2019	2020	2021	2022	2022		
							Standar	Tidak Standar	Jumlah
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	1	-	1
2.	Stadion Sepakbola	1	1	1	1	1	1	-	1
3.	Sepak bola	46	118	118	118	118	87	31	118
4.	Futsal	-	37	37	37	37	37	-	37
5.	Tenis lapangan	6	11	11	11	11	11	-	11
6.	Bola voli	72	195	195	195	195	158	37	195
7.	Bola voli pantai	3	3	3	3	3	3	-	3
8.	Bola basket	7	16	16	16	16	16	-	16
9.	Bulu tangkis	47	63	63	63	63	44	19	63
10.	Sepak takraw	37	37	37	37	37	6	31	37
11.	Atletik	1	5	5	5	5	5	-	5
12.	Tenis meja	43	43	43	43	43	43	-	43
13.	Taekwondo	2	2	2	2	2	2	-	2
14.	Karate	2	2	2	2	2	2	-	2
15.	Pencak silat	3	3	3	3	3	3	-	3
16.	Panjat tebing	1	1	1	1	1	-	1	1
17.	Kolam renang	5	9	9	9	9	4	5	9
18.	Golf	1	2	2	2	2	2		2

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung, Tahun 2023



Data di atas menunjukkan ada perubahan kondisi pada lapangan olahraga, diantaranya sarana Sepak Bola, Bola Volly, Bulu Tangkis, Sepak Takraw, Panjat Tebing dan Kolam Renang. Berdasarkan hasil identifikasi melalui survey lapangan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan tersebut adalah adanya lapangan yang sudah mengalami kerusakan (contohnya *Lapangan Panjat Tebing*), adanya sarana prasarana yg sudah rapuh (contohnya matras olahraga karate dan pencak silat) dan lapangan yang tidak sesuai standar (contohnya tidak ada garis lintasan pada kolam renang). Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan ini maka optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki daerah terus ditingkatkan dari tahun ke tahun melalui perangkat daerah terkait.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah daerah berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, hal ini diterjemahkan kedalam bentuk pelayanan umum/publik yang diberikan kepada masyarakat yang berorientasikan kepada kualitas pelayanan yang baik. Secara umum, pelayanan ini terbagi kedalam dua kelompok kecil, yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Adapun gambaran perkembangan dan keberhasilan indikator kinerja dari kedua layanan tersebut, sebagai berikut:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

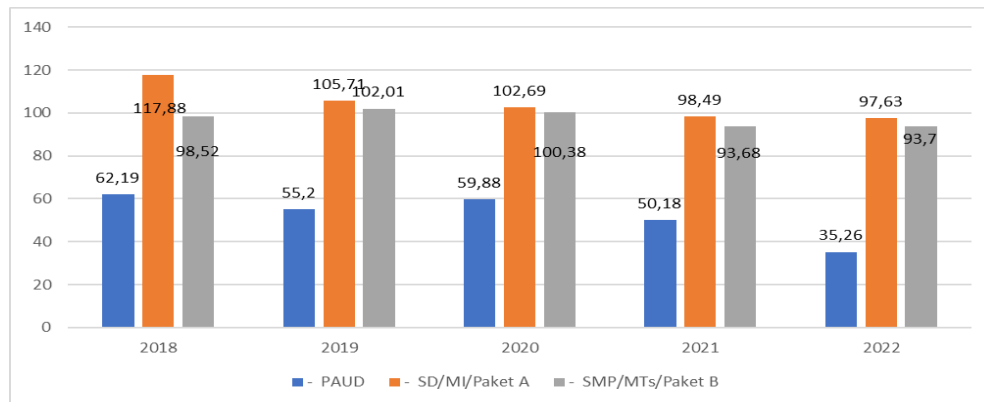
Kualitas layanan urusan wajib yang dilaksanakan daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat diukur dengan mempergunakan indikator kinerja penyelenggaraan beberapa urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu urusan a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; f) sosial.

Sementara urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar antara lain : a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) lingkungan hidup; e) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; f) pemberdayaan masyarakat dan desa; g) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; h) perhubungan; i) komunikasi dan informatika; j) koperasi, usaha kecil dan menengah; k) penanaman modal; l) kepemudaan dan olahraga; m) statistik; n) kebudayaan; o) perpustakaan dan r) kearsipan. Berikut ini gambaran pencapaian indikator dari setiap urusan wajib tersebut :



2.3.1.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar a. Pendidikan

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia yang seharusnya. Semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun, menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah grafik APK di Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, diolah, 2023

Gambar 2.28 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

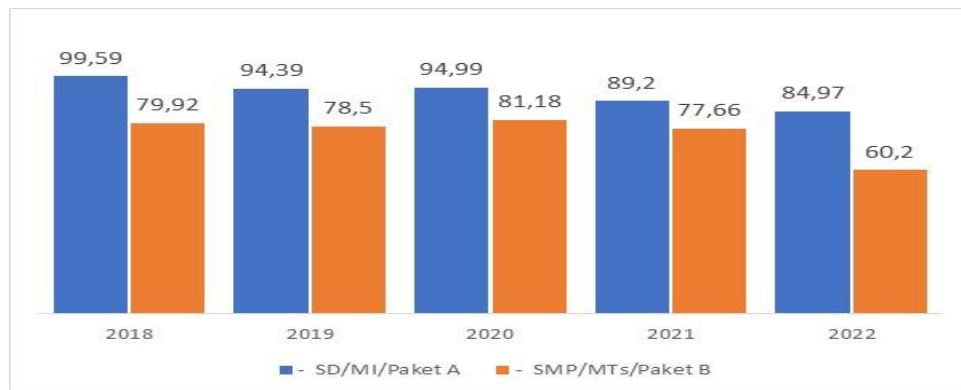
Melihat gambar di atas, persentase APK PAUD dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2018 APK PAUD sebesar 62,19% turun menjadi sebesar 35,26% pada tahun 2022. Penurunan APK PAUD dikarenakan masih banyak orang tua yang menganggap usia 3 tahun masih terlalu dini untuk bersekolah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022 jumlah anak yang berusia kurang dari 4 tahun yang berpartisipasi pada jenjang PAUD hanya berjumlah 395 orang atau hanya sebesar 10,36% dari total keseluruhan siswa PAUD pada tahun 2022. Sama halnya dengan APK PAUD yang menurun setiap tahunnya, APK SD dalam kurun lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 APK SD sebesar 97,63% menurun tajam dari 117,88 APK SD tahun 2018.



Sedangkan untuk APK SMP cenderung fluktuatif. APK SMP tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 102,01% dan turun menjadi sebesar 93,7% pada tahun 2022.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi dari penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APK digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Berikut adalah grafik APM di Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, diolah, 2023

Gambar 2.29 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

APM SD/MI dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Capaian APM SD/MI tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 99,59% dan terendah sebesar 84,97% tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata APM pada jenjang SD/MI sebesar -4,80% dalam lima tahun terakhir.

Angka APM pada jenjang SMP/MTs dalam kurun waktu 2018-2022 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tahun 2018 APM SMP/MTs sebesar 79,92% dan angka tersebut terus menurun hingga tahun 2019 di angka 78,5% kemudian tahun 2020 berfluktuasi menjadi sebesar 81,18% dan turun kembali dalam dua tahun menjadi sebesar 77,66% tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi sebesar 60,2%. Pertumbuhan rata-rata APM SMP/MTs sebesar -5% dalam lima tahun terakhir.



3. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.

Tabel 2.46 Angka Kelulusan di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023; diolah

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2018-2022 tidak pernah berubah yakni tetap 100%. Hal ini mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung yang semakin baik. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak, mulai dari orang tua, guru, murid serta berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mampu mempertahankan angka kelulusan.

4. Angka Melanjutkan

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.

Tabel 2.47 Angka Melanjutkan di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,59%	99,83%	96,7%	93,84%	n/a
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	n/a	94,33%	87,11%	89,05%	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023 (diolah)



Dapat dilihat pada tabel di atas, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2018-2022 berfluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi tahun 2019 yakni sebesar 99,83% dan terendah sebesar 93,84% tahun 2021. Jika melihat angka ini, artinya pada tahun 2021 masih ada sekitar 6% anak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Sama halnya angka melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 2018-2022 juga berfluktuasi. Capaian tertinggi terjadi tahun 2019 yakni sebesar 94,33% dan terendah sebesar 87,11% tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 89,05%. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK lebih kecil jika dibandingkan dengan SD. Masih ada sebesar 10,95% anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor mulai dari ekonomi maupun non ekonomi seperti pernikahan dini. Tentunya ini menjadi PR besar bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

5. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan berpengaruh pada kualitas pendidikan itu sendiri. Berikut merupakan data persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Belitung tahun 2018-2022.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023 (diolah)

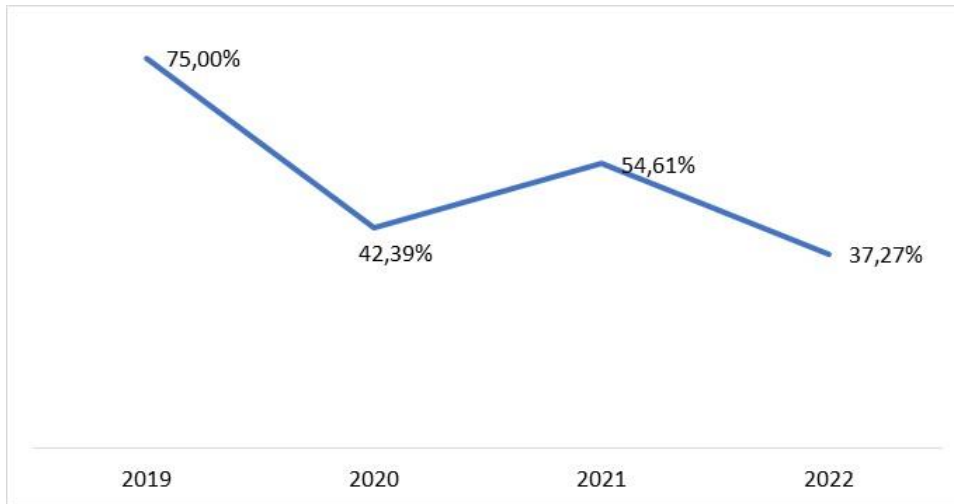
Gambar 2.30 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Berdasarkan data di atas, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV kurun waktu 2018-2022 berfluktuatif dengan capaian tertinggi tahun 2021 yakni sebesar 93,22% dan terendah sebesar 75,85% tahun 2022 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pertahun sebesar -0,89%. Menurunnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2022 disebabkan banyaknya guru yang purna tugas. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2022 ada sebanyak 92 orang guru yang purna tugas.

6. Persentase jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidik

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dengan total guru yang ada. Berdasarkan Permendikbudristek 54 Tahun 2022 tentang Sertifikat Pendidik Guru dalam jabatan, sertifikasi bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut perkembangan persentase jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Belitung tahun 2019-2022.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023, diolah

Gambar 2.31 Persentase jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan persentase jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik kurun waktu 2019-2022 berfluktuatif. Tahun 2017 persentase jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik adalah sebesar 75% mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 42,39% tahun 2020 dan kemudian kembali meningkat tahun



2021 menjadi sebesar 54,61% namun kembali turun menjadi sebesar 37,27% pada tahun 2022. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik, seorang guru harus mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru) selama 3 bulan. Penurunan signifikan yang terjadi disebabkan guru yang memiliki sertifikat pendidik banyak yang purna tugas.

7. Sekolah terakreditasi A

Indikator ini menggambarkan perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi A dengan total seluruh sekolah. Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal yaitu suatu proses yang digunakan Lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2021 (pasal 1 ayat 2) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Akreditasi membantu mengetahui sejauh mana sekolah telah memenuhi kriteria mutu yang sudah ditetapkan pemerintah atau standar nasional pendidikan sebagai standar minimal kualitas. Berikut ini merupakan data sekolah terakreditasi A di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022.

Tabel 2.48 Sekolah terakreditasi A Di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
SD yang terakreditasi A	8,13%	10,65%	10,65%	10,43%
SMP yang terakreditasi A	46,88%	46,88%	50%	51,72%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023 (diolah)

Berdasarkan data di atas, persentase jumlah SD yang terakreditasi A kurun waktu 2019-2021 cenderung meningkat. Tahun 2019 jumlah sekolah terakreditasi A sebesar 8,13% meningkat menjadi 10,65% tahun 2020 dan tahun 2021 masih di angka yang sama namun menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 10,43%. Sama halnya dengan jenjang SD, persentase jumlah SMP yang terakreditasi A kurun waktu 2019-2022 juga meningkat. Tahun 2019 jumlah SMP yang terakreditasi A sebesar 46,88% dan tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 51,72%.



8. Lembaga PAUD yang terakreditasi

Indikator ini merupakan jumlah perbandingan Lembaga PAUD yang terakreditasi dibandingkan dengan total Lembaga PAUD. Sama halnya dengan akreditasi SD dan SMP, untuk mendapatkan satuan PAUD yang bermutu maka perlu dimanajemen secara baik dan untuk mengetahui sejauh mana mutu PAUD maka harus dilakukan akreditasi. PAUD yang bermutu diharapkan menghasilkan generasi masa depan yang berkualitas. Berikut data Lembaga PAUD yang terakreditasi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022.

Tabel 2.49 Lembaga PAUD yang Terakreditasi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Lembaga PAUD yang terakreditasi	90,57%	98,96%	95,1%	96,08%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023; diolah

Berdasarkan data di atas, Lembaga PAUD yang terakreditasi kurun waktu 2019-2022 bersifat fluktuatif. Tahun 2019 lembaga PAUD yang terakreditasi sebesar 90,57% meningkat menjadi sebesar 98,96% tahun 2020 namun turun pada tahun 2021 menjadi sebesar 95,1% dan kembali meningkat tahun 2022 menjadi sebesar 96,08%. Meski demikian, Lembaga PAUD yang terakreditasi di Kabupaten Belitung sudah diatas 90%. Artinya mutu PAUD semakin baik.

9. Lembaga PKBM terakreditasi

PKBM yang terakreditasi berarti PKBM yang telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sesuai yang ditentukan pemerintah pusat, yang mana berarti sudah tidak diragukan lagi kualitasnya, proses administrasinya, proses pembelajarannya, lulusannya, prestasinya, dan keabsahan ijazahnya. Berikut data Lembaga PKBM terakreditasi di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2022.

Tabel 2.50 Lembaga PKBM terakreditasi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022

Indikator	2020	2021	2022
Lembaga PKBM terakreditasi	25%	37,50%	57,14%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023 (diolah)

Berdasarkan data di atas, Lembaga PKBM terakreditasi kurun waktu 2019-2021 berfluktuasi. Tahun 2019 lembaga PKBM terakreditasi sebesar 90,57% meningkat menjadi



98,96% tahun 2020 namun turun pada tahun 2021 menjadi sebesar 95,1%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 ada penambahan PKBM namun tidak ada penambahan PKBM yang terakreditasi.

b. Kesehatan

Di samping pelayanan publik di bidang pendidikan, bidang kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar juga perlu mendapatkan gambaran yang proporsional dari sisi ketersediaan, penyebaran, dan kualitas pelayanan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-3 (tiga) yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung dengan penambahan fasilitas kesehatan maupun pelayanannya. Kualitas layanan kesehatan harus ditingkatkan, salah satunya dengan peningkatan status akreditasi puskesmas. Berikut data puskesmas terakreditasi di Kabupaten Belitung pada tahun 2022.

Tabel 2.51 Data Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Belitung Tahun 2022

Puskesmas	Status Akreditasi
Tanjungpandan	Utama
Air Saga	Madya
Perawas	Madya
Badau	Utama
Sijuk	Madya
Tanjung Binga	Dasar
Membalong	Utama
Simpang Rusa	Madya
Selat Nasik	Dasar

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa sudah lebih dari 70% puskesmas di Kabupaten Belitung yang terakreditasi minimal madya. Sedangkan Puskesmas Tanjung Binga dan Puskesmas Selat Nasik masih berada di tingkat dasar. Namun terus diupayakan untuk meningkatkan status tersebut menjadi madya. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berkualitas tidaknya sumberdaya manusia.



Cakupan pelayanan puskesmas di Kabupaten Belitung sebesar 180%, yang berarti bawah unit pelayanan dasar kesehatan di Kabupaten Belitung sudah merata di tiap kecamatan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Tanjungpandan sebanyak 3 (tiga) puskesmas, Kecamatan Sijuk sebanyak 2 (dua) puskesmas, Kecamatan Membalong 2 (dua) puskesmas, serta Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Badau masing-masing 1 (satu) puskesmas.

Selain itu juga tersebar puskesmas pembantu di 5 (lima) kecamatan sebanyak 31 (tiga puluh satu) Pustu. Di tiap desa juga sudah terdapat Posyandu, Poskesdes dan Polindes sebagai fasilitas penunjang kesehatan sebanyak 182 Posyandu, 38 Poskesdes dan 1 Polindes pada tahun 2022. Berikut adalah tabel sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Belitung tahun 2022.

Tabel 2.52 Data Sarana dan Prasarana di Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
1.	Puskesmas Non Perawatan Telah Terakreditasi	6	Unit
2.	Puskesmas Perawatan (Terakreditasi)	3	Unit
3.	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	31	Unit
4.	Poskesdes	38	Unit
5.	Polindes	1	Unit
6.	Posyandu	182	Unit
7.	Desa Siaga	49	Desa/kel
8.	Puskesmas Keliling	13	Unit
9.	Ambulance SPGDT	2	Unit
10.	RSUD Type C	1	Unit
11.	RSU Swasta	2	Unit
12.	Klinik Swasta	5	Unit
13.	Poliklinik	7	Unit
14.	Pusling Perairan	1	Unit

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono pada tahun 2022 sudah berstatus Akreditasi Paripurna dengan keseluruhan 16 pokja yang sudah terpenuhi yaitu :

1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP);
2. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS);
3. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK);
4. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO);
5. Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS);
6. Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK);
7. Asesmen Pasien (AP);
8. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP);
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB);



10. Program Nasional

- Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
- Menurunkan Angka Kesakitan HIV/AIDS.
- Menurunnya Angka Kesakitan TB
- Pelayanan Geriatri.
- Penyelenggaraan Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA).

11. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP);

12. Hak Pasien dan Keluarga (HPK);

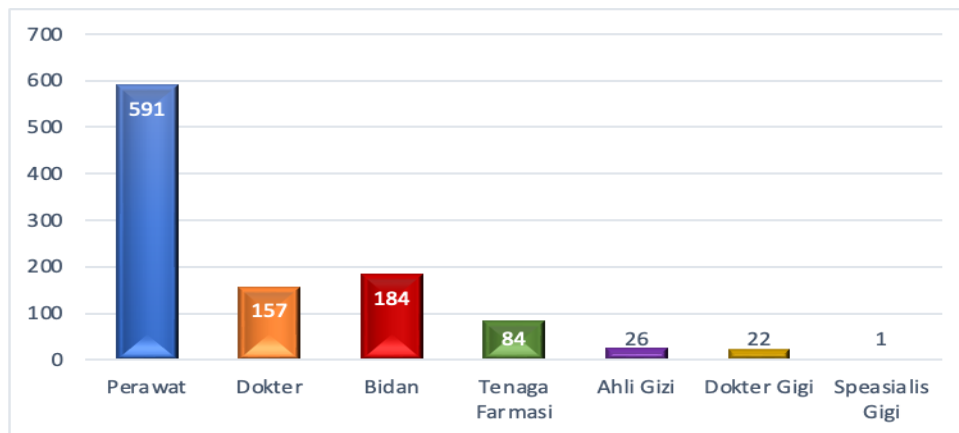
13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);

14. Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE);

15. Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM);

16. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan di Rumah Sakit (IPKP).

Sedangkan kelompok perawat di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 masih mendominasi jumlah tenaga kesehatan sebanyak 591 perawat. Ketersediaan dokter sebanyak 157 orang, terdiri dari Dokter Umum sebanyak 102 orang dan Dokter Spesialis sebanyak 55 orang. Adapun Dokter Gigi sebanyak 22 orang, dan spesialis gigi 1 orang, Jumlah bidan bertambah 16 orang dari tahun sebelumnya menjadi 184 orang. Tenaga farmasi juga bertambah menjadi 84 orang, yang terdiri dari apoteker 38 orang dan tenaga teknis kefarmasian sebanyak 46 orang. Serta ahli gizi sebanyak 26 orang. Bertambahnya jumlah dokter spesialis di Kabupaten Belitung merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Belitung. Berikut merupakan diagram jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Belitung pada Tahun 2022.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Gambar 2.32 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Belitung 2022



Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular. Terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53 Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Penyakit	2018	2019	2020	2021	2022
TBC	255	335	224	195	449
COVID-19	0	0	267	7.517	3.137
HIV/AIDS	23	28	19	25	33
Kusta	10	13	5	9	5
DBD	127	357	598	147	194
Hipertensi	19.015	18.535	17.223	22.353	46.730
Diabetes Melitus	1.922	3.200	2.917	3.108	2.490

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, semua penderita tersebut dapat ditangani dengan baik, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun terutama penyakit hipertensi,serta penyakit menular TBC menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Berikut hasil kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Belitung selama periode 2018 – 2022.

Tabel 2.54 Hasil kinerja urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek/ Fokus/ Bidang urusan/Indikator Kinerja pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Harapan Hidup	70,64	70,94	71,05	71,1	71,31
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran Hidup	12,1	14	15	14,1	14,04
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran Hidup	196	137	94	128,7	216,14
3	Rasio Posyandu per 100 Balita	1,31	1,36	1,16	1,37	1,33
4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	117,1	132,6	107,38	107,9	92,28



No	Aspek/ Fokus/ Bidang urusan/Indikator Kinerja pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96,10	101	98,28	99,9	99,9
6	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	95,92	100	83,67	75,7	99,9
7	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100
10	Cakupan kunjungan bayi	98,69	98,9	109,33	92,2	93,75
11	Angka kejadian malaria	0	0	0	0	0
12	Cakupan Puskesmas	180	180	180	180	180
13	Prevalensi gizi kurang	0,53	9,47	2,21	6,9	6,8
14	Cakupan pelayanan kasus HIV	60,96	60,96	95,72	105,51	100
15	Cakupan pelayanan kasus diabetes mellitus	20,33	134,3	120	129,23	100
16	Cakupan pelayanan kasus hipertensi	32,79	41,4	37,69	53,53	66,81
17	Cakupan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	76,7	97,63	97,68	100
18	Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	98%	93,10%	95,46%	100%	99,52%
19	Cakupan pelayanan kasus Tuberkulosis	91	89,53	67,67	115,17	100
20	Pelayanan kesehatan ibu hamil	88,72	90,50	n/a	83,47	85,13
21	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	75,87	79,21	n/a	91,01	93,87
22	Layanan kesehatan Bayi Baru Lahir	99,18	98,87	n/a	93,04	99,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Selama periode 2018-2022, Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,26%. Tapi peningkatan Angka Harapan Hidup ini mengalami perlambatan di tahun 2021 yang terkontraksi sebesar 0,56% dan hanya tumbuh 0,30% pada tahun 2022. Masih perlu adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.



Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Belitung mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu sebesar 14,04 per 1000 kelahiran hidup (39 kematian yang disebabkan oleh BBLR 9 orang, Asfeksia 6 orang, Diare 1 orang, kelainan kongnital 4 orang, Pneumonia 2 orang, Sepsis 4 orang, kelainan jantung 2 orang dan lain-lain 11 orang lebih rendah dari target 23/1.000 KH. Hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM dalam penanganan kasus komplikasi dan kedaruratan pada neonatus baik di Fasyankes tingkat pertama maupun rujukan. Belum maksimalnya penerapan SOP pada penatalaksanaan kasus komplikasi neonatus, serta belum terintegrasinya koordinasi sistem rujukan baik intern maupun ekstern di Fasyankes tingkat pertama dan rujukan.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2022 sebesar 216,14 per 100.000 KH, 6 (enam) kematian disebabkan karena 3 (tiga) orang gagal jantung, dan 3 (tiga) orang disebabkan penyebab lainnya. Angka ini mengalami peningkatan dari pencapaian tahun 2021 yang hanya sebesar 128 per 100.000 KH. Oleh karena itu perlu upaya penguatan pengendalian kematian ibu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan dukungan keluarga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan bersalin ke fasilitas kesehatan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kematian ibu melahirkan adalah meningkatkan peran bidan. Dalam hal ini, bidan di desa benar-benar difungsikan sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKB dan AKI.

Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten Belitung dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sudah memenuhi target dan sesuai dengan standar nasional Kementerian Kesehatan, di mana standarnya adalah 1–5 posyandu per 100 balita. Pada Tahun 2022 jumlah posyandu di Kabupaten Belitung sebanyak 182 buah dengan total balita 13.639 orang, sehingga rasio posyandu sebesar per 100 Balita mencapai 1,33. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,37 di tahun 2021 untuk rasio posyandu per 100 balita. Jadi ketersediaan jumlah posyandu sudah sesuai dengan banyaknya balita yang membutuhkan pelayanan.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Belitung selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Komplikasi kebidanan



yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 107,9% pada tahun 2021, tetapi mengalami penurunan lagi pada tahun 2022 hanya mencakup 92,8%.

Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Belitung selama periode 2018-2022 bersifat fluktuatif. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) hanya mencapai 75,7% pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 99,90% pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 99,90% jumlah bayi yang ada di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Belitung sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Cakupan kunjungan bayi juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 93,75% setelah menurun di tahun 2021 hanya sebesar 92,2%, yang berarti jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam 1 (satu) tahun sebesar 93,75%. Belum optimalnya kunjungan tersebut salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya kunjungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun bayi yang dikunjungi sudah meninggal. Sedangkan Cakupan balita gizi kurang mendapat perawatan di Kabupaten Belitung sudah mencapai capaian yang optimal pada periode 2017 hingga 2021 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi kurang sudah tertangani seluruhnya.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada tahun 2022 sudah mencapai 100% artinya semua penderita DBD sudah mendapatkan penanganan sesuai dengan tata laksana. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin juga mencapai 100%. Upaya kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Belitung diharapkan dapat meningkat setiap tahun dengan berbagai program dan kegiatan urusan kesehatan sebagaimana juga diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 mengenai strategi pencapaian pembangunan kesehatan dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Sedangkan untuk kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di kabupaten Belitung sudah mencapai tingkat yang optimal, di mana dari periode 2018 hingga 2022 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya.



c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang baik. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menggambarkan dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Infrastruktur juga merupakan adalah faktor penting dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Belitung. Pembangunan infrastruktur tersebut dengan tetap memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang dan harus menjaga kelestarian alam.

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Belitung meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, dan tata ruang. Hasil kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2018-2022 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55 Hasil kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Pekerjaan Umum:					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	76,46	83,44			
2	Persentase Jalan Mantap Kabupaten			n/a	70,88	66,95
3	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah Ada (%)	66,75	52,10			
4	Persentase Pengendalian daya rusak air (%)	26,24	7,18			
5	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik			n/a	40,57	43,03
6	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan			80,48	81,85	82,78
7	Persentase pengolahan air limbah permukiman			53,88	53,98	54,79
8	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik			12,73	15,83	20,02
9	Persentase jalan lingkungan yang tertangani			15,87	22,64	
10	Persentase bangunan Gedung yang memenuhi standar			13,06	14,25	14,82
11	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten			60,00	70,00	90,00
	Penataan Ruang:					



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
12	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100%	100%			
13	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	100%	100%			
14	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya (%)	100%	100%			
15	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan kota (%)	30%	30%			
16	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang			97,60	98,03	98,24

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, 2023

Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar mencapai umur layan sesuai yang direncanakan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar mencapai umur layan sesuai yang direncanakan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sepanjang 666,024 km. Kondisi jalan kabupaten sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 umumnya baik. Pada tahun 2021, proporsi panjang jalan dalam kondisi sedang-baik sebesar 92,3066% dari total panjang jalan kabupaten atau sepanjang 614,784 km, dengan rincian kondisi baik sebesar 88,2617% dan kondisi sedang



4,0449%. Sedangkan 5,1815% jalan dalam keadaan rusak, dan 2,5119% dalam kondisi rusak berat. Kegiatan penyelenggaraan jalan ini dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan untuk pembangunan jalan dan jembatan serta adanya dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), adanya partisipasi masyarakat untuk menghibahkan lahannya dalam pembangunan jalan kabupaten, serta perencanaan yang matang dari mulai proses pengusulan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar mencapai umur layan sesuai yang direncanakan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sepanjang 666,024 km. Kondisi jalan kabupaten sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 umumnya baik. Pada tahun 2021, proporsi panjang jalan dalam kondisi sedang-baik sebesar 92,3066% dari total panjang jalan kabupaten atau sepanjang 614,784 km, dengan rincian kondisi baik sebesar 88,2617% dan kondisi sedang 4,0449%. Sedangkan 5,1815% jalan dalam keadaan rusak, dan 2,5119% dalam kondisi rusak berat. Kegiatan penyelenggaraan jalan ini dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan untuk pembangunan jalan dan jembatan serta adanya dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), adanya partisipasi masyarakat untuk menghibahkan lahannya dalam pembangunan jalan kabupaten, serta perencanaan yang matang dari mulai proses pengusulan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan dalam nomenklatur urusan kabupaten. Beberapa urusan sebelumnya menjadi urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman menjadi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu: air minum, air limbah, dan jalan lingkungan.

Akses terhadap air minum dan sanitasi merupakan prasyarat dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat sebagai benteng utama masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19. Akses terhadap air minum dan sanitasi diperlukan guna menjaga



kesehatan keluarga. Perkembangan penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 80,48% menjadi 81,85% pada tahun 2021 dan menjadi 82,78% pada tahun 2022. Kinerja yang baik ini didorong dengan adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Dalam pengembangan SPAM di seluruh wilayah kabupaten terdapat bantuan DAK Air Minum oleh pemerintah pusat sebagai komitmen pemerintah pusat untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) air minum di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, KEK Pariwisata dan Geopark Belitung, pemerintah pusat melalui Balai Sarpras Perkim Wilayah Provinsi Babel melaksanakan kegiatan pemasangan jaringan distribusi utama dari SPAM Batu Mentas ke wilayah kota Tanjungpandan. Pada tahun 2021, balai ini juga membangun Booster Air Minum di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan, demikian juga halnya dengan indikator persentase pengolahan air limbah permukiman yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 persentase pengolahan air limbah permukiman adalah sebesar 53,88% dan naik 0,16% pada tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 54,04%, serta kembali meningkat 0,81% pada tahun 2022 sehingga menjadi 54,79%. Peningkatan kinerja ini sangat didukung oleh peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas PUPR kabupaten Belitung setiap tahun memberikan dampak yang baik terhadap kesadaran dan kesiapan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Sedangkan tantangan dalam pelaksanaan indikator ini yaitu sulitnya mencari lokasi SPALD-T di daerah perkotaan karena padatnya penduduk dan bangunan.

Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan yang cukup berarti setiap tahun, yaitu dari 12,73% pada tahun 2020 menjadi 15,83% pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 3,1%, dan menjadi 20,02% pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 4,19%. Pencapaian yang terus meningkat ini didukung oleh adanya keterlibatan pihak desa/kelurahan dalam mensosialisasikan kegiatan dimaksud sehingga didapat kesepakatan mengenai pemakaian lahan sejak awal masa pembangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya drainase lingkungan sehingga pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan warga untuk menghibahkan lahannya untuk akses drainase. Demikian pula halnya dengan persentase



jalan lingkungan yang tertangani yang juga mengalami peningkatan dari 15,87% pada tahun 2020 menjadi 22,64% pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 6,77%. Dalam melaksanakan kegiatan terkait jalan lingkungan ini terjalin koordinasi yang baik dengan perangkat desa baik mulai pada saat persiapan pembangunan hingga survei dilapangan.

Hasil kinerja persentase bangunan Gedung yang memenuhi standar juga terus mengalami peningkatan dari 13,06% pada tahun 2020 menjadi 14,25% pada tahun 2021 dan menjadi 14,82% pada tahun 2022. Indikator ini antara lain dipengaruhi oleh Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Dalam penyelenggaraan penerbitan IMB dan dokumen pendukung lainnya tersebut diperlukan kesiapan berkas yang lengkap disampaikan pemohon dalam proses persetujuan bangunan Gedung. Indikator terakhir bidang urusan pekerjaan umum yaitu persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten yang juga terus mengalami peningkatan dan cukup signifikan yaitu dari 60% pada tahun 2020 menjadi 70% pada tahun 2021 dan menjadi 90% pada tahun 2022. Peningkatan ini terjadi karena adanya support koordinasi dan pembinaan dari Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Bangka Belitung serta adanya bantuan kerjasama dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) II Palembang berupa sharing dana dalam pelaksanaan sertifikasi tenaga terampil konstruksi.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung bertujuan mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya. Penataan ruang Kabupaten Belitung mengacu kepada Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034. Untuk penyelenggaraan penataan ruang terdapat peningkatan dalam persentase penyelenggaraan penataan ruang dari tahun sebelumnya. Padat tahun 2022 persentase penyelenggaraan penataan ruang adalah sebesar 98,24, naik 0,21% dari tahun 2021 dengan persentase sebesar 98,03 %. Dan tahun 2021 ini naik 0,43 % dari tahun 2020 yaitu 97,60%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sudah cukup sesuai dengan RTRW. Pemerintah daerah juga telah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam pengurusan izin tata ruang yang mana permohonnya langsung ditujukan kepada sektor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan persyaratan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan. Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain.

Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014 mendefinisikan permukiman sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Untuk menciptakan permukiman seperti tersebut di atas, negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat memiliki tempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau.

Peningkatan jumlah penduduk tentunya akan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan perumahan yang dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman. Permasalahan perumahan dan permukiman pada umumnya masih adanya kawasan permukiman dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan tempat tinggalnya serta sarana prasarananya masih kurang memadai. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan agar masyarakat dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Berikut hasil kinerja urusan Perumahan dan Permukiman selama tahun 2018-2022.



Tabel 2.56 Hasil kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio permukiman layak huni	0,99	0,99			
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	100	100			
3	Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni			0	0	0
4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	51,27	16,76			
5	Persentase luasan kawasan kumuh			6,78	52,60	33,45
7	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Hektar)	32,96	35,61			
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	n/a	0,10			
9	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	n/a	79,31			
10	Persentase pelayanan air bersih (%)	37,93	30,41			
11	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (%)	81,81	83,80			
12	Persentase taman terkelola			100	100	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan dalam nomenklatur urusan kabupaten. Beberapa urusan sebelumnya menjadi urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman menjadi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu: air minum, air limbah, dan jalan lingkungan. Sehingga kinerja atas layanan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Belitung hanya terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: jumlah warga negara korban



bencana yang mendapat rumah layak huni; persentase luasan kawasan kumuh; dan persentase taman terkelola.

Target Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni adalah 0 jiwa. Hal ini dikarenakan diharapkan tidak ada rumah warga yang terkena bencana. Kabupaten Belitung termasuk kabupaten yang jarang mengalami bencana skala besar. Di wilayah ini tidak ada gunung berapi aktif sehingga terhindar dari letusan gunung berapi. Letak pulau yang berada di antara tiga daratan besar yaitu daratan sumatera, jawa dan kalimantan membuat Kabupaten Belitung terlindungi dari pusat tsunami yang berada di Kawasan samudera atlantik dan pasifik. Kawasan permukiman biasanya terletak dalam Kawasan yang landai sehingga terhindar dari bencana longsor. Faktor ini menjadi penyebab jarang rumah warga yang terkena dampak ketiga jenis bencana diatas. Namun demikian kabupaten Belitung yang merupakan daerah kepulauan, rawan akan bencana angin kencang dan abrasi pantai. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir/genangan air di wilayah tertentu. Banyaknya warga yang menempati dan bermukim dilokasi yang rawan bencana banjir sewaktu-waktu dapat membutuhkan bantuan pembangunan rumah korban bencana. Karena itu anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota tetap dianggarkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang memerlukan pembangunan dan atau rehabilitasi rumah, namun anggaran ini pada tahun 2022 tidak dipergunakan karena tidak adanya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.

Terkait dengan luas permukiman kumuh, terlihat trend yang semakin menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2018-2022, yaitu sebesar 52,60% pada tahun 2021 menjadi 33,45% pada tahun 2022. Pada tahun 2021 terdapat perubahan perhitungan dan penetapan untuk persentase luasan permukiman kumuh terhadap tahun sebelumnya, sehingga persentase luasan kawasan kumuh terlihat mengalami perubahan yang cukup besar yaitu dari 6,78% menjadi 52,60%. Sosialisasi yang diadakan sejak tahun 2018 dalam program KOTAKU dan dukungan dari semua pihak serta fasilitasi Kemekumham dalam penyusunan dokumen pendukung untuk Raperbub Pencegahan Kawasan Kumuh menjadi faktor pendorong capaian kinerja kegiatan. Selain itu juga didukung dengan koordinasi dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan stakeholder terkait yang terus dilakukan terutama untuk penanganan kawasan kumuh skala Kawasan.

Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh masih terus ditingkatkan, baik dengan monitoring dan evaluasi maupun pemuktahian dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti penyusunan dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh serta



dokumen pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kewenangan Penanganan Kawasan kumuh dibagi berdasarkan luas deliniasi area yang digolongkan sebagai kawasan kumuh. Untuk luasan Kawasan kumuh dibawah 5 Ha menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, sementara untuk kawasan dengan luasan antara 5 Ha sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Luas kawasan kumuh diatas 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Penanganan kumuh juga memerlukan perencanaan yang komprehensif dan banyak melibatkan OPD-OPD terkait diluar Dinas PUPR.

Hasil kinerja persentase taman terkelola baik pada tahun 2020 maupun 2021 adalah 100%, artinya seluruh taman di Kabupaten Belitung dapat terkelola dengan baik. Pada tahun 2021, kegiatan peningkatan PSU yang dilaksanakan adalah operasional dan pemeliharaan taman di 23 lokasi yang tersebar di wilayah kabupaten Belitung.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

(1) Pengelolaan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan diajarkan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belitung mengupayakan dalam aspek ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Berikut hasil kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2018-2022.



Tabel 2.57 Hasil Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penegakan PERDA dan Perkada	100%	100%	98,8%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, 2023

Pada tahun 2022, hasil kinerja urusan ketentraman dan ketertiban melalui indikator kinerja penegakan PERDA dan PERKADA mencapai 100%. Penegakan PERDA dan PERKADA ini merupakan upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, serta mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib dan tentram. Selain anggota Satuan Polisi Pamong Praja, upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Jumlah satuan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58 Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	490	490	490	490	490

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) pada tahun 2022 sebanyak 490 orang, sehingga jumlah satlinmas pada setiap Desa dan Kelurahan di Kabupaten Belitung sebanyak 10 orang. Satpol PP harus berkolaborasi dengan satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

(2) Penanggulangan Bencana Kebakaran

Untuk memberikan pelayanan publik berupa proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, suatu daerah perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK pada suatu daerah tergantung dari luas daerah tersebut dengan minimal satu WMK.

Response Time (waktu tanggap) merupakan waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen



Kebakaran. Berikut hasil indikator kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2018-2022.

Tabel 2.59 Hasil Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) *	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%
Persentase (%) korban bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan selama masa tanggap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : * Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, 2019, 2020

** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung, 2021, 2022, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan bencana Kabupaten Belitung belum maksimal hanya 7,68% dengan 1 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Cakupan tersebut diukur dari perbandingan banyaknya jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk, serta didukung dengan keberadaan pos pemadam kebakaran.

Penanggulangan bencana kebakaran wajib dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai ditempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Sehingga dibutuhkan penambahan Infrastruktur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran agar cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Belitung merata.



f. Sosial

Pada urusan sosial terdapat beberapa indikator yang menjadi ukuran kinerja, diantaranya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Perkembangan pada urusan Sosial dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60 Hasil kinerja urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah PMKS	13.534	14.337	13.606	14.829	14.716
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	73,85	83,89	94,77	97,69	98,80
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap(%)	100	100	100	100	100
5	Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	73,85	83,89	94,77	97,69	98,80

Sumber : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung, 2023

Dari data diatas pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 113 menjadi 14.716, dan persentase dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 98,80%. Terjadi penurunan jumlah PMKS di tahun 2022.

2.3.1.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja dapat diketahui dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, maka mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Selain itu indikator yang umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi makro ketenagakerjaan daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berbanding terbalik dengan TPAK, TPT yang tinggi justru menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.



Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Belitung berkurang sebanyak 1.590 orang, atau menjadi 96.818 orang bila dibandingkan angkatan kerja tahun 2018. Sebaliknya pada kelompok bukan angkatan kerja terjadi kenaikan sebesar 4,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu penduduk usia kerja di Kabupaten Belitung terus bertambah setiap tahunnya.

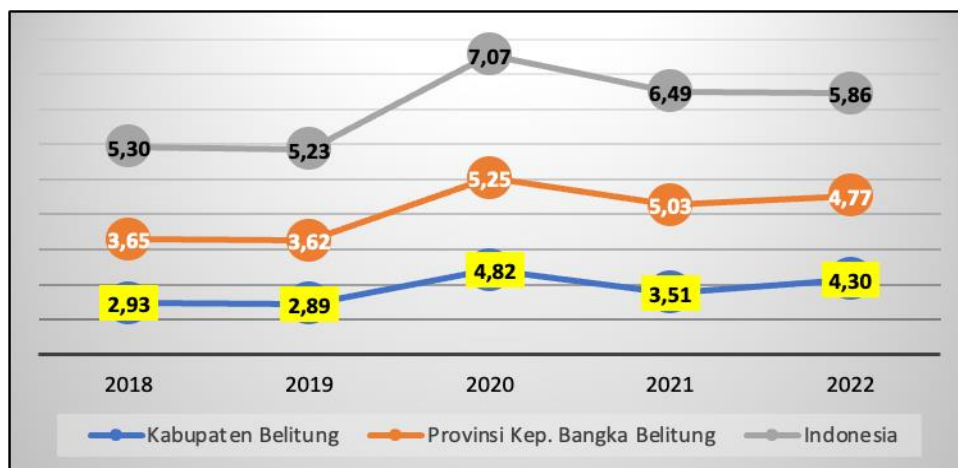
Tabel 2.61 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia Kerja (Orang)	139.868	143.197	143.814	146.122	148.373
Angkatan Kerja	98.408	98.436	99.692	96.844	96.818
Bekerja	95.521	95.583	94.886	93.445	92.658
Pengangguran Terbuka	2.887	2.853	4.806	3.399	4.160
Bukan Angkatan Kerja	41.460	44.761	44.122	49.278	51.555

Sumber : BPS Kabupaten Belitung 2022

Adapun komponen angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja dikategorikan sebagai penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, sebagaimana dilansir dari Jurnal *The Labor Force Approach and The Korean Labor Force Data* (1974) oleh Yunshik Chang. Contoh kelompok bukan angkatan kerja antara lain : ibu rumah tangga, orang yang masih bersekolah, lansia, pensiunan dan orang disabilitas yang tidak bisa mengerjakan apapun.

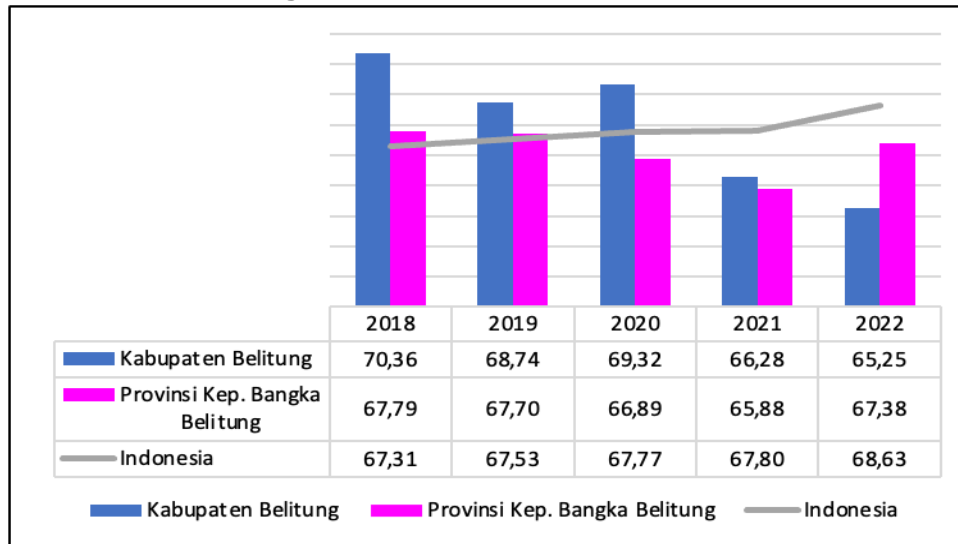
Gambar 2.33 TPT Kabupaten Belitung terhadap TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Belitung Tahun 2023 (diolah)



Gambar 2.34 TPAK Kabupaten Belitung terhadap TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Belitung Tahun 2023 (diolah)

TPT Kabupaten Belitung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak bekerja menjadi sebanyak 4.160 orang. Jadi dari 96.818 jiwa penduduk Kabupaten Belitung yang termasuk angkatan kerja, maka 4,30 persen diantaranya merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran ini meningkat 0,79 poin dari tahun sebelumnya. Angka tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional.

Sementara itu TPAK Kabupaten Belitung cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Capaian TPAK lebih kecil dari tahun sebelumnya atau berkurang 1,03 persen menjadi 65,25 persen pada tahun 2022. Perubahan jumlah angkatan kerja turut mempengaruhi penurunan TPAK tersebut.

Pemerintah daerah dalam hal ini terus melakukan upaya melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja atau Balai Latihan Kerja, membuka akses dunia kerja secara lebih luas dan mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung berkembangnya usaha baru kreatif yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.

Selain TPT dan TPAK terdapat beberapa indikator kinerja lain yang terkait dengan urusan tenaga kerja seperti yang dinyatakan pada tabel berikut.



Tabel 2.62 Hasil Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pencari Kerja (Orang)	246	3.370	2.908	438	363
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)	49	174	187	58	80
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)	30	5,16	4,57	13,24	22,05
4	Penyelesaian penyelesaian hubungan industrial/PHK (kasus)	12	24	34	13	7

Sumber : Dinas KUKMPTK Kabupaten Belitung, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan terhadap jumlah pencari kerja hingga mencapai 363 orang dari tahun sebelumnya yang juga berimbas pada berkurangnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Namun besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan justru naik 8,81 persen dari capaian tahun sebelumnya. Ini menjadi isyarat bagi pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan penciptaan lapangan kerja serta perluasan lapangan kerja dan ketersediaan lapangan usaha baru terutama yang berbasis sumber daya lokal.

Sementara itu terkait dengan jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ PHK tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Adapun penyelesaian kasus hubungan industrial ini dilakukan melalui Perjanjian Bersama (PB) dan anjuran. Jadi dari 7 kasus yang difasilitasi dengan mediasi, 3 kasus diselesaikan melalui anjuran dan 4 kasus lainnya melalui Perjanjian Bersama (PB).

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan 2 (dua) ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan.

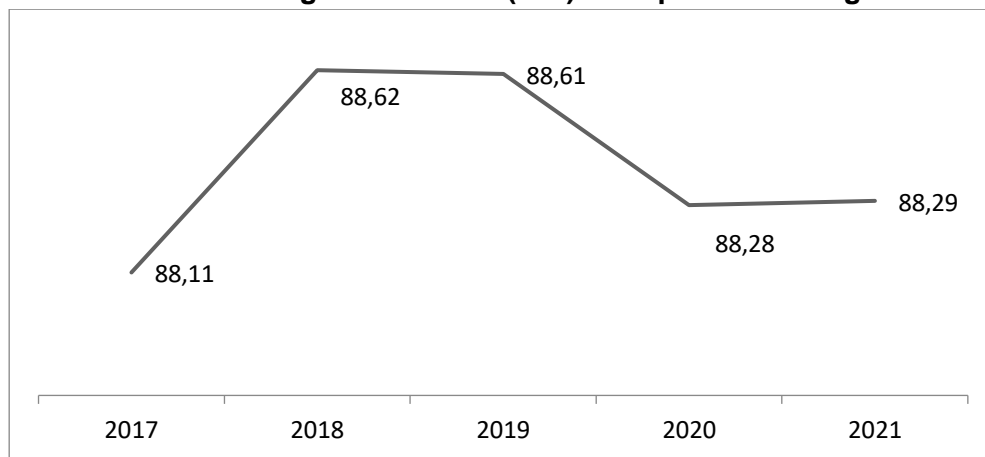
Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Konsep dan Definisi BPS adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPM memberikan gambaran pembangunan kapabilitas dasar manusia di bidang pendidikan,



kesehatan dan ekonomi, sedangkan IPG mengukur kapabilitas dasar manusia pada ketiga bidang tersebut, tetapi terfokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan membandingkan kedua indikator tersebut dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Lebih rendahnya pencapaian IPG dibandingkan IPM menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender pada ketiga bidang pembangunan tersebut, sehingga kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut data capaian IPG di Kabupaten Belitung tahun 2017-2021.

Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Publikasi BPS Kabupaten Belitung, 2022 (diolah)

Gambar 2.35 diatas menunjukkan perkembangan IPG Kabupaten Belitung selama 2017-2021. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa IPG Kabupaten Belitung pada periode 2018-2020 terus mengalami penurunan atau dengan kata lain pembangunan yang berwawasan gender tidak merata. Akan tetapi pada tahun 2021, angka IPG mengalami sedikit kenaikan menjadi 88,29. Kondisi ini perlu mendapat perhatian bahwa Pemerintah daerah perlu redistribusi peran dengan memperhatikan pembangunan yang berbasis gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 sebesar 88,29 sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 72,57, artinya masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan IPG Belitung masih berada di bawah 100 dalam kurun waktu 2017-2021. Meskipun demikian, peningkatan IPG merupakan suatu kemajuan dalam hal kesetaraan

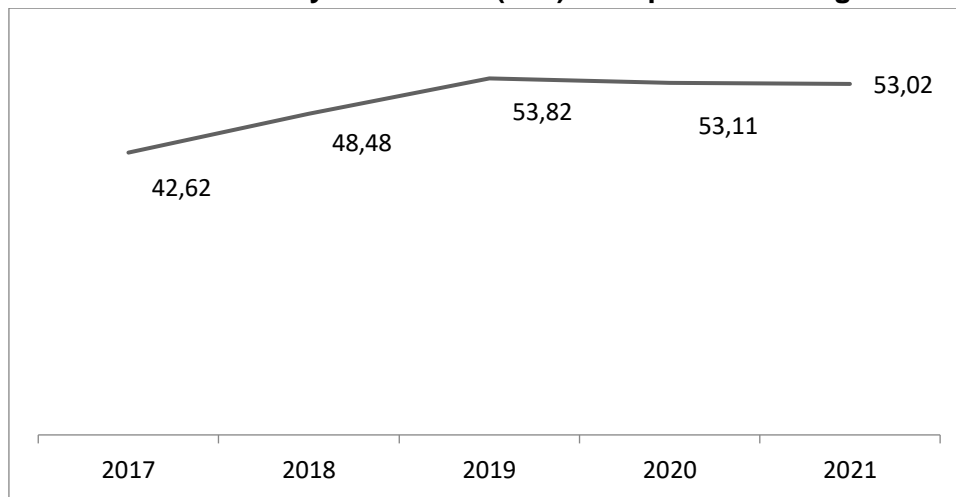


gender. Kemajuan ini disebabkan oleh komponen-komponen pembangunan perempuan terus tumbuh lebih cepat bahkan nilainya lebih tinggi dibanding laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan Indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi, IDG digunakan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan. Interpretasi IDG adalah semakin tinggi maka perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, serta melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut merupakan capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Belitung pada Tahun 2017-2021.

Gambar 2.36 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Publikasi BPS Kabupaten Belitung,2022 (diolah)

Berdasarkan grafik tersebut IDG Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam periode 2017 -2019. Tetapi pada periode 2019-2021 mengalami penurunan, ini disebabkan karena menurunnya peranan perempuan di parlemen dan peranan perempuan sebagai tenaga professional.

Dari data IPG dan IDG diatas, pemerintah daerah perlu member perhatian khusus terhadap kesetaraan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan serta dalam hal



pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, terutama dibidang politik yang perlu ditingkatkan.

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Belitung selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63 Hasil kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2017 – 2021

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	0	0	1	2	2
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	N/A	N/A	N/A	20,9	34,9
3	Jumlah kekerasan dalam rumah tangga	88	51	44	28	28
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	N/A	N/A	62	33,6	36,9
5	Persentase penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)	100	100	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas SPPPA Kabupaten Belitung, 2022

Berdasarkan data capaian urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Belitung selama tahun 2017-2021 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat satu perwakilan perempuan di DPRD dengan status pengganti antar waktu, sedangkan untuk pemilihan periode 2019 – 2024 terpilih dua perwakilan perempuan yang duduk di DPRD.



Jumlah kekerasan dalam rumah tangga dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 28 kasus dari sebelumnya berjumlah 44 kasus pada tahun 2019. Peningkatan data rasio KDRT tersebut menunjukkan peran masyarakat akan kepedulian dalam menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga jika dilihat dalam penyampaian informasi ke lembaga terkait.

c. Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras) dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Peningkatan urusan pangan dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, peningkatan ketersediaan pangan, dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan seimbang. Berikut adalah tabel kinerja urusan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun 2018-2022.

Tabel 2.64 Hasil Kinerja Urusan Pangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018– 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pangan					
1	Pengawasan dan pembinaan keamanan	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan pangan utama	107,24	116,29	99,60	98,96	104,08
3	Persentase tingkat keamanan pangan	n/a	n/a	100	90,91	94,29
4	Ketersediaan Energi dan protein perkapita	154,8	164,38	169,20	171,04	162,20
5	Penguatan cadangan pangan	4	6,5	15	15	35,376
6	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,09	76,5	81,7	78,9	79,90
7	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	5,59	14,69	35,75	56,64	49,48
8	Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	n/a	n/a	n/a	97,5	99,21
9	Persentase penurunan status desa/kelurahan rawan pangan	n/a	n/a	n/a	14,29	12,24

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2023



Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Belitung terus berfluktuasi. Pada tahun 2022, ketersediaan pangan tersedia sebesar 104,08 Ton/Tahun, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 98,96 Ton/Tahun, begitu juga apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Upaya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman terus dilakukan dan dilaksanakan secara partisipatif. Ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh penyediaan dalam negeri dan perubahan stok.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Belitung masih berfluktuasi dan menunjukkan peningkatan kembali pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan masih kurang beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan data Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi pangan hewani melebihi konsumsi energi standar, sedangkan tingkat konsumsi pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih di bawah konsumsi energi standar. Kurang beragamnya pola konsumsi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyusun pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan juga dipengaruhi penguatan cadangan pangan sebesar 35,376 ton. Cadangan Pangan Daerah (CPD) mengalami pengurangan karena adanya penyaluran cadangan pangan daerah sebesar 1,035 ton untuk korban banjir di Desa Cerucuk, Kecamatan Badau.

d. Lingkungan Hidup

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung semakin tahun semakin meningkat sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan antara lainnya tingginya produksi sampah serta pencemaran udara dan air. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan sangat perlu untuk memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperkecil pengaruh negatif yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi ruang terbuka hijau menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan lingkungan hidup tercermin dalam indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung pada tahun 2022 sebesar 69,25 melebihi target yang ditetapkan 68,37. Namun Angka ini masih berada di bawah target Pemerintah pusat yang menargetkan



IKLH tahun 2020 sebesar 71,43. Selama lima tahun terakhir IKLH mengalami peningkatan secara fluktuatif. Pada tahun 2022 naik sebesar 1,16 poin dari tahun 2021 sebesar 68,09, hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Belitung semakin baik.

Tabel 2.65 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,18	64,82	67,62	68,09	69,25
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	57,34	50	53,16	56,75	59,90
3	Hasil Pengukuran indeks kualitas Udara	89,40	96,32	92,63	91,69	91,67
4	Hasil Pengukuran indeks kualitas Tutupan Lahan	35,40	52,31	46,19	43,89	43,83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2023

Dari tabel di atas menggambarkan tiga indikator yang menjadi dasar penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Perkembangan ketiga komponen tersebut dalam lima tahun tersebut berfluktuasi sebagaimana dinyatakan pada tabel diatas. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan sebesar 3,15 persen bila dibandingkan nilai tahun sebelumnya. Capaian ini antara lain disebabkan adanya perubahan lokasi titik pantau air sungai untuk mendapatkan keterwakilan pemantauan air sungai berdasarkan lokasi hulu, tengah dan hilir sungai, penambahan nilai yang dihitung dari lokasi yang diuji oleh pusat, serta nilai IKA sesuai perhitungan IKLH melalui aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebaliknya pada dua komponen IKLH lainnya justru mengalami penurunan sebesar 0,02 persen untuk Indeks Kualitas Udara dan 0,06 persen untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Menurunnya kualitas udara di Kabupaten Belitung disebabkan belum tertatanya pengelolaan lingkungan, baik dalam pengawasan dan pemantauan area kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah, serta makin bertambahnya jumlah dan aktivitas penduduk dalam penggunaan bahan bakar minyak di kehidupan sehari-hari. Sedangkan penurunan signifikan pada Indeks Tutupan lahan disebabkan banyak faktor, salah satunya belum memadainya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, serta inventarisasi data tutupan lahan secara menyeluruh masih kurang akurat.



Ketiga indikator tersebut tentunya tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menjalankan program yang mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Ketersediaan informasi mengenai status lingkungan hidup dapat dilihat dari dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).

Salah satu permasalahan lain terkait dengan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Belitung yaitu masalah persampahan. Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berikut tabel kondisi persampahan di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2018-2022.

Tabel 2.66 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Timbulan sampah yang ditangani (Ton/Tahun)	26.092,17	26.092,97	24.092,97	13.577,09	1.422.910
Persentase jumlah sampah yang tertangani	30,84%	34,03%	15,02%	16,73%	16,81%
Jumlah TPS 3R yang ada	11	14	15	6	6

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2023

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah terus bertambah, dan akan menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan datang. Dari jumlah area pelayanan sampah di Tanjungpandan persentase jumlah sampah yang ditangani terus meningkat sebesar 16,81 di tahun 2022 dan jumlah TPS 3R pada tahun 2022 Masih sama sebanyak 6 lokasi yang di tahun sebelumnya sebanyak 6 lokasi. Hal tersebut di sebabkan oleh berkurangnya pengelola TPS 3R sehingga banyak TPS 3R yang tidak aktif lagi. Pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya dalam menangani permasalahan persampahan salah satu nya dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2019



tentang tata cara penerapan sanksi pelanggaran atas larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah disediakan dan membentuk satuan tugas (satgas) laskar bersih (lebah). Selain itu Kebijakan strategis yang diambil oleh Kepala daerah pada tahun 2021 antara lain :

1. Gerakan “Sehari ndak makai kemasan plastik sekali pakai”.
2. Himbauan agar tidak menggunakan kantong plastik dengan menyediakan wadah yang dapat digunakan ulang.
3. Tatacara pemusnahan limbah infeksius (Limbah B3).
4. Tatacara penyimpanan, pengangkutan dan/atau pemusnahan dan pengolahan residu hasil pembakaran atau cacahan hasil outoclave limbah B3 dari hasil penanganan Covid-19 Kabupaten Belitung.
5. Himbauan Pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah infeksius (limbah B3) dari ODP pada rumah tangga.
6. Larangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sebagai tempat pembuangan limbah medis.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Administrasi kependudukan berupa pendaftaran penduduk yang bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

Sedangkan pencatatan sipil adalah proses catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register catatan sipil oleh instansi penyelenggara catatan sipil sebagai dasar penerbitan kutipan akta yang diantaranya berupa akta kelahiran, akta nikah, akta cerai hingga akta kematian. Berikut adalah tabel indikator kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 – 2022.



Tabel 2.67 Hasil Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk (%)	96.96	99.83	98.21	98,47	n/a
2	Rasio bayi berakte kelahiran	100	99.45	99.01	100	n/a
3	Rasio pasangan berakte nikah	63	68.71	73.02	76,7	n/a
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100	100	100	100	100
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	88,28	-	-	-	-
8	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan	-	92,59	92,02	92,68	78,72

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2023

Secara umum capaian kinerja indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Belitung dalam kurun 2017 –2021 mengalami peningkatan. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Belitung dilihat dari tahun 2020, walaupun sebelumnya di tahun 2019 mengalami peningkatan 99,83%. Dan Pada tahun 2021, rasio penduduk Kabupaten Belitung yang memiliki KTP per satuan penduduk adalah sebesar 98,47% sedikit ada peningkatan dibanding tahun 2020 yaitu 98,21%. Kecenderungannya meningkat stabil memang terjadi dalam periode 2017 – 2021 ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mengurus KTP. Namun masih ada penduduk yang sering menunda-nunda untuk mengurus KTP, terutama wajib KTP pemula, sehingga pada tahun 2021 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk masih belum bisa mencapai angka 100%.

KTP berisi Keterangan jati diri penduduk yang menjelaskan tentang nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat, golongan darah dan agama. KTP merupakan alat bukti sah dan menjadi dasar dalam proses pelayanan



masyarakat. Sedangkan data tahun 2022 belum ada, karena masih menunggu rilis data semester dari Kementerian Dalam Negeri.

Rasio bayi berakta Kelahiran (0-1 th) pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,99% dari tahun 2021 yakni mencapai 100%. Artinya semua bayi yang lahir pada tahun 2021 sudah memiliki akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk mengurus akta kelahiran. Rasio bayi berakta Kelahiran (0-1 th) pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,44% dari tahun 2019 yang mencapai 99,45%. Penurunan ini akibat masih adanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengurus Akta kelahiran putra putrinya untuk berbagai kepentingan, khususnya persyaratan masuk sekolah. Sedangkan data tahun 2022 belum ada, karena masih menunggu rilis data semester dari Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, rasio pasangan berakta nikah juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2017, rasio pasangan berakte nikah adalah sebesar 61% mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadi sebesar 15,7% pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Namun untuk pernikahan-pernikahan yang telah dilangsungkan sudah cukup lama, masih banyak yang belum dilaporkan, baik itu pernikahan muslim di KUA atau pernikahan non muslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan data tahun 2022 belum ada, karena masih menunggu rilis data semester dari Kementerian Dalam Negeri. Cakupan penerbitan akta kelahiran dari tahun 2018-2022 telah mencapai target, hal ini dikarenakan sudah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akte kelahiran keluarga, terutama akte kelahiran anak.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK juga sudah dilaksanakan dan sudah berjalan dari tahun tahun sebelumnya, karena kegunaan dari NIK adalah pada dasarnya menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Dengan demikian, jelas bahwa digit dalam NIK bukanlah serangkaian nomor acak. Tiap digit dalam NIK memiliki perannya sendiri-sendiri. NIK memiliki fungsi untuk memastikan bahwa penduduk yang memilikinya telah terekam dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional. Lebih lanjut, NIK juga berfungsi untuk mengintegrasikan penduduk dengan berbagai pelayanan publik yang ada. Oleh karena itu, keberadaan NIK dalam KTP patut mendapat perhatian lebih.

Database kependudukan skala Kabupaten di Kabupaten Belitung sudah ada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung terus berupaya meningkatkan pelayanan dan selalu berinovasi agar masyarakat Belitung selalu terlayani dengan baik dan



proses pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Inovasi-inovasi layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya inovasi PANTAS (Pelayanan Antar Prioritas), BEKAWAN (Membuat KIA lewat Online), Matang Pohon (Melayani Pindah Datang yang dimohonkan di tempat Tujuan) dan PADUKART (Pelaporan Duka ke Ketua RT).

Persentase capaian tertib administrasi kependudukan pada tahun 2022 semester I sebesar 78,72% belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 92%. Hal ini disebabkan oleh Data Kependudukan Bersih Semester II untuk capaian tertib administrasi kependudukan sampai dengan laporan ini dibuat belum dirilis dari Kementerian Dalam Negeri.

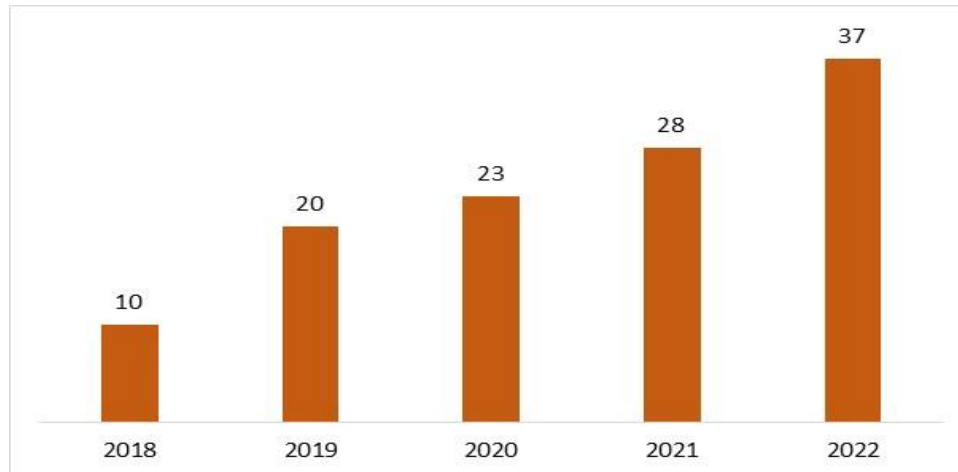
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik terhadap pelayanan umum dalam melayani masyarakat Kabupaten Belitung dan Data base kependudukan skala kabupaten sudah terakses dengan baik.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil kinerja urusan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut.

1. Jumlah Desa dengan IDM Desa “Maju”

Indikator ini menggambarkan jumlah desa dengan IDM desa “Maju” berbanding dengan jumlah seluruh desa yang ada di Kabupaten Belitung. IDM atau indeks desa membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Tujuannya adalah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Berikut data jumlah desa dengan IDM desa “maju” di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.



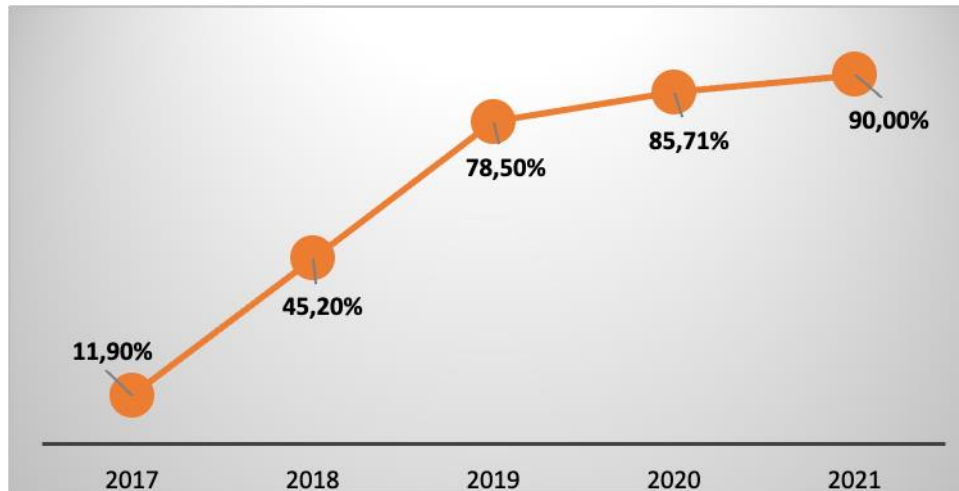
Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2023; diolah

Gambar 2.37 Jumlah Desa dengan IDM Desa “Maju” Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Berdasarkan data di atas, jumlah desa dengan IDM desa “maju” kurun waktu 2018-2022 terus meningkat. Tahun 2018 jumlah desa maju di Kabupaten Belitung berjumlah 10 desa, terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 menjadi berjumlah 37 desa. Jumlah total desa di Kabupaten Belitung adalah 42 desa, artinya dengan tingkat capaian sebesar 88,09% dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 42%. Hal ini menunjukkan bahwa desa sudah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

2. Persentase BUM Desa aktif setiap desa

Indikator ini menggambarkan jumlah BUM Desa aktif berbanding dengan seluruh BUM Desa yang ada di setiap desa di Kabupaten Belitung. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berikut data Persentase BUM Desa aktif setiap desa di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.



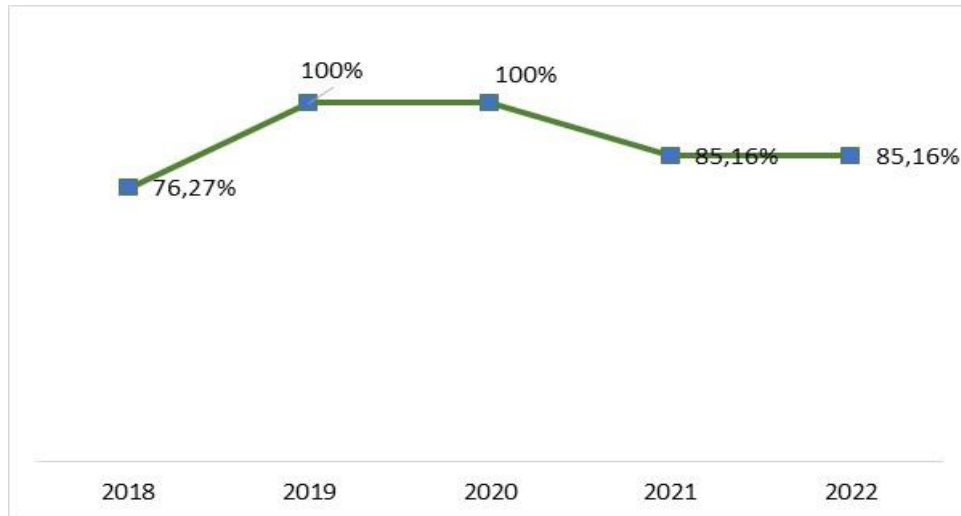
Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2022; diolah

Gambar 2.38 Persentase BUM Desa aktif setiap desa di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Berdasarkan data di atas, Persentase BUM Desa aktif setiap desa di Kabupaten Belitung kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 BUM Desa aktif hanya sebesar 45,20% meningkat menjadi sebesar 88,09% tahun 2022 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 21,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat.

3. Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksinasi kepada bayi dan balita. Kegiatan yang dilakukan di posyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada. Berikut ini merupakan data posyandu aktif di Kabupaten Belitung.



Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2023; diolah

Gambar 2.39 Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase posyandu aktif dari tahun 2018-2022 berfluktuatif. Tahun 2018 persentase posyandu aktif sebesar 76,27%, meningkat menjadi 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020 namun pada tahun 2021 turun kembali menjadi sebesar 85,16% dan tahun 2022 masih diangka yang sama. Penurunan posyandu aktif dimulai karena adanya pandemi Covid-19 dan beberapa posyandu masih belum aktif sampai dengan tahun 2022.

4. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah wadah kegiatan bagi kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan dari PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Sedangkan kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau bagian seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.



Tabel 2.68 Rata-rata kelompok Binaan PKK di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Kelompok Binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2023; diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata kelompok binaan PKK dari tahun 2018-2022 sudah mencapai 100%. Dari total 2.559 kelompok PKK semuanya sudah diibina dengan baik oleh Tim Penggerak PKK di Kabupaten Belitung.

5. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup paling kecil. Berikut adalah data persentase PKK aktif di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.

Tabel 2.69 Persentase PKK Aktif di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	97,96%

Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2023; diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa persentase PKK aktif di Kabupaten Belitung kurun waktu Tahun 2018-2020 sudah mencapai 100%. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan kelompok kaum wanita di Kabupaten Belitung memberikan sumbangan positif dalam meningkatkan kesejahteraan dalam sebuah keluarga.

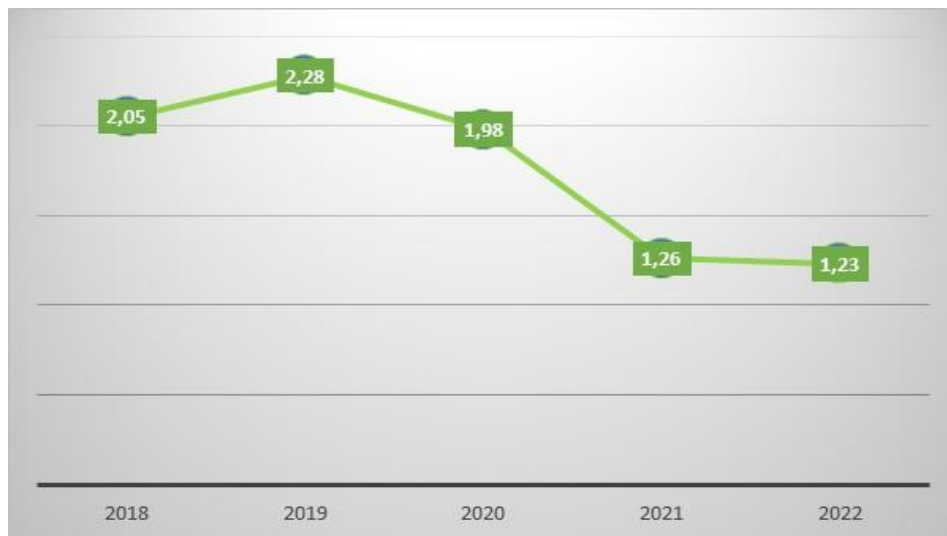
g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana selama tahun 2018 sampai dengan 2022 antara lain dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut.



1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator laju pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut data laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung tahun 2018-2022.



Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2023 diolah

Gambar 2.40 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

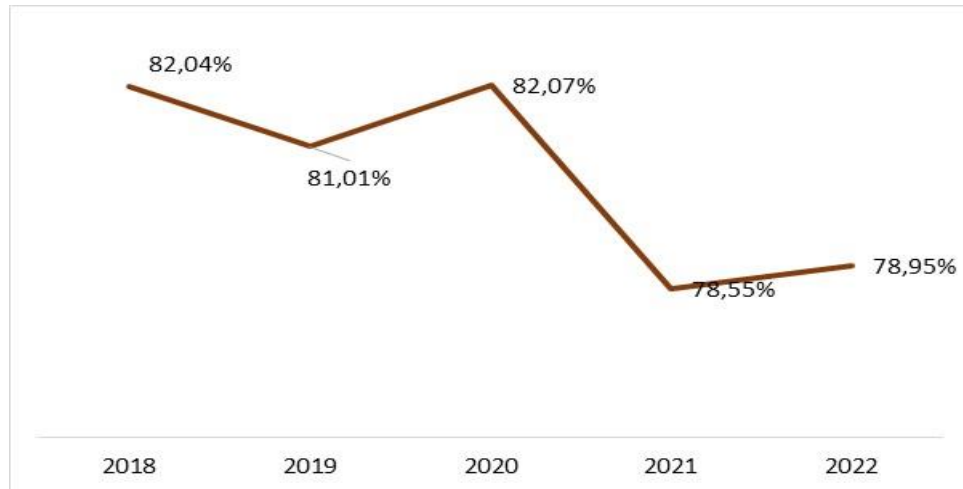
Laju pertumbuhan penduduk kurun waktu 2018-2022 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,28 dan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,23. Secara umum faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor alam yaitu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) serta faktor non alam yaitu migrasi. Penurunan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kematian penduduk akibat Covid-19.

2. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat menstruasi atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, juga



termasuk di dalamnya peserta KB baru pada tahun berjalan. Berikut perkembangan cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.



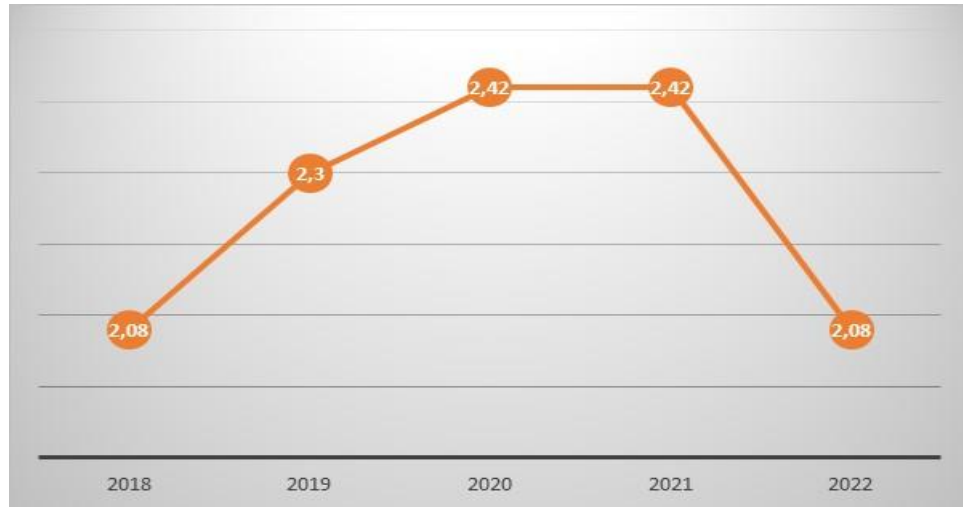
Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2023; diolah

Gambar 2.41 Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif Di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Grafik di atas menunjukkan perkembangan cakupan PUS menjadi peserta KB aktif dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Cakupan PUS menjadi peserta KB aktif tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 82,07% dan terendah sebesar 78,55% pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar 78,95%. Penurunan cakupan PUS menjadi peserta KB aktif disebabkan usia 49 tahun yang masih menggunakan KB tidak terhitung sementara masih banyak perempuan usia 49 tahun keatas yang masih menjadi peserta KB aktif sehingga cakupannya menjadi turun.

3. Total Fertility Rate (TFR)

TFR menurut BPS adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.



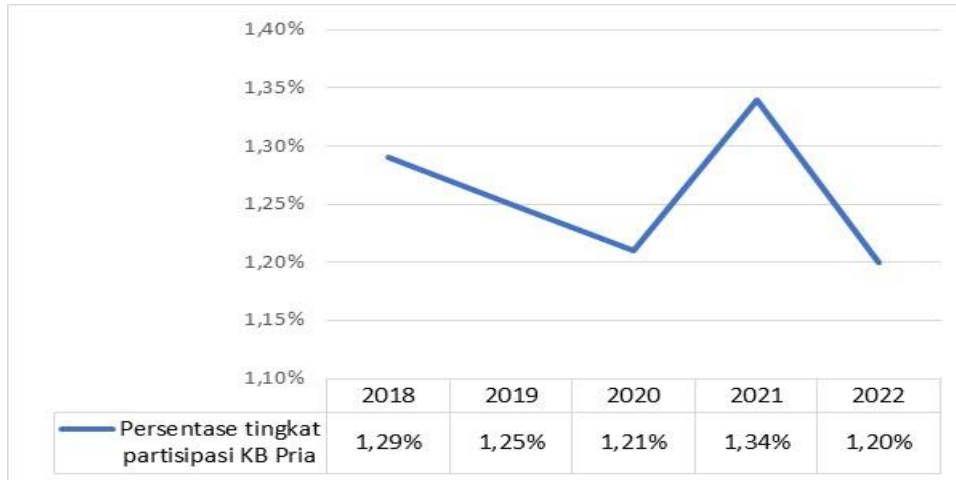
Sumber: DPPKBPMD Kab. Belitung, 2023; diolah

Gambar 2.42 Total Fertily Rate (TFR) Di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Berdasarkan data di atas, perkembangan TFR di Kabupaten Belitung kurun waktu 2018-2021 cenderung meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017 TFR sebesar 2,08 meningkat menjadi 2,42 tahun 2021. Namun pada tahun 2022 TFR di Kabupaten Belitung turun secara signifikan menjadi sebesar 2,08 Artinya bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2 anak selama masa usia suburnya.

4. Persentase tingkat partisipasi KB pria

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi pria menikah dalam ber-KB dibandingkan total seluruh pria yang menikah di Kabupaten Belitung. Partisipasi pria secara tidak langsung adalah mendukung dalam ber-KB dengan cara memilih kontrasepsi yang cocok yaitu kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan dan kondisi istrinya karena tidak semua perempuan secara hormon cocok menggunakan alat kontrasepsi. Berikut data persentase tingkat partisipasi KB pria di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.



Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2023; diolah

Gambar 2.43 Persentase Tingkat Partisipasi KB Pria Di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Perkembangan persentase tingkat KB pria di Kabupaten Belitung kurun waktu 2018-2022 berfluktuatif dengan capaian persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 1,34% dan terendah sebesar 1,20% tahun 2022. Jika melihat angka ini, dapat terlihat bahwa partisipasi pria dalam ber-KB tergolong masih rendah di Kabupaten Belitung, hal ini disebabkan masih banyak pria yang tidak mengetahui adanya kontrasepsi yang bisa dilakukan oleh pria, mereka menganggap yang harus ber-KB adalah perempuan sehingga sosialisasi mengenai KB pria masih perlu ditingkatkan.

5. Tingkat partisipasi peserta KB MKJP

Metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka Panjang. Selain itu, menurut BKKBN, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit, serta metode yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Jenis MKJP adalah IUD, implan atau susuk, tubektomi atau vasektomi.

Tabel 2.70 Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP Di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Tingkat partisipasi peserta KB MKJP	12,49%	13,99%	15,08%	14,40%

Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2023



Tabel di atas menunjukkan kondisi empat tahun terakhir tingkat partisipasi KB MKJP di Kabupaten Belitung. Pada tahun 2019 penggunaan kontrasepsi jangka panjang sebesar 12,49% terus meningkat menjadi sebesar 13,99% tahun 2020 dan 15,08% tahun 2021. Namun pada tahun 2022 tingkat partisipasi KB MKJP di Kabupaten Belitung turun menjadi sebesar 14,40%. Dari data di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi KB MKJP di Kabupaten Belitung masih rendah bahkan tidak sampai 20%. Artinya peran penyuluh KB dalam mempromosikan maupun mensosialisasikan KB MKJP perlu ditingkatkan.

6. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)

Unmet need adalah proporsi wanita usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai kontrasepsi. Berikut adalah data cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*).

Tabel 2.71 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) Di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	5,04%	8,25%	7,36%	9,55%	8,24%

Sumber: DPPKBPMMD Kab. Belitung, 2023

Berdasarkan tabel di atas, *unmet need* di Kabupaten Belitung kurun waktu tahun 2018-2022 berfluktuatif dengan cakupan tertinggi terjadi tahun 2021 sebesar 9,55% dan terendah 5,04% tahun 2018. Pada tahun 2022 turun menjadi sebesar 8,24%. Faktor yang berpengaruh terhadap *unmet need* adalah faktor demografi dan sosial ekonomi, selain itu akses layanan, kualitas suplai dan pelayanan KB, kurangnya informasi, hambatan dari suami, kepercayaan tertentu serta persepsi terhadap resiko kehamilan menjadi faktor penyebab lainnya dari *unmet need*.

h. Perhubungan

Sebagai wilayah kepulauan tentunya urusan perhubungan sangat memegang peranan penting di dalam menjaga keterhubungan antar daerah, hal ini terkait dengan kelancaran arus orang, barang dan jasa dimana menjadi sebab-akibat interaksi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang baik maka distribusi barang dan jasa dari sentra produksi ke daerah konsumen dapat berjalan lancar, selain itu dampak positif lain yang dapat dicapai



adalah terbukanya daerah-daerah yang terisolir serta mobilitas penduduk pun ikut meningkat. Berikut ini penjelasan capaian indikator keberhasilan pembangunan urusan perhubungan dalam mendukung aspek pelayanan umum selama tahun 2018–2022 adalah:

Tabel 2.72 Hasil kinerja urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Arus Penumpang angkutan umum					
A	Tiba	563.080	8.325	6.310	9.365	9.745
B	Berangkat	564.165	10.638	8.725	12.683	12.518
2	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas penumpang	81%	82%	89,71%	79,67%	80,48%
3	Jumlah Uji KIR angkutan umum	400	305	2.065	2.179	1.248
4	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	89,46%	89,86%	56 %	11 %	75,64%
5	Pemasangan Rambu-Rambu	2.298	2.354	1.967	1.967	2.027
6	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	3.108	3.500	4.015	4.080	5.014

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum cenderung mengalami naik turun dari tahun ke tahun baik jumlah penumpang tiba maupun penumpang berangkat penumpang yang menggunakan angkutan umum. Pada tahun 2021 ada sebanyak 9.365 penumpang yang tiba dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 9.745 penumpang tiba di tahun 2022 sedangkan penumpang berangkat dari terminal Tanjungpandan juga mengalami Kenaikan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2021 adalah dari 8.725 menjadi sebesar 12.683 penumpang berangkat dari Terminal Tanjungpandan. Kenaikan jumlah penumpang angkutan darat baik yang tiba maupun yang berangkat, dapat disebabkan karena sudah mulainya penurunan status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kabupaten Belitung sehingga masyarakat mulai menggunakan angkutan umum untuk berpergian.

Kabupaten Belitung mengalami peningkatan kualitas dalam arus lintas jalan raya sejak tahun 2021, terlihat dari tabel di atas, fasilitas keselamatan lalu lintas meningkat dari 79,67% menjadi 80,84% di tahun 2022. Hal ini pula selaras dengan presentase kepemilikan KIR



angkutan umum yang mengalami kenaikan menjadi 75,64% di tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya kendaraan bermotor yang secara teknis layak digunakan di jalan raya khususnya kendaraan dengan membawa penumpang di Kabupaten Belitung. Kualitas arus lintas jalan raya juga dapat diindikasikan dengan banyaknya rambu dan lampu jalan. Banyaknya pemasangan rambu dan lampu jalan cenderung fluktuatif naik tahun selama tahun 2018–2022.

i. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan informasi multi media, serta perluasan jaringan sarana dan prasarana informasi. Keterbukaan memperoleh informasi semakin hari semakin mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan di era globalisasi saat ini.

Penyampaian informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi publik pemerintah dilakukan dengan berbagai media diseminasi informasi publik. Teknologi informasi dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas dengan cara baru, yang lebih inovatif, instan, akurat, transparan, tepat waktu dan efektif. Data mengenai kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73 Hasil kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018– 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Komunikasi dan Informatika					
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 2)	6	6			
2	Web site milik pemerintah daerah	19	19			
3	Persentase Terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	25	82,75			
4	Terintegrasinya sistem informasi			90,63	96.87	100
5	Diseminasi Informasi			100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2023



Pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dijabarkan melalui Indikator Kinerja Persentase pelayanan komunikasi dan informasi yang berkualitas di Tahun 2020 dan 2021. Indikator tersebut berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan. Dari data pada tabel di atas indikator terintegrasi nya sistem informasi mengalami peningkatan yang sebesar 3,13%, atau 100% meningkat dari tahun 2021 yang hanya sebesar 96,87%. Sedangkan indikator diseminasi informasi tetap mencapai target sebesar 100%. Namun untuk indikator pengaduan masyarakat di tahun 2021 indikator tersebut tidak termasuk dalam formulasi rata-rata persentase capaian indikator. Untuk pencapaian indikator tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan berbagai upaya berupa pengembangan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya dan aplikasi publik yang sudah saling terintegrasi dengan layanan publiknya.
2. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur berupa pembangunan jaringan Intra pemerintah daerah dan jaringan komunikasi pemerintah daerah.
3. Interopabilitas dan teknologi berupa integrase data dan peremajaan perangkat teknologi informasi.
4. Tata kelola berupa kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlangsungan implementasi layanan teknologi informasi.
5. Sosialisasi, Pelatihan dan Workshop terkait teknologi informasi.

Selain upaya di atas dukungan SDM yang memahami teknis pengelolaan *e-government*, anggaran yang memadai, tata kelola dan dukungan OPD yang memahami peran dan fungsi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Di bawah ini dapat dilihat tabel realisasi sistem informasi yang terintegrasi, dan daftar Media Website dan Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Tabel 2.74 Realisasi Terintegrasinya Ssistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung tahun 2021-2022

NO	Alamat	2021	2022
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	31 sistem	46 sistem
2	Jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai SPBE yang ada	32 Sistem	46 sistem

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2023



Tabel 2.75 Daftar Media Website yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung tahun 2022

NO	Alamat	Keterangan
1	http://kominfo.belitung.go.id/	Website Dinas Kominfo
2	http://portal.belitung.go.id/	Website Pemkab Belitung
3	http://mediacenter.belitung.go.id/	Website Media Center Dinas Kominfo

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2023

Tabel 2.76 Daftar Media Sosial yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung tahun 2022

NO	Jenis Media Sosial	Keterangan
1	Facebook	http://www.Facebook.com/kominfobelitung
2	Instagram	http://www.instagram.com/kominfobelitung
3	Twitter	http://twitter.com/kominfobelitung
4	Youtube	http://www.youtube.com/channel
5	Tiktok	Kominfo Belitung

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2023

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) ditujukan untuk memberdayakan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut perkembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.77 Hasil kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	129	133	135	138	139
2	Jumlah Koperasi (Unit)	183	187	189	189	193
3	Persentase koperasi aktif	70.49	71.12	71.43	73,02	72,02
4	Volume usaha koperasi (juta rupiah)	63.321,49	65.230,64	78.302,23	93.098,52	89.183,86
5	Jumlah Usaha Mikro	17,596	18,320	20.503	22.899	23.552
6	Pertumbuhan Usaha mikro	5,47%	4.11%	11,92%	11,69%	13,58%



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Jumlah sarana pemasaran usaha mikro	1	2	2	2	2

Sumber :Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2023

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 adalah sebesar 72,02 % atau bertambah menjadi 139 koperasi aktif bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hanya 54 koperasi atau 27,98 persen koperasi yang tidak aktif. Ini juga dapat diartikan bahwa koperasi tersebut dalam proses pembekuan, sedangkan untuk proses pembekuan diperlukan waktu 2 tahun untuk pembubaran koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 46 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Sementara itu jumlah anggota koperasi pada tahun 2022 mengalami penurunan 1,28 persen dari tahun sebelumnya. Demikian pula dengan volume usaha koperasi yang berkurang hingga 4,20 persen atau menjadi Rp. 89.183.859.000,-. Hal tersebut disebabkan terdapat beberapa koperasi yang mengalami penurunan pendapatan, terutama jenis usaha koperasi yang bergerak di bidang sektor perkebunan seperti harga tandan buah sawit (tbs) yang harganya menurun drastis sedangkan biaya angkut transportasi meningkat karena harga bahan bakar minyak yang juga naik.

Tabel 2.78 Data Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Anggota Koperasi (Orang)
(1)	(2)	(3)
1.	2018	15,815
2.	2019	16,108
3.	2020	16,254
4.	2021	16,242
5.	2022	16.034

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2023

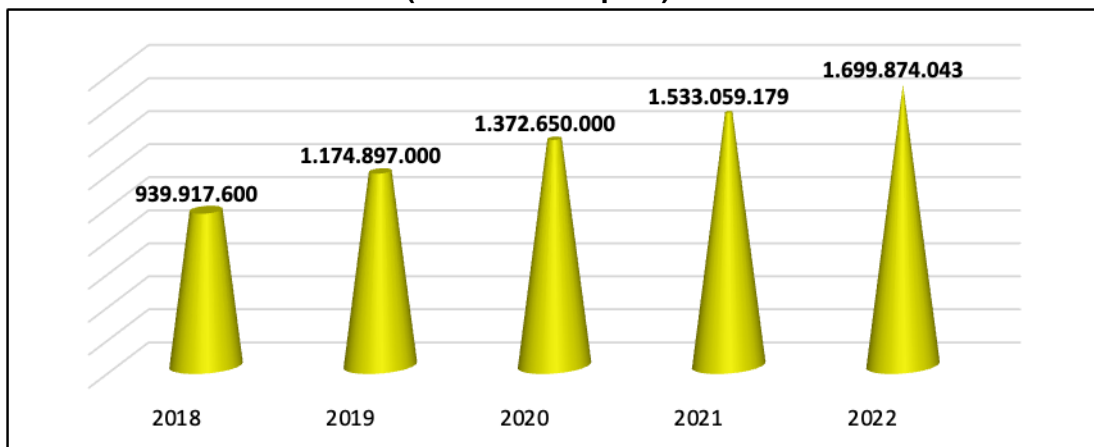
Dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa koperasi adalah salah satu penggerak pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan produktivitas dan kualitas koperasi baik secara kelembagaan maupun partisipasi aktif masyarakat. Koperasi juga hendaknya tidak terbatas hanya di bidang simpan pinjam, tapi juga lebih bersifat produktif dan



merambah berbagai sektor, terutama sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal, sehingga nantinya dapat memberi *multiplier effect* terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung.

Selain koperasi, usaha mikro dan usaha kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Pandemi covid-19 tidak mempengaruhi perkembangan usaha mikro di Kabupaten Belitung yang ditunjukkan dengan penambahan usaha mikro pada tahun 2022 sebanyak 653 unit atau naik 2,85 persen dari tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan geliat pariwisata di Kabupaten Belitung termasuk penyelenggaraan event meski terbatas karena masih pemulihan dari pandemi Covid-19. Terkait sarana pemasaran usaha mikro di Kabupaten Belitung memang baru terdapat dua tempat/pasar. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah kedepan dalam hal penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha mikro tersebut. Selain itu stimulus dalam bentuk pada usaha mikro kecil juga terus diberikan oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi daerah.

**Gambar 2.44 Omset Usaha Mikro di Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022
(dalam ribu rupiah)**



Sumber : Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Omset usaha mikro di Kabupaten Belitung juga mengalami kenaikan selama periode 2018-2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 17,88 persen per tahun. Ini tidak terlepas dari upaya pemerintah antara lain dengan melakukan pelatihan dan pembinaan kewirausahaan usaha kecil menengah terutama dari sisi pemanfaatan ekonomi digital dan peningkatan kemampuan pelaku usaha tersebut dalam bidang pemasaran secara *online* dan pendampingan usaha mikro kecil melalui CIS PLUT KUMKM.



Secara umum pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten cukup baik yang ditunjukkan dari meningkatnya nilai omset usaha mikro. Hal ini merupakan dampak dari terlaksananya pembinaan oleh pemerintah khususnya dinas KUKMPTK dan PLUT KUKM melalui pembinaan kewirausahaan di setiap kecamatan dan desa sehingga meningkatkan jumlah wirausahawan di Kabupaten Belitung.

k. Penanaman Modal

Salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah adalah investasi. Investasi atau penanaman modal kini berperan penting, karena kapasitas fiskal pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota amat terbatas sehingga sulit bila selalu dijadikan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Bila pada suatu daerah terjadi peningkatan investasi maka yang diharapkan adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi, terserapnya tenaga kerja yang berimbang pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan hidup yang layak.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, pemerintah Kabupaten Belitung masih sangat memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Kedua macam penanaman modal tersebut umumnya dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun berupa penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini merupakan table hasil kinerja urusan Penanaman Modal selama Tahun 2018-2022.

Tabel 2.79 Hasil kinerja urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penanaman Modal					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
a	PMDN	67	94	313	150	126
b	PMA	20	34	160	80	69
2	Jumlah Investor yang diberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal	n/a	n/a	n/a	50	56
3	Jumlah Investasi berskala nasional.					
a	PMDN (Juta Rp)	1.047.840,4	317.849,20	497.256,80	390.381,0	968.699,30



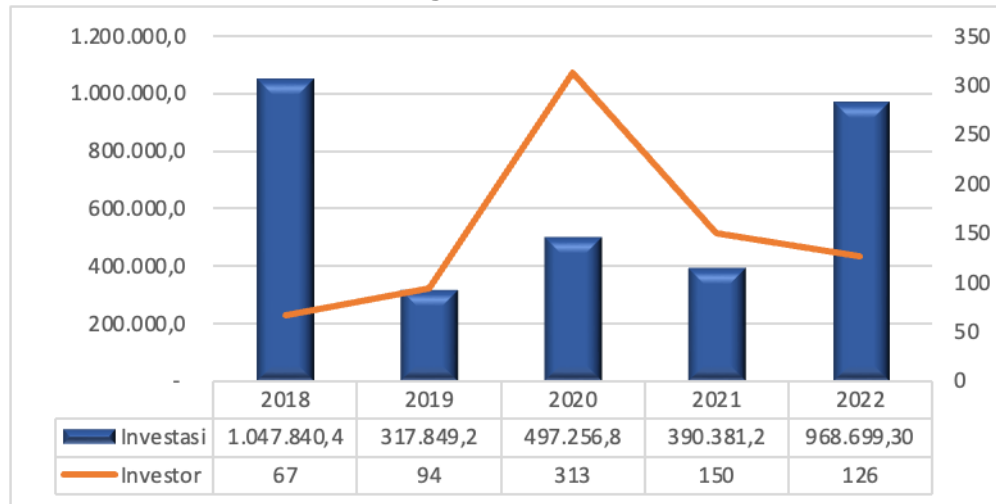
No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
b	PMA (US \$)	5.676,50	13.575,30	20.652,0	7.239,70	3.173,80
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta rupiah)					
a	PMDN (Juta Rp)	407.164,90	-729.991,20	179.407,6	-106.875,6	578.318,1
b	PMA (US \$)	-11.157,50	7.898,8	7.076,7	-13.412,30	-4.065,9
5	Persentase kenaikan/ penurunan realisasi investasi					
a	PMDN (Persen)	63,53	-69,67	56,44	-21,49	148,14
b	PMA (Persen)	-66,28	139,15	52,13	-64,94	-56,14
6	Meningkatnya jumlah investor					
a	PMDN	43	27	219	-163	-24
b	PMA	1	14	126	-50	-11
7	Survey Kepuasan Masyarakat	87,21	80,3	3,31	3,56	3,72

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2023

Perkembangan investasi dalam negeri di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 mengalami penurunan pada jumlah investor, namun meningkat pada nilai investasinya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2022 sebanyak 126 investor di Kabupaten Belitung dengan total nilai investasi sebesar Rp 968.699.300.000,-. Jumlah ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 148,14 persen bila dibandingkan dengan capaian realisasi investasi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp 390.381.000.000,- dengan jumlah investor yang menanamkan modal sebanyak 150 investor. Penurunan yang signifikan terjadi pada Penanaman Modal Asing (PMA) baik pada jumlah investor maupun nilai investasinya. Nilai investasi asing yang masuk ke Kabupaten Belitung pada tahun 2022 hanya sebesar US \$ 3.173,80 dengan jumlah investor sebanyak 69 investor. Berikut adalah grafik jumlah investor dan jumlah investasi PMDN dan PMA selama tahun 2018 – 2022.

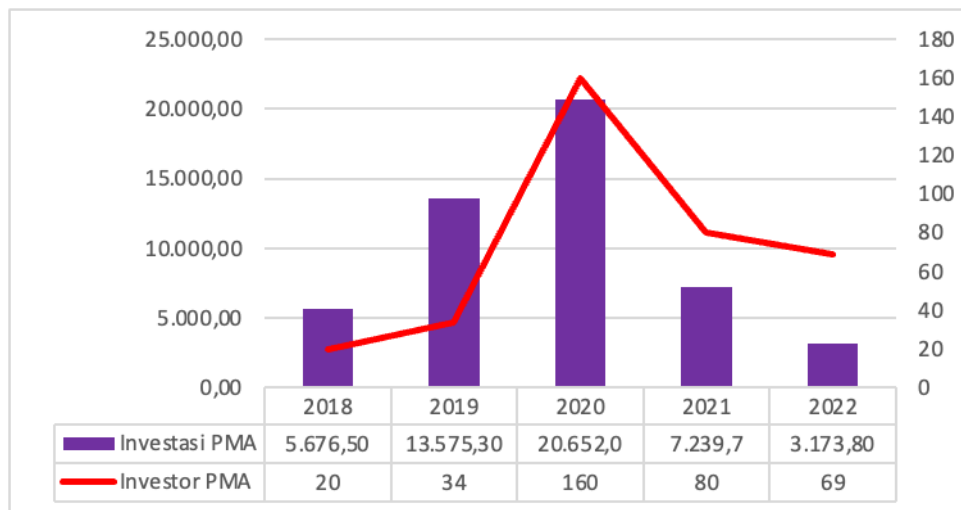


Gambar 2.45 Jumlah Investor Dalam Negeri beserta Realisasi Investasi di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Gambar 2.46 Jumlah Investor Asing beserta Realisasi Investasi di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan keempat nilai investasi di Kabupaten Belitung mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Penanaman Modal Asing (PMA), namun meningkat tajam pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Turunnya modal asing ini, dikarenakan secara umum banyak keluarnya arus modal asing yang dipicu keluarnya investor asing dari pasar saham. Banyak sektor mengalami



kontraksi termasuk sektor pariwisata yang menyebabkan iklim usaha kurang kondusif dan investor harus berpikir ulang untuk menanamkan modalnya.

I . Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga menjadi bagian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif. Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2009 Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Salah satu indikator yang dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan bagi penyelenggaraan urusan kepemudaan adalah jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi kepemudaan yang diimplementasikan dengan program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dan peningkatan kompetensi kepemudaan, yang salah satunya pada kegiatan penggemblengan Paskibraka Tahun 2021 dari mulai seleksi dan kegiatan lain-lain yang telah menghasilkan prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam hal peningkatan pembangunan bidang pemuda dan olah raga menunjukkan kearah yang lebih baik. Untuk selengkapnya hasil kinerja urusan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80 Hasil kinerja urusan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah organisasi pemuda	23	23	24	24	32
2	Jumlah kegiatan kepemudaan	4	4	5	6	6
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	85	85	87,50	88	88
4	Jumlah organisasi olahraga	20	24	26	30	30
5	Cakupan pembinaan olahraga (%)	24	24	100	100	100



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	48	48	52,30	60	77,06
7	Cakupan pembinaan atlet muda	80	80	100	100	100
8	Jumlah lapangan olahraga	104	118	451	425	425
9	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelayanan kepemudaan	200	250	300	325	445
10	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				77,66	77,71
11	Organisasi Kepramukaan yang difasilitasi dalam Organisasi Kepramukaan				1	1
12	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar				77,23	77,23
13	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi dan event olahraga rekreasi			3 even	3 even	21 event

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung, 2023

Peningkatan prestasi olah raga diupayakan oleh daerah melalui Perangkat Daerah terkait dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga serta melakukan pembinaan terpadu terhadap para atlit dan pelatih pada cabang-cabang olah raga. Untuk meningkatkan motivasi masyarakat akan gemar berolah raga maka dilaksanakan beberapa program yang diterjemahkan kedalam beragam kegiatan berupa penyelenggaraan kejuaraan serta pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dijabarkan dalam indikator kinerja nilai tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 6 Prestasi dengan capaian SDM 77,71% di peroleh dari data jumlah pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Belitung (pemuda usia 16 s.d 30 tahun). Realisasi nilai tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan ini pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0.05% dari tahun 2021. Tingginya peningkatan pencapaian hasil kinerja dikarenakan banyaknya pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan di tiap-tiap kecamatan. Namun disisi lain juga terdapat kendala dalam pencapaian target ini dikarenakan pemuda



aktif yang didata harus sesuai usia pemuda yaitu 16 tahun sampai dengan 30 tahun, sedangkan peserta aktif yang mengikuti organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat banyak yang sudah berusia diatas 30 tahun.

Untuk organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam organisasi Kepramukaan terdapat 1 (satu) Lembaga yaitu Kwartir Cabang (Kwartir Cabang). Kwartir Cabang aktif melakukan program kegiatan yang telah direncanakan karena didukung oleh kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung.

Hasil kinerja persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar adalah sebesar 77,23%, yang menunjukkan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Belitung sudah cukup baik dan memenuhi standar. Sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Belitung ini antara lain: Stadion, Gor, Lapangan Tenis Husein dan Lapangan Tenis Rajawali dan lainlain. Untuk jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi dan event olahraga rekreasi terlaksana sebanyak 21 event yang diperoleh dari penyelenggaraan event olahraga rekreasi yaitu: kegiatan peningkatan kesegaran jasmani masyarakat, even Belitung *Golf Championship Series*, dan Lomba Belitung *Geopark Run*. Sedangkan untuk even olahraga prestasi tidak terlaksana karena di tingkat Provinsi tidak diadakan kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota.

m. Statistik

Kewenangan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan bidang statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja. Penyediaan data tersebut dilakukan dengan penyediaan sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu instrumen analisis evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang



lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. Berikut merupakan tabel hasil kinerja urusan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung tahun 2018-2021.

Tabel 2.81 Hasil kinerja urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	70	100			
2	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Daerah	-	100			
3	Pemanfaatan Data			100	100	200

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2023

Dari tabel di atas, terlihat menunjukkan bahwa capaian pemanfaatan Data sama dengan tahun 2021 yaitu mencapai 100% di tahun 2022. Komponen ini diukur dengan membandingkan jumlah data yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dengan jumlah data yang tersedia. Pemanfaatan. Pemanfaatan data yang terealisasi sampai dengan triwulan IV diperoleh dari 502 jenis data melalui Portal Belitung Satu Data yang telah dimanfaatkan seluruhnya oleh stakeholder. Adapun upaya-upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Melakukan pemuktahiran data pada Portal Belitung Satu Data, dengan mengumpulkan data dari seluruh perangkat daerah.
2. Membuat akun admin pada masing-masing perangkat daerah, agar data dari perangkat daerah langsung diinput oleh masing-masing admin sehingga mempercepat publikasi data.
3. Menambah menu baru di portal satu data yaitu menu Metadata.
4. Menyusun metadata kegiatan beberapa OPD (hasil metadata pada 2 (dua) OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian).

n. Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penerapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah. Dengan



demikian untuk mengantisipasi kebebasan dalam mengakses berbagai kebutuhan informasi dengan berbagai macam teknologi yang semakin canggih sehingga memerlukan pengamanan terhadap informasi Pemerintah Daerah. Perkembangan terhadap kinerja persandian dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 82 Hasil kinerja urusan Persandian Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	20	50	50		
3	Agregat nilai pelaksanaan control pengamanan informasi dengan menggunakan instrument yang ditetapkan BSSN	32% (Level II)	20% (Level I)	45% (Level II)	68,3% (Level II)	70,4% (Level II)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Dari data pada tabel di atas tahun 2021, tingkat kematangan keamanan informasi yang diperoleh dari Assesment Indeks KAMI (Keamanan informasi) yakni level II atau mencapai 70,4%. Realisasi capaian tingkat kematangan informasi ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yakni mendapatkan level II, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2021. Pada tahun 2022, tingkat kelengkapan penerapan standar ISO270001 sesuai kategori SE sudah mencapai 409 jumlah nilai per area dibanding dengan tahun 2021 yang hanya mendapatkan 384 jumlah nilai per area.

Adapun upaya-upaya penting yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Melakukan perjanjian kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dengan Balai Sertifikasi (BSrE) , Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) tentang pemanfaatan sertifikat Elektronik pada sisitem elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung.
2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggraan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung.



3. Melaksanakan pendaftaran dan aktivasi sertifikat elektronik di pimpinan pemerintah Kabupaten Belitung dan melaksanakan ceremony penggunaan tanda tangan elektronik pimpinan sejawat sosialisasi pemanfaatan sertifikat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung.
4. Melaksanakan literasi keamanan informasi ke 5 (lima) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se Kabupaten Belitung.

Selain itu Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang keamanan informasi, ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya rekomendasi perbaikan dari penilaian tahun sebelumnya turut mendukung pencapaian kinerja tersebut.

o. Kebudayaan

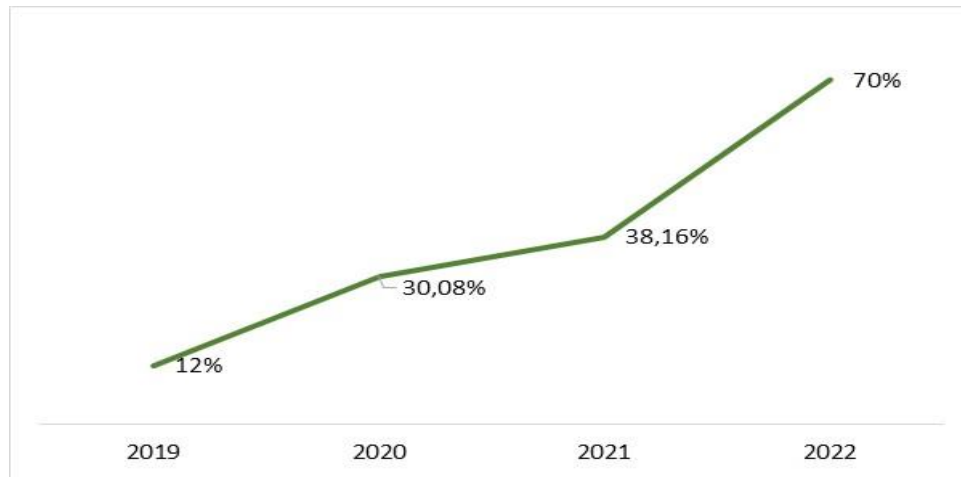
Penyebaran arus globalisasi menjadi suatu hal yang tak terelakkan dewasa ini. Perkembangan globalisasi memiliki dampak positif dan juga negatif. Terkait dengan hal tersebut, kebudayaan harus menjadi fondasi dari setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan di daerah. Kebudayaan memiliki peran strategis bagi sebuah daerah.

1. Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah

Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan disebut objek pemajuan kebudayaan. Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 5 menyebutkan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), dimana salah satunya adalah seni. “upaya perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk seni, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Diperlukan adanya peran dan sinergi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan. Berikut data persentase pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022.



Gambar 2.47 Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah Di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023; diolah

Berdasarkan data di atas, perkembangan pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Belitung kurun waktu 2019-2022 cukup baik, dapat terlihat dari peningkatan yang terjadi setiap tahunnya. Tahun 2017 persentase pemajuan kebudayaan daerah sebesar 12% meningkat menjadi 30,08% tahun 2020 dan menjadi sebesar 38,16% tahun 2021. Tahun 2022 pemajuan kebudayaan daerah meningkat tajam menjadi sebesar 70%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Belitung semakin meningkat.

2. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya dan Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya digelar sebagai upaya pengenalan budaya serta untuk meningkatkan ketahanan budaya dan juga kemajuan kebudayaan daerah khususnya budaya Kabupaten Belitung yang tentunya didukung dengan sarana penyelenggaraan seni dan budaya itu sendiri. Berikut data penyelenggaraan festival seni dan budaya dan sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.



Tabel 2.83 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya dan Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8 kali	24 kali	8 kali	9 kali	4 kali
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023; diolah

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Belitung kurun waktu 2018-2022 berfluktuatif dengan penyelenggaraan terbanyak terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 24 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya dan mulai menurun ketika terjadi pandemi covid-19 di tahun 2020 menjadi 8 kali dan tahun 2021 meningkat menjadi 9 kali namun pada tahun 2022 turun menjadi 4 kali dalam setahun. Sedangkan untuk sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2018-2022 berjumlah 7 buah.

3. Cagar budaya

Menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Berikut adalah data cagar budaya di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Tabel 2.84 Data mengenai Cagar Budaya di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2 buah	2 buah	2 buah	3 buah	3 buah
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2023; diolah



Berdasarkan data di atas, perkembangan benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2018-2022 berjumlah 38 buah. Hal ini sesuai dengan dokumen PPKD (Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan) Kabupaten Belitung yang digunakan pemerintah daerah sebagai pedoman dalam pelestarian kebudayaan daerah. Demikian halnya dengan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu juga berjumlah 38 buah, artinya dari 38 buah cagar budaya yang telah diinventarisasi dalam dokumen PPKD, semuanya telah dilakukan upaya baik dalam hal pengelolaan maupun pelestarian. Sedangkan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari sebelumnya berjumlah 2 buah pada tahun 2018 sampai dengan 2020, bertambah satu dalam 2 tahun terakhir sehingga menjadi 3 buah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi yaitu diantaranya Gedung Nasional, Museum Tanjungpandan dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Belitung.

p. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Perpustakaan merupakan tempat sumber belajar dan informasi yang menyimpan mengelola dana memberikan layanan bahan pustaka baik buku maupun non buku. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka: a). dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan; b). dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik; c). dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga masyarakat yang lebih baik; d). dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia; e). dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya; f). dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antar bangsa; g). dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial.

Keberadaan perpustakaan mempunyai peran penting dalam peningkatan sumberdaya manusia, menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan, menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya membaca serta



pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat, mengembangkan komunikasi antara pemakai dan atau dengan penyelenggara sehingga tercipta kolaborasi, *sharing* pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya, sebagai motivator, mediator dan fasilitator bagi pemakai dalam usaha mencari, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta berperan sebagai agen perubah, pembangunan dan kebudayaan manusia. Keberadaan perpustakaan juga diharapkan dapat meningkatkan pembudayaan gemar membaca di masyarakat. Berikut Hasil kinerja urusan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2018-2022.

Tabel 2.85 Hasil kinerja urusan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	10.939	10.005	3.410	3.934	6.328
2	Jumlah buku yang dipinjam	15.940	12.769	5.084	5.488	4.414

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, 2023

Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya meningkatkan akses perpustakaan kepada masyarakat, hal ini terlihat dari jumlah pengunjung perpustakaan serta jumlah buku yang dipinjam selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 capaian kinerja urusan perpustakaan terkait jumlah kunjungan pemustaka sebesar 10.939 pemustaka. Namun memasuki triwulan pertama tahun 2019 dengan diterpa isu penyebaran virus corona di Indonesia pada umumnya dan di Pemerintah Kabupaten Belitung khususnya, ini menjadi faktor penghambat dalam capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Terlihat pada tahun 2019 capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar hanya menjadi 10.005 pemustaka, dibandingkan capaian pada tahun 2018 dengan persentase penurunan sebesar 8,54%. Memasuki tahun 2020 capaian kinerja mengalami menurun yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh semakin merabaknya penyebaran *Covid-19* di Pemerintahan Kabupaten Belitung sehingga akses kunjungan pemustaka yang langsung datang ke Perpustakaan Daerah sangat minim. Kemudian juga ada pembatasan-pembatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung terkait dilarangnya berkerumun di tempat-tempat keramaian dan berkunjung ke fasilitas umum di Kabupaten Belitung.



Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah pada tahun 2020 menurun drastis dengan penurunan pemustaka sebesar 6.595 pemustaka. Memasuki tahun 2021 capaian kinerja terkait kunjungan pemustaka mulai mengalami peningkatan walaupun belum signifikan kenaikannya. Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah buku yang dipinjam ini dikarenakan tumbuhnya minat baca dari berbagai lapisan masyarakat, dan diiringi dengan peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan di Perpustakaan Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung mengembangkan inovasi bidang layanan berupa pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Digital dengan memperkuat diversifikasi *e-book* yang dinamakan *i-Belitung*. Dengan diluncurkan *i-belitung* sekaligus menjawab permintaan pemustaka akan literasi berbasis digital yang dapat diakses melalui *smart phone* tanpa harus datang ke Perpustakaan Daerah. Hal ini juga dapat mencegah berkerumunannya pemustaka di Perpustakaan Daerah di masa pandemi *COVID-19*. Sehingga pada tahun 2021 capaian pengunjung pemustaka mengalami kenaikan sebesar 533 pemustaka, atau sebesar 13,55% dibandingkan dengan tahun 2020. Demikian pula pada tahun 2022 dengan adanya inovasi LEJUK (Literasi Elektronik Jalanan Untuk Kita) dan SIKANTAN (Sirkulasi Koleksi Antar Perpustakaan) berkorelasi positif terhadap peningkatan kunjungan pemustaka sebesar 2.396 pemustaka atau tingkatan persentase capaiannya sebesar 60,9%. Inovasi LEJUK hadir untuk memperkuat layanan perpustakaan daerah sebagai tanggung jawab penyampaian literasi untuk daerah-daerah yang dianggap potensial untuk dikunjungi, dan Program LEJUK ini sudah terintegrasi dengan *i-Belitung*. LEJUK *iBelitung* merupakan bentuk dari komitmen dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk berinovasi terhadap layanan perpustakaan di Perpustakaan Daerah. Terhadap capaian jumlah buku yang dipinjam memiliki tren yang sama dengan capaian kunjungan pemustaka dengan tren pada tahun 2019 mengalami penurunan, berulang pada tahun 2020 dan mulai mengalami kenaikan pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan jumlah buku yang dipinjam, dengan persentase penurunannya sebesar 19,6%.

q. Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan



bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti sah untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video dan digital. Mengingat jumlah arsip yang semakin banyak dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan maka diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang lebih dikenal dengan sistem kearsipan melalui beberapa pekerjaan atau kegiatan untuk mengelola arsip yang ada. Pengertian kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan Lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip secara umum untuk penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi dan wahana komunikasi. Selain itu arsip memiliki fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pembuat arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga/instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi. Sedangkan fungsi sekunder yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pembuat arsip melainkan bagi kepentingan lembaga, instansi pemerintah, swasta, dan perorangan. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna pembuktian dan penginformasian. Arsip juga digunakan sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bagi bangsa dan negara.



Tabel 2.86 Hasil kinerja urusan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	n/a	19,03	36,59	43,85	64,10
2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	75%	80%	85%	95%	95%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, 2023

Kinerja pengelolaan arsip di Kabupaten Belitung semakin baik, hal ini ditunjukkan dari semua perangkat daerah telah melakukan pengelolaan arsip secara baku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Republik Indonesia. Peningkatan tersebut tak lepas dari upaya dari pemerintah untuk meningkatkan SDM pengelola kearsipan yang pada tahun 2022 sudah mencapai 95%. Kompetensi khusus di masing-masing perangkat daerah yang menangani kearsipan (arsiparis) sudah semakin baik. Sumber Daya Aparatur di Lembaga Kearsipan Daerah sudah mulai menerapkan dan memenuhi unsur NSPK Kearsipan yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya berupaya optimal pelaksanaan terhadap kaidah-kaidah kearsipan yang akan dapat membantu di dalam pelaksanaan tugas kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Belitung merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari sekitar 163 (seratus enam puluh tiga) buah pulau besar dan kecil. Letak geografis Kabupaten Belitung yang luas wilayahnya didominasi lautan merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara baik sehingga perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Belitung. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah produksi perikanan tangkap memberikan sumbangan yang jauh lebih besar dibandingkan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Belitung. Perkembangan pembangunan Perikanan di Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun dapat terlihat dari kinerja sebagai berikut.

Perikanan Merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Belitung, letak geografis kabupaten Belitung yang luas wilayahnya didominasi lautan merupakan suatu potensi yang



sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara baik. Perkembangan pembangunan Perikanan di Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dapat terlihat dari kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.87 Hasil kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

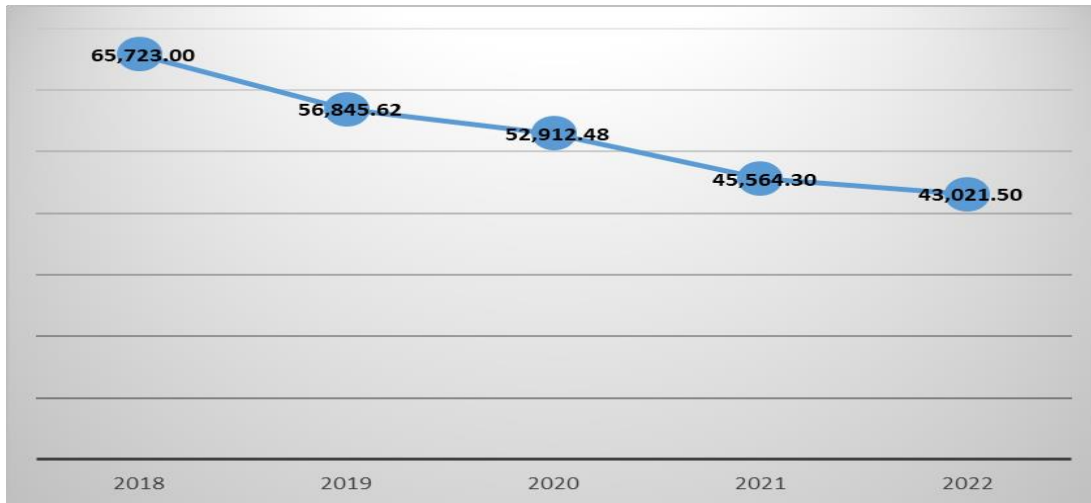
No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	65.723	56.845,62	52.912,48	45.564,3	43.021,5
2	Produksi perikanan Budidaya (ton)	207,2	176,48	152,96	179,78	154,49
3	Jumlah Produksi pengelolaan hasil perikanan (ton)	8.452	8.311	8.095	10.518,88	8.968,07
4	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	50,13	59,42	69,84	70,44	70,60
5	Jumlah Ekspor Hasil Perikanan (ton)	2.783,35	2.065,54	1.960,32	1.863,26	2.373,00
6	Jumlah Benih yang dihasilkan (ekor)	1.999.268	2.282.015	2.250.611	2.900.508	7.614.131
7	Jumlah Kelompok pembudidaya ikan (POKdakan)	88	103	72	40	39
8	Jumlah Kelompok usaha bersama (KUB)	241	227	241	275	320

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, 2023

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sejumlah 43.021,5 ton/tahun dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan capaian sejumlah 45.564,3 ton/tahun. Penurunan produksi perikanan tangkap ini disebabkan Zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga membutuhkan armada penangkapan yang jauh lebih besar dan armada tersebut perlu dilakukannya modernisasi, Umur teknis unit (prasarana usaha perikanan tangkap) yang tersedia harus dilakukan peremajaan, sehingga saat ini seringkali mengalami kendala kerusakan teknis, sehingga sering mengalami hambatan dalam menjalankan usaha perikanan tangkap walaupun nantinya akan ditangani dengan baik. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrim pada penghujung tahun yang juga mengakibatkan penurunan produksi perikanan tangkap. Ini dapat dilihat dalam Grafik berikut.



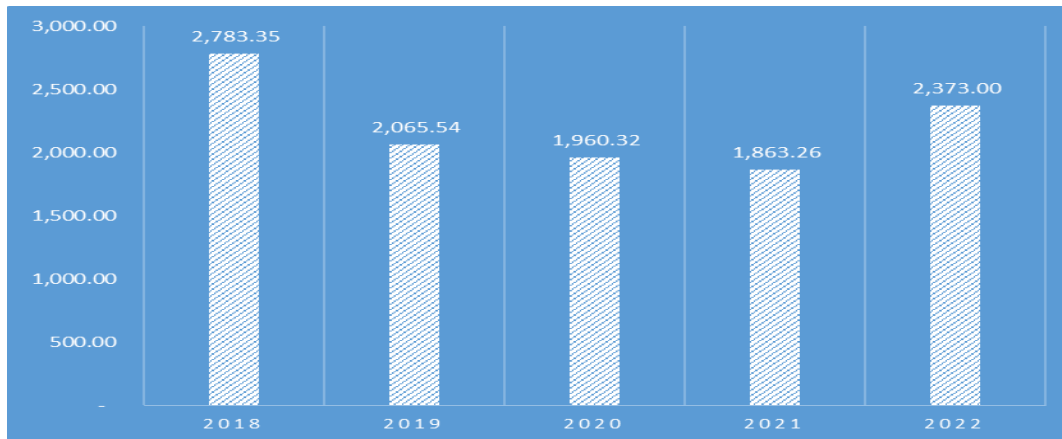
Gambar 2.48 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Adanya penurunan produksi perikanan tangkap ini tidak berpengaruh kepada jumlah ekspor hasil perikanan. Ini terlihat dari jumlah ekspor perikanan pada tahun 2021 sebanyak 1.863,26 ton menjadi 2.373,00 ton pada tahun 2022, atau mengalami peningkatan jumlah ekspor sebesar 27,35 %.

Gambar 2.49 Jumlah Ekspor Hasil Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



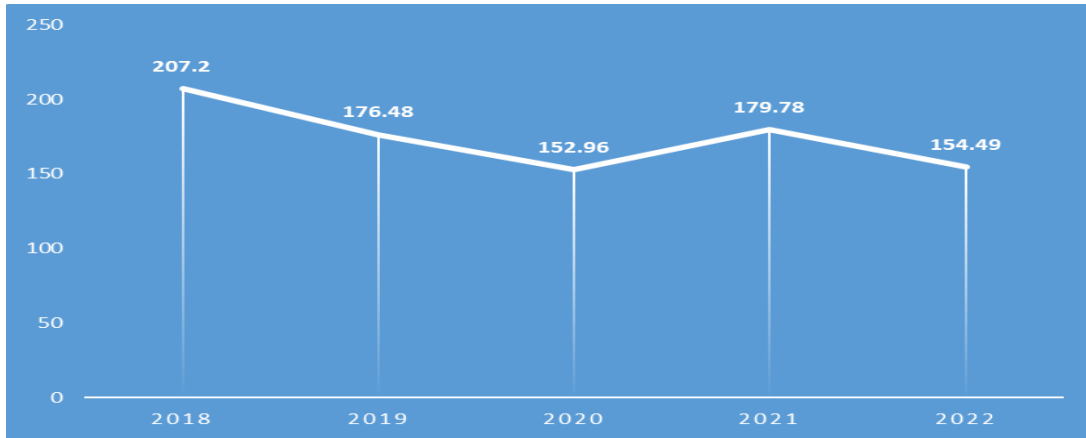
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Walaupun Kabupaten Belitung mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar, akan tetapi pengembangan terhadap perikanan budidaya terutama budi daya ikan laut maupun darat terus didorong perkembangannya. Pada tahun 2021 jumlah produksi perikanan budi daya sebesar 179,78 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2022



menjadi 154,49 ton atau sebesar 14,06 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pembudidaya semakin sulit mendapatkan bibit kerapu serta banyaknya kolam atau bak yang bocor atau rusak di UPT Perikanan Budidaya Membalong sehingga menimbulkan kurangnya wadah untuk menampung hasil pembenihan yang nantinya akan disuply ke pembudidaya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.50 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

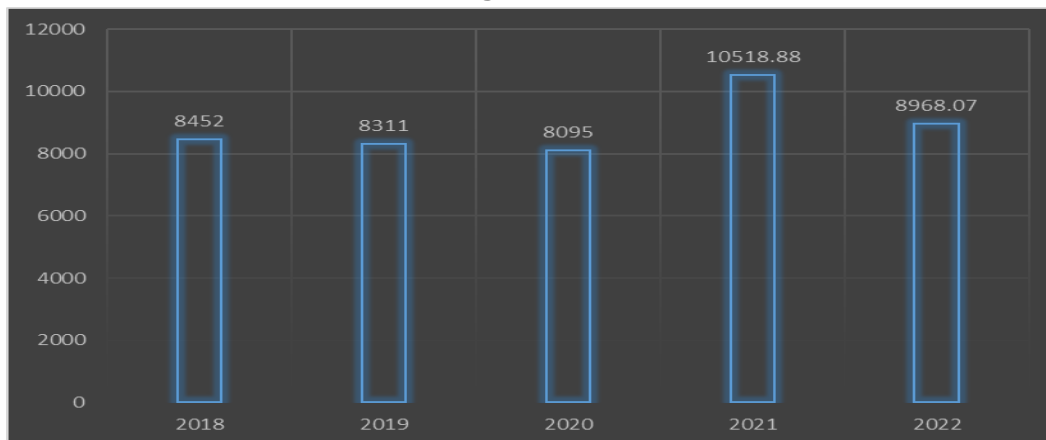


Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Untuk Indikator Jumlah Produksi pengelolaan hasil perikanan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Jumlah Produksi pengelolaan hasil perikanan sebanyak 10.518,88 ton, mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu menjadi 8.968.07 ton atau sebesar 14,74 %.

Penurunan jumlah produksi pengolahan hasil perikanan disebabkan tingginya harga bahan baku ikan, khususnya untuk olahan UMK yang relatif masih tinggi, terutama pada akhir tahun 2022. Jumlah Produksi pengelolaan hasil perikanan dapat dihat dalam grafik berikut :

Gambar 2.51 Jumlah Produksi Pengelolaan Hasil Perikanan Tahun 2018-2022

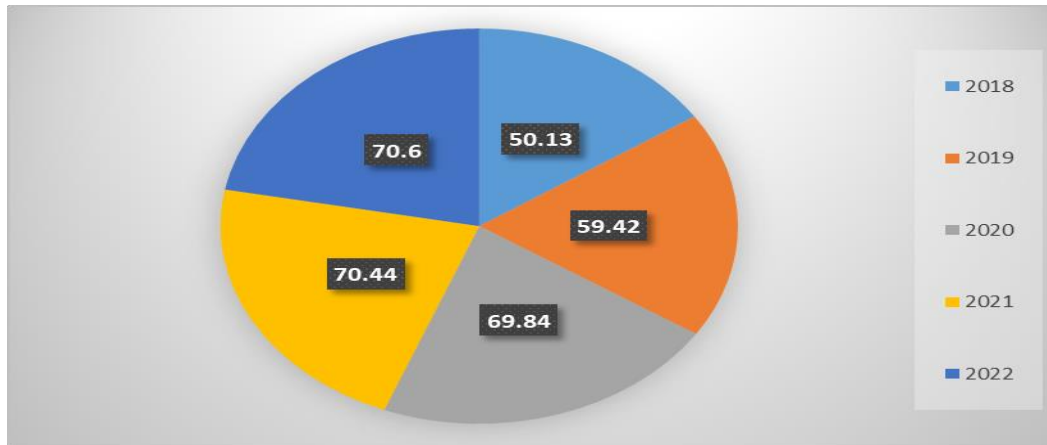


Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023



Selama tahun 2018-2022, angka konsumsi ikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar 70,44, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 70,60 atau sebesar 0,22 %. Hal tersebut menggambarkan bahwa selain pasokan ikan yang lancar ke seluruh wilayah di Kabupaten Belitung, juga telah semakin pahamnya masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan untuk mendukung kesehatan (stunting) dan kecerdasan. Gambaran terkait konsumsi ikan di Kabupaten Belitung dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam garfik berikut :

Gambar 2. 52 Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

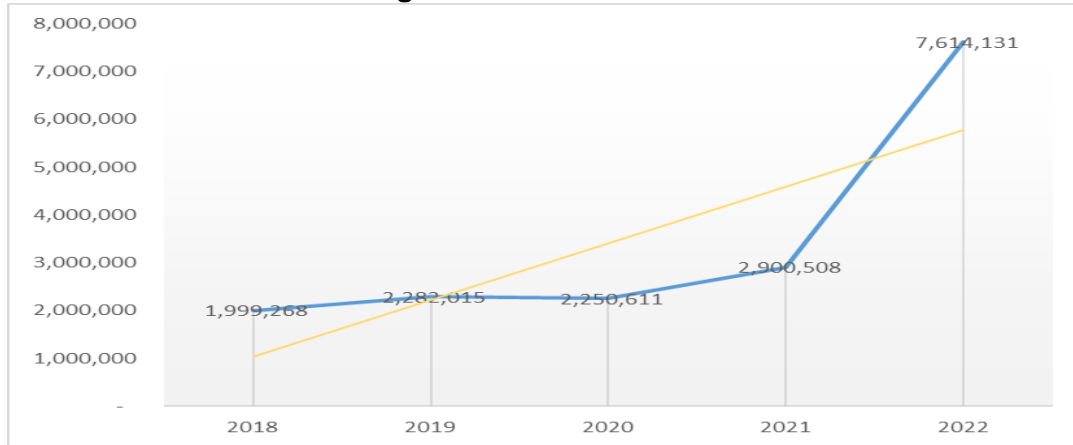


Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Untuk Indikator Jumlah Benih yang dihasilkan pada tahun 2020 sebanyak 2.900.508 ekor mengalami peningkatan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 7.614.131 ekor. Realisasi ketersediaan benih ini didukung oleh ketersediaan benih di BBI Membalong, BBI Tanjung Binga, dan didukung oleh 21 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) air tawar dan 2 UPR air laut dengan jenis ikan air yang dihasilkan UPR yang terdiri dari ikan nila, lele dan kerapu. Selain itu, pada tahun 2022 ada penambahan anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID), yang difokuskan oleh perangkat daerah yang dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada peningkatan ketersediaan jumlah benih. Gambaran terkait Jumlah Benih yang dihasilkan di Kabupaten Belitung dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam garfik berikut :



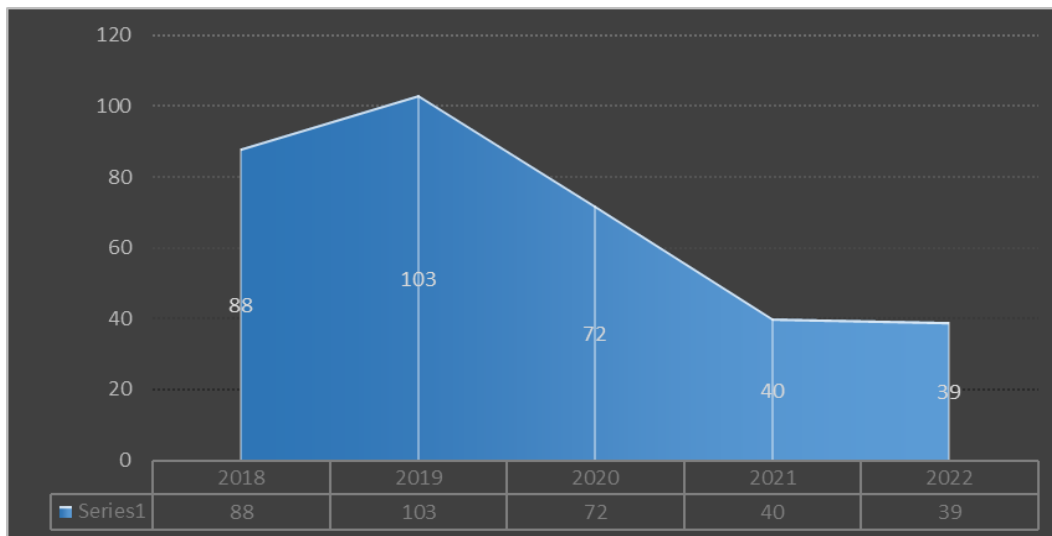
Gambar 2.53 Jumlah Benih yang dihasilkan (ekor) di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Indikator jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKdakan) di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 sebanyak 39 kelompok, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 40 kelompok. Terjadinya penurunan jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKdakan) tersebut disebabkan sebagian dari anggota POKdakan banyak yang melakukan pekerjaan diluar budidaya ikan atau beralih profesi ke aktifitas yang menurut mereka lebih menjanjikan dan memperoleh penghasilan lebih cepat.

Gambar 2.54 Jumlah Kelompok pembudidaya ikan (POKdakan) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023



Berbanding terbalik dengan Indikator jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKdakan), indikator jumlah kelompok usaha Bersama (KUB) justru mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 jumlah KUB di Kabupaten Belitung sebanyak 320 kelompok, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 275 kelompok. Terjadi peningkatan/penambahan jumlah KUB sebanyak 45 kelompok.

Gambar 2.55 Jumlah Kelompok usaha bersama (KUB) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Meningkatnya jumlah KUB tersebut karena Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Perikanan terus meningkatkan sumber daya manusia nelayan, khususnya dalam upaya penumbuhan dan penguatan kelembagaan KUB nelayan. KUB nelayan sangat berkaitan untuk mengembangkan usaha dalam mensejahterakan para nelayan, mengingat sektor perikanan memiliki potensi yang bisa dikelola melalui wadah KUB. Untuk itu, KUB nelayan harus dijadikan peluang menjalankan usaha seluas-luasnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dengan berkelompok, KUB, lalu membentuk koperasi, maka dukungan bantuan dari pemerintah bisa tersampaikan karena telah berbadan hukum.

b. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan di Kabupaten Belitung. Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Belitung sangat didukung dengan ditetapkannya Kawasan Wisata Tanjung Kelayang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Selain itu, Kabupaten Belitung merupakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK Pariwisata) dan juga termasuk



kedalam Unesco Global Geopark (UGG) sehingga pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Belitung semakin pesat dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kunjungan wisatawan, baik dari nusantara maupun dari mancanegara yang merupakan indikator keberhasilan dari kinerja sektor pariwisata tersebut.

Tabel 2.88 Hasil kinerja urusan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pariwisata					
1	Kunjungan wisata	467.571	348.153	134.266	184.570	301.906
2	PAD sektor pariwisata	20.941.952.474	20.406.758.944	10.358.158.155	12.837.908.224,64	42.577.273.454,68
3	Jumlah Hotel dan penginapan	58	69	71	72	71
4	Jumlah Kamar	2.072	2.472	2.647	2.563	2.647
5	Jumlah daya tarik wisata layak dikunjungi	70	72	73	76	78
6	Jumlah Desa Wisata	15	15	20	20	20
7	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	1.986	2.012	2.078	2.143	2.178

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2023

Dengan penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta masuknya Kabupaten Belitung dalam Unesco Global Geopark (UGG), sehingga memicu pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dalam mendukung kepariwisataan di Kabupaten Belitung, yang kemudian berimbas pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung. Jumlah hotel dan penginapan pada tahun 2018 tercatat ada sebanyak 58 bangunan, yang terdiri dari klasifikasi hotel bintang dan non bintang atau penginapan dengan jumlah kamar 2.072 kamar hotel, meningkat pada tahun 2022 menjadi 72 hotel dengan jumlah kamar 2.596 kamar. Meningkatnya pertumbuhan hotel dan penginapan tersebut juga dikarenakan meningkatnya kunjungan wisatawan selama tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 184.570 orang, dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 301.906 orang atau meningkat sebesar 61,13 %.

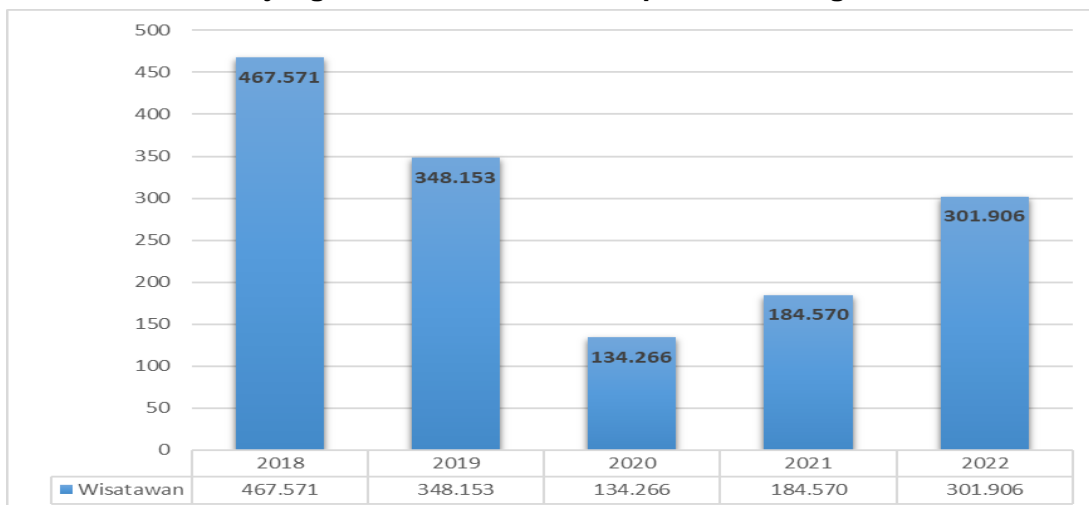


Pada tahun 2019, sektor pariwisata di Kabupaten Belitung sedikit mengalami penurunan jumlah wisatawan akibat melambungnya harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar, yaitu menjadi 348,153 orang. Hal tersebut diperparah lagi dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada tahun 2019-2020 sehingga menyebabkan munculnya kebijakan *lockdown* diberbagai negara dan daerah di tanah air serta diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut berakibat pada penurunan jumlah yang sangat tajam pada kunjungan wisatawan, yaitu menjadi 134.266 orang.

Jumlah wisatawan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 184.570 orang atau sebesar 37,46% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena jumlah penerima vaksinasi diberbagai daerah terus meningkat, sehingga angka penyebaran covid-19 dapat terkontrol dan cenderung menurun, menyebabkan mulai dilonggarkannya kebijakan pemerintah terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pada tahun 2022, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara kembali mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena sudah kembali normal kondisi negara-negara dari keterpurukan setelah mengalami pandemic covid-19 dan tidak ada lagi pemberlakuan kebijakan terkait larangan kunjungan ke negara-negara maupun wilayah yang merupakan destinasi pariwisata tujuan.

Gambar 2.56 Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2023



Peningkatan aksesibilitas dan amenitas kepariwisataan di Kabupaten Belitung semakin berkembang dengan mulainya wisatawan melihat Belitung sebagai destinasi baru yang menarik. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penerbangan ke Tanjungpandan dari beberapa maskapai penerbangan, pertumbuhan operator wisata yang membuat paket-paket wisata Belitung, terbukanya beberapa destinasi wisata sebagai daya tarik wisata baru yang layak dikunjungi. Pada tahun 2018 pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung semakin berkembang dengan ditetapkannya Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, masuknya Kabupaten Belitung kedalam Unesco Global Geopark (UGG) dan dinobatkannya Kabupaten Belitung menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sehingga aksesibilitas dan amenitas untuk mendukungnya pun terus ditingkatkan. Atraksi wisata dengan pelaksanaan *event* nasional dan internasional dilaksanakan di Kawasan Wisata Tanjung Kelayang. Promosi wisata Belitung sebagai destinasi wisata unggulan terus dilakukan dengan mengikuti *event expo* berskala nasional di beberapa kota besar di Indonesia.

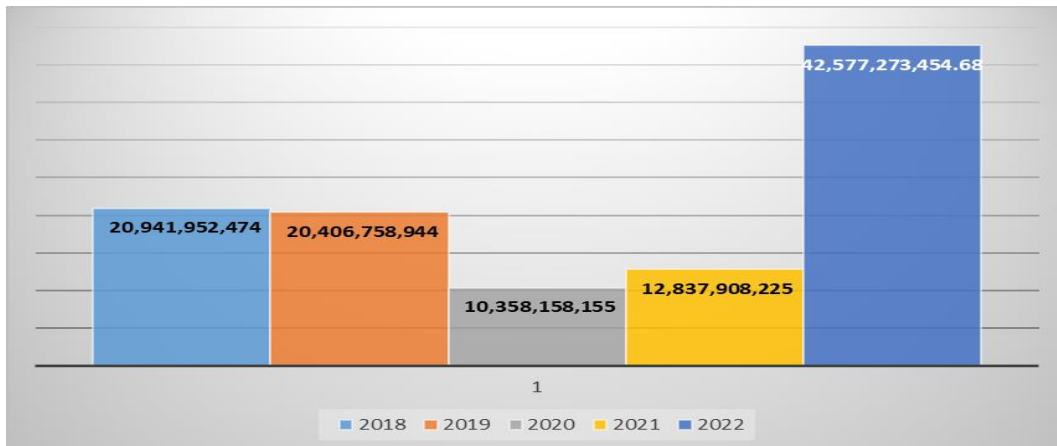
Dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan pemerintah dan masyarakat terus berupaya untuk menambah dan memperbaiki Daerah Tujuan Wisata, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat/swasta. Pada tahun 2018 jumlah daerah tujuan wisata berjumlah 67 dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 74 daerah tujuan wisata walaupun dari jumlah tersebut terdapat objek wisata yang belum terkelola dengan baik.

Pembentukan desa wisata merupakan upaya untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Pada tahun 2018 terdapat 15 Desa wisata yang pembentukannya diawali dengan program PNPM mandiri pariwisata dan adanya program inovasi daerah, yaitu Program Satu Desa Satu Destinasi (TUSENA) sehingga terus berkembang sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 20 desa wisata.

Meningkatnya kunjungan pariwisata, juga mempunyai dampak terhadap meningkatnya PAD sektor pariwisata. Pada tahun 2020 PAD sektor pariwisata sebesar Rp. 10.358.158.155,-, mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 12.837.908.224,64,-. Selanjutnya PAD sektor pariwisata ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi Rp. 42.577.273.454,68 Hal tersebut disebabkan karena sudah kembali normal kondisi negara-negara dari keterpurukan setelah mengalami pandemic covid-19 dan tidak ada lagi pemberlakuan kebijakan terkait larangan kunjungan ke negara-negara maupun wilayah yang merupakan destinasi pariwisata tujuan.



Gambar 2.57 PAD sektor Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

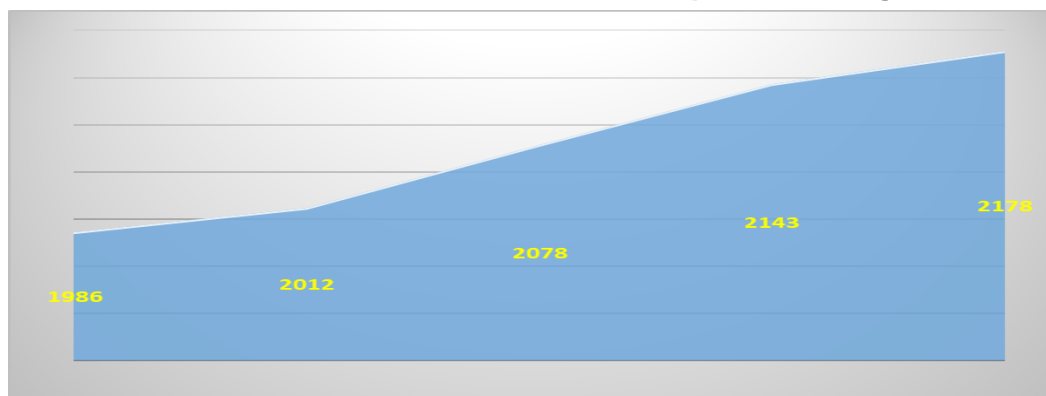


Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2023

Pada Tahun 2022, PAD sektor pariwisata mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp. 42.577.273.454,68, jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 12.837.908.225. Ini terjadi karena persiapan-persiapan serta pembenahan sarana prasarana destinasi dan pelaku wisata maupun penunjang unsur untuk peningkatan pariwisata lainnya, yang dilakukan pada saat terjadinya pandemic covid-19, sehingga setelah pandemic covid-19 berlalu semua sarana prasarana baik dari segi infrastruktur maupun SDM Pariwisata sudah siap seperti sebelum terjadi pandemic covid-19.

Hal tersebut menyebabkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan berefek pada peningkatan PAD. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung sejalan dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Belitung, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif dalam pengembangannya baik dari segi Arsitektur, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Film, Animasi dan Video, Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, Fashion, Aplikasi dan Game Developer, Penerbitan, Periklanan, Televisi dan Radio, Seni Pertunjukan, Seri Rupa.

Gambar 2.58 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2023



Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 terdata 2.178 orang. Meningkatnya jumlah orang kreatif ini merupakan akibat dari semakin berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai Industri Kreatif sehingga mendorong peningkatan permintaan produk kreatif. Walaupun jumlah orang kreatif sudah meningkat, namun ketersediaan dan kualitas orang kreatif masih belum memadai untuk dapat meningkatkan skala produksi Industri Kreatif. Peningkatan jumlah dan kualitas orang kreatif dipengaruhi oleh dua aspek utama yaitu Pendidikan Kreatif dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Kreatif.

c. Pertanian

Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir dan menunjukkan peningkatan pada 2 (dua) tahun terakhir, yaitu 27,79% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 28,17% pada tahun 2021. Kontribusi sub sektor pertanian pada tahun 2021 mencapai 13,92%. Secara umum, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Selama pandemi Covid-19 melanda Kabupaten Belitung, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap mampu bertahan dan menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Belitung. Berikut adalah hasil kinerja urusan pertanian Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.89 Hasil kinerja urusan Pertanian Pemerintah Kabupaten Belitung
Tahun 2018 – 2022**

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)	n/a	n/a	n/a	113,59	116,29
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	n/a	n/a	n/a	3,25	3,47
3	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	25,31	25,01	27,79	28,17	belum rilis
4	Kontribusi PDRB sub sektor pertanian	n/a	n/a	n/a	13,92	10,70
5	Persentase (%) peningkatan produksi pertanian					
	- Perkebunan Rakyat	60,58	19,15	39,28	36,57	35,04
	- Tanaman Pangan	37,47	-30,51	5,34	-24,68	-66,06
	- Tanaman Hortikultura	146,71	-10,67	19,32	-14,12	6,45
	- Peternakan	8,3	9,73	8,81	11,25	-14,39



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Produksi pangan (padi)	2419,58	1454,45	2204,96	1576,40	710,4
	Hortikultura (cabai)	382,4	341,6	456,2	328,4	407,05
	Perkebunan (lada + karet)	6209,58	7398,72	8648,44	8480,55	8385,12
6	Persentase kebutuhan sarana pertanian	n/a	n/a	n/a	12,44	19,82
7	Persentase prasarana yang digunakan	n/a	n/a	n/a	23,05	20,78
8	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	68,3	77,44
9	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	n/a	n/a	n/a	100	100
10	Persentase penanggulangan bencana pertanian	n/a	n/a	n/a	100	100
11	Peningkatan kelas kelembagaan Kelompok Tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	n/a	n/a	n/a	30 lembaga	31 kelembagaan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2023

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani yang perhitungannya meliputi 4 (empat) sub sektor, yaitu sub sektor tanaman perkebunan, hortikultura, tanaman pangan dan peternakan. Peningkatan capaian NTP pada tahun 2022 sebesar 116,29, dapat diartikan bahwa petani di Kabupaten Belitung sudah sejahtera. Peringkat tertinggi Nilai Tukar Petani (NTP) pada sub sektor tanaman perkebunan dan peternakan. Dalam penentuan NTP dipengaruhi beberapa faktor antara lain luas lahan, harga jual, harga pupuk dan saprodi lainnya, serta jumlah tanggungan keluarga.

Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor pertanian Tahun 2022 sebesar 10,70%, yang terdiri dari sub sektor perkebunan 52%, sub sektor peternakan 41% dan sub sektor hortikultura sebesar 5%, dan yang terkecil sub sektor tanaman pangan sebesar 2%. Kontribusi PDRB sub sektor pertanian mencapai Rp. 1,176 trilyun.

Capaian produksi pertanian pada tahun 2022 mengalami penurunan baik pada perkebunan rakyat (lada dan karet), tanaman pangan (padi) dan tanaman hortikultura (cabai). Sehingga Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya meningkatkan produksi pertanian yang diupayakan dengan pemenuhan kebutuhan sarana pertanian, prasarana yang digunakan dan prasarana pertanian dalam kondisi baik. Capaian persentase sarana pertanian hanya sebesar 19,82 pada tahun 2022, karena adanya penurunan luas tambah tanam khususnya untuk tanaman pangan strategis yang disebabkan kurangnya minat petani dalam budidaya pertanian karena adanya kenaikan harga timah, kondisi lahan yang belum



optimal, kenaikan harga pupuk non subsidi, serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim. Sarana pertanian yang diberikan kepada kelompok tani berupa saprodi pangan strategis, saprodi tanaman hortikultura, bibit tanaman perkebunan, produk olahan hasil tanaman perkebunan, benih dan bibit pertanian, benih/bibit dan pakan ternak serta bibit ternak unggas. Pemenuhan jumlah sarana pertanian tersebut juga didukung dengan adanya penambahan anggaran belanja saprodi pangan strategis melalui Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran perubahan 2022.

Sementara itu, capaian prasarana yang digunakan tahun 2022 terealisasi sebesar 20,78%, yaitu dari total lahan sawah sebesar 1.015,39 ha hanya 211 ha lahan sawah yang digunakan. Hal tersebut karena penggunaan lahan sawah masih belum sesuai dengan jumlah lahan sawah yang ada dan juga masih kurangnya minat petani dalam budidaya pertanian sehubungan dengan adanya lonjakan harga timah yang tinggi, serta adanya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan hama penyakit yang berdampak pada biaya produksi tinggi. Selain itu, selama tahun 2022 terdapat penambahan pembangunan prasarana pertanian bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan bidang pertanian, yang meliputi pembangunan jaringan irigasi air tanah dangkal sebanyak 3 unit (Desa Terong, Dukong dan Kembiri), Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 5,5 km (Desa Perawas, Cerucuk, Terong, Lassar, Bantan, Simpang Rusa, Tanjung Rusa), pembangunan/perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan sarana pendukungnya (BPP Badau, Sijuk dan Tanjung Rusa); Rehab Puskesmas; Pembangunan Bank Pakan di Desa Tanjung Rusa.

Sedangkan di bidang peternakan, capaian persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 2022 sebesar 100%, indikator kinerja sebelumnya yaitu persentase penanganan kasus penyakit hewan menular juga tercapai 100% selama 2018 hingga 2022. Capaian tersebut didukung dengan terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan puskesmas.

Selain upaya peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian, juga dilakukan upaya penanggulangan bencana pertanian yang juga tercapai 100% pada tahun 2022. Serta melalui penguatan kelembagaan pertanian dengan upaya meningkatkan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa alsintan (UPJA), yang telah tercapai sebanyak 31 kelompok tani dari 43 kelompok tani yang ada. Kelompok tani yang ada saat ini masih belum mencukupi standar penilaian kemampuan kelas kelompok. Berikut adalah perkembangan areal dan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Belitung tahun 2018-2022.



Tabel 2.90 Perkembangan Areal dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018-2022

No	Komoditi	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Padi, terdiri dari :	823	2.340	853	1.454	725	2204,96	234	1576	214	710,4
	a. Sawah	800	2.280	810	1.401	705	2168,66	229	1538,2	210	694,7
	b. Ladang	23	60	43	53	20	36,30	5	38,2	4	15,7
2.	Palawija, terdiri dari :	146	2.696	2.696	168	193,9	1924,66	186,6	1697	334,6	2577,6
	a. Jagung	281	67	39	58	66,1	512,76	55,7	467,3	80,3	673,1
	b. Ubi Kayu	1.674	93	66	242	82,9	1337,05	71,4	1120,1	172,2	1764,1
	c. Ubi Jalar	21	3	5	43	8,4	19,5	14,2	44,1	29,9	59,3
	d. Kacang Tanah	43	73	41	39	36,5	55,35	45,3	65,7	52,2	81,1
3.	Hortikultura, terdiri dari :	914	3.529	921	3.885	6884,9	6700,08	1853	4111	3439	4480,97
	a. Sayur-Sayuran	442	1.825	403	17.720	314,9	1471,99	320,2	1370	548,05	2780
	b. Buah-Buahan	471	1.698	492	3.699	6570	5228,09	1529,6	2736	2888,7	1698,7
	c. Biofarmaka	0,4	4,9	0,08	0,72	1,0366	4,461	3,04	4,78	2,137	2,27

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2023

d. Perdagangan

Ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Belitung sudah cukup stabil dengan persentase 100% selama lima tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung tahun 2023. Adapun terkait pasar sesuai standar jumlahnya masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebanyak satu unit. Selanjutnya terdapat peningkatan sebesar 8,35 persen pada banyaknya alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang sah dari 1.760 buah di tahun 2021 menjadi 1.907 buah pada tahun 2022.

Tabel 2.91 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

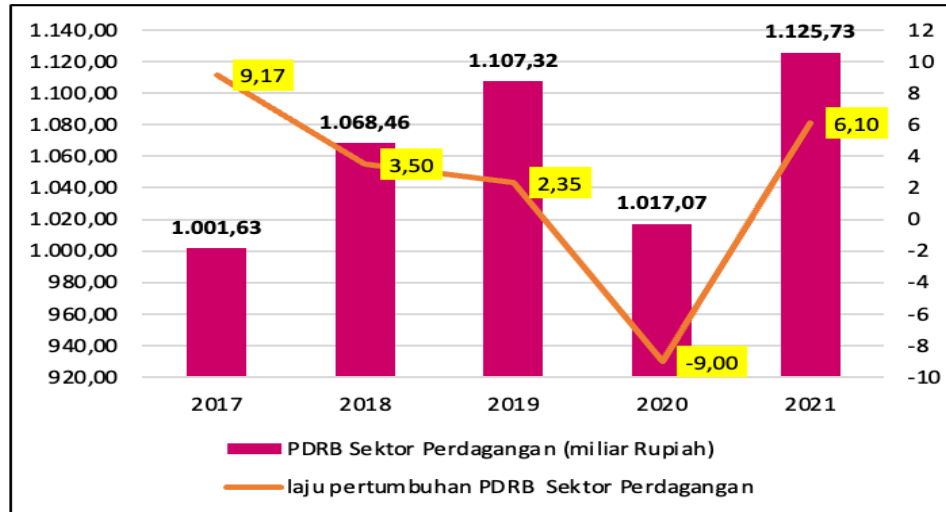
No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok (%)	100	100	100	100	100
2	Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya	1.750	1.967	2.928	1.760	1.907
3	Jumlah pasar sesuai standar	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas KUKMPTK Kabupaten Belitung, 2023



Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung menurut Lapangan Usaha, dapat dilihat kontribusi sektor perdagangan yang mencakup perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Gambar 2.59 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2022 (diolah)

Pada tahun 2021, kontribusi sektor perdagangan yang mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Belitung tahun 2021 adalah sebesar 10,23 persen dan merupakan kontributor terbesar keempat setelah sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, sektor Konstruksi dan sektor Industri Pengolahan. Total nilai tambah sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) mencapai lebih dari 1,125 triliun rupiah di tahun 2021 bila dibandingkan dengan total PDRB pada tahun 2017 yang hanya berada di kisaran satu triliun rupiah.

e. Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Sektor industri diharapkan dapat tumbuh pesat yang kemudian merangsang pertumbuhan sektor lainnya, seperti pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri, dan sektor jasa yang berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut. Pada akhirnya diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* perluasan peluang kerja yang ada sehingga berakibat positif dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta secara tidak langsung



menunjukkan bahwa perekonomian di suatu daerah itu tumbuh. Tolok ukur peran industri di daerah terhadap perekonomian antara lain dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB, serapan tenaga kerja dan sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa. Berikut adalah tabel kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Belitung tahun 2017-2021.

Tabel 2.92 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Sektor Industri (Industri Pengolahan) (Milyar Rupiah)	1.070,60	1.156,31	1.124,62	1.172,49	1.357,64
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	12,25	12,41	11,41	11,93	12,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2022

Hingga tahun 2021, total nilai tambah yang dihasilkan dari sektor industri di Kabupaten Belitung mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dalam tiga tahun terakhir, dan bahkan meningkat cukup signifikan pada tahun 2021. Kontribusi sektor ini terhadap total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami fluktuasi, namun terus menunjukkan peningkatan sejak tahun 2019 yaitu 11,41% menjadi 11,93% di tahun 2020 dan 12,43 di tahun 2021 atau meningkat kontribusinya sebesar 3,44 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2022 belum dirilis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.

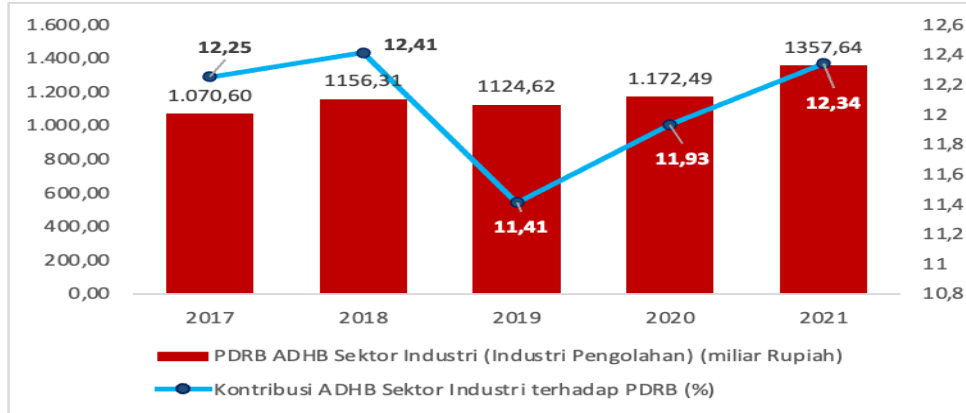
Walaupun sempat mengalami penurunan laju pertumbuhan yang tajam pada tahun 2019, angka pertumbuhannya berhasil kembali meningkat. Pada 2021, kategori ini tercatat tumbuh sebesar 4,81 persen, sedangkan tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 0,14%. Melihat laju pertumbuhan yang menunjukkan tren positif, kategori ini tentu memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang di tahun yang akan datang. Perkembangan di kategori industri pengolahan juga memiliki keterkaitan erat dengan beberapa kategori lainnya, terutama kategori perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.

Komoditi unggulan sektor industri ini adalah makanan yang merupakan olahan lebih lanjut dari ikan seperti kerupuk, otak-otak dan hasil lainnya yang saat ini semakin berkembang semenjak pariwisata Kabupaten Belitung semakin dikenal masyarakat luas. Maka penguatan atau optimalisasi pada kategori-kategori penghasil bahan baku utama secara tidak langsung juga akan mengoptimalkan nilai tambah dari kategori lapangan usaha



industri pengolahan. Berikut merupakan diagram kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Belitung.

Gambar 2.60 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021 (persen)



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2022 (diolah)

Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2019 berada di titik terendah yaitu sebesar -6,27 persen, terlihat dari menurunnya kontribusi sektor industri secara tajam dari tahun 2018 sebesar 12,41% menjadi hanya 11,41% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh penutupan sebagian besar industri pengolahan timah di Kabupaten Belitung yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung yang sudah beralih ke sektor pariwisata. Untuk itu, penumbuhan sektor industri pengolahan ini akan difokuskan pada sub sektor pengolahan makanan dan minuman dalam keterkaitannya dengan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Belitung. Berikut merupakan hasil kinerja urusan perindustrian Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2018-2022.

Tabel 2.93 Hasil kinerja urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (%)	2,08	2,18	1,12	1,34	1,76
2	Pertumbuhan Jumlah pelaku industri kecil menengah (%)	2,08	2,18	1,12	1,34	1,76
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	15	15	15	15	16
4	Industri Kreatif (KUB)	20	20	20	20	21

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2022



Industri kecil tersebar di beberapa jenis usaha yaitu pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, kerajinan dan umum, serta logam dan jasa. Berikut perkembangan industri kecil di Kabupaten Belitung tahun 2018-2022.

Tabel 2.94 Perkembangan Jumlah Industri Kecil Tahun 2018-2022 (Unit)

No	Jenis Usaha Industri Kecil	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pangan	1.331	1.367	1.401	1.409	1.449
2.	Sandang	59	62	63	66	66
3.	Kimia dan Bahan Bangunan	366	366	366	366	366
4.	Kerajinan dan Umum	160	162	166	184	184
5.	Logam dan Jasa	239	239	240	241	241
	Jumlah	2.155	2.196	2.236	2.266	2.306

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2023

Jumlah industri kecil di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir walau tidak terlalu signifikan. Setelah berlalunya pandemi Covid-19, Kabupaten Belitung masih dalam masa pemulihan ekonomi.

2.3.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Ketersediaan dokumen perencanaan strategis yang baik dan berkualitas merupakan Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung.



Tabel 2.95 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	78%	87,22%	94,30%	99,35%	91,02%
5	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2023

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung telah tersedia dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Belitung terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Berikut kinerja urusan penunjang fungsi perencanaan. Pada tahun 2019, RPJMD Kabupaten Belitung Periode 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 telah ditetapkan RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 . RPJMD Kabupaten Belitung tersebut merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025. Sebagai Penjabaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Belitung menuangkannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dan di tahun 2022 dokumen RPJPD Kabupaten Belitung masih digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung yang merupakan jaban dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Belitung dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai tahun 2005 sampai tahun 2025. Dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan



bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Arah, dan Program Kepala Daerah terpilih.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung telah tersedia atau ada. RPJMD Kabupaten Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 telah ditetapkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Pada tahun 2022 dokumen RPJMD masih digunakan sebagai dasar pembangunan daerah Kabupaten Belitung sampai dengan tahun 2023 yaitu masa berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung. Namun, di tahun 2022 Kabupaten Belitung telah mulai Menyusun RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026 sebagai dasar pembangunan daerah Kabupaten Belitung sampai di lantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2026-2030 dan di sahkannya dokumen RPJMD Periode tahun 2026-2030.

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 23); Peraturan Bupati Belitung Belitung Nomor 33.A Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 33.A); Peraturan Bupati Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017;
- b. Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2018;
- c. Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2019;



- d. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2020;
- e. Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2021;
- f. Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2022.

Dalam melaksanakan RPJMD ke dalam RKPD tingkat konsistensi Indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan perencanaan adalah Tingkat Konsistensi Perencanaan Kabupaten Belitung dengan capaian pada Tahun 2020 sebesar 94,30% persen. Pada tahun 2018 tingkat konsistensi 78%. Untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2013-2018, pada tahun 2017 RPJMD Kabupaten Belitung dilakukan Perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten nomor 12 tahun 2017. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 82,22%, sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 94,30%. Pada tahun 2021 baru akan dilakukan perubahan RPJMD untuk penyesuaian.

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang konsisten hampir mencapai 100 persen dengan pertahunnya mengalami peningkatan persentasenya. Sedangkan pada Tahun 2021 konsistensi tersebut mengalami peningkatan menjadi 98,71 persen, sebab terdapat 2 (dua) program di RPJMD yang tidak digunakan di RKPD.

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang. Setiap tahunnya dalam pengembangan RTRW selalu mencapai nilai 100 persen, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Peraturan Daerah yang mengatur urusan Tata Ruang terdapat didalam Peraturan Daerah kabupaten Belitung No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung tahun 2014-2034.



b. Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk menyusun dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu penyusunan dokumen data dan informasi barang milik daerah juga sudah memenuhi ketentuan dan tepat waktu dalam penyampaiannya selama periode 2018-2022.

Tabel 2.96 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	n/a
2	Persentase SILPA terhadap APBD	20,46	16,94	10,55	11,23	11,87
3	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	81,49	85,48	87,00	91,61	89,34
4	Peningkatan PAD (%)	-0,65	-7,43	-8,75	14,65	1,16
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	26,09	24,20	23,60	22,00	21,55
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	20,17	18,64	21,03	29,00	32,72
7	Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan terkait	100	100	100	100	100
8	Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen data dan informasi barang milik daerah sesuai dengan aturan terkait	100	100	100	100	100
9	Persentase (%) peningkatan penerimaan pendapatan daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya	2,32	11,54	-1,6	6,18	14,35

Sumber : BPKAD dan BPPRD Kabupaten Belitung, 2023

Sejak tahun 2020 hingga 2021 Pemerintah Kabupaten Belitung telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Belitung sudah semakin baik dan sesuai dengan indikator penentuan opini sebagaimana ditetapkan BPK yang mencakup antara lain kesesuaian dari penentuan definisi kas, penyediaan, aset tetap, penerimaan dan lain-lain. Adapun capaian untuk tahun 2022 masih menunggu hasil audit dari BPK RI.



Peningkatan sangat signifikan terjadi pada penerimaan pendapatan daerah tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yang melonjak hingga 14,35 persen atau naik 15,95 poin setelah sempat anjlok di tahun 2020. Pandemi Covid-19 memang berdampak pada penerimaan pendapatan daerah, khususnya pendapatan transfer ke daerah karena adanya *refocusing* dana transfer dari pusat serta adanya kebijakan yang mengharuskan pembatasan aktivitas/ *social distancing* untuk membantu pencegahan jumlah penularan covid-19. Namun berkurangnya kasus Covid-19 dan kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada pemulihan ekonomi di tahun 2021 dan 2022 telah berimbas pada meningkatnya jumlah pendapatan daerah, sehingga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan didalam dokumen Renstra BKPSDM menyatakan bahwa sasaran yang direncanakan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 terdiri dari empat sasaran utama yang memiliki indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan. Berikut hasil kinerja urusan pemerintahan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Tabel 2.97 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0	74			
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,25	255,56			
3	Indeks Profesionalitas ASN	62	75,96	72,86	68,96	75,44
4	Persentase (%) tingkat pelayanan kepegawaian	100%	100%			
5	Persentase ASN yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP			81,52	69,15	43,87
6	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi			96,06	85,76	97,87

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, 2023



Persentase ASN yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 10,58% atau 43,87% dibandingkan tahun 2021 sebesar 69,15%. Demikian pula dengan Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi pada tahun 2022 sebesar 97,87% atau meningkat sebesar 5,78 % dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85,76%.

d. Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.98 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase tindak lanjut temuan	n/a	74%	69%	75%	90,12 %
2	Jumlah temuan BPK	19	12	6	11	10
3	Persentase penurunan jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan	8,9%	11,2%	-8,6%	-	50%
4	Persentase nilai evaluasi SAKIP PD minimal BB	10%	27%	Belum tersedia	62,5%	77,42%
5	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	70%	59%	51%	71,49%	69,23%
6	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2	3
7	Menurunnya persentase OPD yang terdapat temuan material					166,67 %
8	Persentase pemenuhan komponen evaluasi internal		53,4%	45,3%	45,3%	56,8%
9	Nilai tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 2 (Nilai 2,3)	Level 2 (Nilai 2,3)	Level 2 (Nilai 2,3)	Level 2 (Nilai 2,3)	Level 3 (Nilai 3,118)

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belitung, 2023

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase pemenuhan komponen evaluasi internal pada evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung untuk tahun 2022 belum dirilis oleh



Kemenpan RB. Tujuan Sistem SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra yang disebabkan karena pengawasan belum berfokus pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis. Penanganan kasus/pengaduan masyarakat belum optimal serta peran APIP dalam menjalankan peran layanan pemberian saran atau advisory services belum optimal. Perlu adanya peningkatan level kapabilitas APIP yang berada di level 3 (tiga) dan level maturitas SPIP yang pada saat ini berada di level 3 (tiga) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dituntut meningkatkan kapabilitasnya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah melalui hasil-hasil pengawasan. Pada audit ketaatan, APIP akan mampu menilai kepatuhan suatu program/kegiatan terhadap peraturan terkait, sedangkan dengan audit kinerja APIP akan mampu menilai apakah suatu fungsi/program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat yang pada akhirnya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja meliputi aspek Efektif, Efisien, Ekonomis (3E) di organisasi.

Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan kategori diatas 70 ini perlu menjadi perhatian, meskipun nilai akuntabilitas Kabupaten Belitung sudah mengalami peningkatan dengan nilai Laporan Kinerja BB dengan nilai 77,42.

e. Penelitian dan pengembangan

Sampai dengan saat ini kinerja hasil penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan belum dapat dioptimalkan. Kerja sama membangun jejaring/ network dengan pemerintah lain/ swasta/ akademisi masih belum dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan secara optimal. Sebagai upaya



penguatan fungsi perencanaan pembangunan daerah perlu dukungan perencanaan dan kajian strategis pembangunan daerah.

Rencana program Kelitbangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2022 tertuang pada Program Prioritas RKPD Tahun 2022. Tugas fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan termasuk ke dalam fungsi penunjang yaitu Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan berupa Program Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 2.99 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	0	35,29	76,92	38,71
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	0	43,75	93,75	62,50
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	0	0	40,00	33,33	100
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	0	0	71,43	68	67,06

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2023

Hal ini tidak luput dari pemenuhan ketercapaian target pada indikator program Penelitian dan Pengembangan, yaitu capaian dari aspek-aspek yang mendukung urusan penelitian dan pengembangan hampir keseluruhan mencapai hasil kelitbangan yang direkomendasikan, yakni:

- Presentase (%) Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah sebesar 38,71%, terdapat 12 perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dari 31 perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Belitung.
- Presentase (%) kebijakan inovasi daerah yang diterapkan di daerah sebesar 62,50%, terdapat 10 program inovasi kepala daerah yang diterapkan di daerah dari 16 program inovasi kepala daerah.
- Presentase (%) Implementasi rencana kelitbangan sebesar 100%, dikarenakan terlaksananya kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif.
- Pencapaian indikator Presentase (%) Rekomendasi Kelitbangan yang diterapkan sudah optimal dengan realisasi sebesar 67,07% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.



f. Unsur Penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang lainnya

Fungsi unsur pendukung ditangani oleh beberapa perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.100 Hasil kinerja urusan Pemerintahan fungsi penunjang lainnya Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD * Provinsi/Kab/Kota	100	100	100	100	100
2	Persentase (%) tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*	90	93,55	96,39	93,40	93,83
3	RAPERDA yang disetujui DPRD (%)*	100	100	100	100	100
4	Nilai SAKIP**	CC	CC	B	B	B
5	Nilai LPPD	3,1045	2,6761	Belum tersedia	Masih proses evaluasi	Masih proses evaluasi
6	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	100	100	100	100	100
7	Produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat**	457	956	947	910	700
8	Persentase (%) tingkat kesesuaian penataan struktur organisasi daerah terhadap hasil analisis penataan kelembagaan berbasis kebutuhan daerah dan aturan hukum yang berlaku**	100	100	100	100	100
9	Persentase (%) terciptanya stabilitas daerah yang kondusif***	100	100	100	100	100
10	Persentase (%) penyelesaian masalah strategis dan penanganan konflik sosial***.	100	88,8	100	100	100
11	Persentase meningkatnya penanganan konflik	n/a	100	100	100	100
12	Persentase peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan	n/a	100	100	100	100

* Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, 2022

** Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2022

*** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung, 2023

Dari data di atas dapat dilihat kinerja Sekretariat DPRD sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan untuk aktifitas Anggota DPRD dengan tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang mencapai 100%. Dari indikator Tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas DPRD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan 2,99% dari tahun sebelumnya 96,39% menjadi 93,40%. Dari penurunan tersebut masih diatas rata-rata persentase tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah pada lima tahun terakhir. Dan indikator RAPERDA yang disetujui DPRD meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 133,33% sebanyak 8 RAPERDA dari target 6 RAPERDA. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya kebutuhan untuk operasional pelaksanaan tugas DPRD. Dari data di atas, terlihat pada tahun 2017 sampai dengan 2019 nilai SAKIP meningkat menjadi CC dengan range 50-60. Ditahun 2020 ada peningkatan dalam penilaian yaitu dengan nilai B dalam range 60-70. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Sedangkan untuk kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, indikator produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat pada Tahun 2021 sebanyak 910 terdiri dari 10 Peraturan Daerah, 66 Peraturan Bupati dan 834 Keputusan Bupati Belitung. Dari data di atas, terlihat pada tahun 2017 sampai dengan 2019 nilai SAKIP meningkat menjadi CC dengan range 50-60. Di tahun 2020 ada peningkatan dalam penilaian yaitu dengan nilai B dalam range 60-70. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun terakhir sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan terciptanya stabilitas daerah yang kondusif di Kabupaten Belitung yang persentasenya masih tetap mencapai 100%. Kemudian capaian dari tiga indikator lainnya, yaitu persentase penyelesaian masalah strategis dan penanganan konflik sosial, persentase meningkatnya penanganan konflik dan persentase peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan juga terealisasi 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau



internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari a) kemampuan ekonomi daerah; b) fasilitas wilayah atau infrastruktur; c) iklim berinvestasi; dan d) sumberdaya manusia.

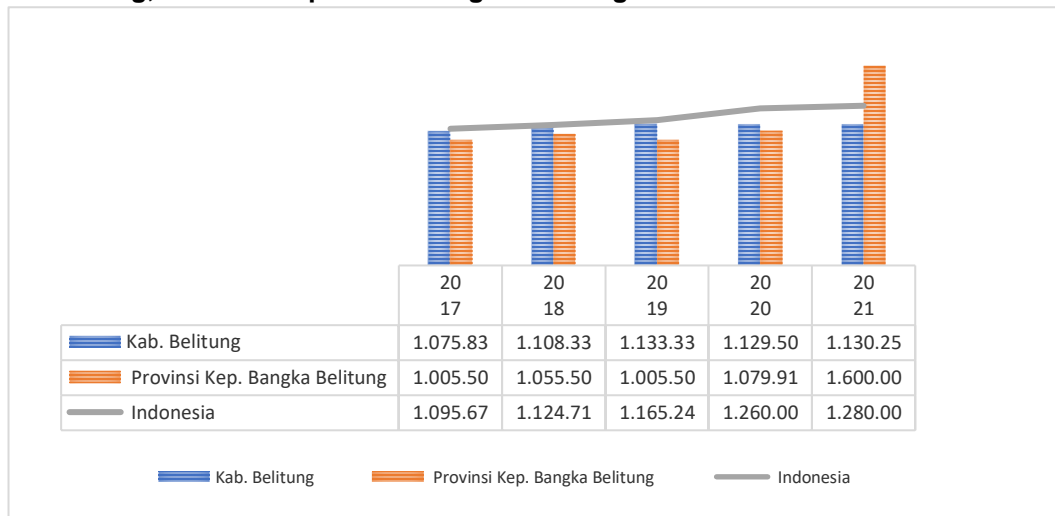
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi baik yang sudah berada di dalam daerah maupun yang akan masuk ke daerah itu yang kemudian dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2017-2021 :

Gambar 2.61 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (dalam rupiah) Penduduk Di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung mengalami kenaikan dalam kurun 2017-2021, untuk pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitung berada di atas pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia, namun pada tahun 2021 nilai pengeluaran provinsi berada diatas Kabupaten Belitung dan



Indonesia dengan nilai sebesar Rp 1.600.000,- Meskipun begitu pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah nasional,

Selanjutnya akan diperlihatkan perbandingan pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada tabel berikut.

Tabel 2.101 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (dalam rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	1,366,384.00	1,416,582	1,441,834	1.465.540	1.463.474
2	Belitung	1,492,133.00	1,517,552	1,677,212	1.752.785	1.626.741
3	Bangka Barat	1,196,786.00	1,299,129	1,315,113	1.256.163	1.388.584
4	Bangka Tengah	1,160,921.00	1,213,758	1,425,107	1.362.167	1.423.547
5	Bangka Selatan	1,155,676.00	1,231,949	1,302,257	1.257.371	1.267.973
6	Belitung Timur	1,492,306.00	1,408,769	1,678,367	1.676.258	1.753.013
7	Pangkalpinang	1,707,168.00	1,844,451	1,844,819	1.845.502	1.927.232

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Pada tabel di atas menyatakan bahwa dalam kurun tahun 2017-2021 terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita pada kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khusus Kabupaten Belitung untuk rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Kota Pangkalpinang. Di Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk tingkat pengeluaran tertinggi yang di hitung per kabupaten maka pada tahun 2021 Kab. Belitung berada pada peringkat ketiga setelah Kota Pangkalpinang dan Belitung Timur. Kota Pangkalpinang memiliki pengeluaran perkapita tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.927.232,- sebulan. Sementara itu, di Kabupaten Bangka Selatan memiliki rata-rata pengeluaran perkapita terendah sebesar Rp. 1.267.973,- perbulan. Artinya untuk biaya hidup masyarakat di Pulau Belitung cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran sebulan masyarakat di beberapa kabupaten lainnya di Pulau Bangka, hal ini dikarenakan dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir. Tentunya kota Pangkalpinang masih menjadi yang tertinggi untuk besaran pengeluaran per kapita karena letak posisi yang strategis sebagai kawasan ibukota provinsi dan menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Maka Dapat disimpulkan sebanyak 25,99 persen dari total



penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.249.999,-. Sedangkan 4,77 persen dari total penduduk memiliki pengeluaran perkapita Rp. 750.000,- sebulan.

Adapun yang dimaksud dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut BPS adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (non pangan). Kelompok makanan antara lain padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan, telur, sayur-sayuran, makanan dan minuman jadi dan rokok. Sementara kelompok bukan makanan terdiri atas perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak pungutan dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Tabel 2.102 Rata-rata Pengeluaran (Rupiah) Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan per Kapita di Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kabupaten Belitung	779,678	712,455	747,786	769,766	789,688	887,524	835,504	917,281	828,742	797,998
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	742,230	679,394	766,054	714,790	733,471	764,622	771,121	730,723	783,204	748,971
3	Indonesia	554,631	541,045	556,899	567,818	572,551	592,690	603 236	622 449	622 845	641 744

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tahun 2021 penduduk di Kabupaten Belitung mengeluarkan uang untuk keperluan konsumsi makanan sebesar Rp 828,742,- dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp 1.626.741,- dan konsumsi bukan makanan sebesar Rp 797,998,-. Bila dibandingkan dua tahun sebelumnya kurun 2019-2020 terjadi penurunan rata-rata pengeluaran pada konsumsi bukan makanan ditahun 2021, sedangkan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan nilainya berfluktuatif antara tahun 2019 dan 2020.

Apabila dilihat pada Tabel 2.97 di atas, maka Kabupaten Belitung pada kurun waktu 2017-2021 memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi tertinggi melampaui Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk nasional, Artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Belitung cenderung lebih banyak mengeluarkan uang untuk konsumsi makanan dan bukan makanan pada kurun lima tahun terakhir. terutama membelanjakan uang yang dimiliki untuk membeli



makanan dan minuman jadi, Pola konsumsi dapat dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Gaya hidup serba instan diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi makanan dan minuman jadi di Kabupaten Belitung. Apalagi sebagian besar bahan makanan masih banyak yang didatangkan dari luar daerah sehingga harganya menjadi mahal dan akhirnya membuat masyarakat lebih memilih mengkonsumsi makanan dan minuman jadi daripada memasak atau mengolah sendiri bahan makanan tersebut.

Dapat juga disimpulkan bahwa pada tahun 2021 bahwa pola konsumsi perkapita untuk komoditas makanan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung sedikit lebih besar dibandingkan komoditas non makanan, atau 51,12% total pengeluaran berupa makanan dan 48,88% pengeluaran bukan makanan.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Belitung. Ketersediaan fasilitas wilayah/ infrastruktur Kabupaten Belitung meliputi ketersediaan aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air minum, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kabupaten Belitung dalam meningkatkan daya saing daerah.

a. Perhubungan

Sehubungan dengan kegiatan perekonomian Kabupaten Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka perhubungan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memperlancar arus barang dan jasa dari sentra produksi ke tempat konsumen baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Untuk menjangkau wilayah di Kabupaten Belitung, pada tahun 2022 tersedia ruas jalan dengan detail sebagai berikut:

- a. Jalan Negara = 106,56 Km;
- b. Jalan Provinsi = 135,16 Km;
- c. Jalan Kabupaten = 666,02 Km.



Tabel 2.103 Persentase (%) Jalan Berkondisi Baik Tahun 2018–2022

Tahun	Prosentase (%) Jalan Kondisi Baik
(1)	(2)
2018	76,45
2019	83,44
2020	88,09
2021	88,26
2022	81,55

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Tabel 2.104 Profil Kondisi Jalan di Kabupaten Belitung Tahun 2018–2022

Keadaan	Panjang Jalan (Km)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jenis Permukaan					
a. Aspal	631,32	631,92	631,92	631,92	633,624
b. Kerikil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tanah/Puru	34,70	34,10	34,10	34,10	32,40
Jumlah	628,67	628,67	666,02	666,02	666,02
2. Kondisi Jalan					
a. Baik	509,19	555,76	586,70	587,84	543,168
b. Sedang	76,62	70,37	20,51	26,94	37,497
c. Rusak	80,21	39,89	58,80	51,24	85,359
Jumlah	628,67	628,67	666,02	666,02	666,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Sebagai salah satu sarana penghubung dari suatu daerah ke daerah lain yang terpisah, adanya suatu jembatan merupakan pelengkap sarana transportasi jalan untuk kebutuhan masyarakat daerah terpencil. Pada tahun 2022 tersedia 107 (seratus tujuh) buah jembatan dengan panjang 1.042 (seribu empat puluh dua) meter. Jembatan dengan jenis buatan beton menjadi tipe jembatan yang dominan di Kabupaten Belitung dengan jumlah 105 buah dan total panjang 802 meter pada tahun 2021, hal ini dikarenakan struktur beton yang tahan lama dan perawatan yang rendah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya jembatan dengan jenis apapun perlu dilakukan perawatan pada tahun 2022 tidak ada penambahan jembatan dan kondisi Jembatan pada tahun 2022 masih sama baik dengan tahun 2021.



Data jumlah dan panjang jembatan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung tahun 2018–2022 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.105 Jumlah dan Panjang Jembatan Kabupaten Belitung Tahun 2018–2022

Keadaan	Jumlah dan Panjang Jembatan per Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tipe/Jenis Jembatan										
a. Beton	104	777	105	802	105	802	105	802	105	802
b. Baja	2	240	2	240	2	240	2	240	2	240
c. Kayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	106	1017	106	1017	107	1042	1042	107	1042	107
Kondisi Jembatan										
a. Baik	106	1017	105	1042	105	1042	105	1042	105	1042
b. Sedang	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
c. Rusak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	106	1017	106	1017	107	1042	1042	107	1042	107

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Bandar udara yang melayani angkutan udara di Kabupaten Belitung saat ini adalah Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan yang saat ini telah berstatus Bandara Internasional. Bandara ini sebelumnya dikelola oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun pada tahun 2020, bandara ini telah dikelola oleh PT Angkasa Pura sejak bulan Oktober tahun 2020. Di antara tahun 2018–2022 terjadi jumlah pesawat maupun penumpang yang tiba dan berangkat melalui Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan terjadi secara fluktuatif. Tahun 2017 pesawat yang tiba maupun berangkat sebanyak 4.418 pesawat dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebanyak 4.798-an pesawat, walau pada dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi penurunan sebagai akibat dari adanya pandemi yang mulai terjadi di berbagai negara. Di satu sisi, penumpang yang tiba dan berangkat juga mengalami hal yang sama dari tahun 2018 ke tahun 2022. Penumpang yang datang tahun 2018 sebanyak 527.355 orang menurun menjadi 395.274 orang pada tahun 2019, dan penurunan sampai tahun 2022 menjadi 282.757 Sedangkan penumpang yang berangkat juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 526.828 orang menjadi 396.998 orang pada tahun 2019 dan 282.263 orang pada tahun 2022. Oleh karena perbedaan arus penumpang yang datang dan berangkat, terdapat asumsi bahwasanya terjadi emigrasi penduduk dari Kabupaten Belitung pada rentang waktu tersebut. Hal ini pula selaras dengan arus bagasi yang dibongkar dan dimuat, dengan adanya penurunan penumpang dari tahun 2018 ke 2019, seyogianya penumpang akan membawa barang dan bagasi untuk masuk



sehingga akan meningkatkan jumlah bagasi dibongkar di Kabupaten Belitung. Namun, kontras dengan peningkatan bagasi, total barang yang dimuat masih memiliki kecenderungan penurunan dari tahun 2018 ke 2019.

Terjadinya penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia yang berdampak langsung terhadap segala sektor termasuk dengan kondisi jumlah penumpang pesawat sebagai akibat adanya pembatasan pergerakan.

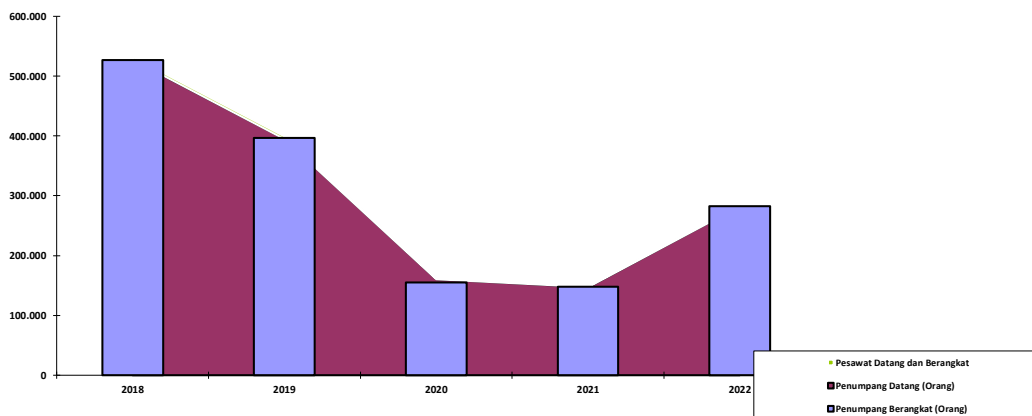
Berikut ini tabel mengenai data perkembangan jumlah pesawat dan jumlah penumpang pesawat tiba di Kabupaten Belitung tahun 2018–2022.

Tabel 2.106 Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Bandara Udara H.AS Hanandjoedin Tahun 2018–2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pesawat Datang (kali)	4.798	3.968	2.040	1.733	2.422
2	Pesawat Berangkat (kali)	4.796	3.968	2.040	1.733	2.422
3	Penumpang Datang (orang)	527.355	395.274	160.118	147.363	282.757
4	Penumpang Berangkat (orang)	526.828	396.998	154.898	148.054	282.263
5	Bagasi Bongkar (kg)	3.624.925	2.257.253	865.005	1.069.262	2.122.153
6	Bagasi Muat (kg)	3.688.333	2.268.547	856.352	1.080.758	2.088.972
7	Barang Bongkat (kg)	2.195.553	2.125.062	1.960.087	3.975.220	4.160.861
8	Barang Muat (kg)	1.122.207	815.580	980.578	1.577.986	1.091.805

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Gambar 2.62 Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Bandara Udara H.AS Hanandjoedin Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, 2023



Sementara itu, jumlah pengguna angkutan laut mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlah penumpang yang tiba dan berangkat dari Pelabuhan Tanjungpandan Kabupaten Belitung sebanyak 61.194 orang atau meningkat sebesar 0,85 persen dari capaian penumpang tahun 2018 yang sebanyak 51.747 orang. Peningkatan jumlah kapal yang tiba dan berangkat dari pelabuhan tentunya berpengaruh terhadap arus masuk penumpang bahari dari Kabupaten Belitung. Namun penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana jumlah penumpang yang tiba dan berangkat dari Pelabuhan Tanjungpandan Kabupaten Belitung hanya 24.690 orang. Hal ini disebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Berikut disajikan tabel data perkembangan jumlah penumpang berangkat dan jumlah penumpang tiba di Kabupaten Belitung tahun 2018–2022.

Tabel 2.107 Arus Lalu Lintas Pelabuhan Penumpang Laskar Pelangi Kabupaten Belitung Tahun 2018–2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Penumpang					
1	Berangkat	24.164	43.600	12.054	13.358	29.895
2	Datang	27.583	45.410	12.636	15.403	31.299

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2023

Terminal Tanjungpandan melayani angkutan bus di dalam kota dan antar kota, jumlah penumpang bus Terminal Tanjungpandan cenderung mengalami penurunan. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, dan semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi membuat jumlah penumpang terus menurun.

Pada tahun 2018 jumlah penumpang naik bus sebanyak 12.500 orang, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 12.683 orang, hal ini terus menurun sampai dengan tahun 2022, Begitu pula dengan penumpang yang datang ke Terminal Tanjungpandan yang cenderung mengalami pasang surut. Pada tahun 2018 jumlah penumpang yang turun sebanyak 10.124 orang dan mengalami fluktuatif naik turun sampai dengan tahun 2022 menjadi 9.745 orang.



Tabel 2.108 Arus Lalu Lintas Penumpang dan Bus yang Masuk Terminal Tanjungpandan Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penumpang	21	14	14	14	14
2	Naik	12.500	10.638	8.725	12.683	12.518
3	Turun	10.124	8.325	6.310	9.365	9.745

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2023

b. Perhotelan dan Restoran

Pertumbuhan sektor Pariwisata yang merupakan sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Belitung memiliki daya tarik bagi investor untuk investasi di bidang perhotelan dan rumah makan. Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Belitung yang sangat pesat, memerlukan daya dukung fasilitas hotel, penginapan, yang cukup dan memadai. Pada tahun 2022 jumlah hotel di Kabupaten Belitung yang telah berdiri sebanyak 71 hotel. Peningkatan pariwisata juga berimplikasi pada peningkatan jumlah restoran/rumah makan. Berikut perkembangan jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.109 Perkembangan Jumlah Hotel dan Penginapan Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hotel Bintang 5					
	Jumlah Hotel	-	-	1	1	1
	Jumlah Kamar	-	-	164	164	164
2	Hotel Bintang 4					
	Jumlah Hotel	5	5	5	6	6
	Jumlah Kamar	552	552	552	678	678
3	Hotel Bintang 3					
	Jumlah Hotel	7	7	7	10	10
	Jumlah Kamar	615	615	615	669	669
4	Hotel Bintang 2					
	Jumlah Hotel	7	7	7	4	4
	Jumlah Kamar	356	356	356	229	229
	Jumlah Tempat Tidur	-				
5	Hotel Bintang 1					



No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Hotel	4	4	4	4	4
	Jumlah Kamar	107	107	107	107	107
6	Hotel Melati					
	Jumlah Hotel	37	46	47	47	47
	Jumlah Kamar	652	841	853	906	906
	Total Hotel	60	69	71	72	72
	Total kamar	2.282	2.471	2.647	2.757	2.757

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2023

Selain peningkatan jumlah hotel, perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Belitung juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Belitung. Berikut adalah tabel peningkatan jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Belitung pada tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.110 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah makan Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Restoran/Rumah Makan	120	136	145	150	150

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2023

c. Air Bersih

Sumber air baku di Kabupaten Belitung didapatkan dari sumur dangkal dan air permukaan, keberadaan kolong- kolong eks tambang menjadi sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih. Kondisi Pengelolaan air baku pada saat ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Berikut data perkembangan penyediaan air bersih oleh PDAM.



Tabel 2.111 Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakai dan Penjualan Air Minum PDAM di Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pelanggan	2.415	2.470	2.426	2.347	Belum ada data
2	Pemakaian air (m3)	284.009	346.127	353.344	386.662	Belum ada data
3	Penjualan air (Juta Rp)	1.747.928.320	1.744.794.200	1.698.757.465	1.987.107.405	Belum ada data

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung, Tahun 2022

Selain penyediaan air bersih oleh PDAM pemerintah telah membangun 15 (okumme) SPAM yang berada di kecamatan-kecamatan dengan jumlah pelanggan tahun 2021 sebanyak 3.587. Berikut data perkembangan SPAM di kabupaten Belitung.

Tabel 2.112 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Belitung Tahun 2022

NO	LOKASI SPAM	NAMA INSTALASI PENGOLAHAN	PENGELOLA	JUMLAH UNIT (SR) AKTIF	KEBERFUN GSIAN
1	Membalong	IKK Membalong	UPT	491	V
2	Tanjungpandan	IKK Tanjung Pandan (perawas)	PDAM	-	V
3	Badau	IKK Badau	UPT	257	V
4	Sijuk	IKK Sijuk	UPT	721	V
5	Selat nasik	IKK Selat Nasik	UPT	347	V
6	Membalong	SPAM Desa Perpat	Desa		V
7	Sijuk	SPAM Desa Terong	Desa	150	V
8	Tanjungpandan	Spam Desa Perawas	PDAM	300	V
9	Membalong	SPAM Desa Pulau Seliu	Desa	100	V
10	Membalong	SPAM Desa Padang Kandis	Desa	100	V
11	Tanjungpandan	SPAM Desa Juru Seberang	UPT	307	V
12	Membalong	SPAM Desa Kembiri	Desa	50	V
13	Membalong	SPAM Desa Bantan dan Simpang Rusa	UPT	264	V
13	Badau	SPAM Kws. Kacang Butor	Desa	100	V
14	Sijuk	SPAM Desa Air Seruk	Desa	200	V
15	Sijuk	SPAM Desa Sungai Padang	UPT/Desa	200	V

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2023



d. Energi Listrik

PLN Wilayah Belitung tahun 2021 mengelola daya terpasang untuk Kabupaten Belitung sebanyak 96.020 KW di mana jumlah pelanggan listrik mencapai 71.085 pelanggan.

Tabel 2.113 Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Daya Tersambung Listrik di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pelanggan (pelanggan)	60.915	64.345	67.483	71.085	Belum ada data
2	Daya Terpasang (KW)	120.310.200	128.108.950	132.777.800	96.020	Belum ada data
3	Rumah tangga pengguna listrik (pelanggan)	53.798	56.350	58.459	-	Belum ada data

Sumber : UP3 Belitung Tahun 2023

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan sebagai infrastruktur dasar dalam kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perizinan dan perpajakan.

a. Kriminalitas

Dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, maka hal penting yang harus diperhatikan adalah situasi serta kondisi daerah yang aman, kondusif serta terkendali yang merupakan kunci bagi investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Berikut diuraikan jumlah tindak pidana tahun 2018-2022 di Kabupaten Belitung.



Tabel 2.114 Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Jenis Tindak Pidana	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pencurian/ Perampokan	34	2	29	34	Belum ada data
Penganiayaan	1	39	11	3	Belum ada
Pembunuhan	1	8	0	3	Belum ada
Kesusilaan/ Asusila	1	1	8	1	Belum ada data
Psikotropika/ Narkotika	11	8	10	16	Belum ada data
Perjudian	6	1	2	2	Belum ada
Pemeriksaan	0	1	0	0	Belum ada
Kelalaian Menyebabkan Kematian/ Terluka	1 4	0	3	3	Belum ada data
Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	8	3	0	Belum ada data
Lainnya	39	3	25	3	Belum ada
Jumlah	13	83	91	93	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2022

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kasus tindak pidana di Kabupaten Belitung, berfluktuatif cenderung menurun pada kurun waktu tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 122 tindak pidana meningkat pada tahun 2018 menjadi 131 kejadian 2018 kemudian menurun pada tahun 2019 dengan 83 kejadian namun terjadi peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 93 kejadian. Adapun tindak pidana tertinggi dalam kurun waktu 2017-2021 adalah pencurian/perampokan dan kejahatan lainnya.

Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas dan berdampak negatif seperti bertambahnya tingkat pengangguran serta meningkatnya angka kemiskinan. Penurunan jumlah tindak pidana terjadi pada tahun 2019 sebanyak 83 kejadian dan tahun 2020 sebanyak 91 kejadian. Situasi ini didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Selain angka kriminalitas, indikator demonstrasi juga menjadi salah satu parameter tingkat keamanan suatu daerah. Berikut disajikan jumlah demonstrasi di Kabupaten Belitung dalam dua tahun terakhir.



Tabel 2.115 Demonstrasi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022

Jenis Demonstrasi	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Demo bidang politik	0	0	0	0
Demo bidang ekonomi	1	1	1	3
Demo kasus pemogokan kerja	0	0	0	0
Demo bidang lain	1	1	1	0
Jumlah	2	2	2	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, 2023

Berdasarkan tabel diatas, jumlah demonstrasi di Kabupaten Belitung sangat rendah dan cenderung tetap dalam dua tahun terakhir, yang mencakup demo bidang ekonomi dan demo bidang lainnya. Hal ini dapat mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Belitung.

b. Perizinan

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Belitung terus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari penguatan organisasi perangkat daerah yang menangani perizinan dan non perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah teknis. Sejak tahun 2007 telah dibentuk perangkat daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh pejabat eselon III. Selanjutnya pada tahun 2013 status organisasi perangkat daerah ini ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh pejabat eselon II. Dan akhirnya di tahun 2017 nomenklatur perangkat daerah tersebut diubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Di samping penguatan organisasi perangkat daerah yang menangani perizinan dan non perizinan, keseriusan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan fokus iklim berinvestasi dapat dilihat juga dari pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, dari sebelumnya pada tahun 2013 – 2014 hanya melayani 6 jenis perizinan, menjadi 37 jenis perizinan pada tahun 2015 – 2016, dan selanjutnya pada pertengahan tahun 2017 meningkat menjadi 100 jenis perizinan. Hal ini dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Belitung. Berikut 100 (seratus) perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, yaitu:



Pada pertengahan tahun 2018, pemerintah pusat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara *online* yang lebih dikenal dengan OSS / *Online Single Submission* yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung diberikan tugas melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendapat kemudahan dalam hal perizinan secara *online*. Pada Bulan Agustus 2021 telah menerapkan OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*).

Berdasarkan Regulasi UUD Cipta kerja Nomor: 11/2020 tentang Cipta Kerja dan adanya Peraturan Bupati Belitung Nomor: 33 tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian. Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada DPMPTSP yang meliputi Perizinan Berusaha dan non perizinan. Penyelenggaraan perizinan berusaha dan Non perizinan yang menjadi wewenang DPMPTSP terdiri atas sektor:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Perindustrian;
- e. Perdagangan;
- f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. Perumahan pemukiman rakyat;
- h. Transportasi;
- i. Ketenagakerjaan;
- j. Pariwisata;
- k. Kesehatan, obat dan makanan; dan
- l. Pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor: 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Belitung. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

- Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana.
- Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Perizinan berusaha yang berbasis risiko meliputi sektor:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Perindustrian;
- e. Perdagangan;
- f. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Perumahan dan pemukiman rakyat;
- h. Transportasi;
- i. Ketenagakerjaan;
- j. Kesehatan, Obat dan Makanan;
- k. Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Pariwisata; dan
- m. Ketenagakerjaan.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk di bidang pelayanan perizinan sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai Tolak Ukur Penilaian sebagai tingkat Kualitas Pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan bagi masyarakat, IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat 3,70 dan Nilai konversi 92,56 dengan Mutu Pelayanan “A” dengan Kinerja Pelayanan “Sangat Baik”. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dilihat realisasi pada tahun 2021 dengan Nilai IKM sebesar 3,52 atau nilai konversi SKM 88,00 yang mencerminkan kepuasan sebagian besar pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

Tabel 2.116 Perkembangan Jumlah Izin Di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Izin yang menjadi kewenangan	100	100	100	100	1234
2.	Jumlah Pengajuan Izin	2100	1.573	985	1.124	3.774
3.	Jumlah izin yang terbit	2.093	1.394	840	761	3.630

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2023



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah izin yang diterbitkan dari tahun 2018 – 2022 berfluktuatif cenderung meningkat dimana pada tahun 2018 jumlah izin yang terbit sebanyak 2.093 meningkat menjadi 3.630 pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan 14,76 persen. Penurunan jumlah izin yang cukup tajam pada tahun 2020 dan 2021 dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia mengakibatkan semua lini kehidupan manusia mengalami keterpurukan dampak dari penyebaran virus Covid-19. Demikian pula halnya pada sektor pelayanan publik yaitu pelayanan perizinan dan non-perizinan telah melaksanakan upaya pencegahan terjadinya penyebaran virus covid-19 dengan melakukan kegiatan pelayanan tanpa tatap muka. Namun pada tahun 2022 jumlah pengajuan izin dan jumlah izin yang diterbitkan mengalami peningkatan yang cukup tajam hal ini menunjukkan semakin pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung sudah cukup membaik. Jumlah izin yang terbit pada tahun 2022 sebanyak 3.630 izin dengan rincian 2.674 izin terbit otomatis (OSS), 412 izin terbit terverifikasi (OSS), 1 izin KEK terverifikasi (OSS), 38 izin PBG dan 505 izin terbit non OSS.

c. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah merupakan komponen dalam pembentukan pendapatan daerah Terdapat 11 objek Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Kabupaten Belitung.

Tabel 2.117 Perkembangan Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pajak Hotel	11.275.358.863,99	9.251.808.783,11	3.877.534.981,54	4.261.523.758,87	8.271.751.894,00
2	Pajak Restoran	6.959.254.135,28	8.371.801.817,68	5.122.995.494,91	6.567.366.427,56	11.416.789.530,45
3	Pajak Hiburan	672.847.474,79	578.992.143,01	258.621.978,85	389.141.261,10	544.231.302,89
4	Pajak Reklame	1.231.383.983,62	893.040.643,81	782.970.552,67	940.770.859,92	1.075.247.118,02
5	Pajak Penerangan Jalan	11.518.244.153,00	12.302.757.750,00	12.245.521.984,00	12.801.858.754,00	14.247.670.076,00
6	Pajak Parkir	149.340.000,00	177.289.750,00	287.204.250,00	330.444.750,00	486.718.500,00
7	Pajak Air Tanah	115.078.320,00	125.985.840,56	0,00	126.703.243,20	128.59.3440,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	105.420.000,00	87.870.000,00	96.345.000,00	209.625.000,00	146.835.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.376.972.885,62	37.787.362.648,50	32.320.169.383,00	35.649.125.319,00	31.436.373.040,50
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.882.869.611,00	7.515.251.609,00	7.026.350.800,00	7.684.697.782,00	7.750.218.785,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.337.992.505,00	22.324.822.412,65	17.190.984.688,26	12.797.168.660,82	15.966.855.819,63

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)



Realisasi Pajak Daerah selama kurun waktu 2018-2022 berfluktuatif cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan -1,10 persen, dimana pada tahun 2018 pajak daerah sebesar Rp 95.624.761.932,30 meningkat 3,79 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pajak daerah mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar minus 20,22% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan imbas dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang melanda dunia sehingga menyebabkan munculnya kebijakan *Lockdown* di berbagai negara dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut. Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap industri pariwisata yang berimbas pada penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang mengakibatkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan mengalami penurunan yang cukup tajam. Pendapatan pajak terbesar yang mengalami pertumbuhan negatif kurun waktu 2018-2022 ada pada objek Pajak hotel (-7,45%), pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar -6,99%, pajak hiburan (-5,17%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (-3,58%) dan Pajak Reklame (-3,33%). Objek pajak yang mengalami pertumbuhan positif yaitu pajak parkir (34,36%), pajak restoran (13,17%), pajak sarang burung walis (8,64%), pajak bumi dan bangunan (7,13%), pajak Pajak Penerangan Jalan (5,46%), dan pajak air tanah (2,81%).

Pada tahun 2022 pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 11,88 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan terbesar pajak daerah pada tahun 2022 ada pada objek pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu sebesar Rp. 31.436.373.040,50 atau sebesar 34,37%, urutan terbesar kedua yaitu pada objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 15.966.855.819,63,00 atau sebesar 17,47 dan urutan terbesar ketiga yaitu objek pajak Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar atau sebesar 14.247.670.076,00 atau sebesar 15,58 persen.

d. Peraturan Daerah Pendukung Investasi

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan menarik serta menumbuhkan iklim investasi diperlukan sebuah okumment kebijakan daerah yang sifatnya formal yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaannya. Berikut Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Belitung yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah serta menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Belitung dalam rentang tahun 2018-2022.



Tabel 2.118 Perkembangan jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Perda	1	1	0	0	2	Buah
2	Jumlah Perbub	-	1	1	3	0	Buah

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2022

Berikut penjelasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2018-2022:

1. Pada Tahun 2018 hanya terdapat satu Peraturan Daerah yang diterbitkan yaitu mengenai Pencabutan Izin Gangguan.
2. Pada Tahun 2019 terdapat satu Peraturan Daerah Kabupaten Belitung dan satu Peraturan Bupati Belitung yang di terbitkan yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha. Sebagai upaya meningkatkan iklim berinvestasi di daerah dan meningkatkan daya saing serta menjamin kepastian hukum, Pemerintah Kabupaten Belitung dapat melakukan deregulasi perizinan dan non perizinan. Deregulasi perizinan terkait izin yang menghambat investasi dapat melalui harmonisasi perizinan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha.
 - b. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 tahun 2019 tentang tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Belitung. Pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Kemudahan Investasi di luar maupun dalam kawasan KEK yang bertujuan:
 - 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - 2) menciptakan lapangan kerja;
 - 3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - 4) mendorong meningkatnya investasi; dan
 - 5) mendorong dan mengembangkan Kawasan.
3. Pada Tahun 2020 terdapat satu Peraturan Bupati Belitung yang diterbitkan yaitu: Peraturan Bupati Belitung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2025. Rencana Umum Penanaman Modal



Kabupaten Belitung (RUPMK) bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal, mensinergikan semua kepentingan sektoral dan sebagai peta panduan (road map) penanaman modal di daerah.

4. Pada tahun 2021 terdapat tiga peraturan Bupati yang diterbitkan yaitu:
 - a. Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan citra pelaksana perizinan berusaha dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada masyarakat.
 - b. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perindustrian bertujuan untuk:
 - memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - memberikan kepastian hukum terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual.
 - memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan yang menjadi kewenangannya.
 - c. Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Belitung. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
 - Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana.
 - Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pada tahun 2022 terdapat dua peraturan Daerah yang diterbitkan yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah



ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Daerah.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
 - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - Retribusi Izin Trayek
 - Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah tersebut. Adapun indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah adalah kualitas tenaga kerja dan rasio ketergantungan penduduk.

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Berikut data penduduk Kabupaten Belitung menurut tingkat pendidikan selama periode 2018 - 2022.

Tabel 2.119 Data Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2018-2022

No	Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tidak/Belum Sekolah	30.140	31.174	33.110	33.995	34.832
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	27.487	28.913	29.875	30.470	30.601
3.	Tamat SD/Sederajat	44.089	44.225	43.986	44.637	45.088
4.	SLTP/Sederajat	24.809	25.250	25.379	25.863	26.264
5.	SLTA/Sederajat	33.485	34.543	35.175	36.323	37.787
6.	Diploma I/II	1.113	1.087	1.062	1.041	1.026
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2.750	2.908	2.996	3.105	3.194
8.	Diploma IV/Strata I	5.009	5.433	5.692	6.094	6.567



No	Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
9.	Strata II	169	181	194	204	229
10	Strata III	2	3	3	3	3
Jumlah		169.053	173.717	177.472	181.735	185.591

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa proporsi penduduk di Kabupaten Belitung yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah pada tahun 2021 adalah 20,36 %. Selain itu penduduk dengan lulusan jenjang pendidikan tinggi Strata 1 (S-1) meningkat pada lima tahun terakhir, sedangkan jumlah lulusan D-I/II mengalami penurunan selama periode 2018-2022. Hal ini antara lain disebabkan sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Akademi/Diploma III/Sarjana Muda atau D-IV/S1 yang tentunya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Kesempatan kerja yang ada saat ini memang memerlukan keahlian dan kompetensi khusus yang erat hubungannya dengan tingkat pendidikan, terutama penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Berikut data rasio lulusan D-IV/S1, S2 dan S3 di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.120 Rasio Lulusan D-IV/S1, S2 dan S3 di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah lulusan D-IV/S1	5.009	5.433	5.692	6.094	6.567
2	Jumlah lulusan S2	169	181	194	204	229
3	Jumlah lulusan S3	2	3	3	3	3
4	Jumlah lulusan S1/ S2/ S3	5.180	5.617	5.889	6.301	6.799
5	Jumlah penduduk	169.053	173.717	177.472	181.735	185.591
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,031	0,032	0,033	0,035	0,037

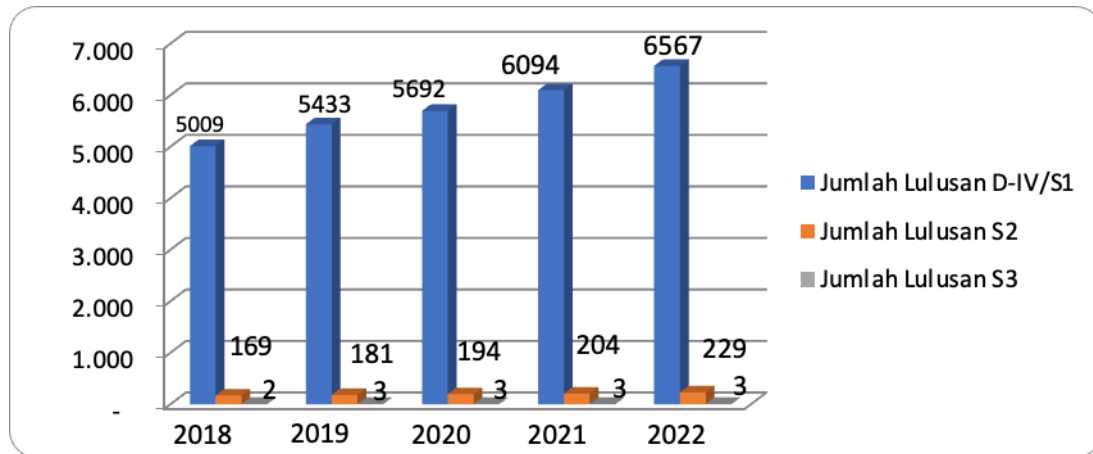
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Belitung masih tergolong rendah meskipun cenderung meningkat dari semula 0,031 di tahun 2018 menjadi 0,037 pada tahun 2022. Jumlah lulusan S2 juga terus mengalami kenaikan meskipun pertumbuhannya tidak sebesar lulusan D-IV/S1. Selain itu terdapat perbedaan yang cukup dalam



antara lulusan D-IV/ S1 dengan lulusan pasca sarjana (S2 dan S3) yang memang masih sedikit jumlahnya. Peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hingga sarjana atau pasca sarjana perlu mendapat dukungan dan dorongan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini merupakan suatu keharusan dan tuntutan kebutuhan dalam memperoleh sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, baik terdidik, terampil serta melek teknologi guna menghadapi tantangan era revolusi industri 5.0 saat ini.

Gambar 2.63 Jumlah Lulusan D-IV/S1, S2 dan S3 di Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

B. Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio atau rasio beban tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah salah satu indikator demografi yang penting karena berhubungan erat dengan kondisi ekonomi dan potensi pengembangan suatu wilayah. Dalam suatu kelompok masyarakat, tidak semua dapat dikategorikan produktif. Jadi ada pula golongan masyarakat yang dikategorikan tidak produktif. Oleh karena itu untuk mengetahui kualitas produktivitas masyarakat secara umum diperlukan rasio yang memperhitungkan kedua factor tersebut, yaitu Rasio Ketergantungan. Adapun rasio ketergantungan menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan maka akan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk berusia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif, yaitu kelompok anak-anak dan lanjut usia.

Selain itu, Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Indikator ini secara tidak



langsung memperlihatkan keadaan ekonomi suatu Negara apakah tergolong Negara maju atau Negara yang sedang berkembang, dan memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Jika suatu daerah memiliki angka ketergantungan yang tinggi, maka potensi pertumbuhan ekonominya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan, jika *dependency ratio* suatu wilayah tergolong rendah, maka potensi pertumbuhannya besar karena banyak terdapat masyarakat usia produktif. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu Negara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya masyarakat non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif. Berikut data terkait Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Belitung tahun 2018-2022.

Tabel 2.121 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

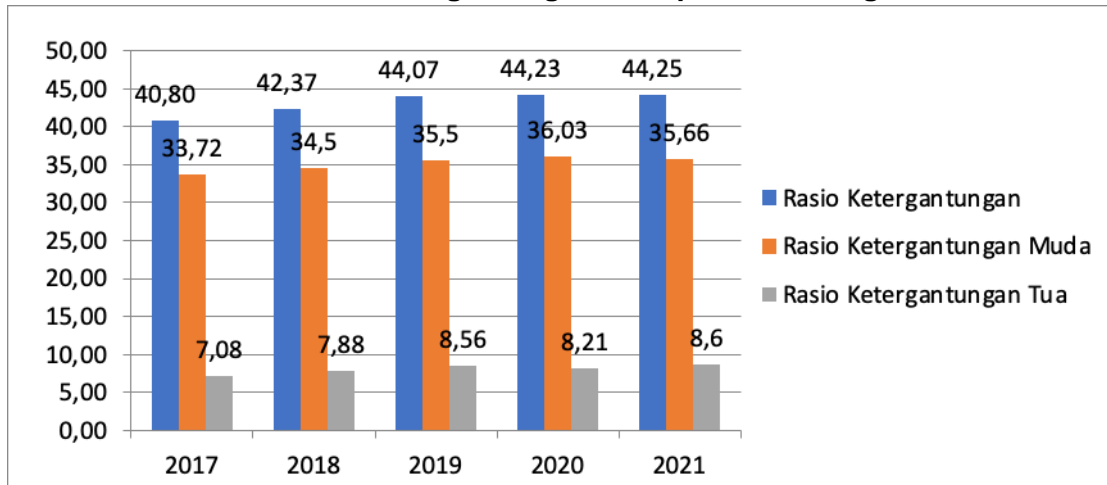
Tahun	Penduduk Kelompok Umur (jiwa)			Jumlah Penduduk	Rasio Ketergantungan (%)		
	0-14 Tahun	15-64 Tahun	≥ 65 Tahun		Muda	Tua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2018	40.960	118.740	9.353	169.053	34,50	7,88	42,38
2019	42.811	120.579	10.327	173.717	35,50	8,56	44,06
2020	44.328	123.045	10.099	177.472	36,03	8,21	44,24
2021	44.921	125.983	10.831	181.735	35,66	8,60	44,26
2022	45.566	128.406	11.619	185.591	35,49	9,05	44,53

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Belitung selama periode 2018-2022 terus meningkat, dari tahun 2018 yaitu sebesar 42,38 persen menjadi 44,53 persen pada tahun 2022. Selama periode tersebut rasio ketergantungan berada pada angka diatas 40 persen dan masuk kategori “Rasio Ketergantungan Tinggi”. Pada tahun 2022, rasio ketergantungan Kabupaten Belitung adalah 44,53 persen atau naik 0,27 poin dari tahun sebelumnya, dengan rasio ketergantungan muda sebesar 35,49 persen dan rasio ketergantungan tua sebesar 9,05 persen. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Belitung mempunyai tanggungan sekitar 44 penduduk usia non produktif, dengan 35 diantaranya kelompok usia muda dan 9 lainnya berasal dari kelompok usia lanjut. Rata-rata pertumbuhan rasio ketergantungan pada periode 2018-2022 adalah 0,53 persen. Besar kecilnya rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh proporsi penduduk berusia anak-anak (0-14 tahun) dan proporsi penduduk usia kerja (15-64 tahun).



Gambar 2.64 Rasio Ketergantungan Kabupaten Belitung 2017-2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Cerminan dari rasio ketergantungan adalah bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia yang tidak produktif (dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Namun jumlah penduduk usia produktif yang tinggi juga harus di imbangi dengan jumlah peluang kerja yang tinggi. Jika tidak, akan terjadi angka pengangguran yang tinggi. Jika terjadi hal demikian, maka bonus demografi akan berbalik menjadi bencana demografi. Generasi muda harus produktif agar dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian di daerah khususnya dan Indonesia pada umumnya.

2.5 Standar Pelayanan Minimal

A. Dasar Hukum pelaksanaan SPM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 221 Nomor 1419);
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Daerah menetapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Jenis Pelayanan Dasar untuk Kabupaten terdiri atas :

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;



4. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan Kesehatan balita;
8. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
9. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan Kesehatan pada lanjut usia;
11. Pelayanan Kesehatan pada pendetira hipertensi;
12. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
13. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis;
15. Pelayanan Kesehatan orang yang berisiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;
20. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
29. Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar sesuai kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas : Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum



dan Penataan ruang, Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan Sosial.

2.5.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik, Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal, dan Mutu pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan didik Pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak, serta Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajarana yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.

Berdasarkan kewenangannya jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten terdiri dari :

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar, terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
3. Pendidikan kesetaraan.

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada tahun 2020 dan tahun 2021 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.122 Capaian SPM Pendidikan Tahun 2020-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian Tahunan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi) Kelompok Usia 7-12 Tahun	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SMP/MTs) Kelompok Usia 13 – 15 Tahun	100%	100%	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	penduduk usia 7-18 Tahun yang terlayani pada Pendidikan Kesetaraan	100%	92,27%	92,38%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	penduduk usia 5-6 Tahun yang terlayani PAUD	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2022 (diolah)



Memperhatikan capaian di atas, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan diantaranya melalui peningkatan penyediaan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan terus dilakukan, meskipun pencapaian SPM di bidang pendidikan masih belum maksimal. Terlihat dari capaian SPM untuk jenjang Pendidikan SD tahun 2021 sebesar 89,20% turun dari tahun 2020 yang sebesar 92,65%. Artinya masih ada sekitar 10% anak di Kabupaten Belitung yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD.

Capaian SPM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2021 sebesar 77,66% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 69,98% tahun 2020. Meski demikian pencapaian SPM jenjang pendidikan SMP masih belum maksimal, masih ada sekitar 22% anak berusia 13-15 tahun di Kabupaten Belitung yang tidak berpartisipasi dalam jenjang pendidikan SMP. Sedangkan untuk capaian SPM untuk jenjang PAUD pada tahun 2021 sebesar 74,43% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 84,41% tahun 2020. Hal ini dikarenakan rata-rata orang tua sudah menyekolahkan anaknya pada jenjang SD pada umur 6 tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021 jumlah siswa yang berusia kurang dari 7 tahun yang menempuh jenjang SD berjumlah 2.359 orang.

Capaian SPM tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Belitung secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik, namun demikian dalam penyelenggaraannya dengan perubahan kebijakan dibidang Pendidikan mengakibatkan permasalahan diantaranya :

1. Berdasarkan standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP belum seluruh guru memenuhi kualifikasi Pendidikan S-1 dan bersertifikat pendidik;
2. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Pendidikan dasar untuk sekolah-sekolah yang beraloasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
3. Standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih harus ditingkatkan bila dibandingkan Standar Nasional, hal ini terlihat dari capaian Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG).

Dalam menyikapi permasalahan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan solusi, yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Memberikan kesempatan Pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya para guru;
3. Mendorong pemerataan guru PNS dengan pengukuran indeks pemerataan guru, minimal di tingkat kecamatan untuk menekan adanya perpindahan guru yang kurang jam mengajar;



4. Melakukan optimalisasi kegiatan penilaian kinerja guru (PKH) dan penilaian kinerja berkelanjutan (PKB).

2.5.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah Kabupaten terdiri atas :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan Kesehatan balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes militus;
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan dengan terduga tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan pada tahun 2020 dan tahun 2022 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.123 Capaian SPM Kesehatan Tahun 2020-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Setiap Tahun	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,89%	83,47%	85,15%
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	85,35%	91,01%	93,87%
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	99,50%	93,04%	99,43%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Setiap Tahun	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	92,65%	79,80%	80,86%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	90,25%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	52,20%	76,29%	80,20%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,59%	85,52%	88,46%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Kumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	37,69%	53,53%	66,81%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	100%	97,63%	97,68%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	67,67%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,32%	100%	100%

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Permasalahan dan Solusi dalam pencapaian kinerja standar pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Belitung, diantaranya :

Dari tabel 2.53 di atas terlihat bahwa ada beberapa indikator SPM yang belum mencapai target 100%, hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

Permasalahan:

1. SPM pelayanan kesehatan Ibu hamil :
 - a. Masih adanya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan.
 - b. Masih terdapat ibu hamil pendatang dari luar wilayah Kabupaten Belitung yang tidak memeriksakan kesehatannya ke tenaga kesehatan dan tidak memiliki kelengkapan pencatatan riwayat kesehatan selama kehamilannya.



- c. Masih kurang optimalnya dukungan keluarga dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil ke tenaga kesehatan.
2. SPM Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin:
 - a. Masih adanya persalinan yang terjadi tanpa ditolong tenaga kesehatan (melahirkan di rumah).
 - b. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non kesehatan di wilayah kecamatan Membalong walaupun sudah bermitra dengan bidan desa.
 - c. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan.
3. SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir:
 - a. Masih ada Bayi Baru Lahir yang belum bisa dilakukan Skriining SHK dikarenakan kondisi bayi tersebut sedang sakit atau lahir premature/BBLR.
 - b. Masih adanya bayi yang dilahirkan tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan (dilahirkan di rumah).
4. SPM Pelayanan Kesehatan Balita:
 - a. Pemantauan kesehatan balita melalui sweeping terkendala oleh jumlah tenaga baik di Puskesmas maupun di desa/kelurahan dikarenakan tenaga yang tersedia mempunyai tugas dalam pelaksanaan program Puskesmas.
 - b. Masih ada posyandu yang belum terpenuhinya standar jumlah tenaga kader dan alat penimbangan dan pengukuran.
5. SPM Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
 - a. Jumlah sasaran skriining kelompok usia produktif yang relative besar (119.144 org), dibandingkan dengan jumlah SDM Puskesmas yg melayani.
 - b. Adanya tugas rangkap petugas program P2PTM yang ada di Puskesmas.
 - c. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posbindu PTM, dengan berbagai alasan antara lain karena adanya anggapan kondisi tubuh dalam keadaan sehat, adanya kekhawatiran apabila tahu akan penyakit yang di derita dan kesibukan dalam bekerja untuk pemenuhan ekonomi keluarga.
 - d. Kurang optimalnya dukungan lintas sektor, tokoh masyarakat / tokoh agama termasuk pihak swasta dalam layanan posbindu PTM dan belum adanya kader khusus posbindu PTM.
6. SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut
 - a. Pemantauan kesehatan usia lanjut melalui sweeping tidak maksimal dikarenakan kurangnya jumlah tenaga di Puskesmas maupun didesa/kelurahan.



- b. Masih kurang optimalnya dukungan keluarga dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan lansia ke tenaga kesehatan.
- 7. SPM Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke fasyankes atau Posbindu, karena merasa tidak ada keluhan sakit, sehingga tidak diketahui terhadap kemungkinan penyakit hipertensi.
 - b. Sebagian masyarakat mencari pengobatan sendiri seperti membeli obat di apotik atau mencari pengobatan alternative.
 - c. Belum semua data hipertensi diambil dari Fasyankes milik swasta.

Beberapa hal tersebut di atas menjadi kendala sehingga tidak tercapai standar SPM yang telah ditetapkan. Disamping memang ada alat dan bahan serta dana untuk kelengkapan yang terbatas. Selain itu hal – hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini adalah masih belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sektor lainnya.

Solusi :

1. Memaksimalkan kerjasama lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
2. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada lintas sektor, toma/ toga dan pihak swasta dalam penggerakan/ dukungan posbindu PTM serta mendorong adanya peningkatan kapasitas kader khusus posbindu PTM
3. Meningkatkan Komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Promosi Kesehatan.
4. Meningkatkan Kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas.
5. Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan atas data kunjungan kasus penyakit hipertensi baik kunjungan Puskesmas maupun fasyankes lain (kinik swasta).

2.5.3 Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri atas jenis layanan dasar Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Standar pelayanan minimal untuk sub urusan bidang air minum daerah kabupaten terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan standar pelayanan minimal untuk



sub urusan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan limbah domestik bagi warga negara. Jenis layanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum pada tahun 2020 dan tahun 2021 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.124 Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Setiap Tahun	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	100%	100%	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	100%	-	100%

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2022 (diolah)

Pada tahun 2020 pencapaian jenis pelayanan dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Belitung untuk jumlah layanan sebanyak 600 jiwa tidak dapat terealisasi dikarenakan pada masa tahun 2020 merupakan masa pandemic Covid-19 terdapat pengurangan alokasi anggaran setiap perangkat daerah, maka penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dihapus anggarannya sehingga target yang direncanakan tidak teralisasi.

2.5.4 Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perumahan Rakyat terdiri dari:

- a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten



Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Pada saat masa pasca bencana;
 - b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
 - c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat pada tahun 2020 dan tahun 2021 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.125 Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Setiap Tahun	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	100%	-	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	-	-

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2022 (diolah)

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.



Permasalahan :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/sektor;
2. Tingkat pemahaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum komprehensif antar stakeholder/sektor;
3. Tidak semua indikator dan definisi operasional dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik Daerah;
4. Belum teridentifikasinya perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
5. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Solusi :

1. Kebijakan pejabat terkait untuk mengakomodir upaya penerapan SPM.
2. Dukungan OPD yang terkait dengan Keuangan Daerah.

2.5.5 Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020 dan tahun 2021 terlihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.126 Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Setiap Tahun	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota.	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	90,74%	87,14%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100%	55,56%	87,14%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	7,49%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	83,33%	76,32%

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2022 (diolah)

Capaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatas, terlihat capaian jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja mencapai 100%, untuk jenis pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Pelayanan Informasi Rawan Bencana mengalami sedikit penurunan. Sedang capaian SPM jenis pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana naik secara signifikan.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Namun beberapa upaya pencapaian SPM yang perlu menjadi perhatian yaitu tersedia dokumen bencana (Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dokumen Rencana Kontingensi (Renkon), pemenuhan kelengkapan sarana prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.



2.5.6 Standar Pelayanan Minimal Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.

Terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dalam Permensos tersebut yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Yang diterapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Belitung, hanya 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar di luar Panti dan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial. Sedangkan Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial kepada Gelandangan Pengemis di luar Panti tidak diterapkan, karena berdasarkan data Pembangunan Daerah tidak terdapat Gelandangan Pengemis di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.127 Target Capaian dan Realisasi SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Setiap Tahun	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100%	59,01%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100%	98,37%	85,38%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi	100%	100%	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Setiap Tahun	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		social dasar tuna social di luar panti			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2022 (diolah)

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial salah satunya data PMKS belum valid. Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, penguatan SDM Kessos, dan penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan indikator dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pusat maupun daerah. TPB memiliki tujuh belas tujuan yang dibagi dalam empat pilar, yaitu

- A. Pilar Pembangunan Sosial, mencakup poin (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesetaraan Gender. Pada intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- B. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi poin (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pada intinya, bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan;
- C. Pilar Pembangunan Lingkungan, mencakup poin (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11), Kota dan Pemukiman Layak, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Laut, dan (15) Ekosistem Darat. Pada intinya,



bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;

- D. Pilar Hukum dan Tata Kelola, meliputi poin (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Pada intinya, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Berikut adalah capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Belitung.

Tabel 2.128 Pemetaan Capaian Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2020

No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	7,56	6,29	6,27
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	96,74	96,25	95,46
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	-	-	-
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah tangga	-	-	-
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	98,4	141	139
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	82,04	81,01	82,07
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	%	-	-	-
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	%	belum ada	belum ada	belum ada



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	-	-	-
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	lokasi	belum ada	belum ada	belum ada
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.		-	-	-
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	jiwa	4	41	140
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)		-	-	-
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.		168,4	n/a	n/a
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	rupiah	n/a	n/a	n/a
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dokumen	0	0	0
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	7,56	6,29	6,27
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	%	-	-	-
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	%	9,99	6,85	belum ada



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	%	belum ada	belum ada	belum ada
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	belum ada	belum ada	belum ada
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	7,02	8,05	4,71
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	belum ada	belum ada	belum ada
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	82,1	76,5	82,17
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rupiah	belum ada	belum ada	belum ada
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	orang	196,85	138,7	93,83
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	96,1	101	93,8
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		13,5	20,8	15,9
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		10,5	14,4	11,8
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		12,1	18	14,3
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	98,4	141	87,86
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,93	0,67	0,52
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	insiden	284	258	217
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		0	0	0



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	%	100	100	100
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	17	13	6
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur 10-18 tahun.	%	n/a	n/a	n/a
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	41,5	34,91	34,91
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	belum ada	belum ada	belum ada
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	orang	-	-	-
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Kecamatan	9	9	9
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	%	belum ada	0,9 (data dari pusat)	belum ada
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	L	-	-	-
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	82,04	81,01	82,07
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	82,04	81,01	82,07
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	11,48	12,49	13,99



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		-	-	207
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	%	belum ada	belum ada	belum ada
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	belum ada	belum ada	belum ada
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		860	958	915
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	96,74	96,25	95,46
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	%	0	0	0
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur 10-18 tahun.	%	belum	belum	belum
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	87,7	90,8	90,2
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		3,59	3,9	3,88
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%	100	100	100
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	117,8	107,71	102,69
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	98,52	102,71	100,38
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	8,15	8,41	8,46
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	62,19	55,2	59,88
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	%	belum	belum	belum
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara	%	n/a	n/a	n/a



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
	penduduk umur ≥15 tahun.				
4.a.1*	Proporsi sekolah (SD/MI) dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	%	100	100	100
	56,56		63,93	47,54	
	(c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		4,92	7,38	1,64
	(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		0	0	0
	(e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		100	100	100
	(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		100	100	100
	(g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		100	100	100
	Proporsi sekolah (SMP/Sederat) dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		100	100	100
	(a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		81,25	81,25	80,33
	(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		40,63	40,63	12,3
	(c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		0	0	0
	(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		100	100	100
	(e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		100	100	100
	(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		100	100	100
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	TK = 22,16 SD = 66,90 SMP = 54,40	TK =24,16 SD = 66,90 SMP = 56,80	TK = 18,68 SD=67,29 SMP=58,20
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	belum	belum	belum



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	%	belum	belum	belum
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	%	-	-	-
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	%	belum	belum	belum
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	-	-	-
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	belum	belum	belum
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		belum	belum	belum
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		belum	belum	belum
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	belum	belum	belum
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	8,7	3,85	6,45
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	%	82,04	81,01	82,07

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026**



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	8,78	8,25	7,36
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	%	80,69	80,81	75,79
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%		78,98%	80,48%
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3/dtk	-	-	-
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	belum	belum	belum
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	77,50%	77,50%	77,50%
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	%	22,4	28,6	38,7
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	0,66	0,83	0,83
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Kecamatan	belum terkelola	belum terkelola	belum terkelola
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	%	-	-	-
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.		Tidak Ada insentif	Tidak Ada insentif	Tidak Ada insentif
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		-	-	-

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026**



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	4,48	3,87	belum
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	%	50,06	51,99	belum
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	4,43%	3,77	-2,07
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	0	5,81	50,47
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	n/a	n/a	n/a
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	belum	belum	belum
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	belum	belum	belum
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rupiah	n/a	n/a	n/a
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	2,91	2,89	4,82
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	%	0	18,99	31,53
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	n/a	126	126
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	3,3	3,84	3,75
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	14.681	19.063	6.288
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	452890	332.985	127.978
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	USD	-	-	-
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	%	-	-	-
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Unit	belum	belum	belum
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		-	-	-
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	belum	belum	belum

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026**



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	%	belum	belum	belum
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	%	belum	belum	belum
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	%	8,44	n/a	22,07
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	%	belum	belum	belum
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	%	belum	belum	belum
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	%	78	102,32	107,23
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	Laki-laki : 75,40 Perempuan : 69,50	Laki-laki : 87,21 Perempuan : 80,81	Laki-laki : 87,13 Perempuan : 75,79
10.1.1*	Koefisien Gini.		belum	belum	belum
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	-	-	-
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	%	-	-	-
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	-	-	-
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	%	-	-	-
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	institusi	-	-	-
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	orang	0	0	0
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	kota	-	-	-

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026**



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	EWS (satuan peringat an dini)	0	0	1 (FWS : Flute Warning System) di Amau
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	rupiah	n/a	n/a	n/a
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	belum	belum	belum
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	%	-	-	-
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	dokumen	-	-	-
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	ton	n/a	6.982,49	14.077,96
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	-	-	-
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Fasilitas publik	-	-	-
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	%	15,88	23	25,869
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	%	n/a	n/a	n/a
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	0	0	0
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	belum	belum	belum
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalamihukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	%			9 kasus
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	belum	belum	belum



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	%	-	-	28 anak, 10 dewasa
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	%	69,32	73,49	.71,09
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	%	belum	belum	belum
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	%	belum	belum	belum
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	belum	belum	belum
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	8,7	8	6,45%
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%		3,8	7,6
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	98,69	99,56	99,52
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	62,08	64,69	67,06
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	93,01	96,54	96,68



No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan.	orang	1	1	1
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%	belum	belum	belum
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		1,03	1,01	0,85
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	%	Meningkat	Menurun	Menurun
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	%	81,56	84,01	81,46
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	%	39	51,16	53,62
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Proyek	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		100%	100%	100%

Sumber : KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang telah direncanakan.

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah maupun struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dokumen ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur secara rinci Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang akan digunakan untuk melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, sehingga diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembahasan tentang kondisi keuangan daerah Kabupaten Belitung, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu serta Proyeksi Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam Kerangka Penganggaran dan Pendanaan periode perencanaan.



3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2018-2022. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Selanjutnya terkait penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, perlu didukung data empirik keuangan (penganggaran) daerah yaitu kondisi keuangan pada periode 2018-2022 sebagai cermin kebijakan penganggaran pembangunan yang telah dijalankan pada periode tersebut.

Adapun kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa pengelolaan pendapatan daerah, kinerja pengelolaan belanja daerah dan kinerja pengelolaan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah serta neraca daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022 berfluktuatif cenderung meningkat dimana tahun 2018 realisasi pendapatan sebesar 963,22 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2019 realisasi pendapatan mengalami peningkatan menjadi 1,082 triliun atau sebesar 12,41 persen. Pada tahun 2020 Pendapatan Daerah mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 957,02 Milyar rupiah atau -11,61 persen dan meningkat kembali tahun 2021 menjadi Rp 1,016 triliun rupiah atau sebesar 6,18 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,095 triliun rupiah atau sebesar 7,76 persen dari tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan pendapatan daerah yang cukup tajam pada tahun 2020 disebabkan karena



menurunnya komponen pendapatan terutama pada komponen pendapatan transfer Pemerintah Pusat. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan dan pencegahan dampak penularan Covid-19 berpengaruh terhadap nilai transfer ke daerah.



Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

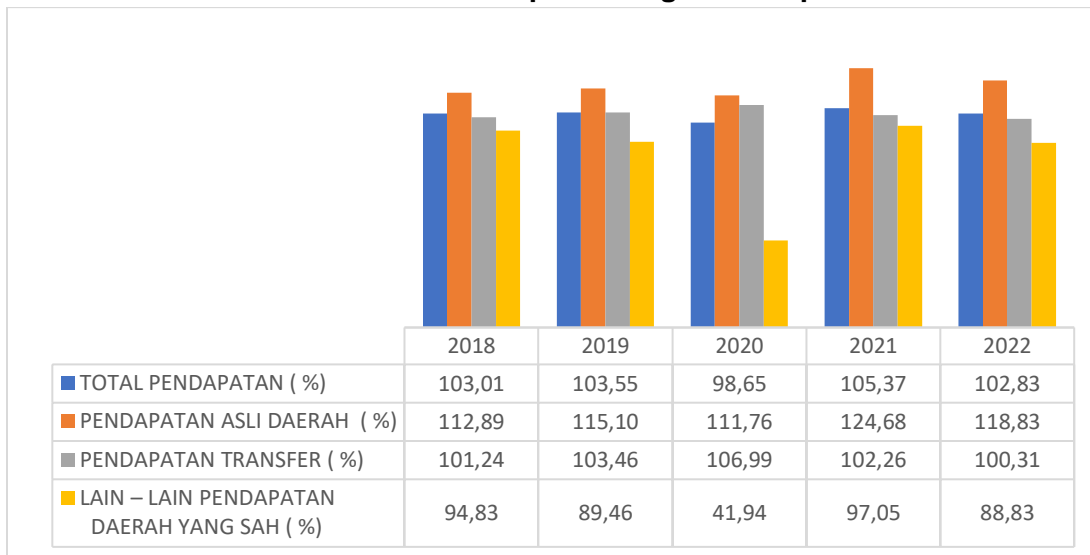
Kode	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3		4		5		6		7	
4	PENDAPATAN	935,054,053,699.35	963,227,529,030.79	1,045,686,545,099.00	1,082,784,254,354.25	970,146,286,359.00	957,021,600,971.11	964,352,113,400.00	1,016,168,466,318.45	1,064,832,351,593.00	1,095,000,886,527.53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	170,028,716,699.35	191,938,969,495.04	154,360,631,099.00	177,674,823,550.42	145,075,360,800.00	162,134,305,440.46	149,090,783,152.00	185,892,692,702.98	158,803,365,450.00	188,041,403,284.53
4.1.01	Pajak Daerah	78,669,200,000.00	95,624,761,932.30	81,926,766,250.00	99,416,983,398.32	67,860,000,000.00	79,316,693,695.41	73,233,194,752.00	81,758,425,816.47	80,745,331,247.00	91,471,284,506.49
4.1.02	Retribusi Daerah	9,133,199,004.00	8,719,185,210.84	9,328,627,000.00	9,876,391,944.25	7,234,307,500.00	7,399,450,727.00	8,168,099,200.00	7,595,275,799.00	9,212,331,080.00	8,933,321,281.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000.00	4,115,011,274.05	4,000,000,000.00	4,269,120,158.11	4,000,000,000.00	3,928,156,865.21	4,354,310,000.00	4,281,969,912.36	4,680,000,000.00	4,679,197,843.02
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	78,226,317,695.35	83,480,011,077.85	59,105,237,849.00	64,112,328,049.74	65,981,053,300.00	71,490,004,152.84	63,335,179,200.00	92,257,021,175.15	64,165,703,123.00	82,957,599,654.02
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	714,972,433,000.00	723,825,772,908.29	783,012,686,000.00	796,141,581,043.83	690,013,715,145.00	738,241,263,498.65	749,772,360,248.00	766,716,523,438.47	890,019,700,000.00	892,739,119,572.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	681,691,415,000.00	689,269,042,160.00	731,323,046,000.00	735,509,551,933.00	634,413,715,145.00	689,852,874,634.00	697,576,552,000.00	716,912,345,622.00	828,674,100,000.00	829,438,417,950.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33,281,018,000.00	34,556,730,748.29	51,689,640,000.00	60,632,029,110.83	55,600,000,000.00	48,388,388,864.65	52,195,808,248.00	49,804,177,816.47	61,345,600,000.00	63,300,701,622.00
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50,052,904,000.00	47,462,786,627.46	108,313,228,000.00	108,967,849,760.00	135,057,210,414.00	56,646,032,032.00	65,488,970,000.00	63,559,250,177.00	16,009,286,143.00	14,220,363,671.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	61,685,200,000.00	59,037,511,260.00	57,409,794,185.00	55,031,159,666.00	39,585,620,000.00	39,262,663,106.00	4,827,200,000.00	4,763,000,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50,052,904,000.00	47,462,786,627.46	46,628,028,000.00	49,930,338,500.00	77,647,416,229.00	1,614,872,366.00	25,903,350,000.00	24,296,587,071.00	11,182,086,143.00	9,457,363,671.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)



Apabila dilihat dari target pendapatan daerah dan realisasi yang dicapai, pendapatan daerah Kabupaten Belitung secara umum cenderung melebihi target rencana kecuali untuk tahun 2020 realisasi tidak sesuai dengan target sebesar 98,65%, hal ini disebabkan akibat dampak dari pandemi *Covid-19*. Target realisasi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hal yang positif dimana setiap tahunnya selalu melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan sangat tinggi. Penerima yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah realisasinya mengalami fluktuasi naik dan turun, hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah.

Gambar 3.1 Realisasi Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2018-2022



Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)*

Berdasarkan grafik 3.2 dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Belitung masih rendah atau ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dari rata-rata proporsi komposisi pendapatan daerah diketahui bahwa penerimaan daerah selama periode 2018 - 2022 terbesar diperoleh dari pendapatan transfer yaitu sebesar 76,56%, posisi kedua yaitu dari penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 17,73% dan posisi ketiga yaitu Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 5,69%.



Gambar 3.2 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

Selama periode 2018-2022, kontribusi dari ketiga komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda, dimana pendapatan transfer selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2018, kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah sebesar 75,15 persen mengalami fluktuasi hingga menjadi 81,53 persen pada tahun 2022. Besarnya kontribusi sumber pendapatan ini menunjukkan bahwa pendanaan daerah Kabupaten Belitung masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Kontribusi terbesar kedua adalah Pendapatan Asli Daerah di mana pada tahun 2018, kontribusi PAD sebesar 19,93 persen mengalami fluktuasi cenderung menurun menjadi 17,17 persen pada tahun 2022. Pendapatan daerah dengan kontribusi terkecil adalah Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi 4,93 persen pada tahun 2018 dan mengalami fluktuasi cenderung menurun hingga menjadi 1,30 persen pada tahun 2022.

Gambar 3.3 Kontribusi Komponen Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)



Apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah kurun waktu 2018-2022 dengan realisasi pendapatan sebesar 3,26 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -0,51 persen. Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,38%, dan Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -26.02 persen.



Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

Kode	Uraian	Realisasi (Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
		Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2022 (Unaudited)	
4	PENDAPATAN	963,227,529,030.79	1,082,784,254,354.25	957,021,600,971.11	1,016,168,466,318.45	1,095,000,886,527.53	3.26%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	191,938,969,495.04	177,674,823,550.42	162,134,305,440.46	185,892,692,702.98	188,041,403,284.53	-0.51%
4.1.01	Pajak Daerah	95,624,761,932.30	99,416,983,398.32	79,316,693,695.41	81,758,425,816.47	91,471,284,506.49	-1.10%
4.1.02	Retribusi Daerah	8,719,185,210.84	9,876,391,944.25	7,399,450,727.00	7,595,275,799.00	8,933,321,281.00	0.61%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,115,011,274.05	4,269,120,158.11	3,928,156,865.21	4,28,969,912.36	4,679,197,843.02	3.26%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83,480,011,077.85	64,112,328,049.74	71,490,004,152.84	92,257,021,175.15	82,957,599,654.02	-0.16%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	723,825,772,908.29	796,141,581,043.83	738,241,263,498.65	766,716,523,438.47	892,739,119,572.00	5.38%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	689,269,042,160.00	735,509,551,933.00	689,852,874,634.00	716,912,345,622.00	829,438,417,950.00	4.74%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34,556,730,748.29	60,632,029,110.83	48,388,388,864.65	49,804,177,816.47	63,300,701,622.00	16.34%
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47,462,786,627.46	108,967,849,760.00	56,646,032,032.00	63,559,250,177.00	14,220,363,671.00	-26.02%
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	59,037,511,260.00	55,031,159,666.00	39,262,663,106.00	4,763,000,000.00	-56.79%
4.3.02	Dana Darurat		-	-	-		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47,462,786,627.46	49,930,338,500.00	1,614,872,366.00	24,296,587,071.00	9,457,363,671.00	-33.19%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)



1) Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 berfluktuatif cenderung menurun dimana pada tahun 2018 rasio derajat persentase desentralisasi fiskal sebesar 19,93 % dan turun pada tahun 2019 menjadi 16,41 dan pada tahun 2020 menjadi 16,94% kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 18,29% dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 17,17%. Walaupun mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022 akan tetapi kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan berkriteria “cukup”, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

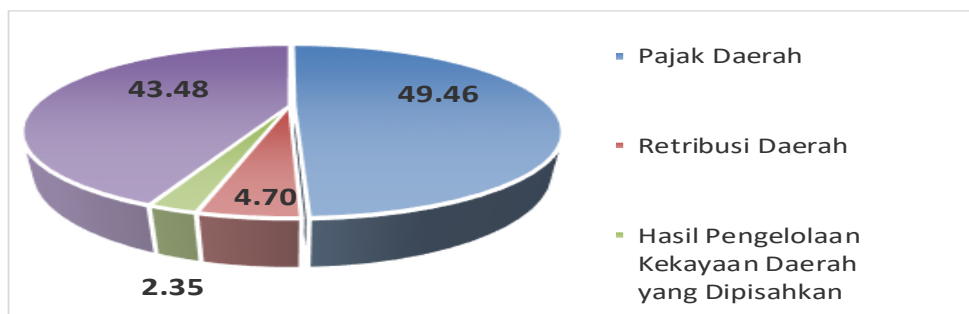
Tabel 3.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Rasio derajat Presentase Desentralisasi Fiskal
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	963.227.529.030,79	191.938.969.495,04	19,93
2019	1.082.784.254.354,25	177.674.823.550,42	16,41
2020	957.021.600.971,11	162.134.305.440,46	16,94
2021	1.016.168.466.318,45	185.892.692.702,98	18,29
2022	1.095.000.886.527,53	188.041.403.284,53	17,17

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.

Gambar 3.4 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



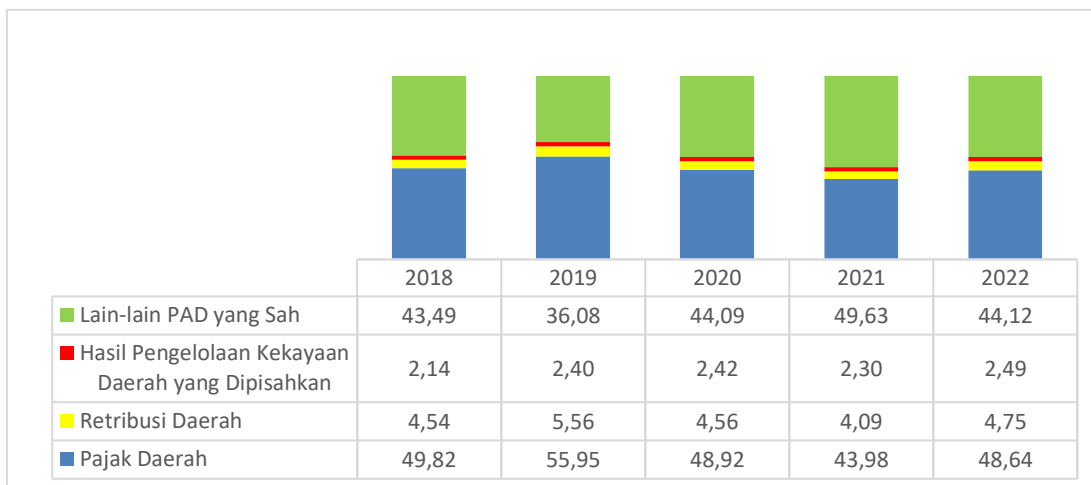
Sumber :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)



Realisasi PAD selama kurun waktu 2018-2022 yang berfluktuatif dipengaruhi oleh fluktuasinya komponen pembentuk PAD. Urutan komponen PAD dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil yaitu: (1) Pajak Daerah dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 49,46 persen dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 48,64 persen cenderung menurun dimana pada tahun 2018 sebesar 49,82 persen; (2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 43,48 persen dimana pada tahun 2022 sebesar 44,12 persen cenderung meningkat dimana tahun 2018 sebesar 43,49 persen; (3) Retribusi Daerah dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 4,70 persen dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 4,75 persen berfluktuatif cenderung meningkat, di mana tahun 2018 sebesar 4,54 persen; (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 2,35 persen dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 2,49 persen berfluktuatif dan 2,14 persen ditahun 2018.

Gambar 3.5 Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023
(data diolah Tim RPD)

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun 2018-2022 adalah sebesar -0,51 persen. Urutan komponen PAD dengan pertumbuhan terbesar ke terkecil yaitu: (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 3,26 persen; (2) pendapatan Retribusi Daerah sebesar 0,61 persen; (3) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,16 persen; (4) Pajak Daerah mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -1.10 persen.

Pada tahun 2020 pajak daerah mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar minus 20,22% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan imbas dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang melanda dunia sehingga menyebabkan munculnya kebijakan *Lockdown*



di berbagai negara dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut. Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap industri pariwisata yang berimbas pada penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang mengakibatkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan mengalami penurunan yang cukup tajam. Pendapatan pajak terbesar yang mengalami pertumbuhan negatif kurun waktu 2018-2022 ada pada objek Pajak hotel (-7,45%), pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar -6,99%, pajak hiburan (-5,17%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (-3,58%) dan Pajak Reklame (-3,33%). Objek pajak yang mengalami pertumbuhan positif yaitu pajak parkir (34,36%), pajak restoran (13,17%), pajak sarang burung walet (8,64%), pajak bumi dan bangunan (7,13%), pajak Pajak Penerangan Jalan (5,46%), dan pajak air tanah (2,81%). Pada tahun 2022 pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 11,88 persen dari tahun sebelumnya.

Pendapatan terbesar pajak daerah pada tahun 2022 ada pada objek pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu sebesar Rp. 31.436.373.040,50 atau sebesar 34,37%, urutan terbesar kedua yaitu pada objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp 15.966.855.819,63,00 atau sebesar 17,47 dan urutan terbesar ketiga yaitu objek pajak Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar atau sebesar 14.247.670.076,00 atau sebesar 15,58 persen.

Tabel 3.4 Angka Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pajak Hotel	11.275.358.863,99	9.251.808.783,11	3.877.534.981,54	4.261.523.758,87	8.271.751.894,00	-7,45
2	Pajak Restoran	6.959.254.135,28	8.371.801.817,68	5.122.995.494,91	6.567.366.427,56	11.416.789.530,45	13,17
3	Pajak Hiburan	672.847.474,79	578.992.143,01	258.621.978,85	389.141.261,10	544.231.302,89	-5,17
4	Pajak Reklame	1.231.383.983,62	893.040.643,81	782.970.552,67	940.770.859,92	1.075.247.118,02	-3,33
5	Pajak Penerangan Jalan	11.518.244.153,00	12.302.757.750,00	12.245.521.984,00	12.801.858.754,00	14.247.670.076,00	5,46
6	Pajak Parkir	149.340.000,00	177.289.750,00	287.204.250,00	330.444.750,00	486.718.500,00	34,36
7	Pajak Air Tanah	115.078.320,00	125.985.840,56	107.994.582,18	126.703.243,20	128.59.3440,00	2,81
8	Pajak Sarang Burung Walet	105.420.000,00	87.870.000,00	96.345.000,00	209.625.000,00	146.835.000,00	8,64
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.376.972.885,62	37.787.362.648,50	32.320.169.383,00	35.649.125.319,00	31.436.373.040,50	-3,58



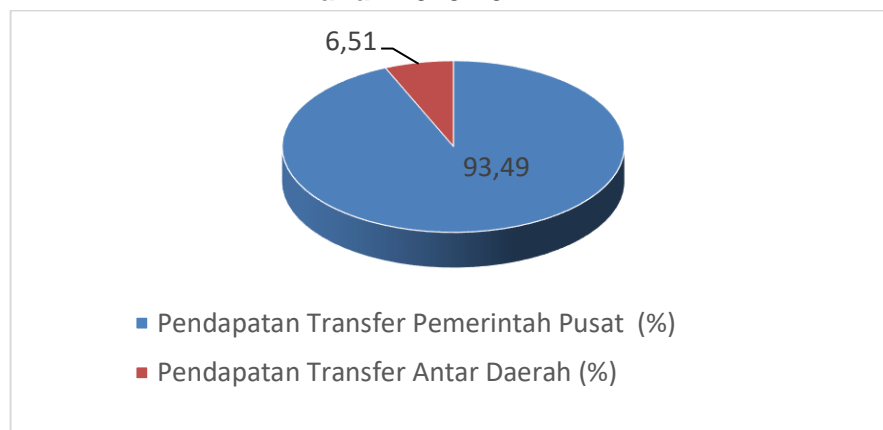
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.882.869.611,00	7.515.251.609,00	7.026.350.800,00	7.684.697.782,00	7.750.218.785,00	7,13
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.337.992.505,00	22.324.822.412,65	17.190.984.688,26	12.797.168.660,82	15.966.855.819,63	-6,99
		95.624.761.932,30	99.416.983.398,32	79.316.693.695,41	81.758.425.816,47	91.471.284.506,49	-1,10

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dirinci menurut objek dan sub rincian objek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal 34 ayat(1), pendapatan transfer terbagi atas dua komponen utama yang meliputi: (1) Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus;(c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer Antar Daerah yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Gambar 3.6 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



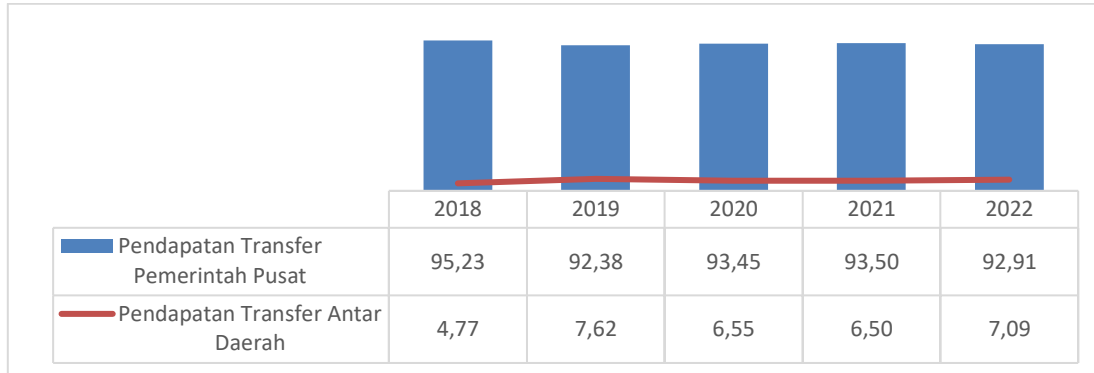
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

Realisasi Pendapatan Transfer selama kurun waktu 2018-2022 dipengaruhi oleh komponen pembentuk Pendapatan Transfer. Urutan komponen pendapatan transfer dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil yaitu: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat nilai rata-rata kontribusi sebesar 93,49 persen dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 92,91; (2)



Pendapatan Transfer Antar Daerah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 6,51 persen dan Kontribusi pada tahun 2022 sebesar 7,09 persen.

Gambar 3.7 Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



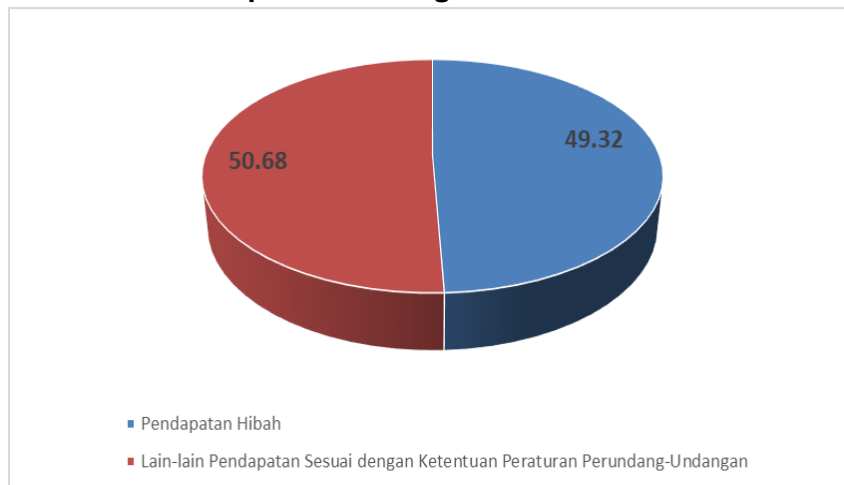
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

Pendapatan daerah dari pendapatan transfer cenderung meningkat selama kurun waktu 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan 5,38%, dimana rata-rata pertumbuhan tertinggi bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah rata-rata pertumbuhannya sebesar 16,34% sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 4,74%.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, lain-lain pendapatan Daerah yang sah terbagi atas tiga komponen utama yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gambar 3.8 Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2023 (data diolah Tim RPD)



Urutan komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah kurun waktu 2018-2022 dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil yaitu: (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan nilai rata-rata kontribusi sebesar 50,68 persen dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 66,51persen; (2) Pendapatan Hibah dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 49,32 persen di mana pada tahun 2022 sebesar 33,49 persen sedangkan untuk Dana Darurat selama periode 2018-2022 tidak ada realisasi pendapatan.

Tabel 3.5 Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Hibah	-	54.18	97.15	61.77	33.49
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100	45.82	2.85	38.23	66.51

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023, (data diolah Tim RPD)

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan -26,02 persen, di mana rata-rata pertumbuhan dari Pendapatan Hibah yaitu sebesar -56,79% dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar -33.19 persen.

b. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat 1 Belanja Daerah terdiri atas : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan



aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



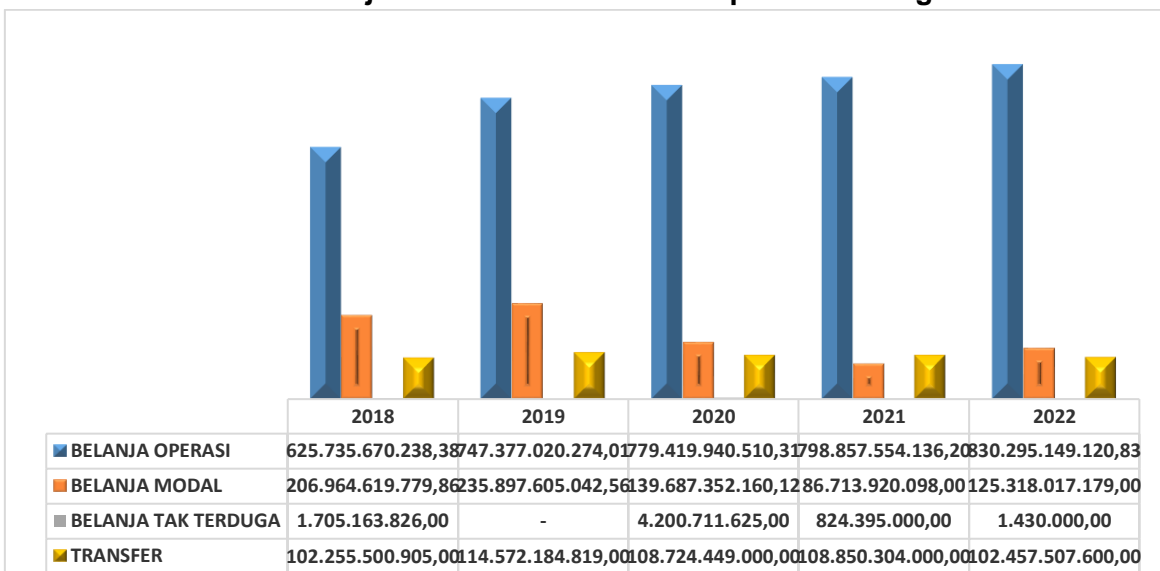
Tabel 3.6 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 – 2022

NO. URUT	URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
5	BELANJA										
5.1	BELANJA OPERASI	780.839.467.436,81	625.735.670.238,38	886.727.107.651,01	747.377.020.274,01	894.162.103.888,69	779.419.940.510,31	872.546.217.355,00	798.857.554.136,20	945.274.857.259,00	830.295.149.120,83
5.1.1	Belanja Pegawai	488.459.891.134,46	376.805.467.012,00	547.293.213.842,01	462.567.588.606,00	538.286.895.598,57	474.496.214.179,00	455.042.458.525,00	434.774.956.712,00	500.236.911.198,00	453.049.538.368,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	247.277.844.302,35	208.161.973.016,38	319.888.441.559,00	267.024.915.617,01	333.667.689.290,12	285.566.636.934,31	391.922.588.530,00	340.523.373.880,20	413.374.623.396,00	349.625.118.791,35
5.1.4	Belanja Subsidi	200.000.000,00	165.850.000,00	1.177.401.000,00	126.800.000,00	1.177.401.000,00	1.049.886.038,00	1.393.162.500,00	1.213.110.144,00	1.393.162.498,00	1.196.662.498,00
5.1.5	Belanja Hibah	44.701.732.000,00	40.602.380.210,00	18168051250,00	17.657.716.051,00	20.830.118.000,00	18.307.203.359,00	23.545.103.300,00	22.063.125.040,00	26.207.387.000,00	24.335.941.910,48
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	642.904.500,00	282.988.360,00	4.062.773.167,00	2.087.887.553,00
5.2	BELANJA MODAL	230.746.388.852,00	206.964.619.779,86	253.464.804.560,00	235.897.605.042,56	154.155.077.801,00	139.687.352.160,12	101.591.706.051,00	86.713.920.098,00	154.537.904.424,00	125.318.017.179,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.645.000.000,00	2.559.116.291,00	6.700.000.000,00	3.641.784.085,00	4.570.000.000,00	3.712.808.843,00	9.769.271.588,00	5.005.482.915,00	8.253.000.000,00	2.421.196.500,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.680.421.852,00	58.014.257.736,60	74.028.105.947,00	65.804.461.450,00	70.533.911.374,00	62.723.662.214,60	26.317.490.785,00	23.980.510.190,00	38.561.443.764,00	30.186.248.691,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.943.451.661,00	37.454.060.531,16	41.427.140.213,00	40.109.241.863,65	45.147.343.457,00	43.962.174.801,52	22.083.687.088,00	21.131.077.693,00	28.886.926.000,00	24.135.368.303,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	116.392.611.000,00	107.896.190.801,10	129.580.808.400,00	124.637.505.235,91	33.483.953.430,00	28.872.536.309,00	37.820.449.100,00	33.973.179.700,00	76.219.364.450,00	67.928.699.480,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.084.904.339,00	1.040.994.420,00	1.728.750.000,00	1.704.612.408,00	419.869.540,00	416.169.992,00	5.600.807.490,00	2.623.669.600,00	2.617.170.210,00	646.504.205,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	6.700.000.000,00	1.705.163.826,00	3.000.000.000,00	-	10.200.000.000,00	4.200.711.625,00	3.250.000.000,00	824.395.000,00	2.200.000.000,00	1.430.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	6.700.000.000,00	1.705.163.826,00	3.000.000.000,00	-	10.200.000.000,00	4.200.711.625,00	3.250.000.000,00	824.395.000,00	2.200.000.000,00	1.430.000.000,00
6	TRANSFER	102.360.650.000,00	102.255.500.905,00	114.652.533.000,00	114.572.184.819,00	108.724.449.000,00	108.724.449.000,00	109.048.682.000,00	108.850.304.000,00	102.826.375.000,00	102.457.507.600,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	-	-	-	-	9.313.410.000,00	9.313.410.000,00	109.048.682.000,00	108.850.304.000,00	102.826.375.000,00	102.457.507.600,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	8.535.022.000,00	8.535.022.000,00	8.141.833.000,00	8.141.833.000,00	8.995.768.000,00	8.995.768.000,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	778.388.000,00	778.388.000,00	100.906.849.000,00	100.708.471.000,00	93.830.607.000,00	93.461.739.600,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	102.360.650.000,00	102.255.500.905,00	114.652.533.000,00	114.572.184.819,00	99.411.039.000,00	99.411.039.000,00	-	-	-	-
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	101.759.195.000,00	01.759.195.000,00	114.002.533.000,00	114.002.533.000,00	99.411.039.000,00	99.411.039.000,00	-	-	-	-
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	601.455.000,00	496.305.905,00	650.000.000,00	569.651.819,00	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	1.120.646.506.288,81	936.660.954.749,24	1.257.844.445.211,01	1.097.846.810.135,57	1.167.241.630.689,69	1.032.032.453.295,43	1.086.436.605.406,00	995.246.173.234,20	1.204.839.136.683,00	1.059.500.673.899,83

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)



Gambar 3.9 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

Tabel dan grafik diatas menyatakan target dan realisasi APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 – 2022 untuk sumber- sumber belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

1) Belanja Operasi

Belanja daerah yang bersumber dari belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Besaran anggaran untuk target yang ditetapkan dari tahun 2018-2022 setiap tahunnya mengalami peningkatan termasuk capaian realisasi belanja.

Realisasi belanja operasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp. 830.295.149.120,- Sedangkan realisasi terendah pada tahun 2018 sebesar Rp. 625.735.670.238,-. Dari realisasi belanja operasi untuk pos belanja pegawai merupakan pengeluaran yang terbesar, diikuti belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Target dan realisasi belanja modal Kabupaten Belitung pada tahun 2019 mengalami kenaikan, namun kemudian cenderung penurunan di tahun 2020-2022, Keadaan ini terjadi pada saat dampak wabah Pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia, selain upaya menangani



Covid-19 kebijakan pengurangan anggaran atau *refocusing* di beberapa kementerian sampai dengan pemerintah kabupaten/kota.

Target belanja modal tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 253.464.804.560,00 dengan capaian realisasi belanja Rp. 235.897.605.042,56. Sedangkan target belanja terendah pada tahun 2021 sebesar Rp. 101.591.706.051,00 dengan realisasi Rp. 86.713.920.098,00. Target dan realisasi tertinggi pada kelompok belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sedangkan yang terendah pada kelompok belanja modal aset tetap lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga yang dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Pada periode 2018-2022 alokasi anggaran Belanja tak terduga tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 10.200.000.000,00 yang dialokasikan untuk penanganan dampak penularan pandemi COVID-19 sebesar Rp.9.289.384.440,88 dan alokasi antisipasi penanganan bencana lainnya sebesar Rp. 910.615.659,12 dengan realisasi belanja tak terduga pada tahun tersebut sebesar Rp. 4.200.711.625,00 yang seluruhnya digunakan untuk penanganan dampak penularan COVID-19 di Kabupaten Belitung. Sedangkan pada tahun 2019 tidak ada realisasi belanja tidak terduga hal ini dikarenakan tidak adanya kejadian keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengalokasian belanja tidak terduga pada tahun 2022 sebagai langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Rerpublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga mengikuti mekanisme sebagaimana diatur pada pasal 5 Permendagri Nomor 20 tahun 2020.

4) Belanja Transfer

Realisasi belanja daerah yang bersumber dari Belanja Transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Pada periode 2018-2022 belanja transfer memiliki realisasi belanja tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 114.572.184.819.000,00. dan ditahun 2022 dengan realisasi terendah sebesar Rp. 102.457.507.600,00.

Apabila melihat grafik dan tabel realisasi belanja daerah Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2018-2022 maka secara keseluruhan belanja daerah mengalami fluktuatif, yaitu tren kenaikan kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya.



Tabel 3.7 Rata - Rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

NO. URUT	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5,	BELANJA	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
5.1	BELANJA OPERASI	625.735.670.238,38	747.377.020.274,01	779.419.940.510,31	798.857.554.136,20	830.295.149.120,83	7,33%
5.1.1	Belanja Pegawai	376.805.467.012,00	462.567.588.606,00	474.496.214.179,00	434.774.956.712,00	453.049.538.368,00	4,71%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.161.973.016,38	267.024.915.617,01	285.566.636.934,31	340.523.373.880,20	349.625.118.791,35	13,84%
5.1.4	Belanja Subsidi	165.850.000,00	126.800.000,00	1.049.886.038,00	1.213.110.144,00	1.196.662.498,00	63,89%
5.1.5	Belanja Hibah	40.602.380.210,00	17.657.716.051,00	18.307.203.359,00	22.063.125.040,00	24.335.941.910,48	-12,01%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	282.988.360,00	2.087.887.553,00	64,81%
5.2	BELANJA MODAL	206.964.619.779,86	235.897.605.042,56	139.687.352.160,12	86.713.920.098,00	125.318.017.179,00	-11,79%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.559.116.291,00	3.641.784.085,00	3.712.808.843,00	5.005.482.915,00	2.421.196.500,00	-1,38%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.014.257.736,60	65.804.461.450,00	62.723.662.214,60	23.980.510.190,00	30.186.248.691,00	-15,07%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.454.060.531,16	40.109.241.863,65	43.962.174.801,52	21.131.077.693,00	24.135.368.303,00	-10,40%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	107.896.190.801,10	124.637.505.235,91	28.872.536.309,00	33.973.179.700,00	67.928.699.480,00	-10,92%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.040.994.420,00	1.704.612.408,00	416.169.992,00	2.623.669.600,00	646.504.205,00	-11,23%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.705.163.826,00	-	4.200.711.625,00	824.395.000,00	1.430.000.000,00	-4,30%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.705.163.826,00	-	4.200.711.625,00	824.395.000,00	1.430.000.000,00	-4,30%
6,00	TRANSFER	102.255.500.905,00	114.572.184.819,00	108.724.449.000,00	108.850.304.000,00	102.457.507.600,00	0,05%
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	-	-	9.313.410.000,00	108.850.304.000,00	102.457.507.600,00	231,68%
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	8.535.022.000,00	8.141.833.000,00	8.995.768.000,00	2,66%
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	778.388.000,00	100.708.471.000,00	93.461.739.600,00	995,77%
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	102.255.500.905,00	114.572.184.819,00	99.411.039.000,00	-	-	-1,40%
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	101.759.195.000,00	114.002.533.000,00	99.411.039.000,00	-	-	-1,16%
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	496.305.905,00	569.651.819,00	-	-	-	14,78%
	JUMLAH BELANJA	936.660.954.749,24	1.097.846.810.135,57	1.032.032.453.295,43	995.246.173.234,20	1.059.500.673.899,83	3,13%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

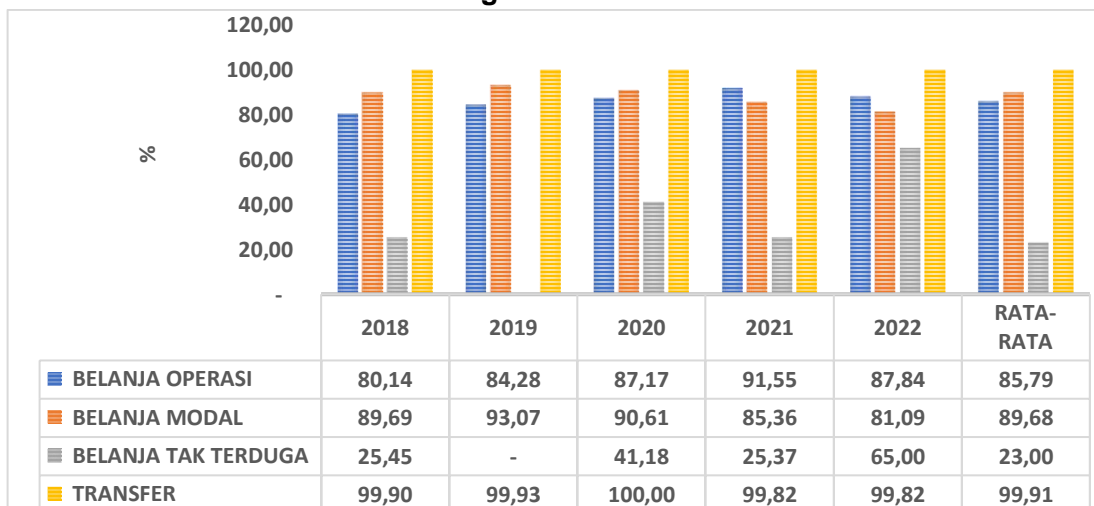


Tabel di atas menggambarkan pengukuran tingkat rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Belitung tahun 2018-2022. Secara umum rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Belitung sebesar 3,13%, dengan kelompok belanja operasi rata-rata pertumbuhan positif sebesar 7,33%. Pertumbuhan tertinggi untuk belanja subsidi sebesar 63,89% namun proporsi anggarannya paling rendah dibandingkan kelompok belanja operasi lainnya. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 4,71% dengan proporsi anggaran yang tertinggi, diikuti kelompok belanja barang dan jasa sebesar 13,84% dan belanja hibah dengan pertumbuhan sebesar -12,01%.

Realisasi belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2018-2022 yang berdampak pada angka rata-rata pertumbuhan sebesar minus 11,79%. Hal ini dipengaruhi oleh porsi anggaran yang menurun setiap tahunnya. Pertumbuhan negatif tersebut mempengaruhi kelompok belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan belanja modal tanah dan belanja modal aset tetap lainnya yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif berkisar minus 1 - 15%.

Realisasi belanja tidak terduga mengalami rata-rata pertumbuhan minus 4,30%. Angka pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh target anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2019. Faktor capaian realisasi belanja tidak terduga yang berfluktuasi selama 5 tahun terakhir dengan realisasi tertinggi tahun pada 2020.

Gambar 3.10 Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018– 2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

Grafik di atas menampilkan tingkat realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022. Pada belanja operasi secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap

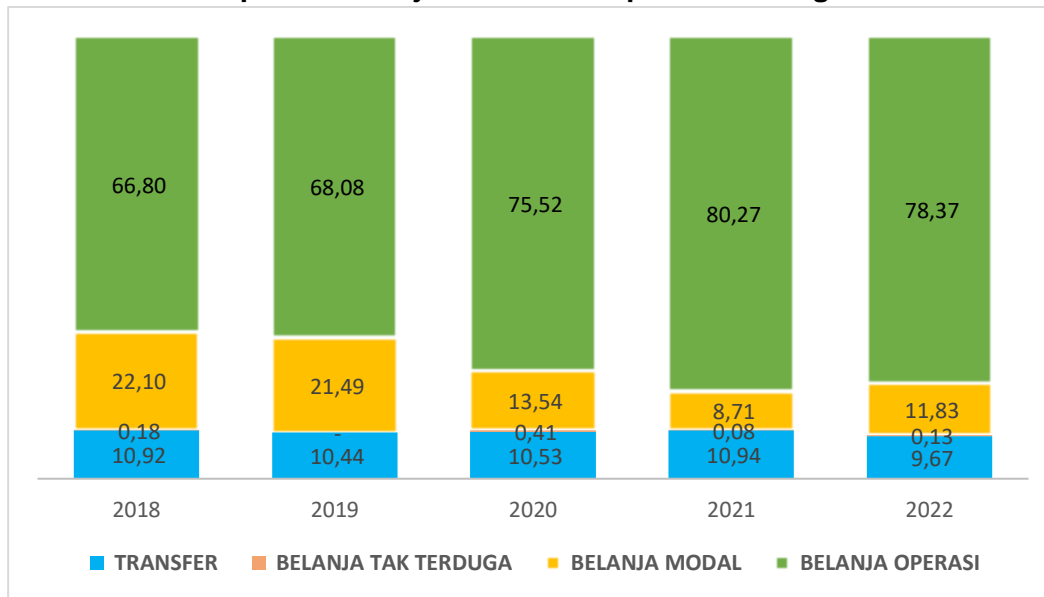


tahunnya dengan persentase realisasi tertinggi pada tahun 2021 dan 2022. Belanja operasi selama 5 tahun mempunyai realisasi rata-rata sebesar 87,84%.

Tingkat persentase realisasi belanja modal setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93,07% dan yang terendah tahun 2022 sebesar 81,09. Secara keseluruhan tingkat realisasi belanja modal sebesar 81,09%.

Kelompok belanja tidak terduga mempunyai realisasi belanja daerah pada tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022, dengan realisasi tertinggi sebesar 65,00% pada tahun 2022 dan realisasi terendah sebesar 25,37% pada tahun 2021. Secara keseluruhan rata-rata realisasi belanja tak terduga sebesar 23%. Sedangkan belanja transfer rata-rata realisasi keseluruhan sebesar 99,91% yang menggambarkan persentase capaian realisasi tertinggi secara umum dari seluruh kelompok belanja.

Gambar 3.11 Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

Grafik diatas menggambarkan komposisi belanja daerah Kabupaten Belitung kurun waktu tahun 2018-2022. Kelompok belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer diukur untuk melihat besaran realisasi anggaran selama 5 tahun terakhir dengan perkembangan komposisi belanja tersebut setiap tahunnya.

Komposisi belanja operasi merupakan komposisi tertinggi dibandingkan kelompok belanja lainnya. Pada tahun 2018 dengan komposisi 66,80% meningkat menjadi 68,08% pada tahun



2019, setelah itu mengalami tren peningkatan menjadi 75,52% pada tahun 2020 sampai dengan 80,27% tahun 2021.

Komposisi belanja modal kecenderungan menurun dari 22,10% pada tahun 2018 menjadi 8,71% di tahun 2021 dan 11,83 pada tahun 2022. Sedangkan Komposisi persentase kelompok belanja tidak terduga dibandingkan dengan kelompok belanja lainnya adalah belanja terendah dengan komposisi sebesar 0,08% sampai dengan 0,41%, sedangkan komposisi belanja transfer terlihat stabil antara 10,92% sampai dengan 10,44% dengan komposisi tertinggi sebesar 10,94%

Komposisi belanja pemerintah Kabupaten Belitung secara umum mengalami perubahan pada kurun waktu 2020-2021. Hal tersebut dipengaruhi kondisi khusus, yaitu terjadinya pandemi COVID 19 yang mempengaruhi tingkat realisasi dan pertumbuhan belanja daerah.

c. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 yang dimaksud Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis Pendapatan maupun Belanja Daerah, Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, di mana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran.



Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Belitung diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja dan hanya pada tahun 2018 sebagian kecil dipergunakan untuk penyertaan modal. Nilai Pembiayaan Netto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi Pengeluaran Pembiayaan dikarenakan Penerimaan Pembiayaan yang lebih besar. Setiap tahunnya realisasi pembiayaan Netto dalam lima tahun terakhir mencapai 100 persen setiap tahunnya.



Tabel 3.8 Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

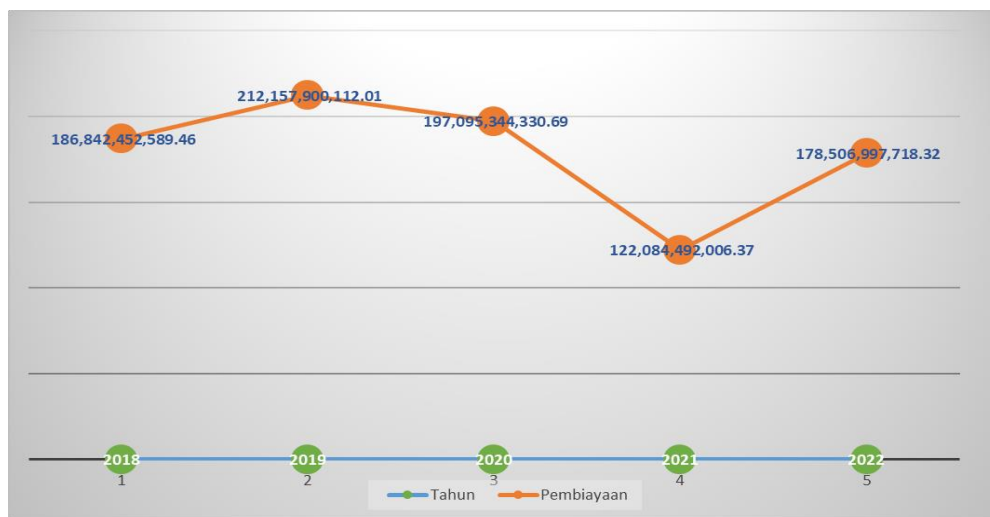
Kode	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pembiayaan						
6.1	Penerimaan Daerah	186.841.325.830,46	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62	-6,47
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun Sebelumnya	186.841.325.830,46	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62	
6.2	Pengeluaran Daerah	1.250.000.000,00	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.250.000.000,00	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	185.591.325.830,46	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62	-6,47
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkekaan	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62	178.506.997.718,32	-4,23

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)



Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung selama tahun 2018-2022 sebagaimana pada Tabel 3.1 di atas, sumber Penerimaan Pembiayaan hanya terdiri dari satu sumber yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), begitu pula halnya untuk Pengeluaran Pembiayaan hanya digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Belitung selama tahun 2018–2022 sebesar -4,23%. SiLPA yang masih tinggi disebabkan surplus penerimaan pendapatan daerah dan adanya efisiensi pelaksanaan belanja.

Gambar 3.12 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

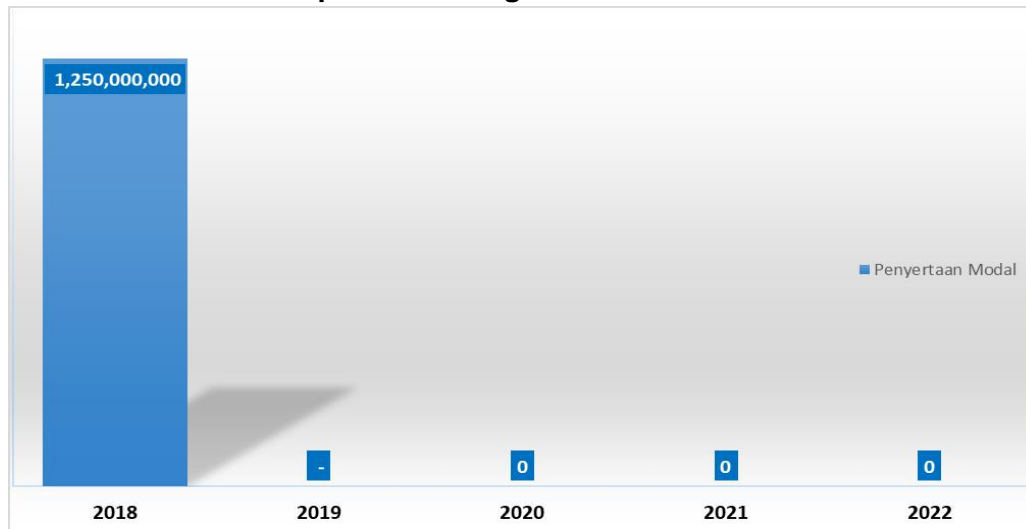


Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

Penerimaan pembiayaan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi Pembiayaan Daerah di samping pengeluaran pembiayaan. Salah satu komponen penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Kinerja pembiayaan daerah menunjukkan semua kondisi dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selama tahun 2020-2022, realisasi pembiayaan daerah, dalam hal ini pembiayaan netto mengalami penurunan. Realisasi pembiayaan tahun 2020 mencapai Rp 197.095.344.330,69, sementara pada tahun 2022 realisasi pembiayaan sebesar Rp178.506.997.718,32, dengan tingkat capaian pembiayaan daerah selama tahun 2020-2022 sebesar 100%.



Gambar 3.13 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Belitung, tahun 2023 (data diolah Tim RPD)

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, selama tahun 2018 – 2022, realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Belitung hanya terjadi pada tahun 2018 yang dipergunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah yaitu kepada PT. Belitung Mandiri. Sementara Perusahaan daerah (BUMD) tersebut sampai tahun 2022 belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2017-2021 dan rasio keuangan Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.9 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021

URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	80.391.689.498,79	83.785.093.018,34	57.106.190.392,97	14.459.545.193,65	100.981.334.703,90	124,02
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	8.467.000,00	13.641.000,00	0,00	0,00	(19,45)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	18.330,00	0,00	0,00	(100,00)
Kas di BLUD	4.448.804.818,32	4.226.185.860,32	1.227.626.335,37	6.575.204.319,37	39.484.223.243,37	215,04
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.051.462.613,00	2.289.539.475,00	2.547.948.119,00	3.209.715.763,00	2.286.198.745,00	5,02
Kas di Bendahara JKN	1.905.813.403,00	1.056.758.844,00	869.370.805,00	1.059.778.745,00	938.875.682,00	(12,95)
Kas di Bendahara BOS	4.839.794.562,35	2.827.170.898,35	3.910.872.306,35	3.907.286.775,35	1.606.760.979,35	(15,56)
Setara Kas	95.000.000.000,00	120.000.000.000,00	135.000.000.000,00	95.000.000.000,00	0,00	(22,70)
Kas lainnya	0,00	1.913.886,00	8.414.077,00	2.054.853,00	2.642.667,00	97,55
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Netto	4.481.989.494,00	5.074.142.477,75	5.704.625.149,00	7.538.695.153,00	7.589.700.615,25	14,62
Piutang Retribusi Netto	1.027.604.743,25	1.061.693.566,25	991.662.873,75	703.402.488,75	793.492.690,00	(4,88)
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian lancar tuntutan ganti rugi Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Netto	30.444.271.708,15	57.901.894.275,62	19.848.111.374,19	16.253.329.232,01	11.187.983.348,50	(6,20)
Piutang Lainnya Netto	10.668.608.926,25	10.778.982.817,00	16.664.668.494,50	5.472.748.315,50	30.161.515.722,75	109,90
Beban Dibayar Dimuka	1.388.888,92	224.910.000,21	14.320.134,62	15.439.817,70	20.049.791,32	4.009,39
Persediaan	75.152.283.841,29	64.737.652.477,88	97.755.254.044,88	105.347.832.225,38	20.986.669.419,06	(8,79)
Jumlah Aset Lancar	310.413.712.497,32	353.974.404.596,72	341.662.723.436,63	259.545.032.881,71	216.039.447.607,50	(7,56)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026**



URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	65.605.721.810,08	62.745.969.165,42	59.643.573.497,61	57.263.734.710,90	56.572.269.058,29	(3,63)
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	65.605.721.810,08	62.745.969.165,42	59.643.573.497,61	57.263.734.710,90	56.572.269.058,29	(3,63)
Jumlah Investasi Jangka Panjang	65.605.721.810,08	62.745.969.165,42	59.643.573.497,61	57.263.734.710,90	56.572.269.058,29	(3,63)
ASET TETAP						
Tanah	98.095.498.284,30	265.310.068.184,30	234.912.537.629,00	280.520.331.030,00	315.846.019.231,53	47,75
Peralatan dan Mesin	355.143.196.068,04	422.885.557.541,66	488.430.200.680,62	560.305.824.030,72	603.453.023.670,23	14,25
Gedung dan Bangunan	481.275.043.778,08	528.064.516.192,13	569.596.426.836,78	609.181.200.370,42	642.932.080.517,48	7,52
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.331.950.066.399,26	1.450.169.713.978,27	1.680.424.495.618,18	1.782.536.532.897,24	1.906.301.769.619,31	9,44
Aset Tetap Lainnya	53.657.748.285,85	60.165.729.390,96	67.474.110.111,66	56.625.096.756,55	58.927.172.272,59	3,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.835.192.598,51	12.803.552.023,51	19.549.524.123,51	24.294.796.732,51	14.585.038.400,68	25,10
Akumulasi Penyusutan	(1.063.349.614.715,27)	(1.124.427.043.781,98)	(1.229.122.745.056,30)	(1.418.469.656.710,29)	(1.616.372.543.040,66)	11,10
Jumlah Aset Tetap	1.264.607.130.698,77	1.614.972.093.528,85	1.831.264.549.943,45	1.894.994.125.107,15	1.925.672.560.671,16	11,55
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA						

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026**



URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.075.469.049,00	9.075.469.049,00	9.075.469.049,00	13.035.225.372,75	13.165.666.599,75	11,16
Aset Tidak Berwujud Netto	569.864.649,50	443.330.354,50	914.537.895,00	681.801.355,50	543.950.420,00	9,60
Aset Lain-lain	34.650.891.330,57	34.632.460.230,57	38.909.833.608,57	36.395.109.851,57	126.640.839.701,07	63,45
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	(131.015.515,00)	(30.019.664.929,89)	22.813,06
Jumlah Aset Lainnya	44.296.225.029,07	44.151.259.634,07	48.899.840.552,57	49.981.121.064,82	110.330.791.790,93	33,35
JUMLAH ASET	1.684.922.790.035,24	2.075.843.726.925,06	2.281.470.687.430,26	2.261.784.013.764,58	2.308.615.069.127,88	8,58
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.823.203.039,15	2.028.761.870,00	2.293.670.705,00	2.949.079.125,00	2.288.841.412,00	7,63
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	762.983.000,00	662.783.000,00	995.366.666,66	424.292.335,41	806.849.552,07	17,46
Utang Beban	5.013.705.618,00	6.878.823.809,00	11.906.065.674,00	12.414.145.138,80	17.754.662.551,00	39,39
Utang Jangka Pendek Lainnya	262.691.491,00	262.691.491,00	387.222.691,00	262.691.491,00	14.523.250.675,00	1.360,97
Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7.862.583.148,15	9.833.060.170,00	15.582.325.736,66	16.050.208.090,21	35.373.604.190,07	51,73
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	7.862.583.148,15	9.833.060.170,00	15.582.325.736,66	16.050.208.090,21	35.373.604.190,07	51,73
EKUITAS DANA						

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026**



URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Ekuitas Dana	1.677.060.206.887,09	2.066.010.666.755,06	2.265.888.361.693,60	2.245.733.805.674,37	2.273.241.464.937,81	8,30
JUMLAH EKUITAS DANA	1.677.060.206.887,09	2.066.010.666.755,06	2.265.888.361.693,60	2.245.733.805.674,37	2.273.241.464.937,81	8,30
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.684.922.790.035,24	2.075.843.726.925,06	2.281.470.687.430,26	2.261.784.013.764,58	2.308.615.069.127,88	8,58

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Belitung, tahun 2022 (data diolah Tim RPD)



Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Belitung yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 2021, Kabupaten Belitung memiliki total aset sebesar Rp 2.308.615.069.127,88 atau meningkat sebesar 37,02% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp 1.684.922.790.035,24. Proporsi aset terbesar Kabupaten Belitung berupa aset tetap yaitu sebesar Rp 1.925.672.560.671,16 atau sebesar 83,41% dari total aset Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2021.

Berdasarkan Tabel 3.9, aset Kabupaten Belitung dari kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 8,58%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki kekayaan yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam kebijakan akuntansi, kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Pada Tabel 3.9 juga dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tahun 2017-2021 tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Tahun 2021, Kabupaten Belitung memiliki jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar Rp 35.373.604.190,07. Angka ini meningkat 349,90% dibanding kewajiban tahun 2017 sebesar Rp 7.862.583.148,15, sementara rata-rata pertumbuhan kewajiban Kabupaten Belitung dari tahun 2017-2021 adalah sebesar 51,73%.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Berdasarkan Tabel 3.9 dinyatakan bahwa nilai ekuitas dana Kabupaten Belitung pada tahun 2021 mencapai Rp 2.273.241.464.937,81 dan meningkat sebesar 35,55% dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 1.677.060.206.887,09.

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio



atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

a) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah Pemerintah Daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Angka rasio lebih dari 1 (satu) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu melunasi kewajibannya sedangkan nilai rasio kurang dari 1 (satu) menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah melunasi hutang sangat rendah. Data rasio likuiditas Kabupaten Belitung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021

Rasio	Rumus	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	$\frac{\text{aset lancar}}{\text{kewajiban jangka pendek}}$	39,48	36,00	21,93	16,17	6,11
Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	$\frac{(\text{aset lancar} - \text{persediaan})}{\text{kewajiban jangka pendek}}$	29,92	29,41	15,65	9,61	5,51

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Belitung, tahun 2022 (data diolah Tim RPD)

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat (likuid), sehingga kapabilitas keuangan Kabupaten Belitung memiliki kemampuan yang tinggi dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

b) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Pengukuran rasio solvabilitas ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu rasio kewajiban terhadap total aset yang mengukur kemampuan daerah dalam penjaminan hutang dengan jumlah aktiva yang dimilikinya dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang mengukur seberapa besar daerah dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan ekuitas. Data rasio solvabilitas Kabupaten Belitung tahun 2017-2021 dapat dilihat di tabel berikut.



Tabel 3.11 Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021

Rasio	Rumus	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	$\frac{\text{total hutang}}{\text{total aset}}$	0,0047	0,0047	0,0068	0,0071	0,0153
Rasio Hutang terhadap Modal	$\frac{\text{total hutang}}{\text{total ekuitas}}$	0,0047	0,0048	0,0069	0,0071	0,0156

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Belitung, tahun 2022 (data diolah Tim RPD)

Rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Belitung pada tahun 2017-2021 cukup rendah, dengan nilai di bawah 1 (satu). Rendahnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Kabupaten Belitung masih cukup jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga cukup rendah dan menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Belitung

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan masa lalu menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan masa lalu meliputi proporsi dalam penggunaan anggaran maupun analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran akan berdampak pada percepatan pembangunan yang sudah direncanakan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam hal ini periode Tahun 2017 – 2021 perlu dianalisis sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan keuangan untuk periode yang akan datang.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja Kabupaten Belitung selama tahun 2018-2022 untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mempunyai proporsi yang seimbang. Bila dibandingkan dengan pemenuhan untuk belanja operasi dan belanja modal yang dalam hal ini diperuntukkan bagi pembangunan, maka alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Secara rinci analisis proporsi penggunaan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.12 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Proporsi rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BELANJA OPERASI	66,80	68,08	75,52	80,27	78,37	73,81
Belanja Pegawai	40,23	42,13	45,98	43,69	42,76	42,96
Belanja Barang dan Jasa	22,22	24,32	27,67	34,21	33,00	28,29
Belanja Subsidi	0,02	0,01	0,10	0,12	0,11	0,07
Belanja Hibah	4,33	1,61	1,77	2,22	2,30	2,45
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20	0,05
BELANJA MODAL	22,10	21,49	13,54	8,71	11,83	15,53
Belanja Modal Tanah	0,27	0,33	0,36	0,50	0,23	0,34
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,19	5,99	6,08	2,41	2,85	4,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,00	3,65	4,26	2,12	2,28	3,26
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11,52	11,35	2,80	3,41	6,41	7,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,11	0,16	0,04	0,26	0,06	0,13
BELANJA TAK TERDUGA	0,18	0,00	0,41	0,08	0,13	0,16
Belanja Tak Terduga	0,18	0,00	0,41	0,08	0,13	0,16
TRANSFER	10,92	10,44	10,53	10,94	9,67	10,50
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	10,92	10,44	10,53	10,94	9,67	10,50
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,83	0,82	0,85	0,50
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,08	10,12	8,82	3,80
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	10,92	10,44	9,63	0,00	0,00	6,20
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,05	10,38	9,63	0,00	0,00	4,01
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,02

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023 (Data diolah Tim RPD)

Selain gambaran mengenai belanja daerah, perlu diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk aparatur/pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung. Kebutuhan belanja aparatur Kabupaten Belitung selama periode tahun 2018-2022 berasal dari belanja operasi dan belanja modal yang meliputi Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH), Belanja pemungutan pajak, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran memiliki kondisi *fluktuatif* di mana proporsi tertinggi di tahun 2022 sebesar 47,54%.



Tabel 3. 13 Proporsi Belanja Aparatur/Pegawai terhadap Total Belanja di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2022

No	Tahun	Belanja Pemenuhan Aparatur (Rupiah)	Total Belanja (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rupiah)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2018	416.205.784.740,00	936.660.954.749,24	44,38
2.	2019	520.371.329.096,89	1.097.846.810.136,57	47,40
3.	2020	530.330.157.448,10	1.032.032.453.295,43	51,39
4.	2021	462.515.086.520,00	995.246.173.234,20	46,47
5.	2022	503.698.148.856,00	1.059.500.673.899,83	47,54

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023

Rincian belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
(1)	(1)2	4	5	6	7	8
A	BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	295.001.317.458,00	387.265.663.094,00	387.854.483.391,00	361.755.850.413,00	453.049.538.368,00
a	Belanja gaji dan tunjangan ASN	245.314.214.687,00	257.205.693.837,00	253.445.296.690,00	213.774.105.133,00	213.169.005.621,00
b	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	42.482.335.000,00	122.214.010.445,00	127.162.937.626,00	131.686.876.017,00	142.161.166.251,00
c	Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	3.485.330.000,00	3.749.620.000,00	3.729.000.000,00	13.458.833.312,00	15.300.826.546
d	Belanja pemungutan pajak daerah	3.719.437.771,00	4.096.338.812,00	3.517.249.075,00	2.836.035.951,00	3.084.087.258,00
2	Belanja Barang dan Jasa	62.302.807.276,48	62.021.517.308,24	68.110.987.396,98	62.584.916.489,00	97.772.595.067,00
a	Belanja honorarium PNS	23.371.526.108,00	7.048.176.556,00	10.124.209.637,00	10.511.781.000,00	10.236.488.000,00
b	Belanja uang lembur	420.325.000,00	503.200.000,00	585.950.000,00	1.313.615.000,00	1.736.512.000,00
c	Belanja beasiswa pendidikan PNS	391.525.701,00	270.867.601,00	462.095.363,00	708.097.688,00	705.780.822,00
d	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	1.267.695.572,00	1.587.434.425,00	590.642.000,00	1.107.268.358,00	1.530.536.000,00
e	Belanja premi asuransi kesehatan	82.004.820,00	6.045.306.780,00	25.390.984.924,00	26.011.998.896,00	35.999.949.298,00
f	Belanja makanan dan minuman pegawai	1.655.956.300,00	1.960.619.000,00	2.056.592.250,00	2.303.987.765,00	13.281.492.412,00
g	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.163.713.600,00	1.577.260.650,00	1.081.770.000,00	1.154.696.838,00	1.684.117.100,00
h	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.445.959.500,00	2.305.708.650,00	1.300.520.050,00	514.335.000,00	1.006.684.590,00
i	Belanja Perjalanan Dinas	32.504.100.675,48	40.722.943.646,24	26.518.223.172,98	18.959.135.944,00	31.591.034.845,00
j	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
k	Belanja pemulangan pegawai	-	-	-	-	-
B	BELANJA MODAL					
1	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	58.901.660.005,52	71.084.148.694,65	74.364.686.660,12	38.174.319.618,00	32.210.468.113,00
	TOTAL	416.205.784.740,00	520.371.329.096,89	530.330.157.448,10	462.515.086.520,00	583.032.601.548,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023



3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Berikut menyajikan gambaran realisasi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2022.

Berdasarkan tabel 3.15, terjadinya defisit riil dikarenakan realisasi belanja yang melebihi realisasi pendapatan daerah. Untuk menutupi kondisi tersebut, maka dimanfaatkan pembiayaan penerimaan daerah yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.



Tabel 3.15 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Daerah	963.227.529.030,79	1.082.784.254.354,25	957.021.600.971,11	1.016.168.466.318,45	1,095,000,886,527,53
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	936.660.954.749,24	1.097.846.810.135,57	1.032.032.453.295,43	995.246.173.234,20	1.059.500.673.899,83
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.250.000.000,00				
A	Defisit Riil	25.316.574.281,55	(15.062.555.781,32)	(75.010.852.324,32)	20.922.293.084,25	35.500.212.627,70
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	186.841.325.830,46	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan					
4	Penerimaan pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan piutang daerah					
B	Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah	186.841.325.830,46	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62	178.506.997.718,32

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023



**Tabel 3.16 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Belitung
Tahun 2018 – 2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Defisit Riil	25.316.574.281,55	(15.062.555.781,32)	(75.010.852.324,32)	20.922.293.084,25	35.500.212.627,70
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	186.841.325.830,46	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62	178.506.997.718,32

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya bermanfaat dalam menutupi kondisi defisit riil keuangan daerah. Selama tahun 2018– 2022, kondisi SILPA Kabupaten Belitung mengalami nilai yang *fluktuatif* tergantung pada penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Berikut diuraikan kondisi target dan realisasi SILPA Kabupaten Belitung selama tahun 2018 – 2022.



Tabel 3.17 Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
	Jumlah SILPA	212.157.900.112,01		197.095.344.330,69		122.084.492.006,37		143.006.785.090,62		178.506.997.718,32	
1	Pelampauan PAD	21.910.252.795,69	10,33	23.314.192.451,42	11,83	17.058.944.640,46	13,97	36.801.909.550,98	25,73	29.238.037.834,53	16,38
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	8.853.339.908,29	4,17	26.621.095.043,83	13,51	(27.009.845.646,35)	(22,12)	16.944.163.190,47	11,85	2.719.419.572,00	1,52
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(2.590.117.372,54)	(1,22)	(12.837.578.240,00)	(6,51)	(3.173.784.382,00)	(2,60)	(1.929.719.823,00)	(1,35)	(1.788.922.472,00)	(1)
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	183.984.424.780,57	86,72	159.997.635.075,44	81,18	135.209.177.394,26	110,75	91.190.432.172,17	63,77	148.338.462.783,79	83,10
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023

Tabel 3.18 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Tahun Berkenaan Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	214.195.128.982,01	200.684.081.365,69	124.213.585.649,37	145.300.036.020,62	178.954.546.839
	dikurangi :					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	9.833.060.170,00	15.582.325.736,66	16.050.208.090,21	35.373.604.190,07	27.394.364.117
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa lebih (riil) Pembiayaan Anggaran	204.362.068.812,01	185.101.755.629,03	108.163.377.559,16	109.926.431.830,55	139.489.089.902

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, tahun 2023



3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung terkait erat dengan kapasitas daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Belitung bergantung pada anggaran selama 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan pendapatan dan belanja daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Proyeksi keuangan Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.19 Proyeksi Keuangan Kabupaten Belitung Tahun 2023-2026

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)			
		2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142.067.684.839,00	203.908.949.213,20	213.697.473.563,86	215.753.063.677,50
4.1.01	Pajak Daerah	79.790.032.674,00	110.687.918.036,20	116.222.313.938,01	117.384.537.077,39
4.1.02	Retribusi Daerah	8.988.875.470,00	85.082.568.977,00	89.336.697.425,85	90.230.064.400,11
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	48.688.776.695,00	3.538.462.200,00	3.538.462.200,00	3.538.462.200,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	871.537.492.887,00	1.207.775.450.850,00	1.255.958.459.764,97	1.254.770.127.590,46
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	813.037.692.887,00	1.138.920.850.850,00	1.194.138.723.592,50	1.217.482.995.324,35
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.499.800.000,00	68.854.600.000,00	61.819.736.172,47	37.287.132.266,11
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.182.086.143,00	10.997.152.244,00	11.547.009.856,20	12.124.360.349,01
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	11.182.086.143,00	10.997.152.244,00	11.547.009.856,20	12.124.360.349,01
	JUMLAH PENDAPATAN	1.024.787.263.869,00	1.422.681.552.307,20	1.481.202.943.185,03	1.482.647.551.616,97
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	880.575.860.256,00	1.027.552.910.166,84	1.062.245.729.936,81	1.093.562.363.854,59
5.1.01	Belanja Pegawai	467.161.013.622,00	500.845.424.275,84	515.870.787.004,11	531.346.910.614,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.229.722.306,00	488.822.595.391,00	511.938.969.182,70	530.849.547.334,75
5.1.04	Belanja Subsidi	843.409.628,00	1.217.617.500,00	1.339.379.250,00	1.473.317.175,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.125.925.000,00	36.187.029.000,00	32.568.326.100,00	29.311.493.490,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)			
		2023	2024	2025	2026
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	215.789.700,00	480.244.000,00	528.268.400,00	581.095.240,00
5.2	BELANJA MODAL	138.292.927.900,00	403.992.977.641,71	416.959.010.024,64	365.882.368.327,62
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	2.000.000.000,00	2.800.000.000,00	2.750.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.156.324.800,00	68.003.141.800,00	71.594.686.690,20	71.806.837.026,41
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.927.452.500,00	92.950.686.300,00	95.929.107.031,63	56.077.494.295,33
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.568.266.200,00	240.396.912.041,71	239.120.758.016,00	228.096.532.205,88
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.640.884.400,00	642.237.500,00	7.514.458.286,81	7.151.504.800,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	3.675.000.000,00	3.675.000.000,00	3.675.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	3.675.000.000,00	3.675.000.000,00	3.675.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	101.919.675.713,00	107.460.664.498,65	113.323.203.223,58	119.527.819.434,76
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.900.100.000,00	9.790.110.000,00	10.769.121.000,00	11.846.033.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	93.019.575.713,00	97.670.554.498,65	102.554.082.223,58	107.681.786.334,76
	JUMLAH BELANJA	1.124.288.463.869,00	1.542.681.552.307,20	1.596.202.943.185,03	1.582.647.551.616,97
	TOTAL SURPLUS/ (DEFISIT)	(99.501.200.000,00)	(120.000.000.000,00)	(115.000.000.000,00)	(100.000.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.501.200.000,00	120.000.000.000,00	115.000.000.000,00	100.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.501.200.000,00	120.000.000.000,00	115.000.000.000,00	100.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)			
		2023	2024	2025	2026
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	99.501.200.000,00	120.000.000.000,00	115.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)



3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas, maka dihitung kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2024-2026 tersaji pada tabel berikut ini.



Tabel 3.20 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rupiah)			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7
1	Pendapatan	1.024.787.263.869,00	1.047.479.283.851,00	1.099.858.320.149,00	1.155.127.552.186,00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)				
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA)	99.501.200.000,00	95.000.000.000,00	92.500.000.000,00	90.000.000.000,00
I	Total Penerimaan	1.124.288.463.869,00	1.142.479.283.851,00	1.192.358.320.149,00	1.245.127.552.186,00
	Dikurangi				
A	BELANJA OPERASI	238.759.406.128,00	244.728.391.281,20	250.846.601.063,23	257.117.766.089,81
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	237.948.206.128,00	243.896.911.281,20	249.994.334.063,23	256.244.192.414,81
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	811.200.000,00	831.480.000,00	852.267.000,00	873.573.675,00
3	Belanja Bunga	0	0	0	0
B	BELANJA TRANSFER	8.877.890.814,40	9.659.199.902,10	10.527.321.006,30	11.473.464.540,80
1	Belanja bagi hasil	8.877.890.814,40	9659199902,10	10527321006,30	11473464540,80
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
2	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0
II	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	247.637.296.942,40	254.387.591.183,30	261.373.922.069,53	268.591.230.630,61
I - II	Kapasitas riil kemampuan keuangan	876.651.166.926,60	888.091.692.667,70	930.984.398.079,47	976.536.321.555,39

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)



Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program operasional pada program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka memenuhi pelayanan perangkat daerah, dan pelaksanaan program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun alokasi dana yang tersedia masih bersifat indikatif dan akan didistribusikan pada program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah, serta akan dijabarkan pada perencanaan tahunan.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan kinerja “*gap expectation*” pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang berdasarkan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Isu strategis pembangunan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari analisis data kondisi eksisting hasil pembangunan periode sebelumnya. Selain itu juga telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional.

Permasalahan pembangunan daerah yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pada periode sebelumnya, dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, dengan melihat *trend*, perbandingan antar waktu, atau menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan objek tertentu perbandingan dengan standar yang berlaku dan perbandingan antar daerah/wilayah/kawasan lainnya. Selain itu juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Standar Pelayanan Minimal.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Belitung dapat dijabarkan dalam 5 (lima) pokok masalah utama yaitu :

- Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
- Konektivitas dan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan pelayanan dasar
- Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- Tata Kelola Pemerintahan
- Kualitas lingkungan hidup

Identifikasi Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan dari data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Belitung didapat dari gambaran umum pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilihat dari berbagai aspek – aspek pembangunan.



4.1.1 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang cenderung melambat. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi secara global, lemahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat dampak dari inflasi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, perikanan dan kehutanan. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun beberapa kategori mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada kategori industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori jasa lainnya. Peningkatan aktifitas pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -2,28 persen, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami lonjakan yang cukup signifikan di tahun 2021 hingga mencapai 4,64 persen.

Angka inflasi bulanan di Kabupaten Belitung yang tergolong inflasi ringan atau di bawah 10% pertahun, walaupun belum mengganggu perekonomian daerah namun dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap. Pengendalian terhadap inflasi menjadi penting karena ada keterkaitan yang erat antara kenaikan harga dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak serta merta disertai dengan meningkatnya pendapatan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka membatasi pengeluaran dan mengatur ulang perencanaan keuangan. Selain itu potensi peningkatan jumlah penduduk miskin juga kian besar dikarenakan kemampuan membeli barang kebutuhan hidup yang terus menurun. Inflasi di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2018 berada pada angka 2,72 kemudian meningkat pada angka 3,19 di tahun 2019 dan turun menjadi 2,11 di tahun 2020. Terjadi lonjakan signifikan di tahun 2021 pada angka 4,01 dan 4,17 di tahun 2022. Komponen penyebab inflasi di Kabupaten Belitung tak bisa dilepaskan dari andil kelompok pengeluaran makan minum dan tembakau, Penyedia makanan dan minuman restoran, perumahan, listrik, air dan bahan bakar rumah tangga, transportasi, kesehatan dan pendidikan.



Indeks Gini Kabupaten Belitung selama periode 2018-2022 berfluktuatif cenderung menurun dari 0,267 pada tahun 2018 terus menurun hingga tahun 2021 menjadi 0,195, mengalami peningkatan menjadi 0,237 pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kabupaten Belitung. Secara nasional selama lima tahun terakhir Kabupaten Belitung memiliki indeks Gini di bawah Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peningkatan daya saing produk unggulan daerah berbasis potensi daerah seperti perikanan, pariwisata dan pertanian menjadi perhatian utama dalam meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Belitung. Pengembangan produk-produk usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sektor unggulan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global.

Masalah Pokok pembangunan perekonomian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan

Belum optimalnya produksi pertanian disebabkan oleh belum optimalnya penerapan teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, masih rendahnya kompetensi petani dan kelembagaan petani, belum terkelolanya air irigasi dengan baik, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dan belum optimalnya pengelolaan pasca panen produk pertanian dan perkebunan.

Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi perikanan tangkap, masih tingginya tangkapan ikan diluar batas biologis yang aman, belum optimalnya produksi perikanan budidaya, belum optimalnya produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik.

2. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro

Belum Optimalnya pengembangan koperasi dan mikro disebabkan oleh Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi yang masih rendah, masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro, belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam mengembangkan IKM sebagai pendukung kepariwisataan, dan belum optimalnya pembinaan dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan IKM.

3. Kurangnya daya saing pariwisata

Kurangnya daya saing pariwisata Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh belum optimalnya amenities, atraksi, promosi pariwisata, belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan



cagar budaya, SDM pariwisata yang masih kurang berkualitas, belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata, serta belum optimalnya pengembangan Desa wisata.

4. Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan

Tata kelola penanaman modal dan perizinan yang belum optimal disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, belum optimalnya perencanaan penanaman modal, belum optimalnya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, belum optimalnya pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya perencanaan kawasan industri.

5. Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja menyebabkan masih ditemukannya pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung.

Pengangguran terbuka disebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, informasi bursa kerja yang relatif terbatas, serta kurangnya kemampuan atau kompetensi penduduk usia kerja.

4.1.2 Permasalahan Sumber Daya Manusia Belum Berkualitas dan Berdaya Saing

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing sangat penting dalam pembangunan daerah karena mereka merupakan aset utama dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan mampu mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta meningkatkan daya saing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dan daya saing:

1. Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat

Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan, serta faktor sosial dan ekonomi. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Belitung. Tahun 2022 angka kematian ibu di Kabupaten Belitung sebesar 216,14 AKI per 100.000 kelahiran hidup.



2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka kesakitan dan angka kematian. Beberapa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Belitung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ditandai dengan tidak tercapainya salah satu indikator dari 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga adalah menggunakan jamban yang sehat. Sampai dengan tahun 2022 persentase desa ODF (Open Defecation Free) di Kabupaten Belitung baru mencapai 53% atau masih ada 23 desa/kelurahan yang masih melakukan buang air besar sembarangan. Selain itu masih tingginya kasus stunting di beberapa kecamatan di Kabupaten Belitung mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Meskipun prevalensi stunting secara kabupaten di angka 6,6 pada tahun 2022 namun masih ada beberapa kecamatan dengan prevalensi di atas 14%.

3. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali

Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kemiskinan, kekurangan pangan, keterbatasan sumber daya, dan degradasi lingkungan. Beberapa penyebab laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, rendahnya taraf hidup, keinginan untuk memiliki anak yang banyak, serta norma dan budaya yang mendukung kelahiran banyak anak.

4. Kurangnya akses pendidikan

Kurangnya akses pendidikan adalah salah satu masalah pembangunan yang dapat mempengaruhi kemajuan dan kualitas sumber daya manusia. Tanpa akses pendidikan yang memadai, masyarakat sulit untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga dapat memicu kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan sosial. Hal ini terlihat dari angka putus sekolah di Kabupaten Belitung yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka putus sekolah di Kabupaten Belitung sebesar 0,23% meningkat dari 0,15% pada tahun 2018.



4.1.3 Permasalahan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur pada suatu daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan, namun dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pada sebuah daerah tidaklah mudah, seringkali terdapat masalah yang dapat menghambat.

Pembangunan infrastruktur juga memegang peranan penting untuk peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, sanitasi, drainase, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dalam sistem lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi pendorong bagi pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait dan memberikan *multiplier effect*, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Selain itu, penambahan penduduk serta adanya urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Belitung.

Dengan Pembangunan infrastruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Masalah terkait konektivitas dan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan pelayanan dasar yaitu:

1. Kurangnya aksesibilitas antara wilayah

Kurangnya infrastruktur kewilayahan menyebabkan kurangnya aksesibilitas antara wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya perencanaan tata ruang, masih rendahnya informasi tata ruang, belum optimalnya penyelenggaraan jalan, kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, kurangnya sarana dan prasarana perhubungan laut, belum optimalnya pengelolaan pelayaran, belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, belum optimalnya pengelolaan sumber daya air.



2. Kurangnya pemenuhan dan pengelolaan sumber daya air

Kurangnya pemenuhan dan pengelolaan sumber daya air dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya air. Untuk pemenuhan dan pengelolaan sumber daya air tersebut perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian sumber daya air.

4.1.4 Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Azas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas dan 7) Asas Akuntabilitas.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih kurangnya kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan, tercermin dari Nilai Laporan Akuntabilitas dengan kategori “B” dari target yang ditetapkan “BB” dan Indeks Reformasi Birokrasi masih kategori “CC”.

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintahan :

1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal

Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset dikarenakan pengamanan aset, terutama aset tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat, serta aset yang tidak diketahui keberadaannya. Pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis elektronik.

2. Perencanaan pembangunan daerah belum berkualitas

Belum berkualitasnya perencanaan pembangunan dikarenakan sistem perencanaan berbasis elektronik yang diterapkan belum optimal, dan belum terintegrasinya perencanaan dengan pengendalian dan evaluasi. Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia perencanaan masih kurang.



3. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal sesuai target, belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

4. Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah

Rendahnya kualitas dan profesionalitas aparatur disebabkan karena integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur, dan sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih belum rendahnya Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Belitung.

5. Belum optimalnya pelayanan publik dengan teknologi informasi yang terintegrasi

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Belitung disebabkan oleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal, keterbukaan informasi publik yang masih kurang, pelayanan publik yang masih kurang, belum optimalnya tindak lanjut keluhan dan aduan masyarakat, pelayanan administrasi pertanahan yang masih kurang, terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelayanan kepada masyarakat belum optimal, ketersediaan data dan informasi pembangunan yang masih kurang, serta masih kurangnya infrastruktur dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Potensi konflik karena adanya Pemilihan Umum serentak

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak berpotensi menimbulkan ketegangan politik yang dapat menjadi pemicu konflik di masyarakat sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Masih perlu mengoptimalkan perlindungan terhadap masyarakat.

4.1.5 Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup telah dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan



perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak lepas dari penggunaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Masalah lingkungan hidup merupakan ancaman terhadap pembangunan baik saat ini maupun di masa depan.

Permasalahan utama terkait aspek lingkungan hidup di Kabupaten Belitung adalah belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi penurunan kualitas air, kualitas udara serta kualitas tutupan lahan. Selain itu perubahan tatanan perilaku selama masa pandemi Covid-19 telah membawa dampak langsung pada pengelolaan sampah, contoh kebutuhan akan masker untuk melindungi diri dari penyebaran virus Covid-19. Namun perlu ada upaya mitigasi terhadap risiko penularan kembali virus Covid-19 dari sampah masker yang telah digunakan, sehingga tidak memunculkan timbulan sampah yang dapat merusak lingkungan dan selanjutnya berdampak pada kesehatan masyarakat. Berikut penjelasan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung

1. Menurunnya kualitas air, udara dan tutupan lahan

Kualitas air yang menurun disebabkan beberapa hal antara lain penggunaan bahan baku yang berpotensi mencemari air, seperti limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Kegiatan masyarakat yang meningkat di sekitar daerah hulu sungai terutama terkait kegiatan penambangan inkonvensional (TI) menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas air. Pengujian kualitas air juga belum optimal dilakukan karena keterbatasan sarana dan prasarana peralatannya. Kemudian terkait kualitas udara yang menurun dapat disebabkan banyak factor dengan satu di antaranya adalah meningkatnya emisi serta pencemaran udara ambein.

Adapun kualitas tutupan lahan yang belum optimal dikarenakan penggunaan lahan yang meningkat sehingga menjadi lahan kritis, pencadangan sumber daya alam hayati yang masih rendah serta masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Meningkatnya timbulan sampah

Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai dan sumber daya manusia yang terbatas mengakibatkan terhambatnya pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung yang selanjutnya berdampak pada peningkatan timbulan sampah. Selain itu peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah padahal mereka merupakan penyumbang timbulan volume sampah terbesar. Penanganan sampah melalui program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) juga harus ditingkatkan. Masalah lainnya terkait sampah yaitu



pengelolaan dalam hal sistem pemrosesan akhir sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Gunung Sadai juga masih belum optimal.

4.1.6 Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan

Permasalahan Daerah berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah, yaitu sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan urusan pendidikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Aksesibilitas atau akses yang sama terhadap pendidikan dikarenakan berbagai faktor seperti jarak, keuangan dan ketersediaan sekolah yang memadai, hal ini terlihat dari masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung yaitu 8,74 tahun artinya rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Belitung untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani tidak sampai menamatkan pendidikan menengah pertama.
- b. Kualitas tenaga pendidik yang masih rendah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Belitung bahkan belum mencapai 80% dan persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik hanya 37,27% pada tahun 2022.
- c. Masih rendahnya minat masyarakat yang menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan usia dini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, APK PAUD pada tahun 2022 hanya sebesar 35,26%.
- d. Belum semua sekolah di Kabupaten Belitung melaksanakan kurikulum merdeka, berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2022, dari total 122 sekolah dasar, baru 13 sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka dan dari 33 sekolah menengah pertama, baru 3 sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka.
- e. Belum adanya acuan baku kurikulum muatan lokal daerah yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kabupaten Belitung.
- f. Kurangnya motivasi pada siswa yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya seperti kesulitan dalam kehidupan dan kurangnya dukungan keluarga terutama pada siswa menengah pertama, hal ini terlihat dari meningkatnya angka putus sekolah setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka putus sekolah jenjang SMP sebesar 0,38% dari sebelumnya hanya 0,17% tahun 2018.



2. Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan data pada Profil Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2021, angka kematian kasar di rumah sakit sebesar 36,9 per 1.000 pasien keluar, artinya dari 1000 pasien ada sekitar 37 pasien yang meninggal. Total jumlah tempat tidur dari 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Belitung hanya berjumlah 244 tempat tidur untuk melayani kurang lebih 186 ribu penduduk Kabupaten Belitung.
- b. Masih tingginya kasus kematian bayi dan ibu melahirkan. Tahun 2022, angka kematian ibu sebesar 216,14 AKI per 100.000 kelahiran hidup.
- c. Masih rendahnya cakupan ASI eksklusif. Data tahun 2022 menunjukkan persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif hanya sebesar 58,36%
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya masih rendahnya persentase desa ODF di Kabupaten Belitung. Tahun 2022 persentase desa ODF baru sebesar 53%.
- e. Masih tingginya kasus stunting di beberapa desa di Kabupaten Belitung. Meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Belitung sebesar 6,6% tahun 2022 namun masih ada beberapa desa yang prevalensinya di atas 14%.
- f. Masih tingginya penyebaran penyakit menular dan tidak menular. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus HIV dari sebelumnya tahun 2020 sebanyak 19 kasus meningkat menjadi 25 kasus pada tahun 2021. Serta ditemukannya kembali kasus filariasis di Kabupaten Belitung yang membuat masyarakat Belitung harus kembali meminum obat cacing massal selama 2 tahun. Untuk penyakit tidak menular, meningkatnya prevalensi tekanan darah tinggi dalam lima tahun terakhir, data tahun 2018 sebesar 34,91 meningkat menjadi 66,81 tahun 2022.

3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

- a. Pengelolaan sumber daya air belum optimal
- b. Belum terpenuhinya Standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi
- c. Belum optimalnya pelayanan Jalan kabupaten
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung
- f. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi dan mutu konstruksi



4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Permasalahan urusan perumahan rakyat dan permukiman adalah :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana umum permukiman
- b. Berkembangnya kawasan kumuh perkotaan

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penegakan perda dan perkara serta pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi berbagai peraturan daerah guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- e. Masih rendahnya kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

6. Sosial

Permasalahan urusan sosial sebagai berikut:

- a. Belum terpenuhinya secara proporsional kuantitas, kualitas dan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
- b. Lemahnya kualitas dan kurangnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan urusan tenaga kerja:

- a. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja.
- b. Masih terbatasnya lapangan pekerjaan.
- c. Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan



- b. Kurangnya SDM baik di aparaturnya maupun relawan terlatih dalam penanganan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
- d. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak

3. Pangan

Permasalahan urusan pangan :

- a. Tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat Belitung belum beragam. Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BPS, kelompok pengeluaran terbesar masyarakat ada pada komoditas makanan dan minuman jadi, kedua pada kelompok komoditas ikan/udang/cumi/kerang. Sedangkan untuk komoditas umbi-umbian, buah-buahan dan kacang-kacangan termasuk rendah.
- b. Tingkat ketergantungan komoditas pertanian (pangan) tinggi. Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2022, rata-rata konsumsi kalori masyarakat paling besar ada dikomoditas makanan padi-padian yakni 763,40 Kkal/hari.

4. Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan, antara lain:

- a. Terbatasnya lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik.
- b. Kurangnya basis data pertanahan.
- c. Kurang tertibnya dokumen administrasi pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan lingkungan hidup, sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b. Belum terbentuknya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tahura (Taman Hutan Raya)
- c. Belum tersedianya dokumen pendukung dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Tahura



- d. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan perlindungan fungsi lingkungan hidup
- e. Kurangnya integrasi dan ketersediaan data dan akses informasi bidang lingkungan hidup
- f. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung
- g. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- h. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral terkait pengaduan pencemaran dan sengketa lingkungan hidup
- i. Belum lengkapnya peralatan laboratorium untuk pengujian kualitas air, udara dan tanah
- j. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
- k. Belum optimalnya ketersediaan dan tingkat kompetensi sumber daya aparatur
- l. Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung terkait pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- m. Masih terbatasnya jumlah produk hukum daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- n. Masih rendahnya aspek penataan peraturan lingkungan oleh pelaku usaha, serta meningkatnya konflik antara pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berhadapan dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Banyak Penduduk/Warga yang tidak melaporkan peristiwa penting kependudukan, sebagai contoh peristiwa kematian sehingga data yang tersaji tidak akurat.
- b. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pengurusan dokumen kependudukan terutama penduduk pindah dating yang tidak membawa surat keterangan pindah.
- c. Masih adanya penduduk di Kabupaten Belitung yang belum melakukan perekaman KTP-el dikarenakan terkendala usia manula yang tidak mungkin lagi untuk dibawa ke tempat perekaman, cacat fisik/mental, sakit atau jauhnya dari tempat perekaman KTP-e.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kurangnya Peran pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan dipengaruhi oleh peranan kelembagaan di desa yang belum optimal, pemberdayaan masyarakat berbasis



komunitas dan gender yang belum optimal, serta masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Permasalahan pembangunan urusan ini antara lain:

- a) Masih tingginya angka perkawinan usia anak (< 19 tahun) di Kabupaten Belitung. Berdasarkan data Kantor Kemenag Kabupaten Belitung tahun 2022 angka perkawinan anak berjumlah 74 meskipun adanya penurunan dari tahun 2021 yang berjumlah 92, namun angka ini masih terbilang tinggi.
- b) Masih tingginya angka kelahiran remaja (15-19 tahun) di Kabupaten Belitung. Angka ASFR Kabupaten Belitung Tahun 2022 adalah 33 kelahiran per 1000 wanita subur pada kelompok usia antara 15-19 tahun. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan oleh BKKBN yaitu 21 kelahiran per 1.000.

9. Perhubungan

Kelancaran mobilisasi orang dan barang sebagai akibat interaksi dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat dengan implikasi akhir kepada kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu peningkatan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai mutlak harus dilaksanakan melalui pembangunan urusan wajib perhubungan, adapun permasalahan terkait dengan urusan ini meliputi:

- a. Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan laut.
- c. Belum optimalnya pengelolaan pelayaran.
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Belum optimalnya manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- c. Belum optimalnya tindak lanjut keluhan dan aduan masyarakat.
- d. Masih rendahnya keterbukaan informasi publik.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah:



- a. Masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia bidang koperasi dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Banyak koperasi yang tidak aktif kepengurusannya.
- c. Belum optimalnya promosi UKM dan pemasaran produk UKM.
- d. Kurangnya kreatifitas UKM dalam mengembangkan usahanya.
- e. Belum Optimalnya Manajemen UKM.

12. Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya promosi investasi daerah.
- b. Belum optimalnya kerjasama antara pelaku usaha dengan dunia usaha.
- c. Belum optimalnya pemberian fasilitasi pemberian kemudahan dan insentif investasi.
- d. Belum optimalnya perencanaan penanaman modal.
- e. Belum optimalnya pelayanan penanaman modal.
- f. Belum optimalnya kelembagaan penanaman modal.
- g. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan kepada peningkatan kompetensi dan kemandirian pemuda serta peningkatan prestasi olah raga daerah. Adapun permasalahan pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga meliputi:

- a. Belum ada regulasi atau kebijakan daerah yang mengatur tentang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga belum memadai.
 - Belum adanya asrama atlet di Kabupaten Belitung
 - Gedung Olahraga kabupaten yang hanya bertipe C, yaitu yang peruntukannya hanya melayani wilayah kecamatan dengan standar kapasitas penonton maksimal sebanyak 1000 orang dan fasilitas cabang olahraga yang tersedia hanya satu lapangan bola voli dan satu lapangan bulu tangkis.
 - Stadion sepak bola kabupaten yang hanya bertipe C, yaitu yang peruntukannya hanya melayani wilayah kecamatan dengan kapasitas penonton 5.000 – 10.000 orang dan dilengkapi 6 lintasan lari atletik.
 - Belum tersedianya lapangan tembak, lapangan panahan, lapangan balap sepeda (velodrome), arena senam, arena tinju, arena dayung, arena olahraga permainan tradisional (gasing), arena bowling, arena biliard, dan hall fitness.



- c. Belum tersedianya dokumen Profil Potensi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung, yang mana dengan adanya profil potensi pemuda dan olahraga kabupaten dapat memberikan gambaran nyata kondisi pembangunan sektor pemuda dan olahraga di Kabupaten Belitung, selain itu juga profil potensi pemuda dan olahraga kabupaten dapat menyajikan potensi pembangunan sektor pemuda dan olahraga yang dapat dikembangkan melalui intervensi program pembangunan.

14. Statistik

Permasalahan urusan Statistik sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya pusat data.
- b. Belum optimalnya layanan data sektoral.
- c. Kurang optimalnya Kompetensi SDM Statistik dan pengelolaan Data.

15. Persandian

Permasalahan pada urusan persandian adalah:

- a. Masih rendahnya keamanan data dan informasi.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang keamanan dan informasi.
- c. Kurangnya pemahaman keamanan informasi aparatur pemerintah daerah dan publik.
- d. Belum optimalnya kompetensi SDM di bidang keamanan informasi.

16. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melalui program pengembangan nilai budaya dengan memperhatikan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagai acuan perhitungan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, sehingga permasalahan urusan kebudayaan adalah belum optimalnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan daerah.

17. Perpustakaan

Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan urusan perpustakaan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kegemaran membaca masyarakat Belitung termasuk kategori rendah, yaitu hanya 1 kali per hari. Demikian pula dengan data jumlah buku yang dipinjam dalam kurun waktu lima tahun mengalami penurunan yang signifikan. Data tahun 2018 menunjukkan jumlah buku yang dipinjam berjumlah 15.587 menurun tajam menjadi 2.846 buku pada tahun 2022.



18. Kearsipan

Permasalahan urusan Kearsipan yang diselenggarakan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, yaitu:

- a. Masih minimnya kompetensi arsiparis di tiap-tiap perangkat daerah, untuk mengelola arsip di Perangkat Daerahnya masing-masing sesuai dengan NSPK Kearsipan.
- b. Belum optimalnya pengelolaan arsip elektronik.
- c. Belum tersedianya Depo Arsip yang representatif.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan yang dimiliki daerah menjadikan perikanan sebagai potensi andalan daerah, namun tanpa didukung oleh pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan yang berkualitas dan berkelanjutan maka potensi ini tidak akan memberikan pengaruh yang optimal terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan pembangunan urusan ini meliputi:

- a. Dengan diterbitkannya izin mengenai zona penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga mengakibatkan nelayan lokal harus bersaing dengan nelayan luar daerah, yang armada penangkapan ikannya lebih besar sehingga menyebabkan jumlah produksi perikanan tangkap mengalami penurunan
- b. Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan nelayan lokal kalah bersaing sehingga mata pencaharian mereka berkurang
- c. Adanya perubahan/peralihan mata pencaharian masyarakat pembudidaya ikan yang sifatnya masih musiman karena adanya aktivitas penambangan timah yang semakin marak dengan mendapatkan penghasilan yang cenderung lebih cepat dan menjanjikan
- d. Menurunnya produksi perikanan budidaya juga disebabkan tidak ada lagi budidaya rumput laut yang juga berkontribusi terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya yang merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pembudidaya.

2. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan di Kabupaten Belitung. Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Belitung sangat didukung dengan ditetapkannya Kawasan Wisata Tanjung Kelayang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, dan Geopark Belitung. Dengan demikian,



pembangunan sarana prasarana infrastruktur dalam mendukung kepariwisataan mempunyai peranan yang sangat penting, dan dampaknya akan memicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung.

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan Pariwisata:

- a. Sedikitnya jadwal penerbangan ke Belitung dari pintu masuk pariwisata Indonesia, banyaknya pintu masuk pariwisata Indonesia merupakan peluang besar untuk menjadikan pariwisata Belitung semakin maju dan berkembang.
- b. Sarana dan prasarana yang memuat unsur 4A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi dan Ansiliari) belum sepenuhnya memadai atau sesuai standar. Hal ini disebabkan ketersediaan anggaran untuk pembangunan/perbaikan sarana prasarana pariwisata masih kurang.

3. Pertanian

Permasalahan untuk urusan pertanian sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan dan minat petani masih rendah.
- b. Sistem pengairan belum optimal.
- c. Tingginya serangan hama penyakit.
- d. Dampak Perubahan Iklim merupakan salah satu faktor penyebab kurang berhasilnya produksi sektor pertanian.

4. Perdagangan

Permasalahan urusan perdagangan:

- a. Belum optimalnya sarana prasarana kemetrologi.
- b. Belum optimalnya kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia bidang perdagangan.
- c. Belum optimalnya pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

5. Perindustrian

Permasalahan urusan Perindustrian sebagai berikut:

- a. Kurangnya inovasi pengembangan produk IKM dan sentra IKM .
- b. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha IKM
- c. Kurangnya akses pasar untuk mendukung penjualan produk IKM
- d. Teknologi yang digunakan pelaku IKM masih sederhana



- e. Kurangnya kualitas kemasan produk IKM
- f. Belum optimalnya promosi IKM.

D. Urusan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Perencanaan

Permasalahan untuk urusan perencanaan adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kompetensi SDM bidang perencanaan.
- b. Belum terintegrasinya perencanaan dengan pengendalian dan evaluasi.
- c. Belum optimalnya koordinasi OPD terkait penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi.
- d. Belum tersedianya sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- e. Belum optimalnya ketersediaan data analisa capaian kinerja perangkat daerah.
- f. Belum optimalnya capaian kinerja dengan perencanaan.
- g. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi.
- h. Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan belum optimal.
- i. Kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan tentang perencanaan.
- j. Belum optimalnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

Permasalahan untuk urusan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum terintegrasinya perencanaan dengan penganggaran.
- b. Kondisi pengelolaan aset terutama tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat dan penilaian bangunan gedung.
- c. Pengelolaan PAD belum memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
- e. Belum optimalnya pengelolaan aset perangkat daerah.
- f. SDM Pengelola aset di perangkat daerah belum memiliki kompetensi yang optimal.
- g. Belum sesuainya antar dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja (TK).
- h. Pengelolaan PAD belum memanfaatkan teknologi informasi.



3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan untuk urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat jabatan yang belum terisi baik struktural, fungsional, maupun pelaksana.
- b. Masih rendahnya kompetensi profesional aparatur.
- c. Belum terkelolanya sistem manajemen aparatur.
- d. Sistem manajemen pemerintahan belum terlaksana dengan baik.

4. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan untuk urusan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya SDM bidang Penelitian dan Pengembangan (kuantitas dan kualitas).
- b. Kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan tentang penelitian dan pengembangan.
- c. masih kurangnya kerjasama dengan lembaga peneliti atau akademisi.

5. Pengawasan

Permasalahan untuk urusan Pengawasan adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- b. Belum optimalnya Pembinaan, Peringatan Dini dan Manajemen Resiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

6. Sekretariat Daerah

Permasalahan di Sekretariat Daerah, antara lain:

- a. Masih kurangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- b. Belum optimalnya tata kelola pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
- d. Belum optimalnya kerja sama dengan Badan Usaha (KPBU).
- e. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.



7. Sekretariat DPRD

Beberapa permasalahan di Sekretariat DPRD, antara lain:

- a. Masih perlunya peningkatan kapasitas DPRD dalam pembahasan produk legislasi daerah.
- b. Belum optimalnya penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM kesekretariatan DPRD.
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.

8. Kewilayahan

Beberapa permasalahan di setiap Kecamatan di lingkungan Kabupaten Belitung, yaitu:

- a. Belum optimalnya pelayanan publik dengan teknologi informasi yang terintegrasi.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

9. Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Permasalahan pada urusan pemerintahan umum, yaitu:

- a. Perlunya peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik serta etika budaya politik masyarakat untuk mengantisipasi potensi konflik.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik, kedewasaan perilaku berdemokrasi serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.
- c. Belum optimalnya pembinaan terhadap ormas dan LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis dianalisis berdasarkan kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah yang dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan dokumen perencanaan lainnya, hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan isu strategis dari perangkat daerah. Isu Strategis harus menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang.



Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Perumusan isu strategis merupakan salah satu dasar dalam melakukan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Isu strategis diidentifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.
7. Untuk segera dilaksanakan

4.2.1 Isu Strategis Internasional

isu strategis internasional dapat menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi kesehatan, teknologi komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi di baik Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi daerah tak terkecuali Kabupaten Belitung. Beberapa isu global apabila direspon dengan baik akan menjadi faktor pendukung bagi percepatan pembangunan, namun sebaliknya, akan menjadi faktor penghambat apabila pemerintah daerah dan stakeholder lainnya gagal menemukan strategi untuk merespon isu tersebut. Berikut merupakan isu – isu strategis internasional yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah antara lain :

A. Penguatan Sistem Kesehatan.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kinerja ekonomi, tetapi memberikan dampak negatif pada sektor kesehatan. Dunia sedang menghadapi krisis kesehatan masyarakat dalam satu abad terakhir. Semua Negara perlu memperkuat sistem



kesehatan dan program pencegahan penyakit. Seperti yang kita ketahui, virus Covid – 19 awalnya menyerang masyarakat di wilayah Wuhan, Tiongkok dan menyebar menjadi pandemi global. Sistem kesehatan beberapa negara pun kewalahan dalam menghadapi virus baru yang menyebar dengan cepat dan berisiko tinggi ini, khususnya di awal tahun 2020. Sampai awal tahun 2021, jumlah kasus infeksi dunia mencapai 168 juta penduduk dan 3,49 juta diantaranya meninggal dunia. Kasus tertinggi dicatat oleh negara –negara padat penduduk baik negara maju maupun negara berkembang seperti Amerika, India, Brazil, Perancis, dan Turki.

Selama dua tahun terakhir sistem kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak. Banyak tenaga kesehatan yang terpapar dan meninggal, keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) rumah sakit yang meningkat, kurangnya sarana – prasarana kesehatan seperti masker, ventilator, dan alat pelindung diri menjadi permasalahan baru yang muncul di beberapa negara disaat pandemi berlangsung. Semua Negara perlu memperkuat sistem kesehatan dan program pencegahan penyakit. Pandemi covid-19 harus dijadikan momentum untuk mereformasi system kesehatan nasional (SKN). Hal ini untuk mempersiapkan kemungkinan keadaan darurat munculnya pandemic penyakit lain di masa yang akan datang. Mengingat berbagai tantangan mengenai SKN di Indonesia masih sangat banyak, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, ketimpangan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, dan pengembangan inovasi dalam program JKN yang perlu dilakukan agar kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat. Pandemi Covid-19 juga menunjukkan bahwa program JKN berperan penting dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang terintegrasi dengan jaminan sosial lainnya.

B . Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan tajam dari harga komoditas yang kemudian memberi tekanan negatif kepada negara OPEC dan non OPEC. Lebih lanjut, pandemi covid 19 telah membawa perekonomian dunia jatuh ke dalam zona krisis ekonomi dunia. Bahkan, pasar dan perekonomian di negara berkembang juga menghadapi pertumbuhan pendapatan per kapita negatif pada 2020. Sedangkan untuk negara di dunia diproyeksi bakal mengalami tekanan lebih besar dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) ketimbang negara maju pada tahun 2020 hingga 2021. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi harga migas dan non migas.



Pandemi COVID-19 telah menyebabkan ekonomi di semua negara mengalami kontraksi hingga negatif. Hal itu disebabkan pandemi Covid 19 telah mempengaruhi segala sendi perekonomian dunia. Dampaknya ekonomi dunia menjadi stagnan dan negatif. Laporan International Moneter Fund menyatakan bahwa pandemi Covid 19 telah menyebabkan terjadinya resesi dunia yang ditandai dengan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan setiap negara di dunia. Lebih lanjut pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan terjadinya pengangguran dan meningkatnya tingkat kemiskinan di setiap negara dunia. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pemulihan ekonomi dengan mengulirkan berbagai stimulus ekonomi melalui strategi lokal menjadi salah satu alternatif mengembalikan pelebagaan ekonomi di setiap negara.

Dampak dari invasi Rusia ke Ukraina akan memperlambat kegiatan ekonomi global secara tajam. Pertumbuhan global sekarang diperkirakan akan melambat dari 5,7 % pada tahun 2021 menjadi 2,9 % pada tahun 2022. Sebagai akibat dari perang di Ukraina, harga untuk sebagian besar komoditas diperkirakan akan jauh lebih tinggi di tahun 2022 daripada di tahun 2021, sementara harga-harga komoditas diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2022, dalam jangka menengah harga-harga tersebut diproyeksikan tetap tinggi. Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan, serta meningkatnya inflas. Ini dapat menyebabkan kondisi keuangan yang lebih ketat, yang memperbesar kerentanan sektor keuangan. Pertumbuhan di negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang tahun ini telah diturunkan menjadi 3,4 %, sebagai dampak negatif dari invasi di Ukraina lebih dari mengimbangi dorongan jangka pendek untuk beberapa eksportir komoditas dari harga energi yang lebih tinggi. Tidak ada percepatan pertumbuhan yang diproyeksikan tahun depan: pertumbuhan global diperkirakan masih lemah, hanya naik tipis menjadi 3 % yang pada tahun 2023, karena banyak hambatan – khususnya harga-harga komoditas yang tinggi dan pengetatan moneter yang berkelanjutan – diperkirakan akan bertahan.

Prospek global tersebut menimbulkan risiko merugikan yang signifikan bagi pertumbuhan di Indonesia. Pada skenario baseline, pertumbuhan PDB yang diproyeksikan sebesar 5,1 % pada tahun 2022, meningkat menjadi 5,3 % pada tahun 2023. Ini diasumsikan oleh beberapa hal: pelepasan permintaan yang tertahan (pent-up demand), kepercayaan konsumen yang meningkat, dan nilai tukar perdagangan (terms of trade) yang lebih baik. Inflasi diproyeksikan meningkat menjadi 3,6 % (rata-rata tahunan)



seiring peningkatan permintaan dalam negeri dan harga-harga komoditas yang lebih tinggi. Kondisi pembiayaan eksternal diperkirakan akan mengetat meskipun ekspor komoditas diproyeksikan berkontribusi terhadap surplus transaksi berjalan. Lingkungan ekonomi global dapat menciptakan tekanan-tekanan utama terhadap pertumbuhan. Hal ini dapat memicu skenario penurunan dengan tekanan inflasi yang lebih tinggi yang memaksa realokasi fiskal dari pembelanjaan pro-pertumbuhan ke subsidi yang tidak ditargetkan, penurunan permintaan untuk ekspor komoditas, dan pembiayaan eksternal yang ketat yang berdampak pada biaya pinjaman dan keinginan investasi sektor swasta. Dalam skenario seperti itu, pertumbuhan Indonesia bisa lebih rendah dari yang diantisipasi dan mencapai 4,6 % pada tahun 2022 dan 4,7 % pada tahun 2023.

Penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 (Group of Twenty) atau forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa dan Kabupaten Belitung sebagai salah satu tempat pelaksanaan pertemuan G20, sejatinya merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara besar di dunia bagi Indonesia. Presidensi G20 akan dapat menjadi milestone peta jalan Indonesia Maju, khususnya dengan memastikan pengembangan pilar “Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan” terhadap poin-poin penting seperti peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industry dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Momentum ini juga seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Belitung karena sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat sebagai tuan rumah. Hal ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi kemajuan daerah Kabupaten Belitung, yaitu membuka peluang untuk mempromosikan pariwisata di Belitung serta dapat menjadi katalis yang mempercepat pemulihan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

C. Sustainable Development Goals (SDG's)

Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengaruh dari dinamika yang terjadi secara global. Kondisi global terakhir ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan mengancam terhadap keberlangsungan ketersediaan ketahanan pangan, kemiskinan, kualitas SDM, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup, maka dunia internasional berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan



kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelastarian lingkungan hidup dengan program SDG's (*Sustainable Development Goals*)

SDGs adalah sebuah kesepakatan baru pengganti MDGs. Masa berlaku SDGs dimulai berlaku tahun 2015 – 2030 yang telah disepakati oleh 190 negara yang berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-segara di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang dimana tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;



16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

D. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang, sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi sebesar 2,5 hingga 4,7 derajat Celcius di tahun 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui penandatanganan Paris Agreement oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim

Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon. Hal ini dilakukan melalui penurunan dan intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Melalui Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030 dari kondisi business as usual. Penurunan emisi GRK tersebut terutama akan didorong pada sektor *Agriculture, Forest, and Land Use* (AFOLU) serta energi. transisi energi perlu dilakukan diantaranya perluasan akses teknologi sumber energi bersih, percepatan penurunan emisi karbon, pelibatan partisipasi sektor swasta, serta percepatan penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

E. Keterbukaan Perdagangan

Arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi hampir seluruh negara di dunia. Kemajuan sarana transportasi dan telekomunikasi merupakan faktor pendorong utama arus ini yang akan menciptakan interdependensi kegiatan perekonomian. Semua negara yang merujuk pada sistem perekonomian terbuka akan turut berpartisipasi dalam bidang perdagangan dan keuangan. Keterbukaan perdagangan dipandang sebagai hal penting dalam



memenuhi kebutuhan dalam negeri dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga membuat negara saling bekerja sama. Namun, setiap negara yang melakukan keterbukaan perdagangan akan mendapat guncangan ekonomi baik berasal dari domestik maupun negara luar yang akan berpengaruh pada beberapa waktu ke depannya.

Indonesia aktif dalam beberapa perjanjian regional atau plurilateral, seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Economic Community (AEC) 2015, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), AsiaPasific Economic Cooperation (APEC), dan dalam beberapa perjanjian bilateral lainnya (Ditjenppi, 2020). Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan, diharapkan dapat memberikan arus positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

F. Transformasi Digital Menuju Era Society 5.0

Perkembangan teknologi dunia kearah serba digital saat ini terbilang tumbuh sangat pesat. Kehadiran industri 5.0 yang semula diprediksi 20 tahun setelah era 4.0 ternyata akan lebih cepat, yakni hanya bertransisi sekitar kurang lebih 10 tahun. Indonesia masih menyesuaikan dengan era revolusi 4.0, belum selesai dengan segala perkembangannya lahirlah konsep baru yaitu society 5.0 yang digagas oleh negara jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, Robot, IoT) untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Berbeda dengan revolusi industry 4.0 yang lebih menekankan pada bisnis saja, namun dengan teknologi era society 5.0 tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, Bahasa dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak orang.

Teknologi digital kini hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana teknologi digital menjadi salah satu elemen kunci yang dapat mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan. pemerintah ingin memperkuat pondasi digital Indonesia di berbagai sektor, mulai dari keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun disisi lain, tren ini juga berpotensi menyebabkan hilangnya 60 persen jabatan pekerjaan di dunia, di Indonesia sendiri, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang karena tergantikan oleh otomatisasi mesin. Isu ini harus direspon dengan baik dengan agar pemanfaatan teknologi dapat secara maksimal utamanya dalam



mendukung perkembangan ekonomi dan juga kepentingan lainnya dari setiap negara. Hal ini pun mendorong manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menciptakan inovasi baru guna menciptakan masyarakat cerdas dan sejahtera. Akses pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Belitung mengalami kemajuan.

Peran pemerintah juga perlu terus melanjutkan secara sistemik untuk melahirkan SDM digital serta menciptakan ekosistem digital. Tentunya hal ini tak lepas dari pendidikan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang melek akan teknologi digital dan literasi digital. Di saat yang sama, pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, membuat kebijakan dan regulasi yang mendorong pertumbuhan industri teknologi informasi yang efisien dan progresif. Transformasi ekonomi berbasis digital dilakukan diantaranya yaitu penciptaan nilai ekonomi digital untuk pemulihan ekonomi, adopsi teknologi terutama bagi UMKM, pengembangan keterampilan dan literasi digital, serta digitalisasi sektor yang berkontribusi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



Gambar 4.1 Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2020–2024

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi dalam pencapaian visi 2045.



VISI PRESIDEN

*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong*



Gambar 4.2 Arah Kebijakan Presiden RI

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 Major Project yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Blended Finance, Green Finance serta Output Based Transfer/Hibah ke daerah



Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kriya dan Furnasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0% 	245,8 <ul style="list-style-type: none"> • APBN: 13,0 • BUMN 125,9 • Swasta: 106,9 	a.1 Kemenperin, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024) 	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.1 Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 smelter	Industri di kawasan Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa	317,4 <ul style="list-style-type: none"> • APBN: 15,7 • Swasta: 176,0 • KPBU: 14,3 • BUMN: 111,4 	a.1 KemenESDM, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun. 	226,4 <ul style="list-style-type: none"> • APBN: 200,9 • Swasta: 25,5 	a.1 Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%	32,0 <ul style="list-style-type: none"> • APBN: 1,1 • BUMN: 11,9 • Swasta: 19,0 	a.1 Kementan, KemenESDM, BPDPKS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	25 <ul style="list-style-type: none"> • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7 	a.1 KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan

Gambar 4.3 Daftar Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020–2024

Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera

Wilayah Sumatera yang berdekatan dengan negara-negara lain terutama Asia menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (belt and road initiatives), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global. Dalam lima tahun mendatang, transformasi ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang

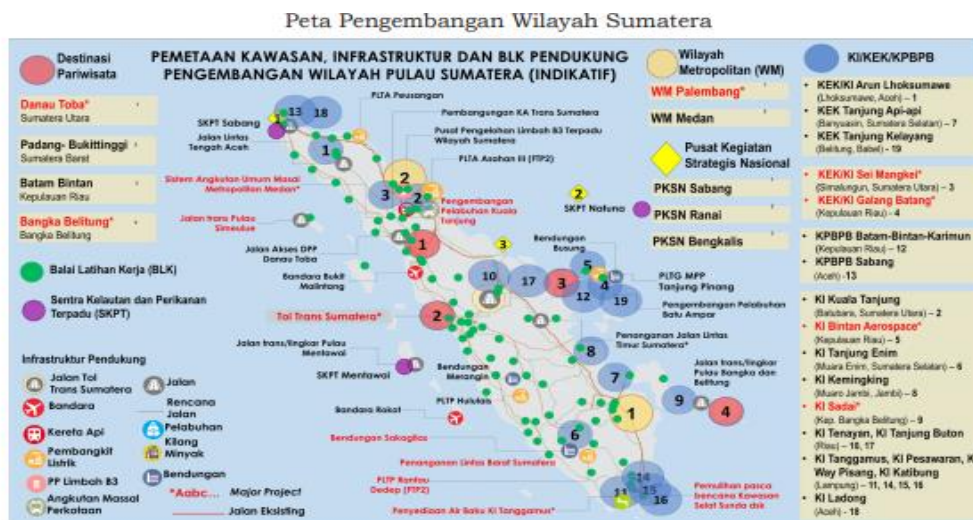


koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat. Strategi pembangunan Wilayah Sumatera akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*) (1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; (f) pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal untuk mendorong transformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan Aceh; dan (g) pelaksanaan pembangunan afirmatif. (2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan industri (KI), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); (e) revitalisasi kawasan transmigrasi; (f) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (g) pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah; (h) pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal pada Destinasi Pariwisata.

Prioritas (DPP); (i) pengembangan industri kedirgantaraan; (j) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; dan (k) penguatan keterkaitan



desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. (3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah, peningkatan pelayanan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah; dan (d) pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus Aceh dapat terus ditingkatkan. (4) Penguatan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi perkotaan yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol, yang dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan (c) memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera; (5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan pantai barat Pulau Sumatera dan pemantapan pemulihan pascabencana Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.



Gambar 4.4 Peta Pengembangan Wilayah Sumatera



Gambar 4.5 Persebaran Destinasi Pariwisata Sumatera – Jawa – Bali

2. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dakt, Borobudur Dakt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai

Latar Belakang	Pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali (41 persen). Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekecil Bali. Pemerintah mendorong penyisipan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritas lainnya						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5% (2024) Meningkatnya devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan (2024) dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024) 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rp 161 T (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)
	<ul style="list-style-type: none"> Perpres ITMP untuk Borobudur dakt, Danau Toba dakt, dan Lombok (100%) Penyusunan ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Wakatobi, Bangka Belitung dan Morotai Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Danau Toba, Borobudur dakt, Lombok (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> Perpres ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, BTS, Wakatobi, Bangka Belitung (100%) Penyusunan ITMP untuk Raja Ampat Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Labuan bajo, dan Manado-Likupang (100%) Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (20%) 	<ul style="list-style-type: none"> Perpres ITMP untuk Raja Ampat (100%) Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (40%) Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (20%) 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (80%) Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (60%) 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (100%) Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Kawasan Prioritas Seleksi 100% 	
Pelaksana	Kemenparekraf, KemenPUPR, Kemenhub, KemenLHK, KemenKP, KemendesPDTT, KemenKUMK, KemenESDM, Kemenaker, BKPM, BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perencanaan, KemenATR/BPN, Kemenan, KemenBUMN, Kemendag, Bappenas, Pemda, Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata, BUMN, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Perintisan Destinasi Pariwisata (Kemenparekraf, KemenATR/BPN, BKPM) Penanganan Jalan Mendukung 10 DPP (KemenPUPR, Pemda) Pembangunan Pelabuhan dan Bandara (Kemenhub, BUMN) 			<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas BUMDes (Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, Kemenaker, KemenKUMK) Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata (KemenPUPR, KemenESDM, Kemenkes, BNPB, Pemda) Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan (Kemenparekraf, Kemenan, KemenKP, KemenLHK, BUMN, Badan Otorita, Kemendag) 			

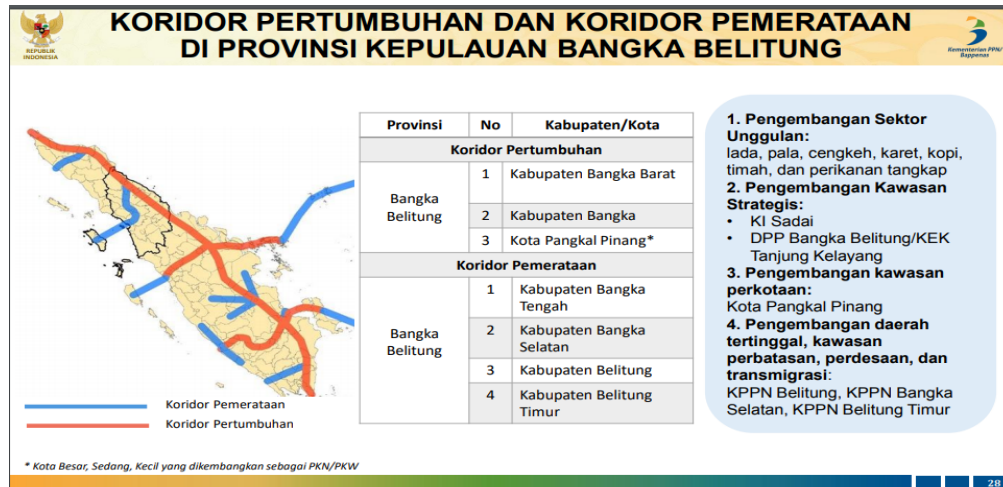
Gambar 4. 6 Destinasi Pariwisata Prioritas

Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan



wilayah Sumatera dilakukan akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.



Gambar 4.7 Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

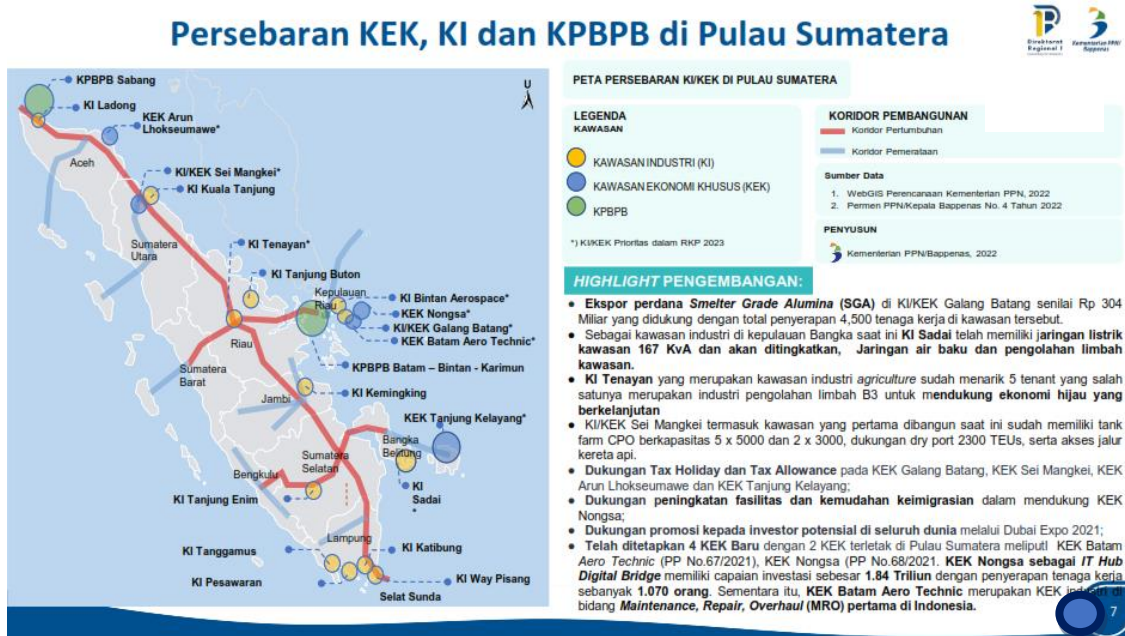
Pengembangan Kawasan Strategis Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut: 1) Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan, di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai serta Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galang Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB BatamBintan-Karimun, dan KPBPB Sabang; 2) Pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Danau Toba, DPP Baru Padang-Bukittinggi, DPP Baru Batam-Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang; 3) Pengembangan industri kedirgantaraan di Batam dan Bintan; 4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; konektivitas melalui Tol Trans Sumatera, Penanganan Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Lintas Penghubung Timur dan Barat Sumatera, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Lintas Tengah Aceh, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, Pembangunan KA Trans Sumatera, Reaktivasi Jalur KA



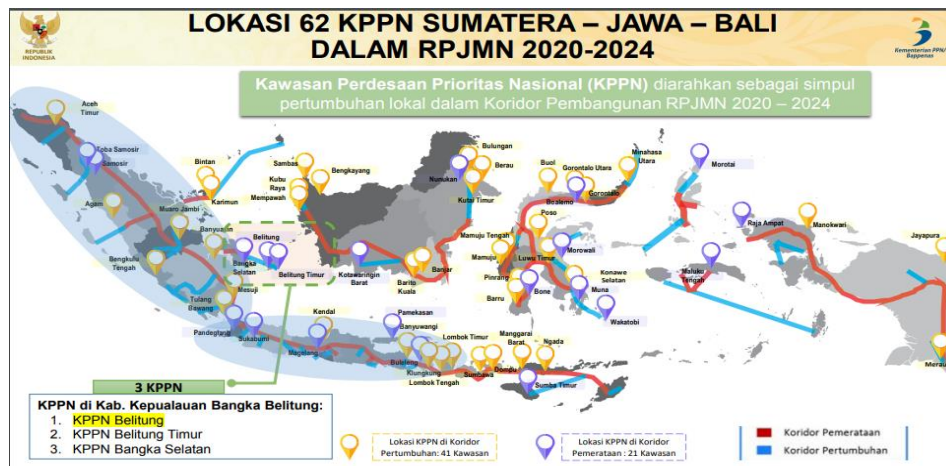
Pariaman – Naras – Sungai Limau, Pembangunan KA Tanjung Enim – Tanjung Api-Api (potensi), Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri – Pekanbaru), Pembangunan KA Lahan – Tarahan, Bandara Bukit Malintang, Bandara Rokot; 5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan 6) Pemantapan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera; 7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; a. pengembangan SMK 816 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan. - 9 - b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 91 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (kimia di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, manufaktur di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, otomotif di Sumatera Utara, Riau, dan Lampung, makanan dan minuman di Sumatera Utara dan Riau, ekonomi kreatif di Riau, migas di Aceh, dan tambang di Sumatera Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian. c. pengembangan 87 unit BLK di wilayah Sumatera mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki. d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi Wilayah Sumatera.



Gambar 4.8 Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Sumatera



Gambar 4.9 Peta Sebaran KEK, KI dan KPBPB di Pulau Sumatera



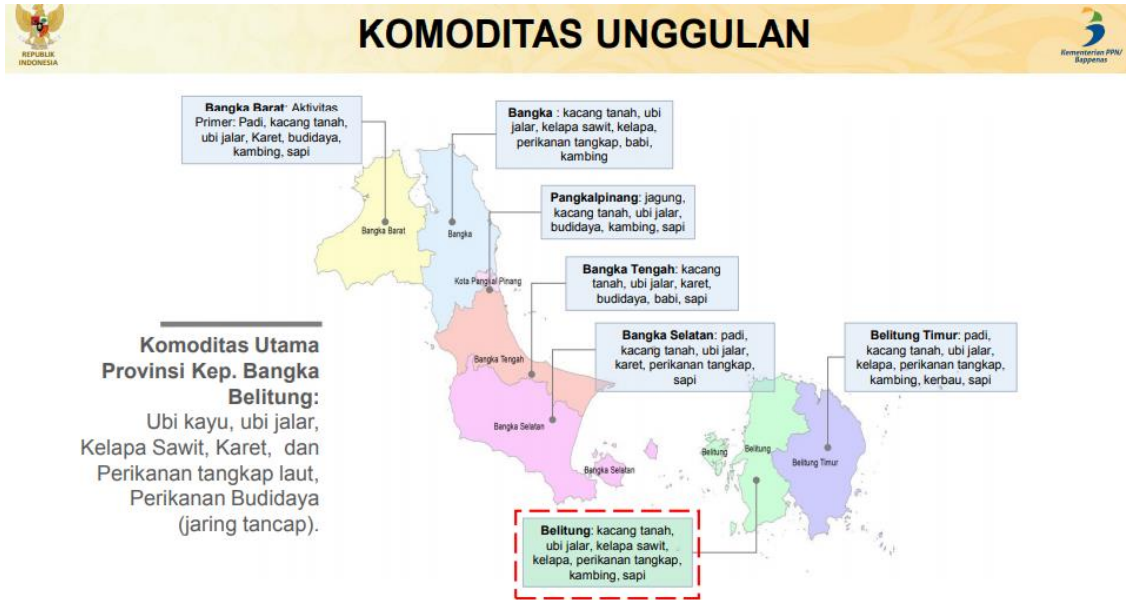
Gambar 4.10 Lokasi 62 KPPN Sumatera – Jawa – Bali

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.



Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut: 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao, - 6 - kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya, yang difokuskan pada: a. Provinsi Aceh: kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap dan budidaya, dan minyak dan gas bumi; b. Provinsi Sumatera Utara: karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya; c. Provinsi Sumatera Barat: kakao, kopi, karet, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap dan budidaya; d. Provinsi Riau: kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi; e. Provinsi Jambi: tebu, karet, kelapa sawit, kopi, perikanan budidaya, dan batubara; f. Provinsi Sumatera Selatan: kopi, karet, tebu, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya, batubara, minyak bumi, dan gas bumi; g. Provinsi Bengkulu: kopi, karet, kelapa sawit, perikanan budidaya, dan emas; h. Provinsi Lampung: kopi, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya; i. Provinsi Bangka Belitung: lada, pala, cengkeh, karet, kopi, timah, dan perikanan tangkap; dan j. Provinsi Kepulauan Riau: lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap. 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). 3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Mentawai, WPP 571 (di Selat Malaka dan Laut Andaman) dan WPP 572 (di Samudera Hindia Barat Sumatera dan Selat Sunda; 4) Pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Gayo Lues.



Gambar 4.11 Komoditas Unggulan di Wilayah Sumatera

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu strategis Kabupaten Belitung pada pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan

Isu pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan diangkat dari analisis permasalahan keadaan ekonomi suatu daerah yang kurang berkembang. Adanya masalah ekonomi dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu daerah. Kondisi pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan dapat disebabkan oleh penurunan permintaan konsumen dan investasi, adanya penurunan produksi dan produktivitas kegiatan ekonomi, juga dapat disebabkan keterbatasan sumberdaya atau distribusi dalam sumber daya, dan adanya pandemi covid-19

Dalam mengatasinya pemerintah daerah dapat melakukan pemberian insentif dalam investasi ke daerah, menyeimbangkan kebijakan fiskal dan moneter di daerah, serta mempromosikan pertumbuhan sektor yang produktif. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.



b. Disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat masih tinggi

Isu disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat masih tinggi diangkat dari ketimpangan atau kesenjangan dalam pembangunan yang terjadi antar wilayah. Disparitas tersebut dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan, akses terhadap sumber daya dan kualitas infrastruktur dan layanan publik di daerah.

Disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong tinggi. Adanya ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik seperti jalan, air bersih, sanitasi dan pendidikan. Sehingga menyebabkan kesenjangan antar daerah yang maju dan daerah tertinggal semakin melebar. Sektor ekonomi di Provinsi Bangka Belitung juga masih mengalami ketimpangan, sebagian besar sektor ekonomi di Bangka Belitung terpusat di kota besar seperti Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung, sedangkan daerah lainnya masih terdapat keterbatasan dalam hal pengembangan sektor ekonomi.

Untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat di Babel, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah memperkuat akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan akses ke sumber daya, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki kebijakan pemerintah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertinggal di Babel untuk memberikan dukungan dan penguatan dalam hal pengembangan sektor ekonomi dan akses terhadap layanan publik.

Disparitas pembangunan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memperburuk masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting untuk dicapai agar setiap wilayah dan masyarakat di suatu negara dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan merata

c. Kapasitas dan Kualitas SDM dan daya saing masih rendah

Isu Strategis Kapasitas dan Kualitas SDM dan daya saing masih rendah diangkat dari rendahnya kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif serta memiliki kearifan lokal baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Masih rendahnya produktivitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan



daerah yang disebabkan masih rendahnya penguasaan keterampilan dan iptek oleh masyarakat dan pelaku pembangunan, tenaga kerja kurang berdaya saing/kompetitif sehingga menjadi tidak termanfaatkan. Masih rendahnya kompetensi fungsional para pelaku pembangunan tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga ahli lainnya, kurangnya integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan dan urusan pelayanan publik. Masih rendahnya tingkat responsif masyarakat dalam menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan hal ini disebabkan belum terbukanya pola pikir masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang, masyarakat belum sepenuhnya terbuka dalam menerima hasil pembangunan daerah dan partisipasi aktif masyarakat dan kaum perempuan dalam pembangunan masih rendah.

Masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia bidang pemerintahan dan pelayanan publik pendukung pembangunan daerah hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah aparatur sebagai pelaku pembangunan (bidang pariwisata, layanan publik dan tenaga ahli lainnya), masih rendahnya jumlah kelompok masyarakat sebagai penggerak sekaligus objek pendukung, masih terbatasnya jumlah kelompok masyarakat sebagai penggerak sekaligus objek pendukung pembangunan

d. Masih rendahnya indeks reformasi birokrasi

Isu Strategis masih rendahnya indeks reformasi birokrasi diangkat dari analisis rendahnya efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang baik, akuntabel dan transparan. Yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas SDM, memperkuat regulasi dan sistem pengawasan terhadap birokrasi, penyederhanaan proses pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan, memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi birokrasi. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam meningkatkan indeks reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam

Isu Strategis masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menghasilkan aktivitas ekonomi



yang dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan ekonomi, serta meningkatkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengelolaan lahan dan penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Dengan upaya tersebut diharapkan kualitas lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung demi keberlangsungan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

f. Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu strategis menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diangkat dari menurunnya aspek kebebasan sipil, partisipasi politik, hak asasi manusia, kekuasaan eksekutif. Dalam mengatasinya, daerah perlu memperhatikan seluruh aspek/komponen Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil.

4.2.4 Telaah terhadap RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu pada fase terakhir dan masa transisi pemerintahan setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah di Kabupaten Belitung pada tahun 2023. Visi RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 adalah “*Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat*” dengan Misi sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para *stakeholder* lainnya dalam pembangunan daerah;
- c. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.



Pada fase terakhir RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, Fokus pembangunan yang menjadi perhatian adalah Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Penguatan Birokrasi. Pada tahapan ini, penguatan diarahkan kepada sektor industri melalui 1) peningkatan kualitas pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan; 2) kontinuitas pengembangan potensi kepariwisataan; 3) optimalisasi pengelolaan pelabuhan laut Tanjung Batu; dan 4) pengembangan sumber daya manusia berbasis potensi daerah.

Birokrasi dalam periode ini harus lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Berbagai dampak negatif atau eksternalitas negatif yang mungkin muncul dari pelaksanaan pembangunan seperti ketimpangan, kemiskinan, kesempatan berusaha dan sebagainya harus dijadikan perhatian untuk dituntaskan dan ditangani. Dengan demikian, pada akhir 20 (dua puluh) tahun pembangunan, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera akan terwujud.

Mengacu pada fokus fase terakhir RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 yang menekankan pada Ekonomi, SDM dan Penguatan Birokrasi. Maka Tujuan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 ada 4 (empat), yaitu:

- i. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- ii. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
- iii. Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.
- iv. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Hasil telaahan sasaran pokok, indikator kinerja dan target kinerja RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 sampai dengan Tahun 2022 diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Hasil Telaahan Sasaran Pokok, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 sampai dengan Tahun 2022

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Fase Keempat (2021-2025)	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022	Hasil Telaahan
1	Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (<i>persen</i>)	6,57	5,64 (capaian 2021)	Realiasi pertumbuhan ekonomi masih dibawah



No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Fase Keempat (2021-2025)	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022	Hasil Telaahan
	Berbasis Potensi Ekonomi Lokal					target RPJPD, karena masih masa pemulihan setelah pandemi Covid-19
			Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) (<i>juta rupiah</i>)	2.049.332	6.710.006 (capaian 2021)	PDRB sudah melampaui target RPJPD
			Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) (<i>juta rupiah</i>)	14.658.296	11.003.950,48 (capaian 2021)	PDRB belum melampaui target RPJPD
			Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (<i>persen</i>)	27,87	28,17 (capaian 2021)	PDRB sudah melampaui target RPJPD
			Rata-rata pendapatan per kapita (<i>rupiah</i>)	6.401.018	n/a	PDRB sudah melampaui target RPJPD



No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Fase Keempat (2021-2025)	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022	Hasil Telaahan
			Rata-rata peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (<i>persen</i>)	15,75	14,35	PDRB belum melampaui target RPJPD
		Meningkatnya Kepariwisataa n daerah	Rata-rata peningkatan jumlah wisatawan (<i>orang</i>)	15.000	266.126	Jumlah wisatawan sudah melampaui target RPJPD
			Jumlah destinasi wisata (<i>unit</i>)	41	72	Sudah melampaui target RPJPD
		Meningkatnya pengembangan Perikanan dan Kelautan	Rata-rata peningkatan jumlah produksi budidaya laut (<i>ton</i>)	30,00	154,49	Sudah melampaui target RPJPD
			Rata-rata peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap (<i>ton</i>)	1.000	43.021,5	Sudah melampaui target RPJPD
		Meningkatnya pengembangan perhubungan laut	Persentase pembangunan dan penataan kawasan pelabuhan laut Tanjung Batu (<i>persen</i>)	97,00	n/s	



No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Fase Keempat (2021-2025)	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022	Hasil Telaahan
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas hidup	indeks pembangunan manusia (IPM)	83,00	73,38	Masih dibawah target RPJPD, mengingat ada penyesuaian angka IPM dari BPS
			Rata-rata angka partisipasi kasar (APK) (<i>persen</i>) - SD - SMP	130,00 113,26	97,63 93,70	APK sudah mendekati angka 100 dalam upaya pengaturan usia sekolah
			Rata-rata angka partisipasi murni (APM) (<i>persen</i>) - SD - SMP	100,00 100,00	84,97 60,20	APM SMP mengalami penurunan sehingga belum melampaui target
			Rata-rata angka kelulusan (<i>persen</i>) - SD - SMP	100,00 100,00	100,00 100,00	Angka kelulusan sudah sesuai target
			Rata-rata lama sekolah (<i>tahun</i>)	11,00	8,74	Belum mencapai target
			Rata-rata usia harapan hidup (<i>tahun</i>)	74,00	71,31	Belum mencapai target



No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Fase Keempat (2021-2025)	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022	Hasil Telaahan
			Rata-rata angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (orang)	2	14	Belum mencapai target
			Rata-rata angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran (orang)	100	216,14	Masih banyak AKI, sehingga di atas target RPJPD
3	Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Persentase penanganan sampah Kabupaten Belitung (<i>persen</i>)	80,00	16,81	Penanganan sampah masih dibawah target

Sumber : Hasil Analisa, 2023

4.2.5 Kebijakan pembangunan daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung memperhatikan kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota. Dalam hal ini identifikasi kebijakan yang ditinjau adalah RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

Kabupaten Belitung Timur merupakan Kabupaten pemekaran dari Belitung. Kabupaten Belitung Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Belitung yang berada pada satu pulau yang sama yaitu pulau Belitong. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, maka dapat diketahui bahwa Visi Kabupaten Belitung Timur adalah Belitung Timur Bangkit dan Berdaya. Adapun misi yang disusun antara lain :

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten



Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. PEMBERDAYAAN ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu dasar kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan suatu daerah adalah isu strategis. Terdapat empat isu strategis yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pencapaian Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Pengembangan ekonomi sektor prioritas;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Pengurangan Risiko Bencana;

Dengan memperhatikan Visi, Misi dan Isu strategis Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, maka pada dasarnya terdapat kesamaan pandangan dan konsep perencanaan antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur yang ingin mewujudkan kemajuan, pembenahan manajemen tatapemerintahan, pemberdayaan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Oleh karena itu fokus prioritas pembangunan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam RPJMD yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial;
3. Mewujudkan stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar ;
4. Memperkuat daya saing daerah dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Memperhatikan 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur, maka sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Belitung baik darat maupun laut, Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung mempunyai kesamaan pemahaman terhadap prioritas pengembangan ekonomi lokal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini terlihat dari mewujudkan stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar menjadi salah satu prioritas pembangunan lima tahunan Kabupaten Belitung Timur, yang akan bersinergi dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 yang menjadikan



penguatan perekonomian dan peningkatan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan daerah.

4.2.6 Isu Strategis Daerah Kabupaten Belitung

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perbandingan dengan kabupaten sekitar, serta analisis kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, Isu strategis Kabupaten Belitung pada pelaksanaan pembangunan periode 2024-2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal

Isu Strategis ini diangkat dari belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah berbasis potensi daerah seperti perikanan, pariwisata dan pertanian dalam meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Belitung. Pengembangan produk-produk usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sektor unggulan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Beberapa pengembangan kawasan strategis perekonomian Seperti ditetapkannya Kabupaten Belitung Sebagai KSPN Tanjung Kelayang, Geopark Belitong, KEKTanjung kelayang, KPPN Selat Nasik juga memiliki pertimbangan tersendiri Detail kondisi pengembangan ekonomi sektor prioritas Kabupaten Belitung yang ikut memperkuat isu ini sebagai berikut :

- **Pengembangan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan**

Pengembangan sektor pertanian dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian, pengelolaan pasca panen produk pertanian dan perkebunan dan pemasaran produk pertanian, serta meningkatkan kompetensi petani dan kelembagaan petani sehingga akan meningkatkan nilai tukar petani.

pengembangan sektor perikanan tangkap, dan budidaya melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui bantuan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perikanan tangkap dan budidaya, dan mengoptimalkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik .

- **Pengembangan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro**

Pengembangan koperasi dan mikro melalui peningkatan Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, dan pemanfaatan



potensi daerah dalam mengembangkan IKM sebagai pendukung kepariwisataan serta pembinaan dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan IKM.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung terus mendorong pemulihan UMKM melalui Subsidi bunga, perluasan layanan pendampingan usaha, pelatihan dan bantuan produktivitas dan nilai tambah usaha mikro, peningkatan kemampuan digital UMKM, standarisasi produk dan kewirausahaan serta pendampingan Sumber Daya Manusia UMKM. Pada Tahun 2022 Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi dana DAK Fisik untuk revitalisasi PLUT menjadi PLUT Premium. Gedung PLUT ini dilengkapi dengan mushola, 4 inkubator, kuliner, kriya, agrobisnis, digital marketing, foto studio produk, coffee shop, ruang pertemuan maksimal 50 orang, ruang laktasi (ruang ibu menyusui), jalur khusus penyandang disabilitas, ruangan *open spaces* dan *co working space*, *display produk privita room*, media center, ruang konsultasi, pos *security* dan parkir mobil. PLUT premium ini juga digunakan untuk “klinik” atau tempat konsultasi dan pendampingan koperasi dan KUKM, ada 5 layanan Konsultan yakni: kelembagaan, produksi, Sumber Daya Manusia, pembiayaan dan pemasaran.

- **Pengembangan Ekonomi Sektor pariwisata**

Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat strategis dan berpengaruh besar dalam pembangunan suatu daerah. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, sektor pariwisata merupakan sektor yang bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian suatu daerah. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Belitung melalui peningkatan amenities, atraksi, promosi pariwisata, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif serta belum optimalnya pengembangan Desa wisata.

- **Pengembangan Ekonomi Sektor Penanaman Modal**

Pengembangan Ekonomi Sektor Penanaman Modal melalui peningkatan tata kelola penanaman modal dan prizinan. Dengan optimalnya implementasi kegiatan penanaman modal diharapkan akan mendorong dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi daerah seperti industri, perdagangan dan pariwisata di dukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 tahun 2022 tentang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah akan memberikankan kepastian hukum kepada investor atau calon investor dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah.



2. Konektivitas dan Infrastruktur yang Mendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar

Isu strategis Infrastruktur dan konektivitas yang mendukung perekonomian diangkat dari berbagai berbagai analisis yaitu kualitas fasilitas publik, infrastruktur dan konektivitas yang mendukung perekonomian dalam menghadapi restrukturisasi global.

Kualitas utilitas pelayanan publik yang belum mumpuni yang disebabkan kondisi belum meratanya utilitas pelayanan publik berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, TPS 3R dan utilitas lainnya dan belum terintegrasinya utilitas sanitasi lingkungan secara terpadu dan efisien, serta belum meratanya tingkat kondisi jalan dan jembatan yang berkualitas.

Kurangnya lahan-milik pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana pemerintah dan sarana publik merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan infrastruktur dan utilitas daerah. Masih sulitnya konektivitas antar wilayah/pulau yang disebabkan belum meratanya jaringan telekomunikasi/Internet, listrik yang berkualitas. Dan masih kurangnya prasarana transportasi antar wilayah baik itu darat, laut maupun udara.

Isu strategis infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung perekonomian berangkat merupakan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik. Isu infrastruktur dan konektivitas berangkat juga dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan, dan menjamin seluruh penduduk untuk mendapat akses energi yang terjangkau dan dapat diandalkan, tersedianya infrastruktur yang tangguh, dan upaya penyediaan permukiman kota dan permukiman manusia yang aman, tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial di masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia Belum Berkualitas dan Berdaya Saing

Isu strategis Sumber Daya Manusia belum berkualitas dan berdaya saing diangkat dari permasalahan belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan, serta faktor sosial dan ekonomi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan kesehatan.. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka.



Selain itu terdapat beberapa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Belitung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ditandai dengan tidak tercapainya salah satu indikator dari 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga adalah menggunakan jamban yang sehat. Sampai dengan tahun 2022 persentase desa ODF (*Open Defecation Free*) di Kabupaten Belitung baru mencapai 53% atau masih ada 23 desa/kelurahan yang masih melakukan buang air besar sembarangan.

Adapun laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, rendahnya taraf hidup, keinginan untuk memiliki anak yang banyak, serta norma dan budaya yang mendukung kelahiran banyak anak.

4. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Isu belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belitung tercermin dari beberapa capaian kinerja yang belum sesuai target yang ditetapkan seperti Nilai Laporan Akuntabilitas masih dalam kategori “B” dari target “BB” dan Indeks Reformasi Birokrasi masih kategori “CC” dari target “B”. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama yang diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Terhubung pada tiga pilar, yakni *rule of law*, *democracy*, dan *good governance*.

Tata kelola pemerintahan belum optimal diangkat dari analisis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal yang disebabkan oleh belum kompetenya SDM pengelola aset di perangkat daerah. Belum berkualitasnya perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh masih kurangnya kompetensi SDM perencanaan. Kurangnya komitmen pemerintah terhadap konsensus yang ada untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini disebabkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal, serta belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Selain itu pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga belum optimal karena masih kurangnya infrastruktur pendukung SPBE. Sehingga tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum optimal.

Manajemen sumber daya manusia yang tidak terkelola dengan baik sesuai dengan kapabilitasnya yang disebabkan rendahnya kualitas tata kelola aparatur untuk peningkatan



kapabilitas dan karir, rendahnya kualitas tata kelola sumber daya manusia untuk pengembangan *endogenous development*, Masih kurangnya transfer pengetahuan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada.

Isu tata kelola pemerintah yang bersih efektif, transparan dan bertanggung jawab berangkat juga dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, demokratis, dan terpercaya dalam upaya meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua.

5. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Isu strategis masih rendahnya kualitas lingkungan hidup diangkat dari belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Belitung. Hal ini disebabkan antara lain penurunan kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah yang masih terbatas cakupannya dalam pengurangan timbulan sampah karena keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai.

Pembangunan lingkungan hidup harus memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan sehingga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dapat dipertahankan. Lingkungan hidup yang berkualitas sangat bergantung pada peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan. Selain itu penanganan sampah juga harus tepat sehingga timbulan sampah dapat diminimalisir.

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung yang terus bertambah setiap tahun menjadi salah satu penyebab degradasi lingkungan. Tekanan aktivitas manusia yang semakin ekstrim dibandingkan dengan laju pemulihan sumberdaya alam yang lambat, akan memunculkan degradasi bahkan kerusakan sumberdaya alam yang semakin cepat, karena pergerakan upaya perusakan yang dilakukan oleh manusia lebih cepat daripada kemampuan alam untuk melakukan pemulihan kembali (*recovery*). Tekanan penduduk apabila tidak sebanding dengan ketersediaan sumberdaya alam tentu saja akan memperlambat pemulihan sumberdaya alam. Sumber daya alam (SDA) berupa tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia dan makhluk hidup lain juga semakin menurun kualitasnya akibat berbagai kegiatan seperti perambahan dan pemukiman oleh manusia.

Pada dasarnya memang pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan masalah yang harus diatasi dengan melibatkan semua sektor dan pemangku kepentingan.



Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan stakeholder harus berperan serta dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan sampah secara tepat dan bijak.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berbeda dengan penyusunan RPJMD yang memuat visi dan misi dari kepala daerah terpilih, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memuat visi dan misi daerah untuk jangka menengah. Hal ini dikarenakan kepala daerah dalam periode 2023-2026 sebagai pelaksana RPD 2023-2026 merupakan pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pejabat berwenang, bukan kepala daerah hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Ortonomi Baru, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

5.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Belitung 2005-2025

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”



Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah;
3. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

5.2 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap Keempat

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung adalah untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan berbasis pada sektor perikanan dan pariwisata yang didukung ketersediaan fasilitas perhubungan yang memadai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arah pembangunan yang jelas dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Belitung. Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung 2005-2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi makro, yaitu :

1. pembangunan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi ekonomi lokal;
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. reformasi birokrasi;
4. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
5. pemerataan pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Belitung pada tahap keempat dalam mencapai visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sector ekonomi, sumber daya manusia dan penguatan birokrasi.



5.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025.

Dengan memperhatikan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan 3 (tiga) sasaran :
 - a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - b) Menurunnya Kemiskinan Penduduk
 - c) Meningkatnya infrastruktur kewilayahan
2. Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia, dengan 2 (dua) sasaran :
 - a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - b) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
3. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, dengan 2 (dua) sasaran :
 - a) Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
 - b) Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan 1 (satu) sasaran :
 - a) Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran termasuk indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilannya disajikan pada gambar cascading sebagai berikut :



Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

Visi : Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

No	Misi RPJPD	Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Sasaran RPD	Indikator Sasaran
1	Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Indeks Gini	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	1) Pertumbuhan Ekonomi
				2. Menurunnya Kemiskinan Penduduk	2) Persentase Penduduk Miskin
				3. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	3) Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan
2	Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Angka Harapan Hidup
				2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2) Rata-rata Lama Sekolah
		Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1) Opini BPK 2) Nilai SAKIP
				2. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	3) Indeks Profesional ASN
3	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal RPD	Target			Kondisi Akhir RPD
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Indeks Gini	0,237	0,248-0,253	0,247-0,252	0,246-0,251	0,246-0,251
2	Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,38	74,26	74,77	74,95	74,95
3	Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	BB	BB
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,25	69,25	69,26	69,27	69,27



Tabel 5.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal RPD	Target			Kondisi Akhir RPD
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,71	4,50	4,60	4,90	4,90
2	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Presentase Penduduk Miskin	6,45	6,40	6,30	6,20	6,20
3	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan	58,85	62,84	65,85	69,01	69,01
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,31	71,38	71,42	72,00	72,00
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,74	8,78	8,80	8,82	8,82
6	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	BB
7	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesional ASN	75,44	71-80 (sedang)	71-80 (sedang)	71-80 (sedang)	71-80 (sedang)
8	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,25	69,25	69,26	69,27	69,27

5.4 Penyelarasan Indikator Makro

Sebagai salah satu amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan Provinsi dan Nasional, sehingga pembangunan dapat saling bersinergi dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 harus selaras dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk lebih lengkapnya tentang keselarasan Tujuan dan Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.4 Penyelesaian Target Indikator Makro

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					RPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2026				RPD Kab. Belitung Tahun 2024-2026		
		Target					Target				Target		
		2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	5,4-5,7	5,7-6,0	5,3-5,9	6,2-6,5	4,28	4,39	4,46	4,78	4,50	4,60	4,90
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	-	-	-	7,0-8,0	6,0-7,0	4,30	4,20	4,10	4,01	6,40	6,30	6,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	-	-	5,3-6,0	3,6-4,3	4,47	4,39	4,26	4,19	3,47	3,46	3,45
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-	-	73,29- 73,35	75,54	71,91	72,13	72,35	72,57	74,26	74,77	74,95
5	Rasio Gini	-	-	-	0,375- 0,378	0,360- 0,374	0,239	0,229	0,224	0,217	0,248- 0,253	0,247- 0,252	0,246- 0,251



BAB VI

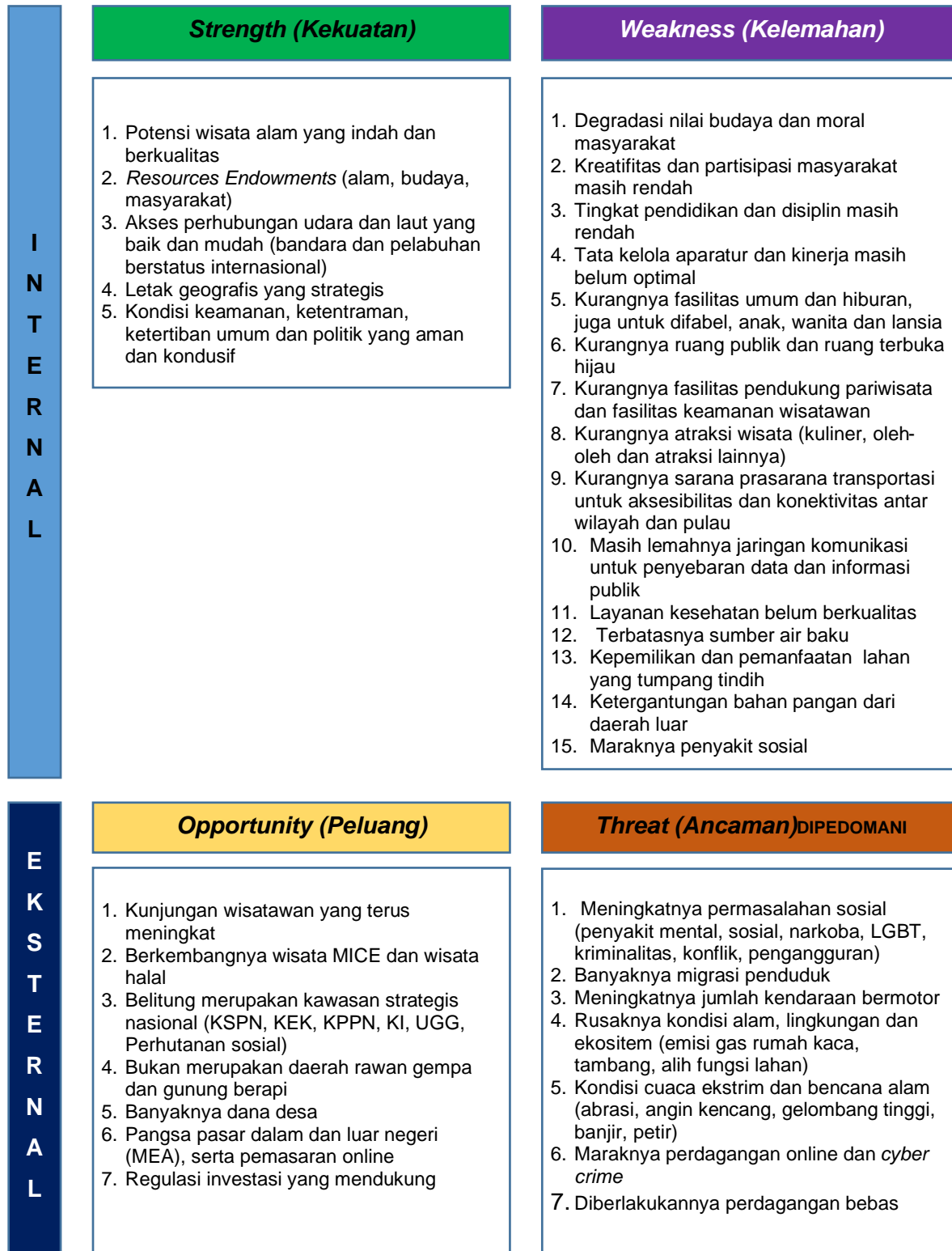
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Pada bab ini akan dirumuskan mengenai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD Belitung. Visi dari Kabupaten Belitung adalah **Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya Secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan Bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat**. Berikut akan dijabarkan mengenai strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berupa rumusan perencanaan komprehensif berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah dan perangkat daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan serta target kinerja RPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah, dipisah menjadi 2 (dua), yaitu 1) Perencanaan Strategis, merupakan perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; 2) Perencanaan Operasional, merupakan perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan secara lebih rinci pada tiap urusan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Dalam penentuan alternatif strategi untuk pencapaian setiap indikator sasaran dirumuskan dan diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal. Analisis yang digunakan adalah metode analisis SWOT. Identifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT, dijabarkan dalam tabel berikut ini:



Gambar 6.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal berdasarkan Analisis SWOT



Berdasarkan identifikasi dan analisis SWOT sebagaimana dijabarkan di atas, maka strategi yang dapat dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal wilayah Kabupaten Belitung untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi misi kepala daerah dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026
VISI : Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan
Memanfaatkan Sumber Daya Secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan Bagi Sebesar-
besarnya Kesejahteraan Masyarakat

Misi / Tujuan	Sasaran RPD	Strategi
Misi 1 : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Tujuan 1 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan 2. Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan
		3. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
		4. Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro
		5. Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian
		6. Memperkuat ekonomi desa dan Kawasan Perdesaan
		7. Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan
	2. Menurunnya kemiskinan penduduk	8. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Perluasan kesempatan kerja 9. Mengurangi beban pengeluaran
	3. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	10. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah 11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Layak Huni



Misi / Tujuan	Sasaran RPD	Strategi
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah		
Tujuan 2 Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat 13. Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat 14. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
	5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	15. Meningkatkan akses pendidikan
Tujuan 3 Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	6. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	16. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		17. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		18. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		19. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		20. Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		21. Meningkatkan statistik sektoral
	22. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	
7. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	23. Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif	
	24. Meningkatkan kapabilitas aparatur	
Misi 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan		
Tujuan 4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	8. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	25. Meningkatkan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup
		26. Meningkatkan Pengelolaan sampah

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, rumusan strategi pembangunan pada tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

STRATEGI 1 : Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan

Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan Kabupaten Belitung. Sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Keragaman budaya dan potensi wisata yang ada perlu didukung dengan pengelolaan dan fasilitas penunjang yang optimal. Ditetapkannya Kabupaten Belitung sebagai Kawasan Strategis



Pariwisata Nasional dan bahkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan pariwisata supaya dapat lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing pariwisata ini diarahkan pada pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata. Potensi Geopark yang dimiliki Kabupaten Belitung yang masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG) serta masuk dalam salah satu lokasi utama Perhutanan Sosial juga perlu untuk lebih dioptimalkan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Sesuai dengan program Bupati dan Wakil Bupati, pengembangan pariwisata di Belitung juga diarahkan pada pengembangan Desa Wisata sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Selain itu juga dengan meningkatkan ekonomi kreatif guna mendukung pariwisata dan peningkatan kompetensi SDM pariwisata. Pengelolaan museum maritim juga perlu ditingkatkan, serta pelestarian adat istiadat, cagar budaya dan kesenian daerah perlu lebih dikembangkan untuk menunjang pariwisata, khususnya pariwisata budaya.

STRATEGI 2 : Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan

Upaya meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan perlu mendapat perhatian dari pemerintah diarahkan pada usaha intensifikasi dan rehabilitasi pertanian, adanya perlindungan terhadap lahan pertanian secara berkelanjutan. Selain itu perlu adanya penguatan kelembagaan pertanian dalam hal produksi, distribusi dan pemasaran. Mutu produksi pertanian juga harus diperhatikan, serta perlu adanya pengelolaan pasca panen sehingga hasil produksi pertanian dapat dimanfaatkan juga dalam bentuk olahan. Strategi ini juga diarahkan pada pengembangan produksi pertanian di kawasan perdesaan prioritas nasional Selat Nasik. Selain itu strategi ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan pertanian sehingga mampu memberi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

STRATEGI 3 : Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya

Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, berdampak pada belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perikanan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ini diarahkan pada pembibitan budidaya laut selain produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sehingga produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat berkelanjutan seiring dengan pengembangan strategi ekonomi biru yang merupakan komitmen pemerintah untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan. Serta juga memperhatikan pengembangan usaha dan daya



saing produk hasil perikanan dan produksi perikanan di Kabupaten Belitung, khususnya di kawasan prioritas nasional Selat Nasik, kawasan strategis dan kawasan lainnya. Upaya pelestarian dan pengendalian sumberdaya perikanan berbasis pada teknologi ramah lingkungan.

STRATEGI 4 : Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro

Koperasi dan usaha mikro telah terbukti sebagai dasar ekonomi yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pengembangan koperasi dan usaha mikro dianggap penting karena potensinya untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat ekonomi lokal. Koperasi juga dapat membantu memperkuat ekonomi daerah dengan memfasilitasi akses keuangan dan usaha bagi masyarakat setempat, dan juga membantu memajukan sektor produksi dan pertanian. Melihat beberapa permasalahan di Kabupaten Belitung terkait belum optimalnya pengelolaan koperasi dan usaha mikro, maka strategi ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi serta usaha mikro. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pengelolaan kelembagaan yang baik, penguatan jaringan, peningkatan kemampuan berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan pasar melalui pemanfaatan teknologi.

STRATEGI 5 : Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian

Investasi memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi karena membantu meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. Investasi juga membantu memperkuat infrastruktur dan membangun sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Melalui optimalisasi tata kelola penanaman modal serta perizinan, akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan dan penataan industri melalui Kawasan Peruntukkan Industri serta penumbuhan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang juga mendukung sektor pariwisata, perlu diperkuat oleh prasarana dan sarana perdagangan yang baik. Kemudahan dalam memperoleh akses terhadap bahan baku, teknologi serta pasar, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk lokal di tingkat regional, nasional maupun internasional.

STRATEGI 6 : Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk memberikan kesempatan dan sumber daya bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat



melalui pengembangan potensi yang ada. Penguatan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses perencanaan, implementasi dan pengawasan kebijakan serta pembangunan daerah, terutama di kawasan perdesaan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat memperoleh akses informasi, pendidikan, dan pelatihan untuk memperkuat kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada serta membangun usaha. Salah satu penguatan ekonomi perdesaan berbasis masyarakat dilakukan melalui pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa untuk meningkatkan pendapatan, pemerataan ekonomi dan pembangunan desa.

STRATEGI 7 : Meningkatkan pengendalian, pengawasan ekonomi dan pembangunan

Pengendalian serta pengawasan ekonomi dan pembangunan merupakan proses untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan program pembangunan di implementasikan dengan benar dan efektif, yang melibatkan pemantauan serta evaluasi hasil dalam rangka penyusunan dan penyesuaian kebijakan pemerintah. Melalui upaya peningkatan fungsi koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa perekonomian daerah berkembang secara bertanggung jawab, stabil dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pemerataan pembangunan, pola kemitraan dengan *stake holder* lainnya juga sangat diperlukan melalui pengembangan kerja sama dengan badan usaha maupun pola *public-private partnership*, guna meningkatkan efisiensi, kualitas dan ketersediaan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan penggunaan produk dalam negeri..

STRATEGI 8 : Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Perluasan kesempatan kerja

Perlindungan Tenaga kerja mendapat perhatian khusus dalam hukum ketenagakerjaan yaitu dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung. Kesempatan kerja yang luas dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Belitung, karena mampu menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Perluasan kesempatan kerja juga terkait dengan masalah produktivitas pekerja. Produktivitas tenaga kerja masih relative rendah karena masih rendahnya tingkat



Pendidikan yang dimiliki dan kurangnya ketrampilan sehingga tak jarang dari para tenaga kerja terserap pada pekerjaan yang bersifat non formal dan tidak tetap.

STRATEGI 9 : Mengurangi beban pengeluaran

Kemiskinan merupakan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial. Masih tingginya kemiskinan di Kabupaten merupakan fenomena yang harus segera diatasi supaya kesejahteraan masyarakat terwujud. Kemiskinan terjadi disebabkan karena masih rendahnya tingkat keterampilan masyarakat, sulitnya mendapatkan akses pelayanan publik yang layak serta masih tingginya pengeluaran masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pengeluaran beban masyarakat miskin ini diarahkan untuk memenuhi jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin, bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu serta meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan untuk meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial.

STRATEGI 10 : Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah

Kabupaten Belitung merupakan wilayah kepulauan, masih kurangnya kualitas sarana prasarana konektivitas antar pulau dan antar wilayah yang memadai masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian pemerintah. Strategi ini diarahkan pada peningkatan konektivitas pulau, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan antar pulau penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan, pengelolaan jalan baik hibah jalan daerah, jalan non status maupun standar jalan. Pembangunan infrastruktur tersebut tetap harus memperhatikan aturan tata ruang ruang. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana prasarana bangunan layanan publik, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik lainnya, terutama yang mendukung pengembangan pariwisata mengingat Kabupaten Belitung sebagai salah satu yang termasuk kedalam Unesco Global Geopark sehingga diperlukannya sarana transportasi publik yang terintegrasi dan terjamin keselamatannya yang memudahkan aksesibilitas antar wilayah.

STRATEGI 11 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Layak Huni

Sarana dan prasarana permukiman yang layak huni menjadi suatu hal yang penting karena terkait dengan pengimplementasian pola perilaku hidup bersih dan sehat, yang difokuskan pada pengurangan kawasan kumuh, meningkatkan aksesibilitas lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana air limbah dan drainase, sehingga dapat meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman bagi masyarakat di Kabupaten Belitung. Selain itu dalam rangka



mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan, salah satunya dengan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

STRATEGI 12 : Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena dengan tingkat kesehatan yang baik maka individu tersebut akan produktif. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah nilai kepatutan yang sebenarnya (*proper value*) terhadap unit pelayanan tertentu, baik dari aspek teknis (ilmu, ketrampilan, dan teknologi medis atau kesehatan) dan interpersonal yaitu tata hubungan dokter – pasien : komunikasi, empati dan kepuasan pasien (Widayat, 2009). Saat ini mutu layanan kesehatan merupakan fokus utama bagi masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat diatasi salah satunya dengan adanya sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat, akurat dan tepat. Kemudian masih tingginya angka kematian ibu dan bayi harus menjadi perhatian utama dengan meningkatkan layanan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga harus dipenuhi secara optimal. Selain itu untuk mewujudkan tercapainya Kabupaten Sehat, pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas harus memiliki kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular menjadi salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Sosialisasi terus menerus juga harus dilakukan dengan promosi kesehatan dalam bentuk KIE atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi bagi masyarakat, seperti optimalisasi cakupan ASI Eksklusif untuk peningkatan kesehatan bayi.

STRATEGI 13 : Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat

Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah. Hal ini berdasarkan data bahwa masih ada desa yang belum menerapkan desa ODF (*Open Defecation Free*) atau stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga,



dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri serta berperan aktif mewujudkan kesehatan masyarakat.. Selain itu juga peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, sehingga dapat berdampak pada penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, gizi buruk dan *stunting*. Strategi ini juga diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat daam berolahraga sehingga dapat tercapai peningkatan prestasi olahraga dengan semakin intensifnya pembinaan olahraga kemasyarakatan..

STRATEGI 14 : Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam membangun peradaban, namun terdapat hal positif dan negatif dalam laju pertumbuhan penduduk, ketika laju pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkendali. Laju pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya penekanan jumlah penduduk. Adanya peningkatan kuantitas penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk. Peran dan kualitas keluarga juga penting dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Hal ini karena pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran dan pembinaan ketahanan keluarga akan memberikan kontribusi meningkatnya kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Selanjutnya Pemerintah sebagai *policy maker* harus berupaya untuk membuat berbagai kebijakan yang diturunkan menjadi berbagai program Keluarga Berencana, salah satunya mendukung keberhasilan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di daerah.

STRATEGI 15 : Meningkatkan akses pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam suatu Negara. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung suatu Negara untuk maju. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia. Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata



dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah. Selain itu juga meningkatkan akreditasi sekolah dan kualitas SDM pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis pada penguatan karakter dan akhlak. Dengan mutu pendidikan pendidikan yang baik, diharapkan dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing.

STRATEGI 16 : Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah.

Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

STRATEGI 17 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud jika telah ada keselarasan dalam perencanaan pembangunan baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dapat dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dan pihak terkait seperti akademisi, pengusaha, LSM, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif, serta memastikan bahwa kepentingan semua pihak terakomodasi dalam perencanaan pembangunan, selain itu memperkuat kompetensi dan kapasitas SDM di bidang perencanaan pembangunan juga menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, diharapkan dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan perencanaan yang berkualitas pula, pemanfaatan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ini diarahkan pada mulai diterapkannya *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah serta mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam satu teknologi informasi.



STRATEGI 18 : Meningkatkan kinerja pemerintah daerah

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah merupakan perwujudan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta memastikan bahwa sumber daya yang digunakan untuk program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program daerah dapat membantu memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintah daerah, seperti sistem informasi manajemen keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan manajemen sumber daya manusia untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terpenting meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara unit kerja di lingkungan pemerintah daerah, serta dengan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.

STRATEGI 19 : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah dapat membantu masyarakat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Meningkatkan peran dan kapasitas lembaga aparaturnya pengawasan intern pemerintah untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan daerah berbasis resiko. Selain itu meningkatkan koordinasi antara Lembaga pengawasan dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan merupakan upaya atau strategi guna meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

STRATEGI 20 : Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Meningkatkan infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk pengelolaan SPBE, seperti jaringan internet yang cepat dan stabil, server yang handal, dan perangkat keras dan lunak yang up to date. Hal ini penting untuk memastikan bahwa system berjalan dengan lancar dan dapat diakses semua pihak. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM terkait pengelolaan SPBE untuk memastikan bahwa system dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu perlu meningkatkan keamanan sistem SPBE guna memastikan bahwa data



dan informasi yang disimpan dalam system terlindungi dari ancaman keamanan. Serta mengintegrasikan sistem SPBE dengan sistem-sistem lain yang digunakan oleh pemerintah daerah.

STRATEGI 21 : Meningkatkan statistik sektoral

Upaya yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan kerja sama antara instansi terkait dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antara instansi terkait. Meningkatkan kualitas data melalui perbaikan metodologi, standar pengumpulan dan pengolahan data, dan validasi data dengan melibatkan ahli statistik dan memperkuat sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Meningkatkan penggunaan data statistic sektoral dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan sektor oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Serta melakukan diseminasi informasi tentang statistik melalui publikasi laporan, seminar, dan workshop guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya statistik sektoral.

STRATEGI 22 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelayanan publik sert memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Menggunakan indikator yang jelas dan terukur untuk mengukur kinerja pelayanan publik, serta memperbaiki system pengukuran kinerja dan monitoring untuk memastikan bahwa indikator tersebut terpenuhi. Memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan petugas pelayanan publik, termasuk keterampilan interpersonal dan penggunaan teknologi. Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mempermudah akses bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk memastikan pelayanan yang terintegrasi dan komprehensif.



STRATEGI 23 : Meningkatkan stabilitas politik, keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif

Sebagai daerah pariwisata tentunya keamanan ketertiban masyarakat menjadi hal yang utama selain itu, dalam rangka pemilukada serentak tahun 2024, stabilitas politik tentu diharapkan. Dalam rangka hal itu semua, upaya yang dapat dilakukan diantaranya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dapat membantu mencegah munculnya konflik sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah, hal ini dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang memadai bagi aparat keamanan. Meningkatkan kerja sama antar Lembaga pemerintah daerah dan antar wilayah untuk mengatasi masalah stabilitas politik dan keamanan. Serta meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik serta etika budaya politik masyarakat untuk mengantisipasi potensi konflik.

STRATEGI 24 : Meningkatkan kapabilitas aparatur

Masih kurangnya kompetensi profesional aparatur menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. SDM aparatur merupakan pelaku pelayanan publik. SDM aparatur yang kurang profesional dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur ini diarahkan pada optimalisasi kinerja pegawai berbasis teknologi, penataan manajemen sumber daya aparatur.

STRATEGI 25 : Meningkatkan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan isu strategis tidak hanya di Indonesia, namun juga dunia. Di Kabupaten Belitung khususnya, pengelolaan lingkungan hidup menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Terlebih lagi Kabupaten Belitung merupakan destinasi pariwisata. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup ini diarahkan pada tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.



STRATEGI 26 : Meningkatkan pengelolaan sampah

Meningkatnya volume timbulan sampah, terutama di daerah-daerah destinasi wisata menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan persampahan yang diarahkan pada meluaskan cakupan pelayanan persampahan, serta pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan perumusan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran secara bertahap selama kurun waktu tiga tahun. Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberi arahan kepada pemerintah supaya lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan tersebut kemudian disusun berdasarkan tema pembangunan setiap tahunnya untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan. Sehingga akan lebih jelas dalam menuangkan RPD ke dalam RKPD dengan penekanan pada fokus atau tema setiap tahunnya. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Belitung berdasarkan pentahapan setiap tahun dapat dilihat pada gambar 6.2 di bawah.

Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi

Visi : Terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Tujuan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi I : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Penguatan Perekonomian	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan



Tujuan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
			berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan
			Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
			Meningkatkan pengembangan koperas dan usaha mikro
			Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian
			Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan
			Meningkatkan pengendalian, pengawasan ekonomi dan pembangunan
	Penguatan perekonomian	Menurunnya kemiskinan penduduk	Meningkatkan akses pendidikan
			Mengurangi beban pengeluaran
	Peningkatan Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Layak Huni
Misi II : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
			Meningkatkan akses pendidikan
Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan kinerja pemerintah daerah



Tujuan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
			Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Meningkatkan statistik sektoral
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif
	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Meningkatkan kapabilitas aparatur
Misi III : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Meningkatkan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatkan Pengelolaan sampah

Tabel 6.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan antara RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

No.	RPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2026	RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026
1.	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Perekonomian
2.	Pembangunan Wilayah	Peningkatan Infrastruktur
3.	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
4.	Pembangunan SDM	Peningkatan Kualitas SDM
5.	Pembangunan Pemerintah	
6.	Pembangunan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
7.	Pembangunan Demokrasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Supaya lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya. Arah kebijakan dari masing-masing strategi yang telah dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dijabarkan pada tabel berikut ini:



Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

VISI : Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya Secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan Bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
T.1 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	S1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1.1 Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata 2. Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata dan SDM ekonomi kreatif 3. Peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata 4. Pelestarian adat istiadat, cagar budaya dan kesenian daerah 5. Optimalisasi pengelolaan museum daerah 6. Meningkatkan pemuda yang mandiri dan kreatif 7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolahraga
		1.2 Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan rehabilitasi pertanian 2. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 3. Mengembangkan produksi pertanian di kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) Selat Nasik da kawasan strategis nasional dan daerah lainnya 4. Penguatan kelembagaan pertanian
		1.3 Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan 2. Pengembangan ekonomi biru 3. Pengembangan pembenihan perikanan budidaya 4. Pengembangan usaha dan daya saing produk hasil perikanan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>5. Mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik dan kawasan strategis nasional dan kawasan lainnya, untuk menuju KEK Perikanan</p> <p>6. Pelestarian dan pengendalian sumberdaya perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan</p>
		1.4 Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro	<p>1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi.</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro</p>
		1.5 Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian	<p>1. Meningkatkan promosi, kerjasama dan investasi</p> <p>2. Penataan Peruntukan kawasan industri</p> <p>3. Menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas IKM berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan</p> <p>4. Menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah</p> <p>5. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan</p> <p>6. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting</p> <p>7. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk lokal</p> <p>8. Meningkatkan Perlindungan Konsumen</p>
		1.6 Memperkuat ekonomi desa dan Kawasan perdesaan	<p>1. Pengembangan Bumdes dan Bumdes Bersama</p> <p>2. Meningkatkan kerjasama antar lembaga desa</p> <p>3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender</p>
		1.7 Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan	<p>1. Meningkatkan fungsi koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah dan perekonomian daerah</p> <p>2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
	S2. Menurunnya kemiskinan penduduk	2.1 Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Perluasan kesempatan kerja	1. Meningkatkan keterampilan pencari kerja 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja lokal 3. Meningkatkan pemberdayaan sosial
		2.2 Mengurangi beban pengeluaran	1. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS 2. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial
	S3. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	3.1 Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah	1. Meningkatkan kebijakan perencanaan tata ruang 2. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang 3. Peningkatan standar jalan kabupaten 4. Peningkatan jalan non status menjadi jalan kabupaten 5. Meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber daya air 6. Meningkatkan pengendalian sumber daya air 7. Meningkatkan konektivitas transportasi antar moda 8. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 9. Peningkatan pelayanan keselamatan transportasi Darat 10. Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas 11. Meningkatkan konektivitas antar pulau 12. Meningkatkan pelayanan pelabuhan 13. Meningkatkan pemenuhan persyaratan kebutuhan pembangunan pelabuhan
		3.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Layak Huni	1. Pemenuhan rumah layak huni korban bencana



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah 3. Rehabilitasi rumah layak huni untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) 4. Meningkatkan aksesibilitas lingkungan dan permukiman 5. Pengurangan Kawasan kumuh 6. Meningkatkan pelayanan air minum/air bersih 7. Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah 8. Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah			
T1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1 Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi
		1.2 Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman
		1.3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran dan kualitas keluarga 2. Meningkatkan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)
	S2. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	2.1 Meningkatkan akses pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah 2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan 3. Meningkatkan penyelenggaraan PAUD 4. Meningkatkan akreditasi sekolah (PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan) 5. Meningkatkan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak 7. Meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi 9. Meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada anak usia sekolah 10. Meningkatkan literasi pada anak usia sekolah dan masyarakat
T2. Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	S3. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	3.1 Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi
		3.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
		3.3 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2. Penguatan produk hukum daerah
		3.4 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan daerah berbasis resiko
		3.5 Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan teknologi informasi komunikasi 2. Meningkatkan keamanan informasi 3. Meningkatkan pengelolaan arsip elektronik 4. Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan monitoring dan evaluasi perencanaan berbasis elektronik
		3.6 Meningkatkan statistik sektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data statistik sektoral



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3.7 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tata kelola pelayanan publik 2. Peningkatan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat 3. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan kemitraan 4. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 5. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana 6. Meningkatkan tata kelola urusan pertanahan yang menjadi kewenangan di Wilayah kabupaten
		3.8 Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik Masyarakat untuk mengantisipasi potensi konflik
	S4 Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	4.1 Meningkatkan kapabilitas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur 2. Meningkatkan manajemen sumber daya aparatur
Misi 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan			
T1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	S1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1.1 Meningkatkan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan hidup 2. Melaksanakan pengelolaan TAHURA
		2.1 Meningkatkan Pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan 2. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan 3. Meningkatkan pengolahan sampah berbasis 3R.



Setiap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu, sehingga pencapaian arah kebijakan secara logis dapat ditentukan. Serta dapat ditentukan juga kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Tahapan pelaksanaan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5 Pentahapan Pelaksanaan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2024	Tema 2025	Tema 2026
Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata			
	2. Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata dan SDM ekonomi kreatif			
	3. Peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata			
	4. Pelestarian adat istiadat, cagar budaya dan kesenian daerah			
	5. Optimalisasi pengelolaan museum daerah			
	6. Meningkatkan pemuda yang mandiri dan kreatif			
	7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolahraga			
Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan	1. Intensifikasi dan Rehabilitasi pertanian			
	2. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan			
	3. Mengembangkan produksi Pertanian di kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) Selat Nasik dan kawasan strategis Nasional dan daerah lainnya			
	4. Penguatan kelembagaan pertanian			
Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya	1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan			
	2. Pengembangan Ekonomi Biru			
	3. Pengembangan pembenihan Perikanan budidaya			



Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2024	Tema 2025	Tema 2026
	4. Pengembangan usaha dan daya saing produk hasil perikanan			
	5. Mengembangkan produksi perikanan di kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) Selat Nasik dan kawasan strategis Nasional dan kawasan lainnya, untuk menuju KEK Perikanan			
	6. Pelestarian dan pengendalian sumberdaya perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan			
Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro	1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi.			
	2. Meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro			
Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian	1. Meningkatkan promosi, kerjasama dan investasi			
	2. Penataan Peruntukan kawasan industri			
	3. Menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas IKM berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan			
	4. Menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah			
	5. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan			
	6. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting			
	7. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk lokal			
	8. Meningkatkan Perlindungan Konsumen			
Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	1. Pengembangan Bumdes dan Bumdes bersama			
	2. Meningkatkan kerjasama antar lembaga desa			
	3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender			
Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan	1. Meningkatkan fungsi koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah dan perekonomian daerah			
	2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa			



Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2024	Tema 2025	Tema 2026
	3. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)			
Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Perluasan kesempatan kerja	1. Meningkatkan keterampilan pencari kerja			
	2. Meningkatkan serapan tenaga kerja lokal			
	3. Meningkatkan pemberdayaan sosial			
Mengurangi beban pengeluaran	1. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS			
	2. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial			
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah	1. Meningkatkan kebijakan perencanaan tata ruang			
	2. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang			
	3. Peningkatan standar jalan kabupaten			
	4. Peningkatan jalan non status menjadi jalan kabupaten			
	5. Meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber daya air			
	6. Meningkatkan pengendalian sumber daya air			
	7. Meningkatkan konektivitas transportasi antar moda			
	8. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan			
	9. Peningkatan pelayanan keselamatan transportasi Darat			
	10. Peningkatan manajemen rekayasa lalulintas			
	11. Meningkatkan konektivitas antar pulau			
	12. Meningkatkan pelayanan pelabuhan			
	13. Meningkatkan pemenuhan persyaratan kebutuhan pembangunan pelabuhan			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Layak Huni	1. Pemenuhan rumah layak huni korban bencana			
	2. Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah			



Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2024	Tema 2025	Tema 2026
	3. Rehabilitasi rumah layak huni untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)			
	4. Meningkatkan aksesibilitas lingkungan dan permukiman			
	5. Pengurangan kawasan kumuh			
	6. Meningkatkan pelayanan air minum/air bersih			
	7. Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah			
	8. Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan			
Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi			
Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat	1. Meningkatkan desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)			
	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman			
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Meningkatkan peran dan kualitas keluarga			
	2. Mengoptimalkan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)			
Meningkatkan akses pendidikan	1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah			
	2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan			
	3. Meningkatkan penyelenggaraan PAUD			
	4. Meningkatkan akreditasi sekolah (PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan)			
	5. Meningkatkan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan			
	6. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak			
	7. Meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
	8. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi			
	9. Meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada anak usia sekolah			



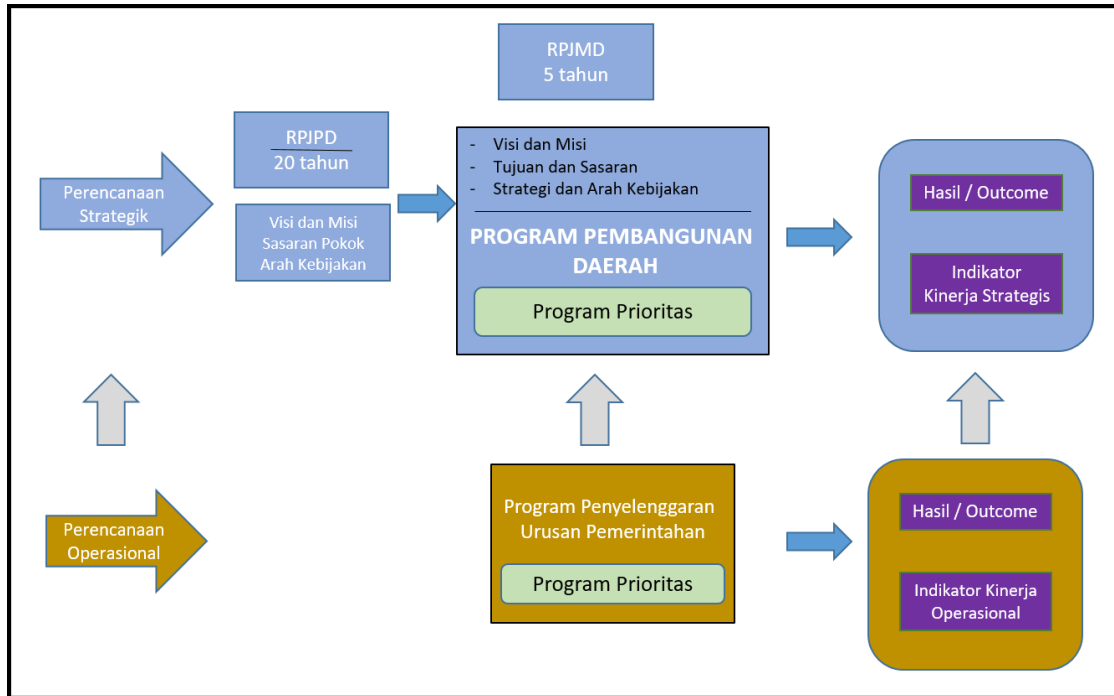
Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2024	Tema 2025	Tema 2026
	10. Meningkatkan literasi pada anak usia sekolah dan masyarakat			
Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah			
	2. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)			
	3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi			
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan			
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			
	2. Penguatan produk hukum daerah			
Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan pengawasan daerah berbasis resiko			
Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Meningkatkan pengelolaan teknologi informasi komunikasi			
	2. Meningkatkan keamanan informasi			
	3. Meningkatkan pengelolaan arsip elektronik			
	4. Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan monitoring dan evaluasi perencanaan berbasis elektronik			
Meningkatkan statistik sektoral	1. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data statistik sektoral			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan tata kelola pelayanan publik			
	2. Peningkatan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat			
	3. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan kemitraan			
	4. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			
	5. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana			
	6. Meningkatkan tata kelola urusan pertanahan yang menjadi kewenangan di Wilayah kabupaten			



Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2024	Tema 2025	Tema 2026
Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif	1. Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik Masyarakat untuk mengantisipasi potensi konflik			
Meningkatkan kapabilitas aparatur	1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur			
	2. Meningkatkan manajemen sumber daya aparatur			
Meningkatkan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan hidup			
	2. Melaksanakan pengelolaan TAHURA			
Meningkatkan pengelolaan sampah	1. Meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan.			
	2. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan			
	3. Meningkatkan pengolahan sampah berbasis 3R			

6.3 Program Prioritas

Program prioritas merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Program prioritas merupakan rencana pembangunan yang konkret dengan pendekatan *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial*, merupakan program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dan erat kaitannya dengan visi dan misi dan capaian sasaran pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:



Gambar 6.2 Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

Dalam implementasinya program prioritas ini dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program prioritas yang implementasinya dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Belitung

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
T1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio Gini	0,237	0,248-0,253		0,247-0,252		0,246-0,251		0,246-0,251		
S1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,71	4,5		4,6		4,9		4,9		
P1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	80%	78%	15.094.533.200	80,00%	15.697.841.862	82,35%	16.247.266.327	84,71%	47.039.641.389	Dinas Pariwisata
P2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100%	100%	4.397.320.000	100%	4.551.226.200	100%	4.710.519.117	100,00%	13.659.065.317	Dinas Pariwisata
P3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	64%	84,80%	2.464.669.750	90,00%	2.550.933.191	95%	2.640.215.853	95,00%	7.655.818.794	Dinas Pariwisata
P4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	n/a	50%	195.000.000	60%	200.850.000	75%	206.875.500	75,00%	602.725.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	n/a	30%	540.000.000	60%	556.200.000	80%	572.886.000	80,00%	1.669.086.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P6	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	n/a	25%	1.338.652.000	54%	1.378.811.560	100%	1.420.175.907	100,00%	4.137.639.467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	n/a	50%	4.858.082.000	60%	5.003.824.460	70%	5.153.939.194	70,00%	15.015.845.654	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kebutuhan sarana pertanian	12,44%	14,00%	1.946.634.850	14,70%	2.085.511.193	15,00%	2.332.140.002	15,00%	6.364.286.045	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	23,05	23,64%	410.000.000	24,62%	400.000.000	25,60%	400.000.000	25,60%	1.210.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	68,30	77%	5.230.000.000	80%	5.330.000.000	84%	5.330.000.000	84,00%	15.890.000.000	
P11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase (%) penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%	100%	300.277.250	100%	318.469.063	100%	336.157.416	100,00%	954.903.728	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P12	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan bencana pertanian	100%	100%	252.679.000	100%	303.215.000	100%	363.858.000	100,00%	919.752.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P13	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase (%) usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	100%	75.023.000	100%	78.774.000	100%	82.712.000	100,00%	236.509.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P14	Program Penyuluh Pertanian	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	30 kelembagaan petani	35 kelembagaan petani	540.955.000	40 kelembagaan petani	568.002.000	45 kelembagaan petani	596.401.000	45 kelembagaan petani	1.705.358.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P15	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	43.021,5	43.100	12.760.000.000	43.200	13.371.200.000	43.300	13.384.604.000	129.600	39.515.804.000	Dinas Perikanan
P16	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	154,59	170	1.490.000.000	175	1.565.000.000	180	1.495.000.000	525	4.550.000.000	Dinas Perikanan
P17	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	7,01%	7,02%	451.700.000	7,04%	460.800.000	7,06%	470.000.000	7,06%	1.382.500.000	Dinas Perikanan
P18	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	8.968,00	9.000	2.200.000.000	9.050	1.200.000.000	9.100	1.200.000.000	27.150	4.600.000.000	Dinas Perikanan
	Program Pendidikan dan Pelatihan Pengkoperasian	Persentase koperasi yang melaksanakan administrasi secara tertib	-	22,00%	138.500.000	43,00%	145.000.000	65,00%	153.000.000	65%	436.500.000	Dinas KUKMPTK
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat waktu	-	50,00%	350.000.000	57,00%	330.000.000	64,00%	330.000.000	64%	1.010.000.000	Dinas KUKMPTK
P19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	n/a	4,60%	1.210.000.000	6,70%	1.110.000.000	8,80%	510.000.000	8,80%	2.830.000.000	Dinas KUKMPTK

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
P20	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	-	1,87%	550.000.000	1,92%	550.000.000	1,99%	600.000.000	1,99%	1.700.000.000	Dinas KUKMPTK
P21	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor yang di Berikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50 investor	50 Investor	405.000.000	60 Investor	413.100.000	65 Investor	421.362.000	183 Investor	1.239.462.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P22	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	60,00%	100,00%	500.000.000	100,00%	510.000.000	100,00%	520.200.000	100,00%	1.530.200.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P23	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	40 IKM	40 IKM	710.000.000	45 IKM	724.200.000	50 IKM	738.684.000	135 IKM	2.172.884.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P24	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	100%	100%	80.000.000	100%	84.000.000	100%	90.000.000	100,00%	254.000.000	Dinas KUKMPTK
P25	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	85,00%	85,00%	1.231.549.542	87,00%	1.073.584.850	90,00%	1.077.664.850	90,00%	3.382.799.242	DPPKBPMD
P26	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	35,75%	36,00%	562.727.520	36,25%	617.870.272	36,50%	678.204.299	36,50%	1.858.802.091	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P27	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	n/a	80%	4.499.590.777	85%	4.400.243.317	90%	4.488.248.183	90%	13.388.082.277	Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	n/a	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	n/a	100%		100%		100%		100%		
P28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan prestasi olahraga	-	75%	20.881.850.235	80%	10.438.230.247	85%	10.833.941.759	85%	42.154.022.241	DISPORA
S2	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Tingkat Kemiskinan	6,45	6,4		6,3		6,2		6,2		
P1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	-	17,00%	384.772.000	21,00%	420.000.000	25,00%	450.000.000	25,00%	1.254.772.000	Dinas KUKMPTK
P2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	-	20,00%	158.090.000	25,00%	164.000.000	30,00%	170.000.000	30,00%	492.090.000	Dinas KUKMPTK

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
P3	Program Hubungan Industrial	Harmonisasi Hubungan Industrial	-	100,00%	172.442.000	100,00%	204.000.000	100,00%	224.000.000	100,00%	600.442.000	Dinas KUKMPTK
P5	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100,00%	100,00%	652.612.350	100,00%	731.873.585	100,00%	806.560.944	100,00%	2.191.046.879	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P6	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100,00%	100,00%	1.242.015.740	100,00%	1.356.834.490	100,00%	1.474.684.425	100,00%	4.073.534.655	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	97,25%	100,00%	1.105.194.750	100,00%	1.252.125.480	100,00%	1.442.338.028	100,00%	3.799.658.258	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
S3	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	58,85	62,84		65,85		69,01		69,01		
P1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik	43,03%	49,91%	17.301.370.000	52,82%	15.185.370.000	57,03%	14.509.570.000	57,03%	46.996.310.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	16,52%	18,30%	9.832.100.000	19,75%	11.264.375.000	21,51%	13.189.015.000	21,51%	34.285.490.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	n/a	8,20%	3.800.000.000	8,69%	3.800.000.000	9,16%	3.800.000.000	9,16%	11.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	20,02%	22,00%	1.800.000.000	29,59%	1.800.000.000	39,57%	1.800.000.000	39,57%	5.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungannya	15,00%	33,33%	300.000.000	46,67%	500.000.000	60,00%	500.000.000	60,00%	1.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	98,24%	100,00%	2.235.000.000	100,00%	2.030.000.000	100,00%	2.080.000.000	100,00%	6.345.000.000	
P7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan standar kabupaten	26,75%	28,25%	129.561.001.000	29,00%	167.857.147.000	29,76%	125.025.251.000	29,76%	422.443.399.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P8	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	n/a	100,00%	369.950.000	100,00%	386.945.000	100,00%	405.640.000	100,00%	1.162.535.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P9	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	0,34%	0,20%	12.747.430.000	0,18%	13.514.500.000	0,16%	14.478.789.000	0,16%	40.740.719.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,66%	99,80%	1.301.454.000	99,82%	1.564.068.000	99,84%	2.026.269.000	99,84%	4.891.791.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	44,90%	66,02%	11.332.113.000	69,84%	11.615.416.000	73,66%	11.905.801.000	73,66%	34.853.330.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	100,00%	100,00%	29.903.923.000	100,00%	36.103.304.800	100,00%	33.114.641.280	100,00%	99.121.869.080	Dinas Perhubungan
P13	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan	100,00%	100,00%	4.282.000.000	100,00%	4.710.200.000	100,00%	5.146.220.000	100,00%	14.138.420.000	Dinas Perhubungan
T2	Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,38	74,26		74,77		74,95		74,95		
S1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,31	71,38		71,42		72,00		72,00		
P1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Puskesmas terakreditasi Madya	66,67%	100,00%	106.806.725.756	100,00%	107.039.981.670	100,00%	109.116.875.310	100,00%	322.963.582.736	Dinas Kesehatan
		Rumah sakit kelas B berstandar internasional	10,00%	40,00%	52.649.308.000	60,00%	67.636.574.950	80,00%	59.460.886.449	80,00%	179.746.769.399	
P2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100,00%	100,00%	3.050.902.695	100,00%	3.135.529.859	100,00%	3.224.099.565	100,00%	9.410.532.119	Dinas Kesehatan
P3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tersedianya sediaan farmasi alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT	100,00%	100,00%	188.527.000	100,00%	207.991.260	100,00%	212.151.085	100,00%	608.669.345	Dinas Kesehatan
P4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Persentase Rumah Tangga yang berPHBS	56,40%	66,60%	837.882.985	77,00%	854.640.645	88,00%	871.733.458	88,00%	2.564.257.087	Dinas Kesehatan
		2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	85,00%	90,00%	303.507.750	95,00%	309.577.905	100,00%	315.769.463	100,00%	928.855.118	
	Program Pengendalian Penduduk	Unmet need	11,98%	11,95%	390.779.334	11,92%	399.274.920	11,89%	406.820.419	11,89%	1.196.874.673	DPPKBPM

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
P6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,38%	14,50%	1.463.690.000	14,60%	1.477.969.200	14,65%	1.494.028.584	14,65%	4.435.687.784	DPPKBPM
P7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	75,01%	75,05%	2.386.443.930	75,10%	2.395.792.808	75,10%	2.404.207.665	75,10%	7.186.444.403	DPPKBPM
P8	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	97,50%	95,70%	321.276.000	95,70%	283.881.000	95,70%	300.374.000	95,70%	905.531.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P9	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan.	14,29%	2,00%	60.420.000	2,00%	69.504.000	2,00%	73.504.000	6,00%	203.428.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P10	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan	90,91%	89,29%	100.000.000	89,29%	110.000.000	89,29%	120.000.000	89,29%	330.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
S2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,74	8,78		8,8		8,82		8,82		
P1	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,68%	100,00%	76.941.577.000	100,00%	79.249.824.310	100,00%	81.627.319.039	100,00%	237.818.720.349	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	80,11%	100,00%	9.016.123.000,00	100,00%	9.286.606.690	100,00%	9.565.204.891	100,00%	27.867.934.581	
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS)	100,00%	100,00%	4.177.033.000	100,00%	4.302.343.990	100,00%	4.431.414.310	100,00%	12.910.791.300	
P2	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	54,61%	59,41%	550.000.000	69,41%	566.500.000	79,41%	583.495.000	79,41%	1.699.995.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P3	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	11.000	12.500	5.658.750.000	13.500	1.175.125.000	14.500	1.520.384.355	14.500	8.354.259.355	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
T3	Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B		B		BB		BB		
S1	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		
		Nilai SAKIP	B	BB		BB		BB		BB		
P1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	100,00%	100,00%	108.559.576.000	100,00%	113.987.784.350	100,00%	119.414.303.500	100,00%	341.961.663.850	BPKAD
P2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100,00%	100,00%	1.844.743.750	100,00%	1.911.958.650	100,00%	1.374.653.200	100,00%	5.131.355.600	BPKAD
P3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,00%	5,18%	2.506.858.000	21,74%	2.565.255.000	3,69%	2.691.225.000	3,69%	7.763.338.000	BPPRD

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
P5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Wilayah, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	n/a	100%	19.364.141.355	100%	20.735.161.870	100%	21.136.665.108	100%	61.235.968.333	Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	n/a	100%		100%		100%		100%		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	n/a	100%		100%		100%		100%		
P6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan daerah	91,02%	100,00%	1.752.564.530	100,00%	1.322.617.757	100,00%	994.998.644	100,00%	4.070.180.931	BAPPEDA
P7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan program perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	231.801.291	100,00%	243.391.356	100,00%	255.560.923	100,00%	730.753.570	BAPPEDA
		Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	181.557.342	100,00%	190.635.209	100,00%	200.166.970	100,00%	572.359.521	
		Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan program perencanaan pembangunan daerah	98,00%	100,00%	152.603.105	100,00%	160.233.260	100,00%	168.244.923	100,00%	481.081.287	
P8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan / pemeriksaan	39,67%	70,00%	365.000.000	80,00%	520.500.000	90,00%	550.000.000	90,00%	1.435.500.000	Inspektorat
P9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	n/a	84,00%	400.000.000	85,00%	410.000.000	86,00%	435.000.000	86,00%	1.245.000.000	Inspektorat
P10	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	n/a	60,00%	290.000.000	65,00%	250.000.000	70,00%	260.000.000	70,00%	800.000.000	DISKOMINFO
P11	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terintegrasinya Sistem Infomasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	96,87%	97,00%	5.846.000.000	98,00%	5.285.000.000	99,00%	5.730.800.000	99,00%	16.861.800.000	DISKOMINFO
P12	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan data statistik sektoral	100%	100%	390.000.000	100%	290.000.000	100%	340.000.000	100%	1.020.000.000	DISKOMINFO
P13	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	100%	100%	1.725.500.000	100%	1.035.000.000	100%	1.095.000.000	100%	3.855.500.000	DISKOMINFO

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
P14	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.	100,00%	100,00%	8.422.500.000	100,00%	7.502.500.000	100,00%	8.038.455.700	100,00%	23.963.455.700	SATPOLPP
P15	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	91,77%	100,00%	126.756.000	100,00%	150.000.000	100,00%	450.000.000	100,00%	726.756.000	BPBD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	91,77%	100,00%	1.149.897.000	100,00%	1.175.000.000	100,00%	1.175.000.000	100,00%	3.499.897.000	
		Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%	100,00%	2.110.650.910	100,00%	2.110.650.910	100,00%	2.110.650.910	100,00%	6.331.952.730	
P16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00%	100,00%	1.751.357.300	100,00%	1.796.114.600	100,00%	1.796.114.600	100,00%	5.343.586.500	BPBD
P17	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100,00%	100,00%	2.020.000.000	100,00%	2.161.400.000	100,00%	2.183.014.000	100,00%	6.364.414.000	Kesbangpol
P18	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100,00%	100,00%	23.088.917.900	100,00%	1.717.725.000	100,00%	1.720.935.000	100,00%	26.527.577.900	Kesbangpol
P19	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100,00%	100,00%	1.420.000.000	100,00%	1.519.400.000	100,00%	1.534.594.000	100,00%	4.473.994.000	Kesbangpol
P20	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100,00%	100,00%	1.530.000.000	100,00%	1.637.300.000	100,00%	1.653.673.000	100,00%	4.820.973.000	Kesbangpol
S2	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	7544,00%	71-80 (Sedang)		71-80 (Sedang)		71-80 (Sedang)		71-80 (Sedang)		
P1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Sesuai Ketentuan	100,00%	100,00%	5.332.563.677	100,00%	5.098.809.124	100,00%	5.035.183.338	100,00%	15.466.556.139	BKPSDM
P2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	46,00%	65,00%	4.233.741.460	75,00%	4.675.000.000	80,00%	4.775.000.000	80,00%	13.683.741.460	BKPSDM
T4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,25	69,25		69,26		69,27		69,27		
S1	Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,25	69,25		69,26		69,27		69,27		
P1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100,00%	100,00%	1.200.000.000	100,00%	452.500.000	100,00%	855.062.500	100,00%	2.507.562.500	Dinas Lingkungan Hidup
P2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	29,41%	25,00%	5.441.006.878	27,00%	5.520.875.962	30,00%	5.824.114.005	30,00%	16.785.996.845	Dinas Lingkungan Hidup
P3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	47,79%	40,48%	525.000.000	100,00%	470.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	1.495.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
P4	Program Pengendalian Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Limbah B3	62,00%	65,00%	88.052.300	65,00%	90.253.608	65,00%	92.509.948	55,00%	270.815.855	Dinas Lingkungan Hidup
P5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	28,00%	39,00%	220.000.000	43,00%	245.000.000	46,00%	270.000.000	46,00%	735.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
P6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Karifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rekomendasi Calon MHA	30,00%	2 Calon MHA	246.242.890	2 Calon MHA	278.898.962	2 Calon MHA	311.621.436	6 Calon MHA	836.763.289	Dinas Lingkungan Hidup
P7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	35 kelompok	58 kelompok	345.000.000	78 kelompok	355.000.000	98 kelompok	365.000.000	100,00%	1.065.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
P8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
P9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	69,43%	60,00%	9.923.022.701	65,00%	9.215.348.268	70,00%	10.132.481.975	70,00%	29.270.852.944	Dinas Lingkungan Hidup
					791.884.212.802		824.107.478.660		789.181.131.357		2.405.172.822.819	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif serta perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Pembangunan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Belitung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan											
1	01	01	Pendidikan										
1	01	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	186.002.072.215	100,00%	191.582.134.381	100,00%	197.329.598.413	100,00%	574.913.805.009,34
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	61,41%	62,00%	235.000.000	65,00%	242.050.000	70,00%	249.311.500	78,00%	726.361.500,00
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	1.684.321.000	100,00%	1.734.850.630	100,00%	1.786.896.149	100,00%	5.206.067.778,90
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	2.323.643.265	100,00%	1.920.852.563	100,00%	1.404.253.140	100,00%	5.648.748.967,79
1	01	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan									
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,68%	100%	76.941.577.000	100%	79.249.824.310	100%	81.627.319.039	100%	237.818.720.349
				Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	80,11%	100%	9.016.123.000,00	100%	9.286.606.690	100%	9.565.204.891	100,00%	27.867.934.581
				Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS)	100%	100%	4.177.033.000	100%	4.302.343.990	100%	4.431.414.310	100%	12.910.791.300
1	01	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
				Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	54,61%	59,41%	550.000.000	69,41%	566.500.000	79,41%	583.495.000	79,41%	1.699.995.000
1	01	02		Kesehatan									
1	01	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	95.221.131.222	100,00%	102.799.577.800,88	100,00%	111.384.097.764,50	100,00%	309.404.806.787
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,00%	75,00%	364.910.000	75,00%	679.338.200,00	75,00%	706.644.964,00	75,00%	1.750.893.164
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	10.435.825.748	100,00%	12.429.080.194,24	100,00%	12.930.419.452,07	100,00%	35.795.325.394
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	7.020.358.755	100,00%	15.510.536.928,60	100,00%	15.904.765.469,17	100,00%	38.435.661.153

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase pelayanan BLUD	-	100,00%	59.467.083.371	100,00%	60.644.519.724,42	100,00%	61.854.410.118,91	100,00%	181.966.013.214		
1	01 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			159.456.033.756,00		174.676.556.619,82		168.577.761.758,82		502.710.352.134,64	Dinas Kesehatan	
		Puskesmas terakreditasi Madya	66,67%	100,00%	106.806.725.756	100,00%	107.039.981.669,82	100,00%	109.116.875.309,82	100,00%	322.963.582.736		
		Rumah sakit kelas B berstandar internasional	10,00%	40,00%	52.649.308.000	60,00%	67.636.574.950,00	80,00%	59.460.886.449,00	80,00%	179.746.769.399		
1	01 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100%	100%	3.050.902.695,00	100%	3.135.529.858,50	100%	3.224.099.565,27	100%	9.410.532.119	Dinas Kesehatan
1	01 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tersedianya sediaan farmasi alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT	100%	100%	188.527.000,00	100%	207.991.260,00	100%	212.151.085,20	100%	608.669.345	Dinas Kesehatan
1	01 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			1.141.390.735,00		1.164.218.549,70		1.187.502.920,69		3.493.112.205,39	Dinas Kesehatan	
		1. Persentase Rumah Tangga yang berPHBS	56,40%	66,60%	837.882.985,00	77%	854.640.644,70	88%	871.733.457,59	88%	2.564.257.087		
		2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	85%	90%	303.507.750,00	95%	309.577.905,00	100%	315.769.463,10	100%	928.855.118		
1	01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			182.966.687.000		219.348.928.000		177.920.075.000		580.235.690.000		
1	01 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			14.123.012.000		13.366.012.000		13.369.112.000		40.858.136.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	10.820.012.000	100,00%	10.820.912.000	100,00%	10.821.812.000	100,00%	32.462.736.000		
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	66,37%	67,00%	340.100.000	69,00%	340.500.000	71,00%	340.900.000	71,00%	1.021.500.000		
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	1.454.900.000	100,00%	1.456.000.000	100,00%	1.457.100.000	100,00%	4.368.000.000		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	1.508.000.000	100,00%	748.600.000	100,00%	749.300.000	100,00%	3.005.900.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	01	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik	43,03%	49,91%	17.301.370.000	52,82%	15.185.370.000	57,03%	14.509.570.000	57,03%	46.996.310.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	16,52%	18,30%	9.832.100.000	19,75%	11.264.375.000	21,51%	13.189.015.000	21,51%	34.285.490.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	n/a	8,20%	3.800.000.000	8,69%	3.800.000.000	9,16%	3.800.000.000	9,16%	11.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	20,02%	22,00%	1.800.000.000	29,59%	1.800.000.000	39,57%	1.800.000.000	39,57%	5.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	07	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	n/a	4,79%	2.270.000.000	5,22%	2.270.000.000	5,64%	2.270.000.000	5,64%	6.810.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	08	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungannya	15%	33,33%	300.000.000	46,67%	500.000.000	60,0%	500.000.000	60,00%	1.300.000.000	
1	01	03	09	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan standar kabupaten	26,75%	28,25%	129.561.001.000	29,00%	167.857.147.000	29,76%	125.025.251.000	29,76%	422.443.399.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60,00%	60,00%	1.744.204.000	60,00%	1.276.024.000	60,00%	1.377.127.000	60,00%	4.397.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	98,24%	100,00%	2.235.000.000	100,00%	2.030.000.000	100,00%	2.080.000.000	100%	6.345.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	04		Perumahan dan Kawasan Permukiman				25.750.947.000,00		27.080.929.000		28.816.499.000		81.648.375.000	
1	01	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	n/a	100%	369.950.000	100%	386.945.000	100%	405.640.000	100%	1.162.535.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	0,34%	0,20%	12.747.430.000	0,18%	13.514.500.000	0,16%	14.478.789.000	0,16%	40.740.719.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	4	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,66%	99,80%	1.301.454.000	99,82%	1.564.068.000	99,84%	2.026.269.000	99,84%	4.891.791.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	44,90%	66,02%	11.332.113.000	69,84%	11.615.416.000	73,66%	11.905.801.000	73,66%	34.853.330.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	05		Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				28.489.469.610		35.104.007.510		29.163.063.210		92.756.540.330	
1	01	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.510.500.000		10.046.500.000		10.269.600.000		30.826.600.000	SATPOLPP
					Persentase dokumen perencanaan anggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	6.508.000.000	100,00%	6.608.000.000	100,00%	6.708.000.000	100,00%	19.824.000.000	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	75,00%	1.105.500.000	75,44%	1.180.500.000	75,44%	1.180.500.000	75,44%	3.466.500.000	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	722.000.000	100,00%	773.000.000	100,00%	841.100.000	100,00%	2.336.100.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	2.175.000.000	100,00%	1.485.000.000	100,00%	1.540.000.000	100,00%	5.200.000.000		
1	01	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.417.808.400		12.323.242.000		5.323.242.000		22.064.292.400	BPBD
		Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	2.981.972.000	100,00%	3.788.762.000	100,00%	3.788.762.000	100,00%	10.559.496.000		
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	66,67%	75,00%	225.000.000	75,00%	225.000.000	75,00%	225.000.000	75,00%	675.000.000		
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	646.856.400	100,00%	700.500.000	100,00%	700.500.000	100,00%	2.047.856.400		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	563.980.000	100,00%	7.608.980.000	100,00%	608.980.000	100,00%	8.781.940.000		
1	01	05	02	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan ketertarikan dan ketertiban umum.	8.422.500.000	100,00%	7.502.500.000	100,00%	8.038.455.700	100,00%	23.963.455.700	SATPOLPP
1	01	05	03	Program Penanggulangan Bencana		3.387.303.910		3.435.650.910		3.735.650.910		10.558.605.730	BPBD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	91,77%	100,00%	126.756.000	100,00%	150.000.000	100,00%	450.000.000	100,00%	726.756.000		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	91,77%	100,00%	1.149.897.000	100,00%	1.175.000.000	100,00%	1.175.000.000	100,00%	3.499.897.000		
		Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%	100,00%	2.110.650.910	100,00%	2.110.650.910	100,00%	2.110.650.910	100,00%	6.331.952.730		
1	01	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.751.357.300	100,00%	1.796.114.600	100,00%	1.796.114.600	100,00%	5.343.586.500	BPBD
1	01	06		Sosial		25.911.659.318		13.775.821.673		12.950.323.825		52.637.804.816	
1	01	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		21.979.445.988		9.414.358.579		8.101.047.935		39.494.852.502	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	4.599.184.888	100,00%	5.613.896.272	100,00%	5.745.765.395	100,00%	15.958.846.555		
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78,80%	78,80%	120.950.000	78,82%	251.700.000	78,85%	247.000.000	78,85%	619.650.000		
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	762.217.000	100,00%	868.657.400	100,00%	908.973.140	100,00%	2.539.847.540		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	16.497.094.100	100,00%	2.680.104.907	100,00%	1.199.309.400	100,00%	20.376.508.407		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	01	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100,00%	100,00%	652.612.350	100,00%	731.873.585	100,00%	806.560.944	100,00%	2.191.046.879	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	01	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	100,00%	100,00%	54.477.500	100,00%	59.925.250	100,00%	65.917.775	100,00%	180.320.525	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	01	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100,00%	100,00%	1.242.015.740	100,00%	1.356.834.490	100,00%	1.474.684.425	100,00%	4.073.534.655	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	01	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	97,25%	100,00%	1.105.194.750	100,00%	1.252.125.480	100,00%	1.442.338.028	100,00%	3.799.658.258	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	01	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	100,00%	100,00%	633.312.990	100,00%	696.644.289	100,00%	765.308.718	100,00%	2.095.265.997	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	01	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	100,00%	100,00%	244.600.000	100,00%	264.060.000	100,00%	294.466.000	100,00%	803.126.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02			Tidak Terkait Pelayanan Dasar											
2	02	07		Tenaga Kerja				715.304.000		788.000.000		844.000.000		2.347.304.000	
2	02	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	-	17,00%	384.772.000	21,00%	420.000.000	25,00%	450.000.000	25,00%	1.254.772.000	Dinas KUKMPTK
2	02	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	-	20,00%	158.090.000	25,00%	164.000.000	30,00%	170.000.000	30,00%	492.090.000	Dinas KUKMPTK
2	02	07	05	Program Hubungan Industrial	Harmonisasi Hubungan Industrial	-	100,00%	172.442.000	100,00%	204.000.000	100,00%	224.000.000	100,00%	600.442.000	Dinas KUKMPTK
2	02	08		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.444.294.519		1.586.343.971		1.742.275.368		4.772.913.858	
2	02	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	35,75%	36,00%	562.727.520	36,25%	617.870.272	36,50%	678.204.299	36,50%	1.858.802.091	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	100,00%	100,00%	300.000.000	100,00%	327.000.000	100,00%	362.700.000	100,00%	989.700.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani	100,00%	100,00%	43.529.158	100,00%	46.632.073	100,00%	50.045.280	100,00%	140.206.511	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	55,80%	65,00%	48.637.842	70,00%	53.501.626	75,00%	58.851.789	75,00%	160.991.257	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024								Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Target	Rp.	Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
2	02 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Pratama	Madya	437.000.000	Madya	480.700.000	Madya	528.770.000	Madya	1.446.470.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	02 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100,00%	100,00%	52.400.000	100,00%	60.640.000	100,00%	63.704.000	100,00%	176.744.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	02 09	Pangan				481.696.000		463.385.000		493.878.000		1.438.959.000		
2	02 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	97,50%	95,70%	321.276.000	95,70%	283.881.000	95,70%	300.374.000	95,70%	905.531.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	02 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan.	14,29%	2,00%	60.420.000	2,00%	69.504.000	2,00%	73.504.000	6,00%	203.428.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	02 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan	90,91%	89,29%	100.000.000	89,29%	110.000.000	89,29%	120.000.000	89,29%	330.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	02 10	Pertanahan				103.821.500		153.000.000		156.060.000		412.881.500		
2	02 10 01	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	n/a	100%	103.821.500	100%	153.000.000	100%	156.060.000	100%	412.881.500	Sekretariat Daerah	
2	02 11	Lingkungan Hidup				26.172.479.115		30.539.722.504		26.443.831.711		83.156.033.329		
2	02 11 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8.134.154.345,50		13.861.845.704,14		8.043.041.846,74		30.039.041.896,38	Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	5.828.263.002	100,00%	5.973.969.577	100,00%	6.123.318.816	100,00%	17.925.551.395,53		
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	69,70%	75,00%	273.062.500	80,00%	287.139.063	82,00%	301.317.539	82,00%	861.519.102		
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	661.011.668,50	100,00%	694.036.960	100,00%	729.537.884	100,00%	2.084.586.513		
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	1.371.817.175	100,00%	6.906.700.104	100,00%	888.867.607	100,00%	9.167.384.886		
2	02 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100,00%	100,00%	1.200.000.000	100,00%	452.500.000	100,00%	855.062.500	100,00%	2.507.562.500	Dinas Lingkungan Hidup	
2	02 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	29,41%	25,00%	5.441.006.878,20	27,00%	5.520.875.961,78	30,00%	5.824.114.005,25	30,00%	16.785.996.845	Dinas Lingkungan Hidup	
2	02 11 04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	47,79%	40,48%	525.000.000	100,00%	470.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	1.495.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	02 11 05	Program Pengendalian Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Limbah B3	62,00%	65,00%	88.052.300	65,00%	90.253.608	65,00%	92.509.947,69	65,00%	270.815.855,19	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024								Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2024		2025		2026		Target	Rp.	Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
2	02	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	28,00%	39,00%	220.000.000	43,00%	245.000.000	46,00%	270.000.000	46,00%	735.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	02	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Karifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rekomendasi Calon MHA	30,00%	2 Calon MHA	246.242.890	2 Calon MHA	278.898.962	2 Calon MHA	311.621.436,31	6 Calon MHA	836.763.289	Dinas Lingkungan Hidup
2	02	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	35 kelompok	58 kelompok	345.000.000	78 kelompok	355.000.000	98 kelompok	365.000.000	98 kelompok	1.065.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	02	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	02	11	11	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	69,43%	60,00%	9.923.022.701	65,00%	9.215.348.268	70,00%	10.132.481.975	70,00%	29.270.852.943,97	Dinas Lingkungan Hidup
2	02	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				10.157.841.450		8.693.302.690		8.814.246.690	27.665.390.830		
2	02	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.156.391.320		6.899.224.720		6.976.006.720		22.031.622.760	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	4.866.592.120	100,00%	4.870.092.120	100,00%	4.868.092.120	100,00%	14.604.776.360	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,00%	81,50%	196.500.000	82,00%	202.000.000	82,50%	202.000.000	83,00%	600.500.000	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	1.030.085.000	100,00%	1.116.200.000	100,00%	1.141.700.000	100,00%	3.287.985.000	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	2.063.214.200	100,00%	710.932.600	100,00%	764.214.600	100,00%	3.538.361.400	
2	02	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian pendaftaran penduduk	84,36%	76,00%	1.298.269.670	78%	1.117.842.970	80%	1.125.009.970	80%	3.541.122.610	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	02	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	93%	95%	554.992.200	95%	488.290.000	95%	525.285.000	96%	1.568.567.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	02	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data	100%	100%	81.188.260	100%	113.445.000	100%	113.445.000	100%	308.078.260	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	02	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan	100%	100%	67.000.000	100%	74.500.000	100%	74.500.000	100%	216.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	02	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				9.547.829.783,00		10.063.616.104,00		10.190.458.308,00	29.801.904.195		
2	02	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.811.833.708		6.381.195.673		6.498.957.877		19.691.987.258	DPPKBPMD	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	5.132.965.340	100,00%	5.235.477.305	100,00%	5.340.039.509	100,00%	15.708.482.154				
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	80%	115.950.000	80%	179.000.000	80%	180.000.000	80%	474.950.000				
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	639.179.368	100,00%	644.179.368	100,00%	649.179.368	100,00%	1.932.538.104				
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparaturnya	100,00%	100,00%	923.739.000	100,00%	322.539.000	100,00%	329.739.000	100,00%	1.576.017.000				
2	02	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa			1.504.446.533		2.608.835.581		2.613.835.581	6.727.117.695	DPPKBPM		
				Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku	100,00%	100,00%	1.294.738.233	100,00%	2.399.127.281	100,00%	2.404.127.281	100,00%	6.097.992.795		
				Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	26%	30%	209.708.300	35%	209.708.300	40%	209.708.300	40%	629.124.900		
2	02	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	85%	85%	1.231.549.542	87%	1.073.584.850	90%	1.077.664.850	90%	3.382.799.242	DPPKBPM
2	02	13		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			4.240.913.264,00		4.273.036.928,20		4.305.056.667,94	12.819.006.860			
2	02	13	02	Program Pengendalian Penduduk	Unmet need	11,98%	11,95%	390.779.334	11,92%	399.274.920	11,89%	406.820.419	11,89%	1.196.874.673	DPPKBPM
2	02	13	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,38%	14,50%	1.463.690.000	14,60%	1.477.969.200	14,65%	1.494.028.584	14,65%	4.435.687.784	DPPKBPM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	02	13	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	75,01%	75,05%	2.386.443.930	75,10%	2.395.792.808	75,10%	2.404.207.665	75,10%	7.186.444.403	DPPKBPM
2	02	15		Perhubungan				44.848.569.000		51.003.717.220		49.182.838.968		145.035.125.188	
2	02	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.662.646.000		10.190.212.420		10.921.977.688		31.774.836.108	Dinas Perhubungan
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	6.036.499.000	100,00%	6.637.199.000	100,00%	7.297.904.000	100,00%	19.971.602.000	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,00%	75,00%	321.650.000	75,00%	275.043.000	75,00%	280.543.860	75,00%	877.236.860	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	1.857.704.000	100,00%	1.894.857.560	100,00%	1.932.754.711	100,00%	5.685.316.271	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	2.446.793.000	100,00%	1.383.112.860	100,00%	1.410.775.117	100,00%	5.240.680.977	
2	02	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	100,00%	100,00%	29.903.923.000	100,00%	36.103.304.800	100,00%	33.114.641.280	100,00%	99.121.869.080	Dinas Perhubungan
2	02	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan	100,00%	100%	4.282.000.000	100%	4.710.200.000	100%	5.146.220.000	100%	14.138.420.000	Dinas Perhubungan
2	02	16		Komunikasi dan Informatika				15.169.591.000		13.044.091.000		13.554.891.000		41.768.573.000	
2	02	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7.598.091.000		6.724.091.000		6.729.091.000		21.051.273.000	DISKOMINFO
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	5.514.000.000	100,00%	5.514.000.000	100,00%	5.514.000.000	100,00%	16.542.000.000	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,80%	75,44%	119.000.000	75,44%	119.000.000	75,44%	119.000.000	75,44%	357.000.000	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	882.091.000	100,00%	797.091.000	100,00%	797.091.000	100,00%	2.476.273.000	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	1.083.000.000	100,00%	294.000.000	100,00%	299.000.000	100,00%	1.676.000.000	
2	02	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	100%	100%	1.725.500.000	100%	1.035.000.000	100%	1.095.000.000	100%	3.855.500.000	DISKOMINFO
2	02	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	96,87%	97,00%	5.846.000.000	98,00%	5.285.000.000	99,00%	5.730.800.000	99,00%	16.861.800.000	DISKOMINFO
2	02	17		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				10.004.337.060		10.337.692.060		9.407.132.400		29.749.161.520	
2	02	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7.755.837.060		8.202.692.060		7.814.132.400		23.772.661.520	Dinas KUKMPTK
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	5.604.642.060	100,00%	5.647.352.060	100,00%	5.817.592.400	100,00%	17.069.586.520	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	70,00%	81.000.000	70,00%	106.000.000	70,00%	103.000.000	70,00%	290.000.000				
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	969.840.000	100,00%	1.017.840.000	100,00%	1.096.340.000	100,00%	3.084.020.000				
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	1.100.355.000	100,00%	1.431.500.000	100,00%	797.200.000	100,00%	3.329.055.000				
2	02	17	05	Program Pendidikan dan Pelatihan Pengkoperasian	Persentase koperasi yang melaksanakan administrasi secara tertib	-	22,00%	138.500.000	43,00%	145.000.000	65,00%	153.000.000	65,00%	436.500.000	Dinas KUKMPTK
2	02	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat waktu	-	50,00%	350.000.000	57,00%	330.000.000	64,00%	330.000.000	64,00%	1.010.000.000	Dinas KUKMPTK
2	02	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	n/a	4,60%	1.210.000.000	6,70%	1.110.000.000	8,80%	510.000.000	8,80%	2.830.000.000	Dinas KUKMPTK
2	02	17	07	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	-	1,87%	550.000.000	1,92%	550.000.000	1,99%	600.000.000	1,99%	1.700.000.000	Dinas KUKMPTK
2	02	18		Penanaman Modal				8.672.294.130		8.845.740.012,60		9.022.654.012,85		26.540.688.155	
2	02	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7.515.294.130		7.665.600.013		7.818.912.013		22.999.806.155	DPMPTSP
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	5.004.800.000	100,00%	5.104.896.000	100,00%	5.206.993.920	100,00%	15.316.689.920	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,00%	75,44%	310.750.000	75,44%	316.965.000	75,44%	323.304.300	75,44%	951.019.300	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	897.200.000	100,00%	915.144.000	100,00%	933.446.880	100,00%	2.745.790.880	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	1.302.544.130	100,00%	1.328.595.013	100,00%	1.355.166.913	100,00%	3.986.306.055	
2	02	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor yang di Berikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50 investor	50 Investor	405.000.000	60 Investor	413.100.000	65 Investor	421.362.000	183 Investor	1.239.462.000	DPMPTSP
2	02	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	60%	100%	500.000.000	100%	510.000.000	100%	520.200.000	100%	1.530.200.000	DPMPTSP
2	02	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	n/a	80%	200.000.000	81%	204.000.000	82%	208.080.000	82%	612.080.000	DPMPTSP
2	02	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepatuhan Investor/ Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal	100%	100%	52.000.000	100%	53.040.000	100%	54.100.000	100%	159.140.000	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024								Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
2 02 19	Kepemudaan dan Olahraga				27.314.698.935,00		17.400.007.946,75		17.927.252.709,09		62.641.959.591			
2 02 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	4.813.087.700	100%	5.043.528.650	100%	5.072.149.447,50	100%	14.928.765.798	DISPORA		
		Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	3.421.000.000	100%	3.721.000.000	100%	3.721.000.000	100%	10.863.000.000			
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64%	65%	82.450.000	65%	112.380.000	66%	113.199.000	66%	308.029.000			
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	892.042.700	100%	918.718.900	100%	936.949.210	100%	2.747.710.810			
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	417.595.000	100%	291.429.750	100%	301.001.238	100%	1.010.025.988			
2 02 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77,88%	78%	1.019.761.000	78%	1.078.249.050	79%	1.139.161.502,50	79%	3.237.171.553	DISPORA		
2 02 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan prestasi olahraga	-	75%	20.881.850.235	80%	10.438.230.246,75	85%	10.833.941.759,09	85%	42.154.022.241	DISPORA		
2 02 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Organisasi yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	600.000.000	1 Organisasi	840.000.000	1 Organisasi	882.000.000	1 Organisasi	2.322.000.000	DISPORA		
2 02 20	Statistik				390.000.000		290.000.000		340.000.000		1.020.000.000			
2 02 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan data statistik sektorial	100%	100%	390.000.000	100%	290.000.000	100%	340.000.000	100%	1.020.000.000	DISKOMINFO		
2 02 21	Persandian				290.000.000		250.000.000		260.000.000		800.000.000			
2 02 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	n/a	60%	290.000.000	65%	250.000.000	70%	260.000.000	70%	800.000.000	DISKOMINFO		
2 02 22	Kebudayaan				7.335.414.000,00		7.555.476.420,00		7.782.140.712,60		22.673.031.133			
2 02 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	n/a	25%	1.338.652.000	54%	1.378.811.560	100%	1.420.175.907	100%	4.137.639.467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2 02 22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	n/a	50%	195.000.000	60%	200.850.000	75%	206.875.500	75%	602.725.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2 02 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah Lokal yang didokumentasikan	1 objek	2 objek	403.680.000	2 objek	415.790.400	2 objek	428.264.112	6 Objek	1.247.734.512	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2 02 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	n/a	30%	540.000.000	60%	556.200.000	80%	572.886.000	80%	1.669.086.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2 02 22 06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	n/a	50%	4.858.082.000	60%	5.003.824.460	70%	5.153.939.194	70%	15.015.845.654	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2	02	23													
			Perpustakaan												
2	02	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.533.420.600	100%	5.923.245.600	100%	6.645.477.600	100%	18.102.143.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	3.866.000.000	100,00%	4.249.700.000	100,00%	4.674.520.000	100,00%	12.790.220.000		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,00%	79,00%	167.000.000	82,00%	183.700.000	85,00%	202.070.000	85,00%	552.770.000		
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	455.000.000	100,00%	456.500.000	100,00%	550.550.000	100,00%	1.462.050.000		
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	1.045.420.600	100,00%	1.033.345.600	100,00%	1.218.337.600	100,00%	3.297.103.800		
2	02	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	11000	12500	5.658.750.000	13500	1.175.125.000	14500	1.520.384.355	14500	8.354.259.355	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	02	24		Kearsipan											
2	02	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Objek Pembinaan Arsip Yang Telah Menerapkan Kaidah Kearsipan	50%	100%	290.205.000	100%	393.800.000	100%	377.080.000	100%	1.061.085.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	3			Urusan Pilihan											
1	03	25		Kelautan dan Perikanan											
1	03	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										Dinas Perikanan	
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	6.521.000.000	100,00%	6.571.800.000	100,00%	6.622.600.000	100,00%	19.715.400.000		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	79,44%	80%	117.000.000	80%	150.000.000	80%	132.000.000	80%	399.000.000		
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	889.000.000	100,00%	951.000.000	100,00%	1.002.000.000	100,00%	2.842.000.000		
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	1.280.500.000	100,00%	1.260.500.000	100,00%	595.000.000	100,00%	3.136.000.000		
1	03	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	43.021,5	43.100	12.760.000.000	43.200	13.371.200.000	43.300	13.384.604.000	129.600	39.515.804.000	Dinas Perikanan
1	03	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	154,59	170	1.490.000.000	175	1.565.000.000	180	1.495.000.000	525	4.550.000.000	Dinas Perikanan
1	03	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	7,01%	7,02%	451.700.000	7,04%	460.800.000	7,06%	470.000.000	7,06%	1.382.500.000	Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 03 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	8.968,00	9.000	2.200.000.000	9.050	1.200.000.000	9.100	1.200.000.000	27.150	4.600.000.000	Dinas Perikanan
1 03 26	Pariwisata				29.552.674.680,00		30.886.016.809,25		31.928.011.152,05		92.366.702.641,30	
1 03 26 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7.596.151.730		8.086.015.556		8.330.009.854,94		24.012.177.141	Dinas Pariwisata
		Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	6.111.451.000	100%	6.325.351.785	100%	6.546.739.097,475	100%	18.983.541.882,48	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,00%	75,00%	212.000.000	75,00%	212.000.000	75,00%	212.000.000	75,00%	636.000.000	
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	908.274.730	100,00%	1.161.782.861	100,00%	1.177.709.015,62	100,00%	3.247.766.607	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	364.426.000	100,00%	386.880.910	100,00%	393.561.741,85	100,00%	1.144.868.652	
1 03 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	80,00%	77,65%	15.094.533.200	80,00%	15.697.841.862	82,35%	16.247.266.327,17	84,71%	47.039.641.389,17	Dinas Pariwisata
1 03 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100,00%	100%	4.397.320.000	100%	4.551.226.200	100%	4.710.519.117	100%	13.659.065.317	Dinas Pariwisata
1 03 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	63,50%	84,80%	2.464.669.750	90,00%	2.550.933.191,25	95,00%	2.640.215.852,94	95,00%	7.655.818.794,19	Dinas Pariwisata
1 03 27	Pertanian				30.716.069.500		31.018.726.655		32.402.027.318		94.136.823.473	
1 03 27 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				21.960.500.400		21.934.755.400		22.960.758.900		66.856.014.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	18.251.029.400	100,00%	19.163.329.400	100,00%	20.120.829.400	100,00%	57.535.188.200	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,00%	75,00%	206.500.000	75,00%	208.500.000	75,00%	211.500.000	75,00%	626.500.000	
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	590.303.000	100,00%	628.217.000	100,00%	664.126.000	100,00%	1.882.646.000	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	2.912.668.000	100,00%	1.934.709.000	100,00%	1.964.303.500	100,00%	6.811.680.500	
1 03 27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kebutuhan sarana pertanian	12,44%	14,00%	1.946.634.850	14,70%	2.085.511.193	15,00%	2.332.140.002	15,00%	6.364.286.045	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1 03 27 03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				5.640.000.000		5.730.000.000		5.730.000.000		17.100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase prasarana yang digunakan	23,05	23,64%	410.000.000	24,62%	400.000.000	25,60%	400.000.000	25,60%	1.210.000.000	
		Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	68,30	77%	5.230.000.000	80%	5.330.000.000	84%	5.330.000.000	84%	15.890.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	03	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase (%) penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%	100%	300.277.250	100%	318.469.063	100%	336.157.416	100%	954.903.728	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	03	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan bencana pertanian	100%	100%	252.679.000	100%	303.215.000	100%	363.858.000	100%	919.752.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	03	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase (%) usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	100%	75.023.000	100%	78.774.000	100%	82.712.000	100%	236.509.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	03	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	30 kelembagaan petani	35 kelembagaan petani	540.955.000	40 kelembagaan petani	568.002.000	45 kelembagaan petani	45 kelembagaan petani	596.401.000	1.705.358.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	03	28		Kehutanan				940.000.000		268.000.000		516.000.000		1.724.000.000	
1	03	28	02	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase Pengelolaan Tahura	n/a	16,67%	940.000.000	26,67%	268.000.000	33,33%	516.000.000	33,33%	1.724.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
1	03	30		Perdagangan				963.000.000		2.527.000.000		983.000.000		4.473.000.000	
1	03	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Refresentatif	2	2	490.000.000	2	470.000.000	2	490.000.000	2	1.450.000.000	Dinas KUKMPTK
1	03	30	04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	100%	100%	80.000.000	100%	84.000.000	100%	90.000.000	100%	254.000.000	Dinas KUKMPTK
1	03	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Tera / tera ulang sesuai standar	90,81%	80%	333.000.000	82%	1.908.000.000	84%	333.000.000	95%	2.574.000.000	Dinas KUKMPTK
1	03	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Taat Aturan	-	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	195.000.000	Dinas KUKMPTK
1	03	31		Perindustrian				710.000.000		724.200.000		738.684.000		2.172.884.000	
1	03	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	40 IKM	40 IKM	710.000.000	45 IKM	724.200.000	50 IKM	738.684.000	135 IKM	2.172.884.000	DPMPSTPP
1	04			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
1	04	01		Sekretariat Daerah				77.134.171.035		80.102.750.545,26		83.436.150.253,40		240.673.071.834	
1	04	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				53.270.438.903		54.967.345.358,36		57.811.236.962,14		166.049.021.224	Sekretariat Daerah
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	23.027.477.856	100,00%	24.340.743.097	100,00%	26.879.733.133	100,00%	74.247.954.086	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64,59%	70,00%	361.000.000	71,00%	405.000.000	72,00%	406.500.000	72,00%	1.172.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	6.706.892.050	100,00%	8.114.297.028	100,00%	8.223.270.968	100,00%	23.044.460.046				
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	17.565.925.327	100,00%	15.570.830.447	100,00%	15.644.061.330	100,00%	48.780.817.104				
		Persentase pelayanan administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100,00%	100,00%	5.609.143.670	100,00%	6.536.474.786	100,00%	6.657.671.532	100,00%	18.803.289.988				
1	04	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	n/a	100%	19.364.141.355	100%	20.735.161.870	100%	21.136.665.108	100%	61.235.968.333	Sekretariat Daerah
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	n/a	100%		100%		100%		100%		
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	n/a	100%		100%		100%		100%		
1	04	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	n/a	80%	4.499.590.777	85%	4.400.243.317	90%	4.488.248.183	90%	13.388.082.277	Sekretariat Daerah
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	n/a	100%		100%		100%		100%		
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti	n/a	100%		100%		100%		100%		
1	04	02		Sekretariat DPRD				39.443.409.210,00		42.025.225.750,00		44.295.925.750,00		125.764.560.710	
1	04	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				24.913.796.500		25.772.189.000		27.042.889.000		77.728.874.500	Sekretariat DPRD
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	4.211.848.000	100,00%	4.362.958.000	100,00%	4.512.958.000	100,00%	13.087.764.000	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65,10%	75,44%	216.800.000	75,44%	336.400.000	75,44%	336.400.000	75,44%	889.600.000	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	2.440.955.000	100,00%	2.507.500.000	100,00%	2.657.700.000	100,00%	7.606.155.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	1.510.150.000	100,00%	1.864.650.000	100,00%	2.497.650.000	100,00%	5.872.450.000				
		Persentase Pelayanan Administrasi DPRD	93,83%	100,00%	16.534.043.500	100,00%	16.700.681.000	100,00%	17.038.181.000	100,00%	50.272.905.500				
1	04	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	14.529.612.710	100%	16.253.036.750	100%	17.253.036.750	100%	48.035.686.210	Sekretariat DPRD
1	05			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
1	05	01		Perencanaan				27.255.936.604,50		20.864.608.435,08		19.852.538.857,03		67.973.083.897	
1	05	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				24.937.410.337,00		18.947.730.853,85		18.233.567.396,54		62.118.708.587	BAPPEDA
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	8.339.489.483	100,00%	8.756.526.327,2	100,00%	9.194.415.013,51	100,00%	26.290.430.824	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	71,00%	75,00%	303.300.000	75,00%	318.465.000	75,00%	334.388.250	75,00%	956.153.250	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	1.382.915.854	100,00%	1.440.449.276,70	100,00%	1.500.859.370,54	100,00%	4.324.224.501	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	14.911.705.000	100,00%	8.432.290.250	100,00%	7.203.904.762,50	100,00%	30.547.900.013	
1	05	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan daerah	91,02%	100%	1.752.564.530	100%	1.322.617.756,50	100%	994.998.644,33	100%	4.070.180.931	BAPPEDA
1	05	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				565.961.737,50		594.259.824,73		623.972.816,16		1.784.194.378	BAPPEDA
					Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	231.801.291	100%	243.391.356	100%	255.560.923	100%	730.753.570	
					Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	181.557.342	100%	190.635.209	100%	200.166.970,45	100%	572.359.521	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan program perencanaan pembangunan daerah	98%	100%	152.603.104,50	100%	160.233.259,73	100%	168.244.922,71	100%	481.081.287	
1	05 02	Keuangan			134.418.565.950		141.401.813.850		147.413.611.600		423.233.991.400	
1	05 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.664.676.200		10.247.055.850		10.595.704.900		30.507.436.950	BPKAD
		Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	6.925.094.400	100,00%	7.271.332.300	100,00%	7.634.898.700	100,00%	21.831.325.400	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	75%	109.500.000	75%	115.000.000	75%	121.000.000	75%	345.500.000	
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	1.811.081.800	100,00%	1.867.454.550	100,00%	1.957.223.200	100,00%	5.635.759.550	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	819.000.000	100,00%	993.269.000	100,00%	882.583.000	100,00%	2.694.852.000	
1	05 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			11.559.428.000		12.254.760.000		12.875.725.000		36.689.913.000	BPPRD
		Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	8.254.650.000	100,00%	8.524.460.000	100,00%	8.760.275.000	100,00%	25.539.385.000	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	75%	55.000.000	75%	63.500.000	75%	75.500.000	75%	194.000.000	
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	2.739.003.000	100,00%	3.023.900.000	100,00%	3.327.250.000	100,00%	9.090.153.000	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	510.775.000	100,00%	642.900.000	100,00%	712.700.000	100,00%	1.866.375.000	
1	05 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			108.559.576.000		113.987.784.350		119.414.303.500		341.961.663.850	BPKAD
1	05 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			283.284.000		435.000.000		462.000.000		1.180.284.000	BPPRD
1	05 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.844.743.750		1.911.958.650		1.374.653.200		5.131.355.600	BPKAD
1	05 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.506.858.000		2.565.255.000		2.691.225.000		7.763.338.000	BPPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	05	03										
1	05	03	01									BKPSDM
1	05	03	02									BKPSDM
1	05	04										
1	05	04	02									BKPSDM
1	05	04										
1	05	05	02									BAPPEDA
1	06											
1	06	01										
1	06	01	01									Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	06	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan / pemeriksaan	39,67%	70%	365.000.000	80%	520.500.000	90%	550.000.000	90%	1.435.500.000	Inspektorat
1	06	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	n/a	84%	400.000.000	85%	410.000.000	86%	435.000.000	86%	1.245.000.000	Inspektorat
1	07			Unsur Wilayah											
1	07	01		Kecamatan				41.987.203.488,00		43.839.307.026,00		45.802.078.804,50		131.628.589.319	
1	07	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				16.324.863.000		17.588.794.300		19.055.155.400		52.968.812.700	Kecamatan Tanjungpandan
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	11.036.000.000	100,00%	12.040.500.000	100,00%	13.044.500.000	100,00%	36.121.000.000	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	76,00%	389.500.000	77,00%	449.000.000	77,00%	499.500.000	77,00%	1.338.000.000	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	2.713.366.400	100,00%	2.898.395.800	100,00%	3.074.145.800	100,00%	8.685.908.000	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	2.185.996.600	100,00%	2.200.898.500	100,00%	2.437.009.600	100,00%	6.823.904.700	
1	07	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.779.764.148		3.568.349.633		4.048.987.217		11.397.100.998	Kecamatan Badau
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	1.981.028.624	100,00%	1.937.099.483	100,00%	1.994.852.467	100,00%	5.912.980.574	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	57,79%	75,44%	52.000.000	75,44%	62.000.000	75,44%	72.000.000	75,44%	186.000.000	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	292.352.324	100,00%	309.933.950	100,00%	322.959.550	100,00%	925.245.824	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	1.454.383.200	100,00%	1.259.316.200	100,00%	1.659.175.200	100,00%	4.372.874.600	
1	07	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.499.500.000		5.127.200.000		4.658.000.000		14.284.700.000	Kecamatan Sijuk
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	3.016.500.000	100,00%	3.215.000.000	100,00%	3.315.000.000	100,00%	9.546.500.000	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	75,00%	109.500.000	75,00%	109.500.000	75,00%	109.500.000	75,00%	328.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	599.500.000	100,00%	578.000.000	100,00%	586.500.000	100,00%	1.764.000.000						
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	774.000.000	100,00%	1.224.700.000	100,00%	647.000.000	100,00%	2.645.700.000						
1	07	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.902.524.000		3.528.000.000		3.368.000.000		10.798.524.000	Kecamatan Membalong	
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	2.538.524.000	100,00%	2.665.000.000	100,00%	2.665.000.000	100,00%	7.868.524.000				
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,00%	75,44%	34.000.000	75,44%	34.000.000	75,44%	34.000.000	75,44%	102.000.000				
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	482.000.000	100,00%	506.000.000	100,00%	506.000.000	100,00%	1.494.000.000				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	848.000.000	100,00%	323.000.000	100,00%	163.000.000	100,00%	1.334.000.000				
1	07	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.152.016.000		5.244.222.250,00		5.357.718.187,50		15.753.956.438	Kecamatan Selat Nasik	
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	1.486.097.000	100,00%	1.560.251.850	100,00%	1.638.114.443	100,00%	4.684.463.293				
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	75,00%	45.000.000	75,00%	36.750.000	75,00%	38.587.500	75,00%	120.337.500				
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	430.594.000	100,00%	443.379.150	100,00%	455.803.558	100,00%	1.329.776.708				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	3.190.325.000	100,00%	3.203.841.250	100,00%	3.225.212.688	100,00%	9.619.378.938				
1	07	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	1.436.586.000	100%	1.497.986.000	100%	1.547.386.000	100%	4.481.958.000		4.481.958.000	Kecamatan Tanjungpandan
1	07	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan											Kecamatan	
						100%	100%	2.850.587.725	100%	3.004.498.600	100%	3.247.998.600	100%	9.103.084.925		9.103.084.925	Kecamatan Tanjungpandan
						100%	100%	245.955.335	100%	251.915.893	100%	275.932.800	100%	773.804.028		773.804.028	Kecamatan Badau
						n/a	85%	302.325.000	90%	302.325.000	0%	302.325.000	90%	906.975.000		906.975.000	Kecamatan Sijuk

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			100%	100%	232.000.000	100%	254.000.000	100%	254.000.000	100%	740.000.000	Kecamatan Membalong			
			100%	100%	272.639.000	100%	285.371.450	100%	299.640.023	100%	857.650.473	Kecamatan Selat Nasik			
1	07	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum							Kecamatan			
						100%	100%	827.352.280	100%	898.943.350	100%	1.008.000.000	100%	2.734.295.630	Kecamatan Tanjungpandan
						100%	100%	400.000.000	100%	435.000.000	100%	470.000.000	100%	1.305.000.000	Kecamatan Badau
						100%	100%	741.850.000	100%	741.850.000	100%	741.850.000	100%	2.225.550.000	Kecamatan Sijuk
						100%	100%	400.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	100%	1.220.000.000	Kecamatan Membalong
						100%	100%	262.691.000	100%	275.825.550	100%	289.616.828	100%	828.133.378	Kecamatan Selat Nasik
1	07	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi							Kecamatan			
						90,00%	90,00%	106.000.000	92,00%	107.000.000	95,00%	108.000.000	95,00%	321.000.000	Kecamatan Tanjungpandan
						100,00%	100,00%	80.000.000	100,00%	120.000.000	100,00%	160.000.000	100,00%	360.000.000	Kecamatan Badau
						87,50%	100,00%	93.050.000	100,00%	117.150.000	100,00%	117.150.000	19 Dok	327.350.000	Kecamatan Sijuk
						87,50%	100,00%	50.000.000	100,00%	52.000.000	100,00%	52.000.000	100,00%	154.000.000	Kecamatan Membalong
						87,50%	100,00%	27.500.000	100,00%	28.875.000	100,00%	30.318.750	100,00%	86.693.750	Kecamatan Selat Nasik
1	07			Unsur Pemerintahan Umum											
1	07	01		Kesatuan Bangsa dan Politik				36.100.131.624,00		15.404.985.409,16		15.480.651.513,25		66.985.768.546	
1	07	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7.936.213.724,00		8.256.810.409,16		8.273.838.513,25		24.466.862.646	Kesbangpol
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	6.547.284.924	100,00%	7.136.136.593,16	100,00%	7.207.497.959,09	100,00%	20.890.919.476	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75,00%	82,62%	169.500.000	82,62%	204.000.000,00	82,62%	167.500.000	82,62%	541.000.000	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	574.928.800	100,00%	656.173.816,00	100,00%	662.735.554,16	100,00%	1.893.838.170	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	644.500.000	100,00%	260.500.000,00	100,00%	236.105.000	100,00%	1.141.105.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD									Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	07	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	100%	2.020.000.000	100%	2.161.400.000	100%	2.183.014.000	100%	6.364.414.000	Kesbangpol
1	07	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	23.088.917.900	100%	1.717.725.000	100%	1.720.935.000	100%	26.527.577.900	Kesbangpol
1	07	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat yang terbina	100%	100%	105.000.000	100%	112.350.000	100%	114.597.000	100%	331.947.000	Kesbangpol
1	07	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	1.420.000.000	100%	1.519.400.000	100%	1.534.594.000	100%	4.473.994.000	Kesbangpol
1	07	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100%	100%	1.530.000.000	100%	1.637.300.000	100%	1.653.673.000	100%	4.820.973.000	Kesbangpol
TOTAL								1.542.681.552.307,20		1.596.202.943.185,02		1.582.647.551.616,97		4.721.532.047.109	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, serta manfaat dan/atau dampak. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut pada akhir periode perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcomes* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan memenuhi kriteria *specific* (kekhususan), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (rasional), *time bond* (batas waktu pencapaian) dan *continuously improve* (bersifat terus menerus meningkatkan kualitas kinerja). Selain untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, indikator kinerja juga merupakan instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penetapan indikator dan target kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah setiap. Pada tabel 8.1 dan 8.2 diuraikan Indikator Makro Pembangunan Daerah yang memuat 13 (tiga belas) indikator kinerja tujuan dan sasaran yaitu: indeks gini, pertumbuhan ekonomi, presentase penduduk miskin, persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan, Indeks Pembangunan Manusia, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, indeks reformasi birokrasi, opini BPK, nilai SAKIP Kabupaten Belitung, indeks profesionalitas ASN dan indeks kualitas lingkungan hidup.



8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama dirumuskan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, yang diturunkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Belitung.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

8.2.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target

Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode perencanaan, yang dijabarkan melalui target-target pencapaian setiap tahunnya. Indikator Kinerja Tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 terdiri dari 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan indikator: Indeks Gini.
2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia, dengan indikator: Indeks Pembangunan Manusia.
3. Tujuan 3: Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi.
4. Tujuan 4: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan 4 (empat) tujuan yang dijabarkan tersebut, terdapat 4 (empat) indikator kinerja tujuan, yang ditetapkan target-target capaiannya, sehingga bisa diukur secara valid. Keterkaitan dan konstitusi antara tujuan, indikator kinerja tujuan dan target selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada tabel 8.1.



Tabel 8.1 Target Indikator Kinerja Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal RPD	Target			Kondisi Akhir RPD
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio Gini	0,237	0,248-0,253	0,247-0,252	0,246-0,251	0,246-0,251
2	Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,38	74,26	74,77	74,95	74,95
3	Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	BB	BB
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,25	69,25	69,26	69,27	69,27



8.2.2 Indikator Kinerja Sasaran dan Target

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Oleh karena itu sasaran menjadi sangat penting untuk bisa diukur, dengan indikator yang tepat dan target-target yang tepat pula.

Keempat tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, telah dirumuskan dan ditetapkan lebih lanjut dalam 8 (delapan) sasaran yang telah dirumuskan dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dengan indikator kinerja: Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Sasaran 2: Menurunnya Kemiskinan Penduduk, dengan indikator kinerja: Tingkat kemiskinan
3. Sasaran 3: Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan, dengan indikator kinerja: Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan.
4. Sasaran 4: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja: Angka Harapan Hidup.
5. Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, dengan indikator kinerja: Rata-rata Lama Sekolah.
6. Sasaran 6: Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja: a) Opini BPK; dan b) Nilai SAKIP.
7. Sasaran 7: Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional, dengan indikator kinerja: Indeks Profesionalitas ASN.
8. Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan, dengan indikator kinerja: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk 8 (delapan) sasaran tersebut dengan 8 (delapan) indikator kerjanya, telah ditetapkan target-target selama 3 (tiga) tahun perencanaan, sebagaimana yang tertera dalam tabel 8.2 berikut ini:



Tabel 8.2 Target Indikator Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal RPD	Target			Kondisi Akhir RPD
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,71	4,5	4,6	4,9	4,9
2	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Tingkat Kemiskinan	6,45	6,4	6,3	6,2	6,2
3	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan	58,85	62,84	65,85	69,01	69,01
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,31	71,38	71,42	72,00	72,00
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,74	8,78	8,80	8,82	8,82
6	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	BB
7	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesional ASN	75,44	71-80 (sedang)	71-80 (sedang)	71-80 (sedang)	71-80 (sedang)
8	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,25	69,25	69,26	69,27	69,27



Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
	1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
		1. PDRB kabupaten :					
		a. Atas dasar harga berlaku (milyar rupiah).	11.003,95	11.407,8	12.082,4	12.757,1	12.757,1
		b. Atas dasar harga konstan (milyar rupiah).	6.710,01	6.972,4	7.229,7	7.487,1	7.487,1
		2. Laju inflasi (%).	4,17	4-4,5	4-4,5	4-4,45	4-4,5
		3. Rasio Gini	0,237	0,248-0,253	0,247-0,252	0,246-0,251	0,246-0,251
		4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,71%	4,5%	4,6%	4,9%	4,9%
		5. Tingkat Kemiskinan	6,45	6,4	6,3	6,2	6,2
		6. Indeks Pembangunan Manusia	73,38	74,26	74,77	74,95	74,95
2.	Aspek Daya Saing Daerah						
		1. Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu)	14.049	14.240	14.427	14.614	14.614
		2. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	58,85	62,84	65,85	69,01	69,01
3.	Aspek Pelayanan Umum						
	2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
		1. Pendidikan					
		1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,74	8,78	8,8	8,82	8,82



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		2.	Rata-rata Capaian SPM Pendidikan	89,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		4.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	80,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		5.	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	100%	100%	100%	100%	100%
		6.	Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	54,61%	59,41%	69,41%	79,41%	79,41%
		2.	Kesehatan					
		1.	Angka Harapan Hidup	71,31	71,38	71,42	72,00	72,00
		2.	Angka Kesakitan (Morbiditas)	34,21%	48,00%	47,00%	46,00%	46,00%
		3.	Puskesmas terakreditasi Madya	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		4.	Terwujudnya rumah sakit kelas B berstandar internasional	10,00%	40,00%	60,00%	80,00%	80,00%
		5.	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		6.	Tersedianya sediaan farmasi alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		7.	Persentase Rumah Tangga yang berPHBS	56,40%	66,00%	77,00%	88,00%	88,00%
		8.	Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
		3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
		1.	Pemenuhan infrastruktur kePuan dan permukiman	n/a	45,35%	46,56%	47,96%	47,96%
		2.	Persentase pemenuhan infrastruktur ke-Pu0an	n/a	26,17%	27,57%	29,36%	29,36%
		3.	Persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik	43,03%	49,91%	52,82%	57,03%	57,03%
		4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	16,52%	18,30%	19,75%	25,51%	25,51%
		5.	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	n/a	8,20%	8,69%	9,16%	9,16%
		6.	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	20,02%	22,00%	29,59%	39,57%	39,57%
		7.	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	n/a	4,79%	5,22%	5,64%	5,64%
		8.	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan	15,00%	33,33%	46,67%	60,00%	60,00%
		9.	Persentase jalan standar kabupaten	26,75%	28,25%	29,00%	29,76%	29,76%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		10.	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
		11.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	98,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
		1.	Rata-rata Pemenuhan PSU Permukiman	n/a	64,52%	65,54%	66,56%	66,56%
		2.	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	n/a	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3.	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	0,34%	0,20%	0,18%	0,16%	0,16%
		4.	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,66%	99,80%	99,82%	99,84%	99,84%
		5.	persentase PSU yang dikelola	44,90%	66,02%	69,84%	73,66%	73,66%
		5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
		1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	80	148,48	147,50	146,20	146,20
		2.	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,28	0,49	0,50	0,51	0,51
		3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		5.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
		6.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
		7.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		8.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	30%	35%	40%	45%	45%
		9.	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.	100%	100%	100%	100%	100%
	6.	Sosial						
		1.	Persentase penurunan PMKS	0,96	0,5	0,5	0,5	0,5
		2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	98,79%	98,79%	98,81%	98,83%	98,83%
		3.	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	42,14%	100%	100%	100%	100%
		5.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	n/a	100%	100%	100%	100%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		6.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.	100%	100%	100%	100%	100%
		7.	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	97,25%	100%	100%	100%	100%
		8.	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		9.	Taman Makam Pahlawan yang tertata	100%	100%	100%	100%	100%
	Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
	7.	Tenaga Kerja						
		1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3%	3,47%	3,46%	3,45%	3,45%
		2.	Persentase penyerapan tenaga kerja daerah	2,7%	10%	20%	40%	40%
		3.	Persentase Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dan Anjuran	83%	25%	30%	35%	35%
		4.	Persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi	n/a	17%	21%	25%	25%
		5.	Persentase penyerapan tenaga kerja	n/a	20%	25%	30%	30%
		6.	Harmonisasi hubungan industrial	20%	100%	100%	100%	100%
	8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,42	53,43	53,44	53,45	53,45
		2.	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	n/a	Pratama	Pratama	Madya	Madya
		3.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	35,75%	36,00%	36,25%	36,50%	36,50%
		4.	Persentase layanan perlindungan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		5.	Persentase keluarga yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%
		6.	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	55,8%	60%	70%	75%	75%
		7.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2,64	3,20	3,18	3,16	3,16
		8.	Status KLA (Kabupaten Layak Anak) Madya	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
		9.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
	9	Pangan						
		1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,90	79,50	80,00	80,50	80,50
		2.	Persentase (%) konsumsi energi (%AKE)	97,50	99,57	99,62	99,67	99,67
		3.	Persentase (%) konsumsi protein (%AKP)	112,81%	112,81%	112,98%	113,16%	113,16%
		4.	Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	97,50%	95,70%	95,70%	95,70%	95,70%
		5.	Persentase penurunan status desa/kelurahan rawan pangan	14,29%	2,00%	2,00%	2,00%	6,00%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
	6.	Tingkat keamanan pangan	90,91%	89,29%	89,29%	89,29%	89,29%
	10.	Pertanahan					
	1.	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	n/a	100%	100%	100%	100%
	11.	Lingkungan Hidup					
	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,25	69,25	69,26	69,27	69,27
	2.	Persentase cakupan pelayanan persampahan	16,81%	17,15%	17,30%	17,45%	17,45%
	3.	Tingkat efektivitas pengelolaan Tahura	12%	20%	28%	35%	35%
	4.	Keseuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.	Persentase pengurangan dampak pencemaran/kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Belitung	20%	25%	27%	30%	30%
	6.	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	47,79%	40,48%	100%	100%	100%
	7.	Persentase pengelolaan limbah B3	62%	55%	55%	55%	55%
	8.	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	28%	39%	43%	46%	46%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		9.	Persentase pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Belitung	30%	60%	60%	60%	60%
		10.	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	35 kelompok	58 kelompok	78 kelompok	98 kelompok	98 kelompok
		11.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		12.	Persentase jumlah sampah yang dikelola	73,27%	60%	65%	70%	70%
		13.	Jumlah isu pengelolaan terkait Tahura yang ditangani	n/a	5 Isu	8 Isu	10 Isu	10 Isu
		12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
		1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,30	3,32	3,34	3,34
		2.	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan	n/a	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%
		3.	Persentase capaian pendaftaran penduduk	86,34%	76,00%	78,00%	80,00%	80,00%
		4.	Persentase capaian penerbitan dokumen	93%	95%	95%	95%	95%
		5.	Persentase capaian pencatatan sipil	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
		6.	Persentase penyajian data kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%
		7.	Persentase pemanfaatan data	100%	100%	100%	100%	100%
		13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1.	Jumlah desa dengan status Desa Mandiri	9 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa	13 Desa
		2.	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa	26%	30%	35%	40%	40%
		4.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	85,00%	85,00%	87,00%	90,00%	90,00%
		14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
		1.	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	n/a	60,32%	60,50%	60,68%	60,68%
		2.	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,42%	2,41%	2,40%	2,39%	2,39%
		3.	<i>Unmet need</i>	11,98%	11,95%	11,92%	11,89%	11,89%
		4.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,38%	14,50%	14,60%	14,65%	14,65%
		5.	Persentase PUS Ber KB	75,01%	75,05%	75,10%	75,10%	75,10%
		15.	Perhubungan					
		1.	Rasio Konektivitas	49,92	50,00	50,00	57,00	57,00
		2.	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	22,91	25,00	25,00	27,00	27,00
		3.	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00
		4.	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	100%	100%	100%	100%	100%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5. Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan	100%	100%	100%	100%	100%
	16.	Komunikasi dan Informatika					
		1. Indeks Domain Layanan SPBE (Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan)	n/a	3,3	3,4	3,5	3,5
		2. Persentase pelayanan komunikasi dan informatika yang optimal	96,34	95%	95,5%	96%	96%
		3. Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	100%	97,00%	98,00%	99,00%	99,00%
	17.	Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah					
		1. Persentase pertumbuhan usaha kecil	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
		2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	-	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%
		3. Jumlah volume usaha koperasi	-	96.138.859	97.138.859	98.138.859	98.138.859
		4. Persentase koperasi aktif	-	71,5	71,79	72,08	72,08
		5. Persentase koperasi yang melaksanakan administrasi secara tertib	n/a	22	43	65	65
		6. Persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat waktu	44	50	57	64	64
		7. Persentase pertumbuhan usaha mikro	-	4,6	6,7	8,8	8,8



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		8.	Persentase pengembangan usaha mikro	-	1,87	1,92	1,99	1,99
		18.	Penanaman Modal					
		1.	Realisasi investasi tahun berkenaan (juta rupiah)	1.014.243,10	1.050.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
		2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3,70	3,72	3,74	3,76	3,76
		3.	Jumlah investor yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal	50 investor	50 investor	60 investor	65 investor	183 investor
		4.	Persentase promosi penanaman modal	60	100	100	100	100
		5.	Realisasi penyelesaian perizinan dan non perizinan	n/a	80	81	82	82
		6.	Kepatuhan investor/pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal	100	100	100	100	100
		19.	Kepemudaan dan Olahraga					
		1.	Kabupaten Layak Pemuda	n/a	Status Pratama	Status Pratama	Status Madya	Status Madya
		2.	Jumlah prestasi olahraga di Tingkat Provinsi, Regional, Nasional, dan Internasional	39 Prestasi	42 Prestasi	45 Prestasi	50 Prestasi	50 Prestasi
		3.	Persentase meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	n/a	77.88 %	78%	79%	79%
		4.	Persentase peningkatan prestasi olahraga	n/a	75%	80%	85%	85%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	77 %	77,88%	78%	79%	79%
		6.	Persentase peningkatan prestasi olahraga	n/a	75	80	85	85
		7.	Organisasi yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi
		20.	Statistik					
		1.	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	n/a	65%	70%	75%	75%
		2.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%
		21.	Persandian					
		1.	Tingkat kematangan keamanan informasi	n/a	60%	65%	70%	70%
		2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	n/a	60%	65%	70%	70%
		22.	Kebudayaan					
		1.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	30,08%	35,22%	40,36%	45,50%	45,50%
		2.	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	n/a	25%	54%	100%	100%
		3.	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	n/a	50%	60%	75%	75%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4.	Jumlah Sejarah Lokal yang didokumentasikan	1 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek	6 Objek
		5.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	n/a	30%-	60%	80%	80%
		6.	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	n/a	50%	60%	70%	70%
	23.	Perpustakaan						
		1.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	7	9	10	11	11
		2.	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	25	30	40	50	50
		3.	Meningkatnya Jumlah Pemustaka	11.000 pemustaka	12.500 pemustaka	13.500 pemustaka	14.500 pemustaka	14.500 pemustaka
	24	Kearsipan						
		1.	Nilai Audit Kearsipan	C-	CC	CC	B	B
		2.	Jumlah OPD yang telah melakukan Pengelolaan Arsip sesuai dengan Kaidah Kearsipan	2 OPD	2 OPD	3 OPD	4 OPD	9 OPD
		3.	Persentase Objek Pembinaan Arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	100	100	100	100	100
		Layanan Urusan Pilihan						
	1.	Kelautan dan Perikanan						
		1.	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung	22,07	22,10	22,15	22,20	22,20



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113,35	114	115	116	116
		3.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104,8	105	106	107	107
		4.	Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	43.021,5	43.100	43.200	43.300	129.600
		5.	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%)	7,01	7,02	7,04	7,06	7,06
		6.	Produksi Perikanan budidaya (Ton)	154,59	170	175	180	525
		7.	Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	8.968	9.000	9.050	9.100	27.150
	2	Pariwisata						
		1.	Persentase Pendapatan sektor pariwisata	11,88	12,55	12,85	13,18	13,18
		2.	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	301.906	305.000	308.000	310.000	1.224.906
		3.	Persentase peningkatan kualitas daya tarik wisata	80	77,65	80	82,35	82,35
		4.	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100	100	100	100	100
		5.	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	63,5	84,80	90	95	95
	3	Pertanian						
		1.	Persentase (%) peningkatan produksi sektor pertanian:					
			- Tanaman pangan	29,00	30,01	69,02	82,03	82,03
			- Tanaman hortikultura	9,67	9,75	19,42	38,77	38,77



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Perkebunan rakyat	9,73	12,64	22,37	32,98	32,98
		- Peternakan	2,71	4,58	7,29	9,29	9,29
		2. Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	3,13	3,30	3,40	3,50	3,50
		3. Persentase kebutuhan sarana pertanian	12,44	14,00	14,70	15,00	15,00
		4. Persentase prasarana yang digunakan	23,05	23,64	24,62	25,60	25,60
		5. Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	68,30	77,00	80,00	84,00	84,00
		6. Persentase (%) penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100	100	100	100	100
		7. Persentase (%) penanggulangan bencana pertanian	100	100	100	100	100
		8. Persentase (%) usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100
		9. Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) (kelembagaan petani)	30	35	40	45	45
	4	Perdagangan					
		1. Kontribusi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	-	10,99	11,11	11,50	11,50



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		2.	Survey Kepuasan Masyarakat	3,56	3,48	3,50	3,53	3,53
		3.	Pasar Representatif (%)	2	2	2	2	6
		4.	Persentase laporan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	100	100	100	100	100
		5.	Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di tera/tera ulang sesuai standar (%)	90,81	80	82	84	84
		6.	Persentase pelaku usaha taat aturan	100	100	100	100	100
	5	Perindustrian						
		1.	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	13,27	13,30	13,32	13,35	13,35
		2.	Jumlah Produk IKM yang tersertifikasi	n/a	35 produk	40 produk	45 produk	45 produk
		3.	Pertumbuhan jumlah IKM	40 IKM	40 IKM	45 IKM	50 IKM	135 IKM
		Pendukung Urusan Pemerintahan						
	1	Sekretariat Daerah						
		1.	Persentase capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesra	57,14%	80%	90%	100%	100%
		2.	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang Administrasi Umum	50%	66,66%	800%	100%	100%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026				
		3.		Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026	100%	100%	100%	100%
		4.		Persentase capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 bidang Perekonomian dan Pembangunan	75%	100%	100%	100%
		5.		Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026	100%	100%	100%	100%
	2	Sekretariat DPRD						
		1.		Presentase (%) pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%
	Penunjang Urusan Pemerintahan							
	1.	Perencanaan						



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1. Nilai komponen Perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung	22,46	22,75	23,04	23,33	23,33
			2. Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	94,23	95,5	95	96	96
			3. Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan daerah	91,02%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan program perencanaan pembangunan daerah	98%	100%	100%	100%	100%
	2.	Keuangan						



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
			3.	Optimalisasi penerimaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100%	100%	100%	100%
			4.	Peningkatan pendapatan asli daerah	5,00%	5,18%	21,74%	3,69%
		3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
			1.	Indeks Profesionalitas ASN	58,07	70	71	72
			2.	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	97,87	75	78	80
			3.	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP per Tahun	43,87	85	87	89
			4.	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100	100	100	100
			5.	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	46	65	75	80
		4.	Penelitian dan Pengembangan					



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.	Persentase hasil kajian dan atau kerjasama penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	n/a	25	30	35	35
		2.	Persentase hasil kajian dan atau kerjasama penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	n/a	25	30	35	35
		3.	Jumlah hasil kajian dan/atau kerjasama penelitian yang dilaksanakan	n/a	2	2	2	6
	Pengawas Urusan Pemerintahan							
			Inspektorat					
		1.	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	39,67%	70%	80%	90%	90%
		2.	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84,36	84	85	86	86
	Unsur Kewilayahan							
			Kecamatan					
		1.	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4.	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	87,5% (badau 100%)	100%	100%	100%	100%
	Unsur Pemerintahan Umum							
	Kesatuan Bangsa dan Politik							
		1.	Persentase penanganan konflik	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terbina	100%	100%	100%	100%	100%
		5.	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		6.	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung dan RTRW Kabupaten Belitung, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung harus menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah/kota. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah/kota sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing.
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan



evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung setelah adanya Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

RPD KABUPATEN BELITUNG
2024 - 2026